



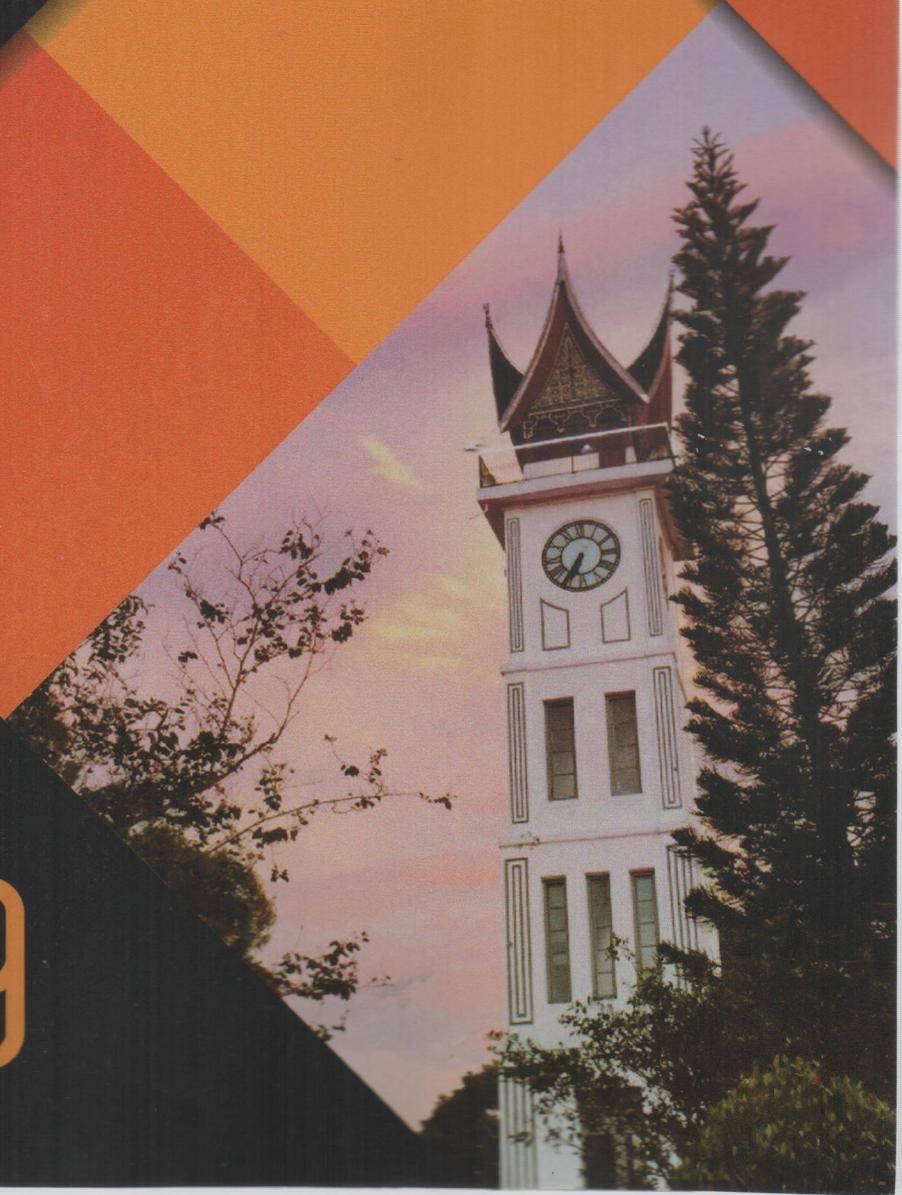
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI

**RKPD**

TAHUN  
**2019**





WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR      TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang      :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
- Mengingat      :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
19. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berpedoman kepada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, yang mengacu kepada RKP Tahun 2019, serta memperhatikan visi, misi dan program Walikota Terpilih.

### Pasal 3

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019;
- b. Rancangan PPAS Tahun 2019; dan
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja, pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019  
Pasal 5

(1) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

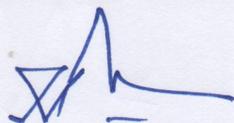
Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR...!9...

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019**

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

**DAFTAR ISI**

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-29
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-113
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-115
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-134
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 ....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-4
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan .....	IV-4
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019.....	IV-4
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 .....	IV-4
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama .....	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah .....	VI-7
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.....	I-3
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi.....	II-2
Tabel 2.2. Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya.....	II-5
Tabel 2.3. Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi .....	II-8
Tabel 2.4. Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas).....	II-11
Tabel 2.5. Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor.....	II-13
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 s/d 2017 .....	II-16
Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi.....	II-17
Tabel 2.8. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d. 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta).....	II-18
Tabel 2.9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d. 2016 atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta).....	II-20
Tabel 2.10. Perkembangan Kontribusi Sektor PDRBTahun 2012 s.d. 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi .....	II-22
Tabel 2.11. Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II-23
Tabel 2.12. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi .....	II-24
Tabel 2.13. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013 s.d 2017.....	II-25
Tabel 2.14. Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017 .....	II-26
Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 s.d 2017 .....	II-27
Tabel 2.16. Perkembangan Angka Melek huruf Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-28
Tabel 2.17. Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi.....	II-29
Tabel 2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-30
Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-31
Tabel 2.20. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-32
Tabel 2.21. Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-33
Tabel 2.22. Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-34
Tabel 2.23. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II-35
Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-36

Tabel 2.25.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-37
Tabel 2.26.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-38
Tabel 2.27.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-40
Tabel 2.28.	Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi.....	II-41
Tabel 2.29.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi.....	II-42
Tabel 2.30.	Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-43
Tabel 2.31.	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017 Kota Bukittinggi .....	II-43
Tabel 2.32.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan tahun 2017 Kota Bukittinggi .....	II-44
Tabel 2.33.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Bukittinggi .....	II-45
Tabel 2.34.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi .....	II-46
Tabel 2.35.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-47
Tabel 2.36.	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi .....	II-48
Tabel 2.37.	Jumlah Dokter Tahun 2017 Kota Bukittinggi.....	II-49
Tabel 2.38.	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi ...	II-50
Tabel 2.39.	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-50
Tabel 2.40.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-51
Tabel 2.41.	Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d 2017 .....	II-52
Tabel 2.42.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tahun 2017	II-53
Tabel 2.43.	Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d 2017.....	II-54
Tabel 2.44.	Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2013s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-55
Tabel 2.45.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi.....	II-55
Tabel 2.46.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara terhadap Luas Daratan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-57
Tabel 2.47.	Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d 2017 .....	II-57
Tabel 2.48.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.....	II-58
Tabel 2.49.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.....	II-59
Tabel 2.50.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017.....	II-60
Tabel 2.51.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017.....	II-61
Tabel 2.52.	Persentase Penegakan Perda Tahun 2013-2017 .....	II-63
Tabel 2.53.	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-64
Tabel 2.54.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-65
Tabel 2.55.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi .....	II-67

Tabel 2.56.	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dan 2017 Kota Bukittinggi .....	II-68
Tabel 2.57.	Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017	II-70
Tabel 2.58.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-72
Tabel 2.59.	Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-73
Tabel 2.60.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-74
Tabel 2.61.	Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk Yang Wajib Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi.....	II-77
Tabel 2.62.	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-78
Tabel 2.63.	Jumlah LSM Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .	II-79
Tabel 2.64.	Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016 s.d 2017 .....	II-80
Tabel 2.65.	Rasio Akseptor KB Mneurut Kecamatan Tahun 2016 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-81
Tabel 2.66.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-82
Tabel 2.67.	Rasio Izin Trayek Tahun 2013s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-83
Tabel 2.68.	Jumlah Uji KirAngkutan Umum Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-84
Tabel 2.69.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-84
Tabel 2.70.	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi.....	II-85
Tabel 2.71.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-85
Tabel 2.72.	Cakupan Pengembangan KIM Tahun2017 .....	II-87
Tabel 2.73.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi ....	II-88
Tabel 2.74.	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi	II-88
Tabel 2.75.	Jumlah BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II-89
Tabel 2.76.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	II-90
Tabel 2.77.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Sampai Tahun 2017 Kota Bukittinggi	II-90
Tabel 2.78.	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi	II-91
Tabel 2.79.	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi ...	II-92
Tabel 2.80.	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d 2017 .....	II-93
Tabel 2.81.	Pemanfaatan Persandian Tahun 2017 Kota Bukittinggi .....	II-94
Tabel 2.82.	Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	II-95
Tabel 2.83.	Kelompok Seni Tradisi yang Ada diKota Bukittinggi .....	II-96
Tabel 2.84.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi .....	II-98
Tabel 2.85.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh	II-99

	Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	
Tabel 2.86.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	II-100
Tabel 2.87.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-101
Tabel 2.88.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-102
Tabel 2.89.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 dan 2017 Kota Bukittinggi.....	II-103
Tabel 2.90.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-104
Tabel 2.91.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-104
Tabel 2.92.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-105
Tabel 2.93.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi.....	II-105
Tabel 2.94.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-106
Tabel 2.95.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2013s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-106
Tabel 2.96.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-107
Tabel 2.97.	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi ...	II-107
Tabel 2.98.	Produktivitas Padi Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-108
Tabel 2.99.	Produktivitas Jagung Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi.....	II-109
Tabel 2.100.	Produktivitas Ketela Rambut Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi	II-110
Tabel 2.101.	Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2013s.d. 2017 Kota Bukittinggi ...	II-110
Tabel 2.102.	Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II-111
Tabel 2.103.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2012 s.d. 2016.....	II-111
Tabel 2.104.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II-112
Tabel 2.105.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II-113
Tabel 2.106.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II-113
Tabel 2.107.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017	II-114
Tabel 2.108.	Indikator Penunjang Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017	II-115
Tabel 2.109.	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi .....	II-116
Tabel 2.110.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2016 dan 2017 Kota Bukittinggi .....	II-117
Tabel 2.111.	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi	II-117
Tabel 2.112.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	II-118

Tabel 2.113.	Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017 .....	II-119
Tabel 2.114.	Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2017 .....	II-119
Tabel 2.115.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 .....	II-120
Tabel 2.116.	Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .....	II-121
Tabel 2.117.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	II-122
Tabel 2.118.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kota Bukittinggi .....	II-123
Tabel 3.1.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi .....	III-11
Tabel 3.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 .....	III-18
Tabel 3.3.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 .....	III-20
Tabel 3.4.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d. 2018 dan Proyeksi/Target Tahun 2019 dan 2020.....	III-22
Tabel 3.5.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi.....	III-23
Tabel 4.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-2
Tabel 4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 .....	IV-5
Tabel 4.3.	Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah .....	IV-6
Tabel 4.4.	Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	IV-14
Tabel 4.5.	Prioritas Pembangunan Tahun 2019 .....	IV-17
Tabel 5.1.	Jumlah Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-1
Tabel 5.2.	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-3
Tabel 5.3.	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-14
Tabel 5.4.	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-24
Tabel 5.5.	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-32
Tabel 5.6.	Program dan Kegiatan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-34
Tabel 5.7.	Program dan Kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-37
Tabel 5.8.	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-39
Tabel 5.9.	Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019 ...	V-41
Tabel 5.10.	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-44
Tabel 5.11.	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi .....	V-47

	Tahun 2019 .....	
Tabel 5.12.	Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-52
Tabel 5.13.	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-54
Tabel 5.14.	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-57
Tabel 5.15.	Program Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-59
Tabel 5.16.	Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-64
Tabel 5.17.	Program Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-67
Tabel 5.18.	Program Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-70
Tabel 5.19.	Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-74
Tabel 5.20.	Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-78
Tabel 5.21.	Program Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-82
Tabel 5.22.	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-85
Tabel 5.23.	Program dan Kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-90
Tabel 5.24.	Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-94
Tabel 5.25.	Program Kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-97
Tabel 5.26.	Program Kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-103
Tabel 5.27.	Program Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-113
Tabel 5.28.	Program Kegiatan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	V-118
Tabel 5.29.	Program Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019 .....	V-125
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi.....	VI-2
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 .....	VI-4
Tabel 6.3.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	VI-6
Tabel 6.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.....	VI-8

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan .....	I - 5
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	II- 3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bukittinggi.....	II- 5
Gambar 2.3 Peta Goncangan Tanah Kota Bukittinggi.....	II-15
Gambar 2.4 PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016 .....	II-19
Gambar 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta) Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-19
Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-24
Gambar 2.7 Cakupan Petugas Linmas 2013-2017 .....	II-63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berpedoman juga kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2019 selanjutnya disebut dengan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan implementasi tahun

ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Pada tahun 2019 terdapat 9 (Sembilan) prioritas pembangunan yaitu: (1) Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya, (2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, (3) Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, (4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, (5) Pengembangan pariwisata, (6) Pengembangan ekonomi kerakyatan (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah), (7) Penanggulangan kemiskinan, (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, dan (9) Pelestarian lingkungan hidup.

Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 tahapan yang diikuti, sebagai berikut: Penyusunan SK Tim Kerja, Penyusunan Kalender Perencanaan, Penyusunan Rancangan Awal, Sosialisasi dan pelatihan dengan SKPD dan DPRD tentang penggunaan e-planning, Rapat persiapan Pra Musrenbang dan Musrenbang, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Penyampaian Surat Edaran Walikota untuk penyusunan Rancangan Renja SKPD, Verifikasi Renja SKPD, Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja, Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD dan Penetapan Renja SKPD Kota Bukittinggi.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
  12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
  13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017;
  14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

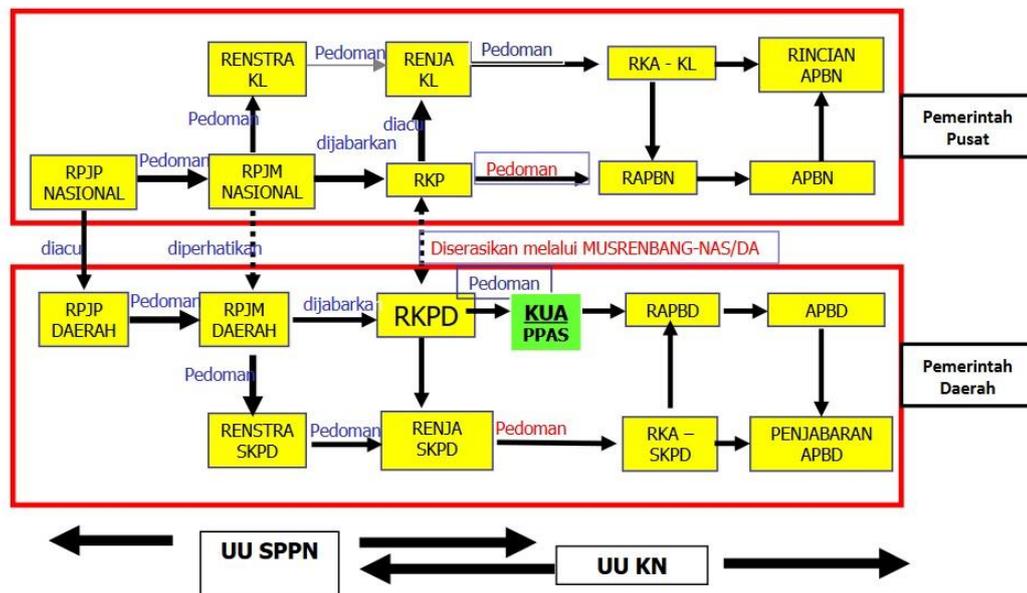
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. RKPD Kota Bukittinggi disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2019, RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 serta memperhatikan masterplan tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat

Kelurahan, Kecamatan dan kota. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan**



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2019 disusun agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah:

1. Untuk mewujudkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2019;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2019;
4. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

#### **BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,

dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

### **BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2019. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.

## **BAB VII Penutup**

Berisi penegasan bahwa RKPD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019.

### **Jadwal Penyusunan RKPD Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Agenda Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Jadwal</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Ket</b>
1	Penyiapan Dokumen Administrasi	PPTK/ Bidang Ekonomi	Minggu I dan II Januari 2018		
2	Rapat persiapan penyusunan rancangan awal RKPD	Bidang Ekonomi	Minggu III Januari 2018	16 Januari 2018	
3	Penyusunan rancangan awal RKPD	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu III Januari –Minggu V Januari 2018	16-26 Januari 2018	
4	Konsultasi Publik rancangan awal RKPD	Bidang Ekonomi	Minggu I Februari 2018	1 Februari 2018	
5	Penyempurnaan rancangan awal RKPD	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu I dan II Februari 2018	2-7 Februari 2018	
5	Penyampaian rancangan awal RKPD kepada Wako melalui Sekda	Bidang Ekonomi	Minggu III Februari 2018	8 Februari 2018	
6	Penyampaian Surat Edaran tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	Bidang Ekonomi	Minggu III Februari 2018	8 Februari 2018	
7	Penyempurnaan rancangan Renja SKPD	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu Maret 2018	Maret 2018	
8	Verifikasi Renja SKPD oleh Bapelitbang	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu Maret 2018	Maret 2018	
9	Penyelesaian Penyusunan rancangan RKPD	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu I April 2018	3 April 2018	
10	Pengajuan rancangan RKPD kepada Walikota melalui Sekda	Bidang Ekonomi	Minggu I April 2018	5 April 2018	
11	Perumusan rancangan	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu II April 2018	12 April 2018	

	akhir RKPD				
12	Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekda	Bidang Ekonomi		16 April 2018	
13	Rapat pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh kepala SKPD	Tim RKPD Tahun 2019	Minggu V April 2018	23 April 2018	
14	Penyusunan rancangan Perwako RKPD	Bidang Ekonomi	Minggu I Mei 2018	3 Mei 2018	
15	Fasilitasi ke Bappeda Provinsi		Minggu I April 2018 Dan Minggu II Maret 2018	6 Juni 2018	

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi. Penetapan Kota Bukittinggi sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat diawali dengan pencanangannya sebagai kota wisata pada tanggal 11 Maret 1984, hingga saat ini berkembang menjadi Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi.

##### **2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

##### **A. Karakteristik lokasi dan wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

##### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km<sup>2</sup>, yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk

Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km<sup>2</sup> (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km<sup>2</sup> (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km<sup>2</sup> (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

**Tabel 2.1.**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi**

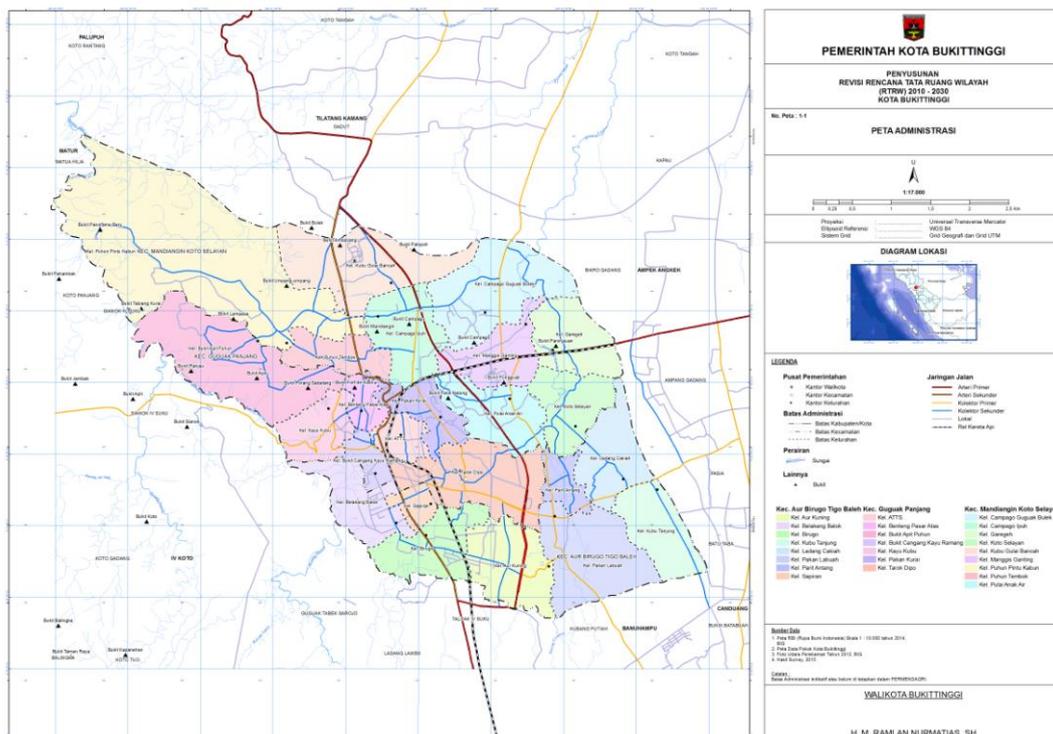
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
<b>I</b>	<b>GUGUK PANJANG</b>	<b>683,10</b>	<b>27,07</b>
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
<b>II</b>	<b>MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>	<b>1.215,60</b>	<b>48,16</b>
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
<b>III</b>	<b>AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>	<b>625,20</b>	<b>24,77</b>
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
<b>JUMLAH</b>		<b>2.523,90</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2016

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Marapi sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Bukittinggi**



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan

- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

## **2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

### **a. Posisi Astronomis**

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara  $100^{\circ}20'$  -  $100^{\circ}25'$  BT dan antara  $00^{\circ}16'$  -  $00^{\circ}20'$  LS.

### **b. Posisi Geostrategis**

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

### **c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi**

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah Pedalaman, Terpencil, Pesisir, Pegunungan dan Kepulauan.

## **3. Topografi**

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756-960 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan kemiringan yang sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,79%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,83%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi**  
**Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya**

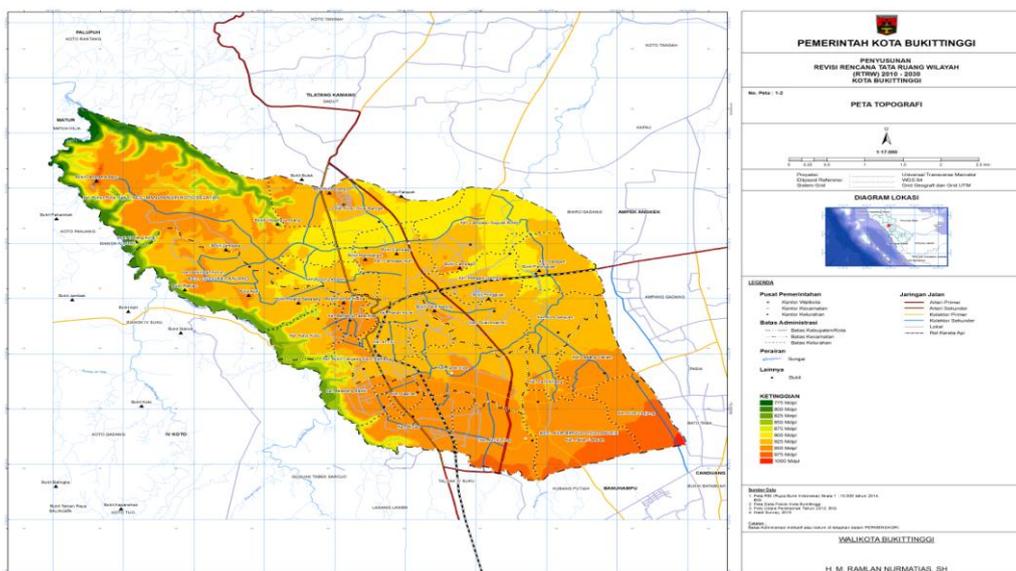
No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
<b>JUMLAH</b>		<b>625,20</b>	<b>100</b>	<b>683,10</b>	<b>100</b>	<b>1.215,60</b>	<b>100</b>	<b>2.523,90</b>	<b>100</b>

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bukittinggi, Tahun 2017

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Peta Topografi Kota Bukittinggi**



Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

- a. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

#### 4. Geologi

Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (exposed), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian (volkanisme). Pada peta geologi resmi yang dipublikasikan Kementrian ESDM, Tufa Batuapung itu disimbolkan sebagai “Qpt”. Secara aktual, terdapat batuan Qpt segar, dan Qpt lapuk menjadi tanah residual (hasil pelapukan). Tampilan fisik dari Qpt segar adalah: “kuning kelabu jika basah dan kuning keputihan jika kering”. Terdapat partikel hitam ukuran 1 mm, serabut kaca putih mengkilat, kwarsa putih susu, partikel kuning karat 1 mm, dan gumpalan-gumpalan amorf silika. Partikel-partikel itu satu sama lain terikat lemah. Secara menyeluruh sebagai massa material, Qpt bersifat kohesif namun lunak (soft), porous dan kenyal (Stiff). Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji

coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (impact test) menunjukkan “tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu”. Hasil “impact test” itu menunjukkan skala kekuatan Qpt segar adalah “cukup kuat”. Dengan metode peremasan tangan, material Qpt memungkinkan peremasan secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas “kokoh” dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan  $\sigma = 18 \text{ kN/m}^3$ , dan perkiraan porositas  $n = 0,5$

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu 1) tanah endapan, dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (aluvium) dan oleh longsoran tebing (koluvium). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (vegetasi) merupakan humus. Ketebalan tanah dan humus bervariasi mencapai beberapa meter.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai “Patahan Semangko” yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah Pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera.

#### **D. Hidrologi**

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola

aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- Batang Sianok dengan lebar 12 meter.
- Batang Tambuo dengan lebar 7 meter.
- Batang Agam dengan lebar 6 meter.

Kota Bukittinggi dilewati oleh Batang Tambuo dan Batang Sianok. Batang Tambuo memiliki lebar lembah 7 meter dan melalui Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sedangkan Batang Sianok memiliki lebar lembah yang lebih besar yaitu 12 meter dan melewati Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk Panjang.

Kemudian terdapat beberapa sungai yang tidak secara langsung mengalir dalam wilayah Kota Bukittinggi tetapi masih dalam lingkup WAS Masanghulu dan Batang Agam, yaitu:

- Sungai Batang Air Katiak.
- Sungai Batang Serasah.
- Sungai Batang Agam.

Kecuali berfungsi sebagai outlet hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya keadaan hidrologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.3**  
**Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi**

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aur Birugo Tigo Baleh</li> <li>• Mandiangin Koto Selayan</li> </ul>
2.	Batang Sianok	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aur Birugo Tigo Baleh</li> <li>• Guguk Panjang</li> <li>• Mandiangin Koto Selayan</li> </ul>

*Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018*

Untuk pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai. Pembangunan hanya ilegal dilakukan di luar garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ini adalah 100 meter dari garis pasang terluar. Untuk lebih jelasnya panjang garis sempadan sungai di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola Dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Permunculan air tanah (mata air) yang berasal dari satuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Merapi, yaitu di daerah dataran timur laut Kota Bukittinggi, diantaranya mata air Sungai Tanang (150 l/detik) dan mata air Bulan Gadang (150 l/detik).

Karakter air tanah wilayah Bukittinggi mengacu kepada peta Hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat yang di publikasi oleh Direktorat Tata Lingkungan, menjelaskan bahwa Aquifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan tekanan batuan/tanah. Potensi air tanah termasuk dalam klasifikasi sedang sampai tinggi. Tingkat serahan air tanah dapat mencapai 5 – 10 l/detik. Kedalaman air tanah dangkal lebih kurang 3 meter, sedangkan air tanah dalam/ artesis mencapai kedalaman 100 meter.

## **E. Klimatologi**

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan Hidrologi dan reaksinya dengan lingkungan Kota Bukittinggi diuraikan sebagai berikut:

### **a. Daerah Aliran Sungai**

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7m, Batang Sianok di sebelah Barat dengan lebar 12-15m, dan Batang Agam di wilayah Kota dengan lebar 5-7m. Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang lembah dalam yang disebut dengan Ngarai Sianok, yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok. Kondisi air semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi Kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

### **b. Tipe**

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk tipe iklim B yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, disamping juga untuk tempat peristirahatan.

**c. Curah Hujan**

Curah hujan Kota Bukittinggi berkisar antara 2.300 - 2.500 mm/tahun, pada umumnya rata-rata berkisar 2.381 mm/tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari/tahun.

**d. Suhu**

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

**e. Kelembaban**

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 63% dan maksimum 90,8%, dengan kelembaban rata-rata 82% setiap tahunnya.

**F. Penggunaan Lahan**

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi sendiri didasarkan pada beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. Struktur ruang yang dikembangkan;
- b. Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c. Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyasikan

kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Gambaran rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)**

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
<b>Semua Kawasan</b>		<b>652,569</b>	<b>567,215</b>	<b>1.303,750</b>	<b>2.523,900</b>
<b>Kawasan Lindung</b>		<b>85,169</b>	<b>135,978</b>	<b>327,765</b>	<b>549,012</b>
<b>1, Kawasan Lindung Setempat</b>		<b>56,687</b>	<b>77,103</b>	<b>195,654</b>	<b>329,444</b>
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
<b>2, Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>28,482</b>	<b>58,875</b>	<b>132,111</b>	<b>219,568</b>
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
<b>Kawasan Budidaya</b>		<b>567,399</b>	<b>431,238</b>	<b>975,986</b>	<b>1.974,888</b>
<b>1, Kawasan Perumahan</b>		<b>320,376</b>	<b>211,357</b>	<b>624,927</b>	<b>1156,927</b>
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
<b>2, Kawasan Perdagangan dan Jasa</b>		<b>32,759</b>	<b>131,424</b>	<b>78,229</b>	<b>242,411</b>
<b>3, Kawasan Perkantoran</b>		<b>8,555</b>	<b>10,989</b>	<b>19,402</b>	<b>38,945</b>
<b>4, Kawasan Pariwisata</b>		<b>0</b>	<b>4,021</b>	<b>0</b>	<b>4,021</b>
<b>5, Kawasan Peruntukan Lainnya</b>		<b>205,520</b>	<b>74,003</b>	<b>253,428</b>	<b>532,951</b>
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361

<b>5,4</b>	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090
------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

## G. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, Benteng Fort de Kock, Kebun Binatang dan lain lain.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan-kegiatan atau program-program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang

sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

## H. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah rawan longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok yang juga meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5.**  
**Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor**

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
1.	Zona Rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo	Pulai Anak Air Koto Selayan

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
			ATTS Kayu Kubu ATTS	Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiangan Koto Selayan)

Berdasarkan tabel diatas, kondisi alam dan lingkungan wilayah Kota Bukittinggi termasuk daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor.

Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona rawan ini didasarkan kepada:
  - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsor apabila terjadi gempa.
  - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
  - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.
2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu: (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng  $< 3\%$ , sepanjang lembah Sungai Agam.

2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

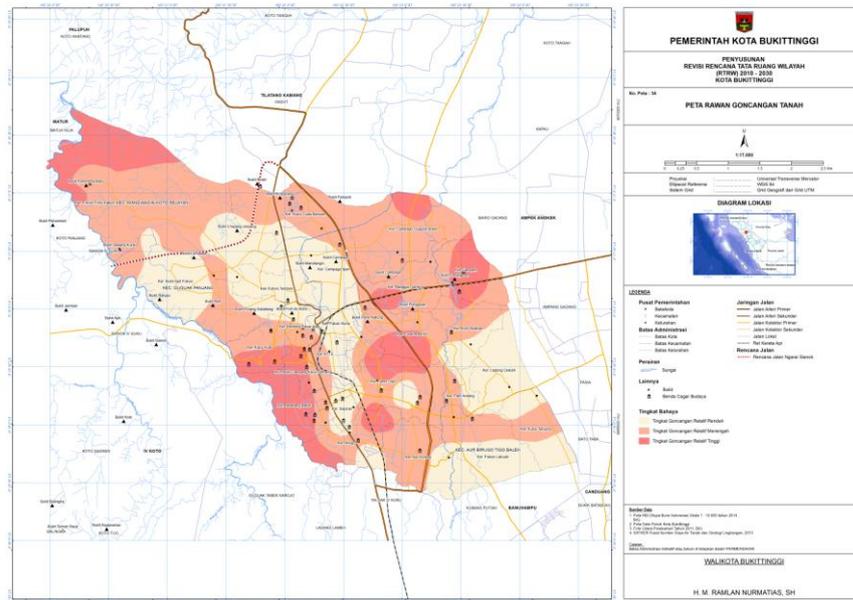
### I. Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

1. Daerah rawan kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Daerah rawan kebakaran

Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan guncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Rawan Guncangan Tanah di Kota Bukittinggi di bawah ini:

**Gambar 2.3**  
**Peta Guncangan Tanah Kota Bukittinggi**



### J. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, yaitu 38,54% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin**  
**Tahun 2013 s/d 2017**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2017	61.588	65.216	126.804	1,68
2.	2016	61.163	63.552	124.715	1,71
3.	2015	59.419	63.202	122.621	1,77
4.	2014	58.408	62.083	120.491	1,88
5.	2013	57.261	60.999	118.260	1.88

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Jika dirinci dan dikaji lagi tentang jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilakukan pemilahan data tersebut tentang kondisi kepadatan penduduk, berdasarkan lokasi dan tempat tinggal. Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,239 Kilometer persegi (Km<sup>2</sup>) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 126.804 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 5.024 jiwa/Km<sup>2</sup>. Ini artinya disetiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat penduduk sebanyak 5.024 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata disetiap wilayah kecamatan.

Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi , Kepadatan penduduk adalah perbandingan penduduk per luas wilayahnya. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7.**  
**Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi**

No.	Tahun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
1.	2017	25.239	126.804	5.024
2.	2016	25.239	124.715	4.941
3.	2015	25.239	122.621	4.898
4.	2014	25.239	120.491	4.774
5.	2013	25.239	118.260	4.607
6.	2012	25.239	114.415	4.533

*Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2017*

Kepadatan penduduk tidak merata untuk 3 ( tiga ) Kecamatan, kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat pada di Kecamatan Guguk Panjang, disebabkan karena wilayah Guguk Panjang adalah pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Hal ini memang sudah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sebab jika persebaran penduduk tidak merata walaupun laju penduduk terkendali, maka akan menimbulkan masalah baru.

Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan masalah sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

#### **A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **1. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas dasar Harga konstan Tahun 2012

s/d 2016 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.8.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta)**

No	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63.085,41	1.55	62.852,17	1.45	65.043,29	1,42	66.721,87	1,37	67.922,77	1,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	130,38	0.003	128,67	0.003	126,47	0,00	125,8	0,00	125,03	0,00
3.	Industri Pengolahan	333.237,40	8.19	345.281,39	7.98	358.082,78	7,80	369.139,12	7,57	373.467,84	7,23
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	30.068,71	0.74	31.017,94	0.72	34.471,3	0,75	35.632,11	0,73	39.249,16	0,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.064,47	0.17	7.291,24	0.17	7.318,	0,16	7.656,82	0,16	7.923,28	0,15
6.	Konstruksi	259.393,76	6.37	282.104,07	6.52	295.207,09	6,43	312.594,78	6,41	331.162,91	6,41
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.318.471,97	32.40	1.397.993,08	32.32	1.501.989,36	32,71	1.599.470,22	32,82	1.694.141,66	32,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	445.233,46	10.94	476.307,24	11.01	507.448,07	11,05	543.771,28	11,16	584.086,7	11,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173.152,35	4.26	188.882,26	4.38	203.479,56	4,43	220.500,54	4,52	236.786,81	4,58
10.	Informasi dan Komunikasi	310.289,26	7.63	326.688,81	7.55	348.117,66	7,58	376.058,61	7,72	404.406,54	7,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	238.504,78	5.86	260.162,30	6.02	277.515,62	6,04	288.870,24	5,93	313.318,3	6,06
12.	Real Estat	143.173,18	3.52	150.936,24	3.49	159.133,65	3,47	167.519,99	3,44	175.761,98	3,40
13.	Jasa Perusahaan	29.669,77	0.73	30.836,42	0.71	32.074,94	0,70	33.461,26	0,69	34.876,67	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.464,72	6.38	267.142,74	6.18	168.813,7	5,90	281.454,22	5,77	292.374,64	5,66
15.	Jasa Pendidikan	192.306,56	4.73	209.062,17	4.83	270.863,46	4,85	239.477,97	4,91	257.079,6	4,97
16.	Jasa Kesehatan	119.994,	2.9	129.34	2.99	222.94	3,05	151	3,10	163	3,16

No	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
.	dan Kegiatan Sosial	62	5	5,21		0,31		302,29		489,34	
17	Jasa lainnya	145.776,70	3.58	158.391,63	3.66	139.852,95	3,68	179.989,16	3,69	191.850,45	3,71
	PDRB	4.069.017,51	100,00	4.324.423,59	100	4.592.478,19	100	4.873.746,31	100	5.168.023,69	100

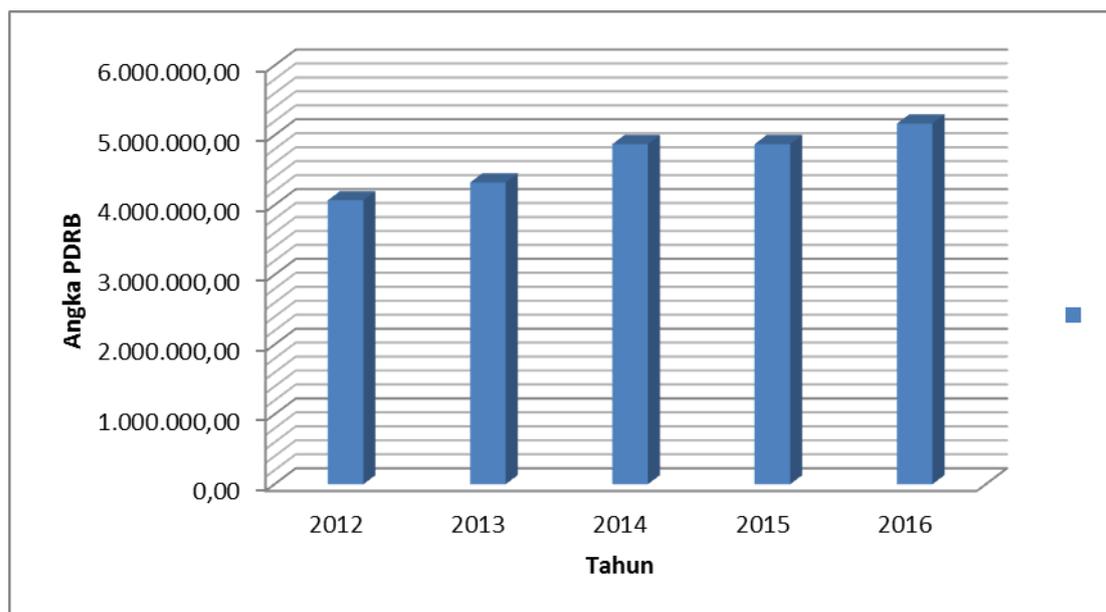
\*Angka Diperbaiki

\*\*Angka Sementara

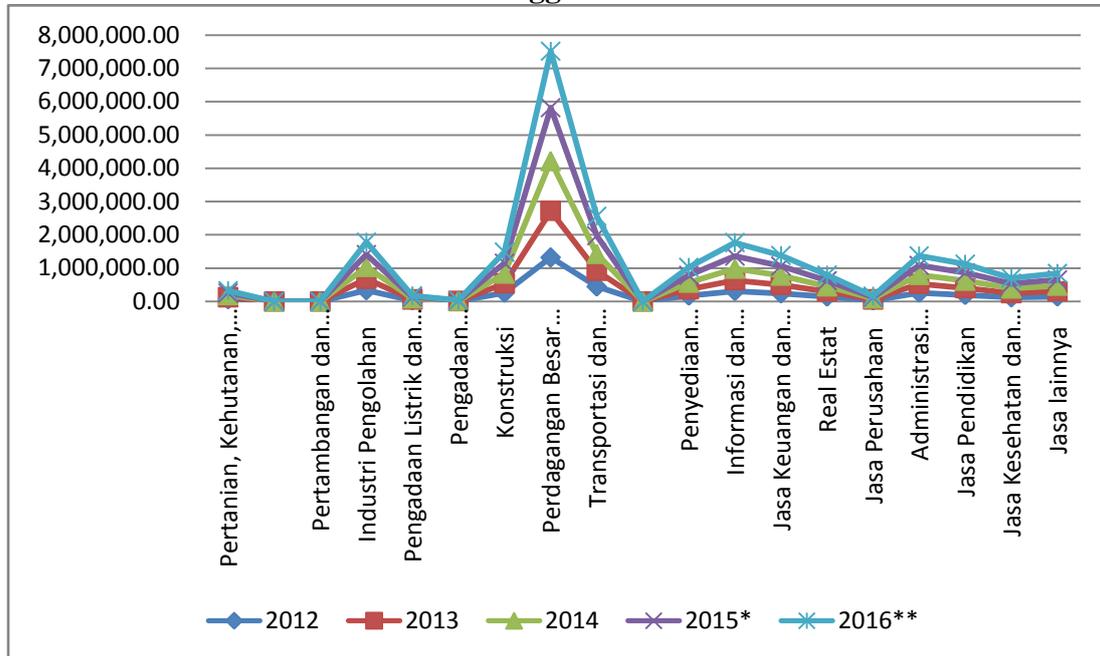
Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

**Gambar 2.4**  
**PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016**



**Gambar 2.5**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta) Kota**  
**Bukittinggi Tahun 2012-2016**



Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.069.017,51 juta pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 5.168.023,69 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi tiap sektor lapangan usaha secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi

**Tabel 2.9.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70.993,93	1,58	74.648,84	1,49	82.195,05	1,46	87.468,91	1,42	92.970,9	1,38
2.	Pertambangan dan Penggalan	146,03	0,00	155,55	0,00	180,19	0,00	194,86	0,00	187,97	0,00
3.	Industri Pengolahan	367.933,43	8,20	389.352,93	7,76	409.898,56	7,27	417.403,13	6,80	442.706,05	6,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	24.047,25	0,54	22.630,7	0,45	29.584,46	0,52	40.339,95	0,66	47.377,68	0,70
5.	Pengadaan Air, Panas Bumi, dan Geotermal	7.261,01	0,16	7.652,06	0,15	8.211,77	0,15	9.144,44	0,15	10.163,85	0,15

NO	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Rp)	%								
	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang										
6.	Konstruksi	288.407,17	6,43	330.562,35	6,59	360.907,48	6,40	393.719,07	6,41	420.171,48	6,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.453.493,89	32,39	1.617.180,98	32,23	1.302.724,57	32,71	2.058.203,23	33,51	2.267.244,22	33,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	470.869,05	10,49	470.869,05	10,78	434.328,61	10,95	665.354,45	10,83	719.657,59	10,66
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	199.034,83	4,43	199.034,83	4,74	166.186,05	4,93	334.075,06	5,44	387.302,14	5,74
10.	Informasi dan Komunikasi	322.384,11	7,18	322.384,11	6,61	284.395,72	6,59	366.362,91	5,97	401.451,04	5,95
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	266.976,32	5,86	266.976,32	6,15	235.902,53	6,16	375.575,11	6,12	420.792,93	6,23
12.	Real Estat	157.439,34	3,64	176.444,95	3,52	157.439,34	3,51	219.265,82	3,57	242.591,62	3,59
13.	Jasa Perusahaan	32.248,32	0,73	34.791,09	0,69	32.248,32	0,67	41.544,01	0,68	45.305,36	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310.039,9	6,91	339.609,24	6,77	310.039,9	6,47	379.930,77	6,19	414.835,05	6,15
15.	Jasa Pendidikan	215.446,8	4,80	257.329,05	5,13	215.446,8	5,24	324.925,94	5,29	363.667,98	5,39
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.423,29	3,06	156.455,56	3,12	137.423,29	3,11	189.125,92	3,08	207.306,12	3,07
17.	Jasa lainnya	163.734,54	3,65	192.217,92	3,83	163.734,54	3,86	238.891,06	3,89	266.059,93	3,94
	PDRB	4.487.879,23	100,00	5.018.343,96	100,00	4.487.879,23	100,00	6.141.524,62	100,00	6.749.791,92	100,00

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Menurut SNA (System of National Accounts) yang diterbitkan oleh United Nation, secara makro perekonomian suatu wilayah, menurut lapangan usaha terdiri dari tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Bila dilihat kontribusi lapangan usaha yang mendukung PDRB tiap sektor, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi didominasi oleh sektor tersier. Sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB terbesar berdasarkan harga berlaku yaitu sebesar 33,59 dengan nilai Rp. 2.267.244,22 juta. Diharapkan dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga akan tercipta struktur ekonomi yang kokoh, seimbang, dan dinamis.

**Tabel 2.10.**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi**

	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
			Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,42	1,37	1,38	1,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	8,20	8,19	7,76	7,98	7,27	7,80	6,80	7,57	6,56	7,23
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,74	0,45	0,72	0,52	0,75	0,66	0,73	0,70	0,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
6.	Konstruksi	6,43	6,37	6,59	6,52	6,40	6,43	6,41	6,41	6,22	6,41
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,39	32,40	32,23	32,32	32,71	32,71	33,51	32,82	33,59	32,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,49	10,94	10,78	11,01	10,95	11,05	10,83	11,16	10,66	11,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,26	4,74	4,38	4,93	4,43	5,44	4,52	5,74	4,58
10.	Informasi dan Komunikasi	7,18	7,63	6,61	7,55	6,59	7,58	5,97	7,72	5,95	7,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	5,86	6,15	6,02	6,16	6,04	6,12	5,93	6,23	6,06
12.	Real Estate	3,51	3,52	3,52	3,49	3,51	3,47	3,57	3,44	3,59	3,40
13.	Jasa Perusahaan	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69	0,67	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	6,19	5,77	6,15	5,66
15.	Jasa Pendidikan	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,85	5,29	4,91	5,39	4,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,08	3,10	3,07	3,16
17.	Jasa lainnya	3,65	3,58	3,83	3,66	3,86	3,68	3,89	3,69	3,94	3,71
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Tabel 2.11.**  
**Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun**  
**2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,80	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,61	-3,54
3.	Industri Pengolahan	1,17	6,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	17,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	11,15
6.	Konstruksi	5,94	6,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	10,16

8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	8,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	15,93
10.	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	12,04
12.	Real Estate	4,92	10,64
13.	Jasa Perusahaan	4,23	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	9,19
15.	Jasa Pendidikan	7,35	11,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	9,61
17.	Jasa lainnya	6,59	11,37
PDRB		6,04	9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

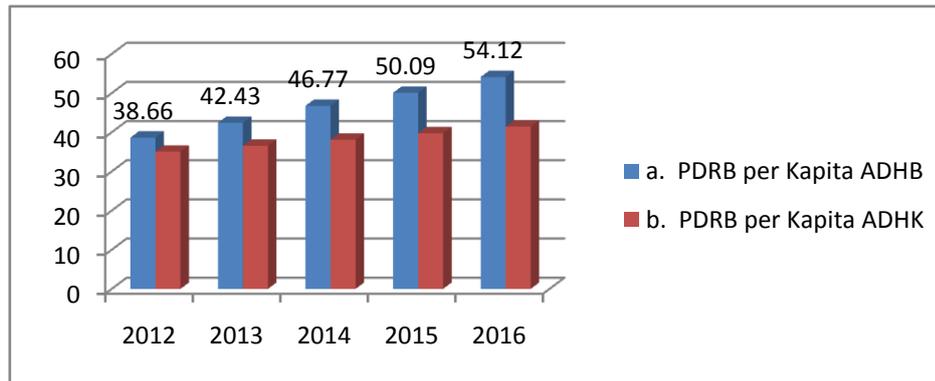
Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04 persen, namun sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar 0,61 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15 persen. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kota Bukittinggi**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam juta Rp)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.069.017	4.324.423	4.592.478	4.873.746	5.168.023
Jumlah Penduduk (jiwa)	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHK	35,06	36,57	38,11	39,75	41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016**



Dari grafik terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

## 2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi :

**Tabel 2.13.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013 s.d. 2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bukittinggi	7,43%	8,89%	2,99%	8,19	1,38
Inflasi Sumatera Barat	10,87	11,90	0,85	5,02	2.03

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Nilai inflasi Kota Bukittinggi tahun 2017 relatif stabil berkisar pada angka dibawah 1%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,45% dan bulan Mei mengalami Deflasi sebesar 0,44%. Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi terhadap Propinsi dan Nasional diman inflasi Kota Bukittinggi merupakan inflasi terendah di Sumatera dari 23 Kota yang menjadi sampel inflasi dan nomor 3 terendah se Indonesia setelah Ternate dan Sorong.

### 3. Indeks Gini/Koefisien Gini

Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

**Tabel 2.14**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,37	0,34	0,34	0,33	0,31
Indeks Gini Provinsi Sumbar					

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Tahun 2017 Kota Bukittinggi dengan angka 0,31 dengan klasifikasi ketimpangan rendah.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM juga merupakan data strategis selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga digunakan sebagai alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel. 2.15**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi**  
**dan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013 s.d.2017**

IPM	2013	2014	2015	2016	2017
	( % )				
Kota Bukittinggi	77,67	78,02	78,72	79,11	79,80
Provinsi Sumbar	68,91	69,36	68,98	70,73	71,24

Sumber : BPS Propinsi Sumbar 2017

Selama kurun waktu 2013-2017 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Tetapi untuk Propinsi Sumatera Barat nilai IPM Kota Bukittinggi masih berada di bawah IPM Kota Padang.

#### B. Kesejahteraan Sosial

##### 1. Pendidikan

Strategi dalam pendidikan adalah suatu rencana tentang cara- cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti pembangunan gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

## 2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf ( AMH ) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

**Tabel. 2.16**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	80,210	96,580	86,477	88,621	90.340
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	80.947	96.639	86.868	88.923	90.340
3.	Angka melek huruf (No 1/ no 2) X 100	99,09	99.94	99,55	99,66	100

*Sumber : BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dengan didukung 45 Sekolah Dasar Negeri dan 11 sekolah Dasar Swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah baik ditingkat SD, SMP atau SMA. Pada tahun 2016 memang terjadi Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun yang beralih hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja sedangkan Kota Bukittinggi tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.

Tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan dibangku sekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas

yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Sesuai dengan data yang diperoleh tahun 2015, angka melek huruf di Kota Bukittinggi mencapai 99,94 %. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat dapat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan. Data-data Angka Melek Huruf ini dapat juga digunakan dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media, serta mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Pada tahun 2015 dan 2016 Angka Melek Huruf di Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 99,41 dan 99,77. Artinya Penduduk usia 10 tahun keatas di kota Bukittinggi tetap hampir 100 % telah mampu tulis baca. Sedangkan pada Tahun 2017 Angka melek Huruf sudah mencapai angka 100%, artinya tidak ada lagi penduduk Kota Bukittinggi yang mengalami buta huruf.

### 3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 2.17**  
**Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi**

<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
71,89	72,12	73,12	73.52	73.6

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Harapan Hidup tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebut saja kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu.

Dengan mengetahui indikator Angka Harapan Hidup ini, kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan

Hidup. Karena Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah.

Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka harapan hidup kota Bukittinggi telah berada di posisi yang cukup baik, bahkan berada diatas rata – rata provinsi. Setiap tahunnya terjadi peningkatan angka harapan hidup Kota Bukittinggi, dari 71,89 pada tahun 2013 menjadi 73,6 di tahun 2016.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### A. Layanan Urusan Wajib Dasar

##### 1. Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah Tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi persentase APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14.021	18.808	15.207	14.514	15.047
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.906	11.759	12.472	12.478	12.908
1.3.	APM SD / MI	100,83	159,95	121,93	116,38	116,57
<b>2</b>	<b>SMP /MTs</b>					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.827	9.181	7.175	8.245	6.729

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.982	6.189	6.505	6.610	6.702
2.3.	APM SMP / MTs	97,78	148,34	110,30	124,74	100,40

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari data yang ada, di Kota Bukittinggi pada tingkat SD untuk kelompok usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2016 yaitu 116,57%. Ini tetap berarti seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal. Hal ini telah terlihat pada data selama 5 (lima) tahun terakhir, APM kelompok usia ini sukses terlaksana di Kota Bukittinggi.

APM pada tingkat SMP/MTs menunjukkan perkembangan yang cukup menggembarakan. Meskipun masih rendah dibanding APM pada tingkat SD namun secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk sekolah sudah bagus. APM tingkat pendidikan SMP pada tahun 2017 APM adalah 100,40% dan mengalami penurunan dari tahun 2016 yang berada pada angka 124,74%.

Dari data di atas, terlihat angka yang sangat membanggakan untuk menilai keberhasilan program pendidikan di Kota Bukittinggi pada semua jenjang pendidikan, baik di tingkat SD dan SMP.

#### **b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD / SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 16 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar juga merupakan indikator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan semaksimal mungkin, agar seluruh masyarakat jadi cerdas. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas di setiap tingkat pendidikan, salah satunya adalah dengan menghitung

Angka Partisipasi Kasar (APK), yakni presentase angka dimana jumlah penduduk yang sedang sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah.

Data perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14.619	16.596	17.056	16.377	17.556
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.9906	11.759	12.472	12.478	12.908
1.3.	APK SD/MI	105,13	141,13	136,75	131,25	133,909
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.235	8.989	9.108	9.450	9157
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.982	6.189	6.505	6.610	6.702
2.3.	APK SMP/MTs	89,30	145,24	140,02	142,97	136,63

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari data yang ada APK di tingkat SD di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah 131,25% atau dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yakni 12.478 jiwa, kenyataannya jumlah siswa yang duduk dibangku sekolah sejumlah 16.377. APK ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 133,91%, melebihi angka 100% . Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya anak didik yang melebihi usia hal ini dikarenakan terlambat masuk sekolah, atau karena tinggal kelas, dan anak yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Namun yang terpenting anak-anak kita duduk dibangku sekolah tetap menuntut ilmu.

Untuk jenjang pendidikan SMP / MTs adalah 136,63% pada Tahun 2017. Angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 yaitu 142,97%. Hal masih mengembirakan karena cukup mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan. Data ini pun membuktikan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan dimana terlihat bahwa angka partisipasi melebihi jumlah penduduk pada masing-masing usia sekolah.

**c. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**

Bangunan merupakan salah satu syarat untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Kondisi bangunan yang baik akan menambah kenyamanan bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kondisi Bangunan Baik untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dari Tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I. SD/MI</b>						
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	31	34	34	37	43
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	61	61	61	61	61
3	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	50,82	55,74	55,74	60,66	70,49
<b>II. SMP/MTs</b>						
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	11	12	13	14	15
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	17	17	19	19	19
3.	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	64,71	70,59	68,42	73,68	78,95

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Kalau dilihat dari kondisi bangunan baik dari Tahun 2013 s.d 2017, pada tahun 2016, dari 61 gedung sekolah SD/MI terdapat 37 (60,66%) bangunan sekolah dalam kondisi baik. Pada Tahun 2017 menunjukkan peningkatan yaitu 43 (70,49%) bangunan sekolah. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan rehab yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam rangka menyediakan sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk SMP/MTs pada Tahun 2016 dari seluruhnya 19 bangunan sekolah sebanyak 14 (73,68%) memiliki kondisi baik, sedangkan pada Tahun 2017 sebanyak 15 (78,95) bangunan sekolah dalam kondisi baik.

#### **d. Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar**

Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dari Tahun

2013 sampai dengan tahun 2017 Kota Bukittinggi sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I.</b>	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.316	2.243	2.467	2.543	2.554
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	2.316	2.243	2.475	2.553	2.557
3.	AL SD/MI	100	100	99,67	99,61	99,88
<b>II.</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	2.002	1.042	1.729	2.137	2.847
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	2.008	1.042	1.731	2.140	2.848
3.	AL SMP/MTs	99,7	100	99,88	99,86	99,96

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2013 s/d 2017 Angka Kelulusan Siswa SD/MI selalu menunjukkan angka hampir 100 % Angka Kelulusan. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya.

Untuk SMP/MTs juga terlihat menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni hampir 100% menunjukkan Angka Kelulusan, dimana pada Tahun 2016 sebesar 99,86% dan Tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan yaitu 99,96%.

**e. Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs**

Dalam hal Angka Menanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.22**  
**Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	2,524	2.976	2.336	3.014	2.953

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	2.316	2.243	2.467	2.543	2.554
3	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	108,9	132,6	94,68	118,5	115,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/Mts dari Tahun 2013 s.d 2017 terjadi fluktuasi turun naik. Terendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebesar 94,68%. Sedangkan pada Tahun 2016 menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu 118,49%. Pada Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan lagi yaitu 115,49%.

#### f. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan ini selain melihat keberhasilan seseorang menyelesaikan pendidikannya, yang dibuktikan dengan ijazah, juga berguna untuk melihat perencanaan tenaga kerja. Perusahaan atau industri dapat mempedomani angka pendidikan yang ditamatkan ini untuk mengembangkan usahanya pada suatu daerah. Jika pada suatu industri membutuhkan banyak tenaga tamatan SD atau SMP, maka salah satu indikator untuk pengembangan usahanya adalah melihat angka partisipasi yang ditamatkan ini. Selain itu juga melihat secara keseluruhan tingkat pendidikan yang ada di suatu daerah, sehingga keberhasilan wajib belajar juga dapat dicermati dari data sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD / MI	1.638	2.638	2.636	2.538	2.554
2.	SMP / MTS	1.497	1.586	2.660	2.846	2.847

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data diatas terlihat bahwa suksesnya program wajib belajar 9 tahun di Kota Bukittinggi salah satunya dilihat dari angka pendidikan ditamatkan ini yaitu dengan meningkatnya Angka Pendidikan Yang Ditamatkan dari Tahun 2016, menjadi 2.847 pada Tahun 2017. Semoga kedepan Kota Bukittinggi dapat menetapkan program wajib belajar 12

tahun, sehingga penduduk Bukittinggi mempunyai tingkat intelektual yang semakin baik.

**g. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi :

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	14.021	14.408	15.207	15.565	15.047
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.906	11.759	12.472	12.478	12.908
1.3.	APS SD/MI	100,83	122,53	121,93	124,74	116,57
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	6.827	6.798	7.175	7.271	6.729
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.982	6.189	6.505	6.610	6.702
2.3.	APS SMP / MTs	97,78	109,84	110,30	110,00	100,4

Sumber: *Profil Pendidikan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016,2017*

Dari data pada periode tahun 2013-2017 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pada tahun 2014 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2015 APS untuk tingkat SD/MI kembali turun menjadi 121.93. Pada tahun 2016 APS tingkat SD/MI kembali naik menjadi 124,74. Pada Tahun 2017 APS untuk tingkat SD/MI mengalami sedikit penurunan yaitu 116,57. Hal ini terjadi pada tingkat SMP/MTsN dimana APS pada jenjang pendidikan ini juga menurun dari tahun ke tahun. APS untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 adalah 110.30 dan pada Tahun 2016 adalah 110, sedangkan pada Tahun 2017 adalah sebesar 100,4. Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah sehingga APS ini

hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi.

Terlepas dari adanya sedikit naik turun APS pada tingkat SD/MI, sebenarnya angka ini sudah cukup bagus untuk melihat partisipasi Penduduk usia 7-12 tahun untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah sudah semakin baik nya kebijakan dan tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan sehingga daya serap siswa pada jenjang pendidikan ini juga meningkat.

#### **h. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah**

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	61	61	61	61	61
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.906	11.759	12.472	12.478	12.908
1.3.	Rasio	46,74	55,28	48,91	48,89	47,26
2	<b>SMP / MTs</b>					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	16	16	17	19	19
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.982	6.189	6.505	6.610	6.702
2.3.	Rasio	22,92	25,85	26,13	28,74	28,35

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Sarana pendidikan di Kota Bukittinggi pada tingkat SD/ SDLB/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 61 gedung sekolah seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya. Dari sejumlah sekolah tersebut hampir semuanya telah memenuhi kewajiban dalam pemenuhan standar minimum terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang diwajibkan undang-undang. Walaupun hanya ditargetkan sebesar 57 persen, namun realisasi pemenuhan sarana dan prasarana adalah sebesar 89,70 persen. Artinya Pemerintah Kota Bukittinggi telah melampaui

standar yang diwajibkan bagi sarana pendukung pendidikan di tingkat SD / SDLB / MI.

Pada tingkat SLTP / SMPLB, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap 9 sekolah telah terpenuhi di tahun 2015, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari target 60% dapat dicapai sebesar 136%, hal ini dapat dilihat dari 11 SLTP / SMPLB yang ada di Kota Bukittinggi 9 sekolah telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Kota Bukittinggi masih mempunyai 3 sekolah lagi yang belum memenuhi sarana prasarana sesuai dengan SNP, hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan yang masih belum memadai serta ketersediaan dana yang belum mencukupi.

Namun pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan.

Sebagian besar sekolah baik di tingkat SD/SDLB/MI, SLTP/SMPLB dan SLTA telah memenuhi sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran diatas dengan predikat baik dan mengalami kenaikan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD / MI dan SLTP. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

#### **i. Rasio Guru / Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru sesuai tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid untuk tingkat pendidikan dasar dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD / SLB/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	902	822	884	815	900
1.2.	Jumlah Murid	16.596	16.579	16.414	16.237	17.285
1.3.	Rasio	54,4	49,6	53,9	50,19	52,10
<b>2</b>	<b>SMP / SMPLB/MTs</b>					
2.1.	Jumlah Guru	486	603	451	659	582
2.2.	Jumlah Murid	8.989	7.715	6.399	9.157	9.137
2.3.	Rasio	54,1	78,2	70,5	71,97	63,70

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD / MI rendah selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2017 rasio ini hanya 52,10. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Dikaitkan dengan capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, Kota Bukittinggi masih memperoleh capaian sebesar 78,06%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja terhadap persentase tenaga pendidik SD / SDLB / MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar. Masih banyak tenaga pengajar yang belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD / SDLB / MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 pada SMP/SMPLB/MTs terlihat penurunan hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah siswa yang cukup besar namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah guru. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah guru tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah siswa pada jenjang pendidikan ini adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan ASN yang tidak dikecualikan untuk guru di Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honorer.

Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

**j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Si/D-IV**

Dari segi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi dapat terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.27**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV					1.350
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs,	1.252	1.453	1.431	1.474	1.480
3.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					91,20

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2013 s.d 2017 tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tapi kalau dilihat dari segi jumlah guru yang berijazah kualifikasi S1/DIV sudah mencapai 91,20% pada Tahun 2017 ini, sehingga menunjukkan upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru menunjukkan hasil yang cukup baik.

**2. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan

kesehatan pada tahun 2016 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Gambaran umum tentang mortalitas, usia harapan hidup, status gizi akan memberikan penjelasan dan mencerminkan status kesehatan masyarakat.

#### a. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitive untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.28**  
**Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Tahun	Jumlah kematian bayi (>1 tahun)	Jumlah kelahiran hidup	Angka kematian bayi
1	2013	19	2.338	8
2	2014	19	2.405	8
3	2015	26	2.407	8
4	2016	12	2.465	5
5	2017	7	2.427	3

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 sebesar 7/1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan yang positif (kematian bayi mengalami penurunan) dibandingkan tahun 2016 lalu yang sebesar 12/1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir angka kematian bayi mengalami fluktuasi, jumlah kematian bayi yang terungkap di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 12 bayi dari 2.465 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian bayi antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Untuk itu, salah satu upaya percepatan penurunan AKB adalah melalui

peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas dan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standard an tepat waktu yang dapat dikaji melalui Audit Maternal Perinatal (AMP).

**b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merefleksikan kondisi social, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (infant mortality rate) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum

Dengan memperhatikan Angka Kematian Bayi karena indikator ini berkaitan langsung dengan Angka Kelangsugan Hidup Bayi, dapat tergambar Angka Kelangsungan Hidup Bayi sebagai berikut :

**Tabel 2.29**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun</b>	<b>Jumlah Kelahiran hidup</b>	<b>AKB *)</b>	<b>AKHB*)</b>
2013	19	2338	8	992
2014	19	2405	8	992
2015	26	2407	11	989
2016	12	2465	5	995
2017	8	2570	3	997

Sumber : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi mengalami naik turun yang relative stabil. Pada tahun 2013 dan 2014 AKHB Kota Bukittinggi berada di angka 992, tahun 2015 turun menjadi 989, tahun 2016 turun lagi menjadi 995 dan pada tahun 2017 kembali naik dengan 997. Keseluruhan angka itu masih tetdapat dalam kategori baik. Ini berarti ibu – ibu yang melahirkan mampu menjaga kesehatannya baik semasa hamil sampai dengan melahirkan , sehingga angka kelangsungan hidup bayi di Kota Bukittinggi berada dalam posisi yang bagus.

**c. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan

derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.30**  
**Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No.	Tahun	Jumlah ibu hamil yang meninggal	Jumlah kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu
1	2013	0	2.338	0
2	2014	1	2.405	0.00042
3	2015	7	2.407	0.00291
4	2016	3	2.465	0.00122
5	2017	1	2.427	0.00041

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Dapat terlihat seperti tabel diatas, jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 1 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang dramatis dibandingkan dengan tahun 2015 dari 7 jiwa dan 2016 dari 3 jiwa. Penurunan ini berkat usaha pemerintah bersama masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

**d. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita**

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Berikut jumlah posyandu dan jumlah balita adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	132	132	132	132	132
2.	Jumlah balita	11.896	12.338	12.638	12.649	12.649
3.	Rasio	11,06	10,6	10,4	10.41	10.41

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Jumlah Posyandu di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebanyak 132 buah dan jumlah balita sebanyak 12.649 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:97. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kota Bukittinggi melayani 97 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2013-2017.

Rasio posyandu terhadap balita di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2017 adalah 11.89. angka ini merupakan angka yang cukup bagus dalam pelayanan posyandu di Bukittinggi. Karena dari 1 posyandu melayani kurang dari 100 balita, begitu juga dengan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan rasio 9.01 dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan rasio 10.29.

Berikut jumlah posyandu dan balita menurut kecamatan :

**Tabel 2.32**  
**Jumlah Posyandu dan Balita**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
1	Guguk Panjang	56	4711	11.89
2	Mandiangin Koto Selayan	47	5217	9.01
3	Aur Birugo Tigo Baleh	29	2816	10.29
	Jumlah	132	12654	10.43

*Sumber: Dinas Kesehatan*

**e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak

jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	2	2	1	12	12
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124715	126805
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0.059	0.058	0.057	0.056	0.055
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk *)	0,017	0,016	0,008	0.096	0.094
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,118	0,116	0,114	0.112	0.110

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Di kota Bukittinggi, sarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dalam kondisi jumlah yang sama setiap tahunnya, beberapa hal hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 0.056 itu berarti dari 1 puskesmas yang ada melayani 17.857 penduduk, sedangkan untuk tahun 2017 rasio puskesmas adalah 0.055, memang mengalami sedikit penurunan, namun angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

Sementara untuk jumlah poliklinik untuk tahun 2016 dan 2017 masih tetap sama, ini berarti layanan yang diberikan sesuai rasio poliklinik persatuan penduduk masih bagus, untuk

tahun 2017 1 poliklinik melayani 10.638 penduduk. Dan untuk Puskesmas Pembantu juga tidak mengalami pergerakan untuk tahun 2016 dan 2017 masih sama dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 14. Dengan rasio 0.110 dimana 1 pustu melayani 9.090 penduduk.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu menurut kecamatan tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jml	Rasio*	Jml	Rasio*	Jml	Rasio*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
	<b>Tahun 2017</b>							
1	Guguk Panjang	47206	2	0.042	5	0.106	3	0.063
2	Mandiingin Koto Selayan	51347	4	0.078	2	0.039	8	0.156
3	Aur Birugo Tigo Baleh	28252	1	0.035	5	0.177	3	0.106
	Jumlah	126805	7	0.055	12	0.095	14	0.110

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Pada tabel di atas tergambar penyebaran sarana kesehatan untuk tingkat kecamatan tidak merata. Namun walaupun demikian pelayanan kesehatan di setiap kecamatan masih berjalan dengan maksimal. Kecamatan mandiingin Kota Selayan adalah daerah yang mempunyai banyak pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 14, hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang paling banyak diantara kecamatan yang lain.

**f. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk.**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pelayanan

Fasilitas kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk. Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Bukittinggi memang belum ada, dan akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2018 ini. Namun pelayanan kesehatan bagi penduduk di tingkat lanjutan telah dilakukan oleh rumah sakit – rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi.

Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi :

**Tabel 2.35**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	3	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	5	5
7.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124715	126805
8.	Rasio*)	0,051	0,050	0,049	0.040	0.039

Sumber : Dinas Kesehatan

Sesuai dengan tabel di atas dapat kita lihat jumlah Rumah Sakit mengalami penurunan, yaitu Rumah Sakit Sitawa Sidingin yang izinnya sudah dicabut karena ada permasalahan dalam pelaksanaan, dan sekarang statusnya menjadi klinik. Rasio Rumah sakit adalah gambaran ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rasio Rumah sakit persatuan penduduk berkisar pada angka 0.040 pada tahun

2016 dan 0.039 pada tahun 2017, rasio ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi saat ini adalah sebanyak 5 Rumah sakit yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi RSSN (Rumah Sakit Strike Nasional)
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina
4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah sakit TNI AD Tk.IV

Dalam pelayanan Rumah sakit di Kota Bukittinggi mempunyai sebanyak 786 tempat tidur yang tersebar di seluruh Rumah Sakit dan di dukung oleh fasilitas sarana dan prasarana. Dan jumlah penderita yang dirawat inap menurut jenis penyakit pada tahun 2015 sebanyak 28.026 pasien dan tahun 2016 sebanyak 38.085 pasien. Sedangkan jumlah penderita yang dirawat menurut daerah asal pada tahun 2016 adalah sebanyak 112.663 pasien . Sesuai dengan rasio yang ada dapat dilihat jika 1 Rumah sakit bisa melayani 25.641 pasien . Angka ini dapat menggambarkan dengan jumlah rumah sakit yang ada masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien yang datang ke rumah sakit di Bukittinggi. Jumlah rumah sakit yang ada menurut kecamatan adalah :

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Rumah Sakit**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru & penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio*	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio*	Jlh	Rasio	Jlh	Rasio	Jmlh	Rasio
	<b>Tahun 2017</b>													
1	Guguk Panjang	47206	1	0.021	0	0	0	0	0	0	2	0.042	3	0.063
2	Mandiangan Koto Selayan	51347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo	28252	0	0	1	0.035	1	0.035	0	0	0	0	2	0.707

Tigo Baleh														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas tergambar penyebaran jumlah rumah sakit tidak sama untuk masing-masing kecamatan. Jumlah rumah sakit banyak terdapat pada kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah rumah sakit sebanyak 3 ( tiga ) unit, kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 2 ( dua ) unit, sementara belum tersedianya rumah sakit pada kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

#### g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organology, golongan usia dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh paripurna, bersinambung dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan professional kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan ditingkat primer yang dilakukan di Puskesmas dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi. Namun pada tingkat lanjutan di Rumah Sakit dapat dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Spesialis.

Indikator dokter persatuan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dokter.

Jumlah Dokter dan rasionya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.37**  
**Jumlah Dokter Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter	187	212	264	264	153
2	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	12.6805
3	Rasio	1.56	1.76	2.15	2.11	1.21

Sumber : Dinas Kesehatan

Sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan Jumlah Dokter di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebanyak 153 orang yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Institusi Dinas Kesehatan lainnya. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 1.21 untuk idealnya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 ( Standar dari WHO sebesar 40 per 100.00 penduduk). Dengan tabel yang tergambar

di atas dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi telah mempunyai dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Jumlah Dokter yang terdapat masing-masing kecamatan adalah :

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
	<b>Tahun 2017</b>			
1	Guguk Panjang	47206	54	0.074
2	Mandiingin Koto Selayan	51347	34	0.033
3	Aur Birugo Tigo Baleh	28252	65	0.168
	Total	126805	100	0.79

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Jika data tersebut dibagi menurut kecamatan, maka pada tahun 2017 didapat data rasio dokter per 1000 penduduk di kecamatan Guguk panjang adalah 0.074, kecamatan mandiingin Kota selayan 0.033 dan kecamatan aur birugo tigo baleh 0.168. Faktor penyebab tingginya rasio untuk kecamatan abtb adalah jumlah penduduk sedikit ditangani dengan jumlah dokter yang cukup banyak.

#### **h. Rasio tenaga medis per satuan penduduk**

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, temperatur dan pengaturan rontgen, anestesi, fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

Jumlah tenaga medis per satuan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013 s.d 2017**

## Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Medis	224	273	236	236	253
2	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124715	126804
3	Rasio	1,89	2,26	1,92	1.892	1.995

Sumber : Dinas Kesehatan

Rasio tenaga medis digunakan untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis yang ada disuatu wilayah. Untuk tahun 2017 rasio tenaga medis mengalami peningkatan dari 1,892 menjadi 1,995, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga medis berbanding lurus dengan peningkatan penduduk.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam hubungan sistem aktivitas sistem transportasi, perkembangan fasilitas transportasi disebabkan oleh perkembangan guna lahan, pola aktivitas maupun keputusan lokasional. Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat-pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Dalam mendesain jalan, hal yang harus dipertimbangkan adalah antisipasi terhadap kondisi lalu lintas dimasa yang akan datang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jalan kota dalam kondisi baik	168,76	164,34	164,96	157,06	116,12
2.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	198,18	194,11	192,99	192,99	164,48
3.	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	0,85	0,85	0,85	0,87	0,75

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018

Dari total panjang jalan di Kota Bukittinggi sebesar 180,169 km, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 168,76 km pada tahun 2013.

#### b. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya irigasi maka kebutuhan akan air pada sebidang lahan tetap terpenuhi sekalipun kondisi lengas tanah tidak mencukupi sehingga tanaman tetap bisa tumbuh secara normal.

Jaringan irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Rasio Jaringan irigasi dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas operasional jaringan irigasi yang ada dalam mengairi petak sawah / areal tanam yang ada. Tabel berikut menyajikan Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.41**

**Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi  
Tahun 2013 s.d. 2017**

NO	Pasokan Irigasi	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Saluran Irigasi (km)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2.	Luas Areal Tanam (Ha)	823	762	759	759	588
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0,0015	0.0016	0.0015	0.0015	0,0015

*Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018*

Dilihat dari tabel diatas, panjang saluran irigasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak terdapat penambahan, sedangkan luas areal tanam terjadi penurunan. Penurunan areal tanam salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan perumahan. Kondisi ini harus dikawal secara baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan pola ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Bukittinggi sehingga produksi padi tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara maksimal.

**c. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk**

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri.

Rasio tempat pemakan umum per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.42  
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk  
Tahun 2017**

No	Uraian	2017
1	Jumlah daya tampung TPU	19,7Ha
2	Jumlah Penduduk	119.183
3	Rasio	0,0165

*Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018*

Dalam penggunaan lahan TPU untuk makan dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.

Dari tabel diatas rasio tempat pemakaman umum per jumlah penduduk yaitu sebesar 0,0165

**d. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**

Kota Bukittinggi memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sehingga jumlah Masjid dan Mushalla sangat menonjol dari pada jumlah tempat beribadah lainnya. Tempat ibadah yang tidak ada di Kota Bukittinggi adalah Pura (tempat beribadah agama Hindu).

Bukittinggi juga terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya, dan masing-masing agama bebas menjalankan peribadatan dengan nyaman. Rasio masing-masing tempat ibadah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.43**  
**Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2013 s.d. 2017**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Masjid	44	44	44	45	45
2.	Jumlah Mushalla menurut BDA	50	146	146	148	105
3.	Jumlah Penduduk beragama Islam	115.244	117.421	119.497	121.560	115.980
4.	Rasio Masjid Per satuan penduduk	0,38	0,37	0,37	0,37	0,39
5.	Rasio Mushalla Per satuan penduduk	0,43	1,24	1,22	1,22	0,91
6.	Jumlah Gereja Katholik	1	1	1	1	1
7.	Jumlah Penduduk beragama Katholik	1.104	1119	1.139	1.160	1.132
8.	Rasio Gereja Katholik Per satuan penduduk	0,91	0,89	0,87	0,86	0,88
9.	Jumlah Gereja Protestan	1	1	1	1	1
10	Jumlah Penduduk Beragama Protestan	1.686	1.723	1.754	1.758	1,882
11	Rasio Gereja Protestan Per satuan penduduk	0,59	0,58	0,57	0,57	0,53

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2017

Peningkatan jumlah tempat ibadah di Kota Bukittinggi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio tempat ibadah dari tahun ke tahun cenderung menurun namun diperkirakan hal ini tidak akan mempengaruhi kualitas ibadah umat beragama. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

**e. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan.

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.44**

**Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB**

**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas RTH	*	*	*	*	2.121.280
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	*	*	*	*	252.390.000
3	Rasio	*	*	*	*	1 : 0,84

*Keterangan: \* data tidak tersedia*

Dari tabel diatas terlihat masih belum mencukupinya ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang penataan ruang, mengingat Bukittinggi daerah perkotaan yang semakin padat jumlah bangunan dan fasilitas lainnya sehingga banyak terjadi perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan pemukiman.

Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan yang ada sekarang baru **22,58%**. Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, penyejuk dan memperindah wajah kota, sekaligus menjadi tempat bersantai, berinteraksi sosial bagi warganya maupun bagi siapa saja yang berkunjung ke Bukittinggi.

Pada Tabel diatas terlihat dimana luas RTH yang ada pada tahun 2017 adalah 2.121.280 m<sup>2</sup> dari luas RTH publik yang seharusnya tersedia yaitu sebesar 5.047.800 m<sup>2</sup>.

Sehingga untuk persyaratan luas minimal 30 % yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum tercapai.

**Tabel 2.45**  
**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas RTH public yang tersedi di akhir tahun pencapaian SPM (M2)	*	*	*	*	2.121.280
2	Luas RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kaw	*	*	*	*	5.047.800
3	Persentase	*	*	*	*	42%

*Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017*

Oleh karena itu harus terus ada usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk menambah ruang terbuka hijau ini guna menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak Cuma itu, Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Ruang terbuka hijau juga membawa begitu banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.

**f. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 bahwasanya Kota Bukittinggi tidak memiliki Kawasan Hutan,

namun hanya memiliki beberapa kawasan yang memiliki lindung yaitu Kawasan Ngarai Sianok Sempadan Ngarai Sianok dan Sempadan Sungai serta Kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH) dengan fungsi Hutan Kota yang merupakan kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati). Selain itu hutan kota juga dimanfaatkan sebagai aktivitas sosial masyarakat (duduk, beristirahat, olah raga ringan).

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.46**  
**Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017)*
1	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha)	*	*	*	*	67,99
2	luas daratan	*	*	*	*	2523Ha
3	Rasio	*	*	*	*	1 : 0,02

Sumber: )\* Data Diolah oleh Bapelitbang

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil perhitungan Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil analisis foto udara Kota Bukittinggi Tahun 2014 di dapat luasan kawasan yang tertutup pepohonan seluas 67, 99 Ha dari luas daratan Kota Bukittinggi, dengan perbandingan rasio 1 : 0, 02 . Besaran Luasan ini masih jauh dari luasan ideal yaitu 30 % dari luasan daratan. Untuk itu perlu dilakukan penanaman pohon kembali di berbagai kawasan karena pohon memiliki fungsi vital bagi masyarakat. Sebagai fungsi pelestarian misalnya, dapat menyegarkan udara sebagai paru-paru kota, karena dalam fotosintesis tanaman akan menyerap CO2 terutama dari gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Selain itu keberadaan pohon perindang juga menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan kota. Sekaligus sebagai pemandangan alami perkotaan dan mengurangi polusi udara.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat

tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Rasio rumah layak huni untuk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**  
**Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2013 s.d 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah Layak Huni					17914
2	Jumlah penduduk	118260	120491	122621	124715	128783
3	Rasio					1:7,19

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2018*

Jumlah rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sekitar 17.914 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 yang berjumlah sekitar 128.783 jiwa, maka rasio rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sekitar 1 : 7,19.

Upaya penanganan rumah tidak layak huni telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam berbagai macam program dan kegiatan, diantaranya adalah program bedah rumah. Disamping itu juga terdapat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam mencapai *universal acces* yang salah satunya adalah pengurangan kawasan kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2014-2017 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha. Dari luas tersebut, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah 8,81 Ha pada tahun 2017, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2017 adalah sekitar 28,79 %. Persentase ini terus diupayakan berkurang dengan adanya kelanjutan program KOTAKU pada tahun 2018, sehingga diharapkan pada tahun 2019, persentase luasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi dapat berkurang menjadi 0%. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.48**  
**Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017

1	Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	Belum ditetapkan	0	0	0	8,81
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	Belum ditetapkan	30,6 Ha	30,6 Ha	30,6 Ha	21,79 Ha
3	Persentase	Belum ditetapkan	0%	0%	0%	28,79%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pada tabel diatas terlihat luas pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2017 yakni sebesar 8,81 Ha dengan persentase 28,79 %.

Disamping itu, penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat, serta dana dari sumber-sumber lainnya baik di pusat maupun daerah melalui APBD.

#### a. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.49**  
**Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Kawasan Kumuh	Belum ditetapkan	30,6 Ha	30,6 Ha	30,6 Ha	21,79
2.	Luas Wilayah	Belum ditetapkan	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha
3.	Persentase	Belum ditetapkan	1,21%	1,21%	1,21%	0,09%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dari tabel diatas persentase luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21,79 Ha atau sebesar 0,09 %. Hal ini merupakan gambaran berhasilnya program terhadap pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan.

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kinerja pelayanan urusan tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator. Adapun indikator sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

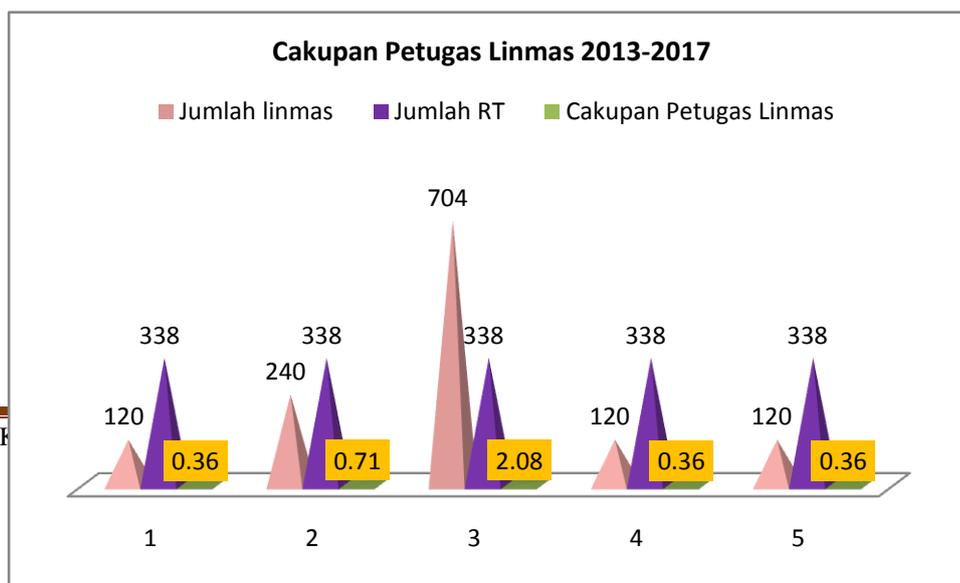
Kondisi dari petugas Linmas yang ada di kota Bukittinggi dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.50**  
**Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2013-2017**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Linmas	120 orang	240 orang	704 orang	120 orang	120 orang
2.	Jumlah RT	338	338	338	338	338
3.	Cakupan Petugas Linmas	0.36	0.71	2.08	0.36	0.36

Sumber: Kantor Satpol PP, diolah

**Gambar 2.7.**



Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 terjadi kenaikan cakupan petugas Linmas karena sudah dibentuk 10 orang per kelurahan, namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 2,08. Hal ini disebabkan karena adanya Pemilihan umum yang mengharuskan adanya linmas pada masing-masing TPS. Sampai tahun 2017 terjadi penurunan kembali petugas linmas.

Sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka kondisi idealnya petugas linmas itu ada 1 orang per RT. Sehingga jumlah yang ideal untuk kota Bukittinggi untuk petugas linmas adalah sebanyak RT yang ada yaitu 338 orang. Jadi untuk kondisi saat ini petugas linmas yang ada belum cukup memadai. Diperlukan sosialisasi mengenai peran fungsi Linmas mulai tingkat kecamatan maupun kelurahan.

**b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)**

Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk itu tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan merupakan salah satu indikator dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

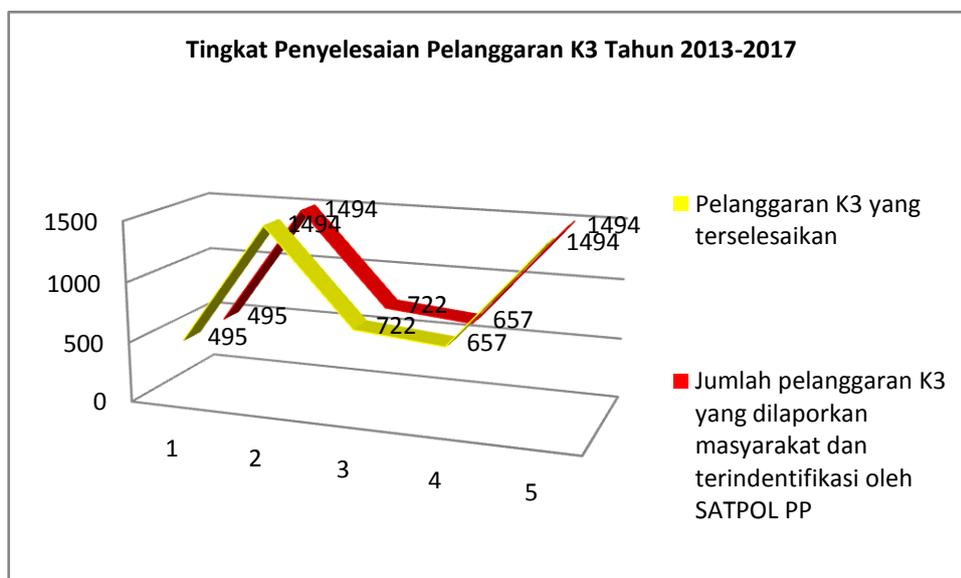
**Tabel 2.51**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	495	952	722	657	1.494
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	495	952	722	657	1.494

3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber: Kantor Satpol PP

**Gambar 2.8.**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017**



Berdasarkan data diatas dapat dilihat setiap tahunnya pelanggaran K3 dapat terselesaikan dengan tuntas, walaupun setiap tahunnya jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Artinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik.

### c. Penegakan PERDA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase penegakan PERDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.52**  
**Persentase Penegakan PERDA Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	495	952	722	657	1.494
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	495	952	722	657	1.494
3	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Satpol PP

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran Perda dengan Jumlah penyelesaiannya penegakan perda sama jumlahnya. Dan jumlah pelanggaran Perda tersebut sama dengan jumlah penyelesaian pelanggaran K3. Karena yang baru dikerjakan oleh Satpol PP baru Perda Trantibum saja. Sementara itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP bukan hanya ditugaskan untuk penegakan Perda Trantibum saja, namun idealnya Satpol PP menegakkan seluruh Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ada.

#### **d. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (selanjutnya disingkat WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdiksi urusan pemerintahannya. PPK adalah salah satu alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian / pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2017 sebanyak 6 unit, berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia (IFCAA)* yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil. Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebanyak 119.183 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 12 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

Cakupan layanan bencana kebakaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah :

**Tabel 2.53**  
**Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	4	4	5	6	6
2.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804
3.	Rasio (1:2 x 100%)	33,82%	33,19%	32,62%	48,31%	47,31%

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018*

Jumlah mobil pemadam kebakaran ini masih separuh dari jumlah ideal kendaraan pemadam kebakaran yang seharusnya, berdasarkan penjelasan diatas masih terdapat kekurangan sebanyak 7 unit lagi. Kekurangan ini diharapkan dapat segera dipenuhi sehingga Cakupan Layanan Bencana Kebakaran di Kota Bukittinggi juga dapat ditingkatkan.

**e. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran adalah :

**Tabel 2.54**  
**Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	53	98	116	115	92
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	53	98	116	115	92
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kebakaran, 2018*

Berdasarkan Permendagri nomor 69 tahun 2012, Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2016 minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, jauh diatas target. Walaupun target telah terpenuhi, namun tetap perlu ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

**6. Sosial**

**a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun social secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan.
5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Lanjut usia terlantar
7. Penyandang disabilitas
8. Tuna susila
9. Gelandangan
10. Pengemis
11. Pemulung
12. Kelompok minoritas
13. Bekas warga binaan pemasyarakatan (BWBP)
14. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
15. Korban penyalahgunaan NAPZA
16. Korban trafficking
17. Korban tindak kekerasan
18. Pekerja migran bermasalah (PMBS)
19. Korban bencana alam
20. Korban bencana sosial
21. Perempuan rawan sosial ekonomi
22. Fakir miskin
23. Keluarga bermasalah sosial psikologis
24. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
25. Komunitas Adat Terpencil

Namun untuk saat ini kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bukittinggi hanya ditemui sebanyak 20 jenis PMKS di luar Gelandangan, Korban

Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Sosial, keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

Jumlah pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebanyak 22.523 Jiwa, yang telah dijadikan di beberapa intervensi program bantuan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Dan saat ini sedang dilakukan verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018. Yang diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid yang dapat digunakan sebagai intervensi program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS di Kota Bukittinggi.

## 7. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

### a. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Perkembangan lulusan S1/S2/S3 dari tenaga kerja kita lihat pada uraian tabel berikut :

**Tabel 2.55.**  
**Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	7.518	6.328	7.443	8.544	10.063
2.	Jumlah lulusan S2/S3	429	140	812	978	1.322
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	7.947	6.468	8.255	9.522	11.385
5.	Jumlah penduduk	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	6,85	5,47	6,85	7,77	9,13

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

#### **b. Kesempatan Kerja**

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja aktif dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang merupakan pengangguran terbuka. Diluar dari itu adalah merupakan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk yang masih bersekolah, rumah tangga, purnakarya dan lain-lain. Untuk pembangunan kesempatan kerja sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya informasi seluas luasnya mengenai ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mendapatkan pekerjaan/tenaga kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran.

#### **c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas dibawah laki-laki.

Salah satu indikator Pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang diduki perempuan di DPRD.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Indikator terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.56.**  
**Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2016 dan 2017 Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	2016	2017
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	46,04%	59,37%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0,03%	0,02%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0,07%	0,06%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,10%	60,10%

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018*

Berdasarkan tabel di atas untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan persentase sebesar 13,33% saat ini terdapat sebanyak 1.636 orang. Sedangkan untuk proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dan keterlibatan perempuan di DPRD masih tergolong sedikit. Dari 25 orang anggota DPRD hanya 2 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD.

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil, terjadi penurunan pada tahun 2017. Selanjutnya untuk partisipasi angkatan kerja perempuan tiap tahunnya masih sama di angka 60,10%. Dari keseluruhan angka indikator tabel di atas dapat dilihat secara umum keterlibatan perempuan di berbagai unsur sudah mulai banyak, hal ini menandakan bahwa pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi sudah cukup baik.

#### **d. Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif

secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perserorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya.

**e. Ketersediaan Pangan Utama**

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian meskipun agak terbatas luasnya. Dari 3 ( tiga ) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 ( dua ) kecamatan lainnya.

Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.57**  
**Ketersediaan Pangan Utama**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017**

NO	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk	118.260	120.469	122.621	124.715	119.183
2.	Produksi Padi	4.463,33	5.053,18	4.200	5.227	5.444,82
3.	Ketersediaan pangan utama (rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)/jumlah penduduk x 10%)	3,77	4,19	3,43	4,19	4,57

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018*

Dari tabel diatas jumlah Produksi Padi pada tahun 2017 di Kota Bukittinggi sebanyak 5.444,82 Ton/tahun, jumlah ini sebagian besar diproduksi dari sentra pertanian yang masih cukup luas yaitu berada di kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Namun ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi sekitar 75%-78% masih tergantung dari daerah di luar Kota Bukittinggi, hanya 21%-24% berasal dari produksi sendiri.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, sejak tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi

hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

#### **f. Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Sebagai unit kerja baru, bidang pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi. Per 31 Desember 2016 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 389 persil tanah dengan luas 1.249.161,76 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 389 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 149 persil dengan luas 494.921,80 M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 240 persil dengan luas 754.239,96 belum memiliki sertifikat.

#### **g. Lingkungan Hidup**

Kinerja pembangunan di Kota Bukittinggi pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari indikator penanganan sampah dan persentase penduduk berakses air minum. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat memusnakan sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut:

##### **1) Persentase penanganan sampah**

Sampah merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh setiap kota yang sedang berkembang. Penanganan sampah yang tidak tepat dan tidak terkendali akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten dan memiliki komitmen yang tegas terhadap pengelolaan sampah tersebut. Upaya yang dilakukan secara rutin yaitu penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk, billboard di lokasi TPS dan di kelurahan, bahkan razia yang dilakukan bersama tim Gabungan. Kondisi kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang cukup banyak setiap harinya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	143.267	271.089	*	412	426
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	168.630	108.73	*	432	448
3.	Persentase	84.95%	90	*	95,37 %	95,08%

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2017*

\* *Data tidak tersedia*

Dilihat dari tabel di atas, semenjak tahun 2013 volume sampah cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume sampah ini terjadi karena produksi sampah tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Bukittinggi itu sendiri tapi juga merupakan sampah “eksport” dari masyarakat yang ada disekitar Kota Bukittinggi, seperti daerah tetangga.

Penyebab lain dari tingginya produksi sampah ini adalah produk yang dikonsumsi masyarakat semuanya memakai kemasan baik itu berupa plastik, kertas, karton dll. Dilihat dari Jumlah persentase produksi sampah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu di Kota Bukittinggi diperlukan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah terutama pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah dan organik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah income/pendapatan masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan sampah karena masyarakat itu sendiri belum disiplin terhadap penanganan sampah, seperti tidak disiplin membuang sampah pada jam-jam yang sudah ditentukan pada setiap TPS, membuang sampah tidak meletakkan pada bak yang sudah disediakan. Disamping itu budaya malu untuk membuang sampah sembarangan juga belum ada baik masyarakat kota Bukittinggi maupun pengunjung yang masuk ke Kota Bukittinggi.

## 2) Persentase cakupan area pelayanan

Sumber timbulan sampah Kota Bukittinggi ada beberapa macam yaitu sampah rumah tangga, sampah taman, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah kawasan wisata, sampah terminal, dan sampah pusat keramaian lain. Penanganan sampah di Kota Bukittinggi masih menjadi permasalahan karena Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA sendiri dan memanfaatkan TPA regional yang lokasinya berada di Kota Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 45 Km dari Kota Bukittinggi dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Sistem pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi menggunakan cara:

1. Pengumpulan, pewadahan, dan pengangkutan ke TPA Regional.
2. Pengumpulan, kegiatan yang dilakukan masyarakat mengangkut sampah dari rumah ke TPS/kontainer sebagai wadah sampah, kemudian pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dijalan dan tempat-tempat umum.
3. Pengangkutan dari TPS/ kontainer sampah oleh petugas kebersihan dengan kendaraan truk sampah.
4. TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di Kota Payakumbuh dalam upaya pelayanan dibidang persampahan

Daerah pelayanan untuk persampahan Kota Bukittinggi adalah semua cakupan wilayah pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk area daerah pelayanan sektor persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.59**  
**Daerah Pelayanan Sektor Persampahan**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km <sup>2</sup> /Ha)	2523,9 Ha				

2.	Luas area kota (Ha)	2523,9 Ha				
3.	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa cakupan pelayanan persampahan sudah menjangkau 24 kelurahan.

### 3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio Tempat Pembuangan sampah menunjukkan perbandingan jumlah tempat pembuangan sampah dan daya tampungnya terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi rasionya berarti kinerja pembangunan Dinas Lingkungan Hidup serta SKPD terkait lainnya dalam penyediaan sarana persampahan semakin baik dalam meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2.60**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah daya tampung TPS	371,7	262,5	405,1	243,1	31.937,5
2	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804
3	Persentase	0,31%	0,22%	0,33%	0,19%	0,025%

Sumber: BDA 2017

Berdasarkan tabel diatas rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk pada dari tahun 2013-2014 ada kecenderungan menurun sebagai akibat pengolahan sampah oleh masyarakat terutama untuk sampah rumah tangga menjadi sampah organik justru mulai meningkat karena adanya program pengolahan sampah rumah tangga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.

Berdasarkan kondisi dilapangan pada tahun-tahun terakhir ini yaitu adanya pengurangan jumlah TPS dilapangan serta adanya razia terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditetapkan. Pembongkaran TPS ini dilakukan karena adanya keresahan masyarakat terhadap perilaku warga yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang membuang sampah ke TPS secara sembarangan, sehingga banyak sampah yang berserakan dan bertaburan hingga ke jalan yang membuat pemandangan kurang baik di

sekitar TPS. Selain itu dengan adanya razia-razia yang dilakukan oleh petugas dan warga disekitar TPS diharapkan tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan dan memberikan efek jera terhadap warga yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Untuk kedepannya diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bukittinggi dengan pemerintah Kabupaten Agam dalam penanganan sampah untuk daerah disekitar Kota Bukittinggi.

#### **4) Indeks Pencemaran Air (IPA) (indeks)**

Kota Bukittinggi dilalui oleh sungai Batang Agam yang mengalir 4 (empat) Kabupaten/ Kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan pemantauan terhadap kualitas Batang Agam yang dilakukan dari tahun 2011 maka, kualitas air sungai Batang Agam mengalami penurunan dari tahun 2011 dari Indeks Pencemaran Air (IPA) 81,58 kategori baik menjadi 61,40 kategori kurang di tahun 2015. Parameter yang sangat tinggi adalah total coli dan e-coli disamping parameter lain yang juga diatas ambang batas (MBAS detergen, BOD5, COD, pospat, nitrit, besi ). Sumber pencemar utama dari parameter tersebut adalah Limbah Cair Domestik (Rumah Tangga , Pasar, Hotel dan Restoran, Rumah Sakit, Industri skala kecil dan Rumah Potong Hewan) serta sampah padat domestik.

Aliran Batang Agam ini terdapat saluran induk dari Birugo Puhun menuju ke Batang Agam dan aliran induk dari Birugo ke Jembatan Besi, hingga pertemuan dengan Batang Agam di depan rumah potong hewan. Daerah pelayanan Batang Agam mempunyai jaringan drainase yang cukup padat, biasa digunakan untuk saluran pembuangan air hujan dan limbah.

Sungai Batang Agam lebih banyak beban pencemaran selain dari rumah tangga adalah Pasar Bawah, RPH yang belum memiliki IPAL, dari pabrik tahu sebanyak 3 buah disepanjang aliran.

Beban pencemaran sungai adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air sungai. Beban pencemaran juga merupakan besaran satuan berat zat pencemar dalam satuan waktu. Dari hasil laporan survey mutu badan air Kota Bukittinggi, maka dihitunglah beban pencemaran air di Batang Agam. Debit air Batang Agam adalah 176,8 l/detik, dengan beban BOD pada titik sampel satu sebesar 40,90 kg/hari dan COD sebesar 162 kg/hari, pada titik sampel dua BOD sebesar 49,56 kg/hari dan COD sebesar 243,27 kg/hari, dan pada titik sampel tiga BOD sebesar 56,56 kg/hari dan COD 56,56 kg/hari. Di Kecamatan

Mandiingin Koto Selayan, tepatnya di Kelurahan Cimpago Ipuah apabila hujan turun akan mengakibatkan genangan air yang memuat kekhawatiran warga sekitar

### **5) Indeks Pencemaran Udara (IPU)**

Kualitas udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas. Kualitas udara ambien tergantung konsentrasi zat- pencemar baik berupa gas maupun partikel debu di udara. Penurunan kualitas udara ambient, terutama pada jam-jam sibuk di jalan padat lalu-lintas. Pencemaran udara dapat berasal dari sumber pencemar seperti:

- a. Sumber pencemar yang bergerak (aktifitas transportasi),
- b. Sumber pencemar yang tidak bergerak (aktifitas kegiatan usaha/ industri)
- c. Sumber pencemar dari pembakaran sampah.
- d. Sumber pencemar aktifitas rumah tangga.

Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan turunnya kualitas udara perlu dilakukan upaya pemantauan kualitas udara secara berkala dan terus menerus sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemantauan kualitas udara ambien tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kabupaten/kota yang menjadi titik pantau. Titik pantau di Kota Bukittinggi berlokasi di Tugu Monumen Polisi Wanita mewakili kawasan padat lalu lintas. Pemantauan dilakukan terhadap 5 (lima parameter pada masing-masing titik pantau yaitu SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub> dan TSP dan Pb (untuk kawasan padat lalu lintas).

Berdasarkan hasil analisa laboratorium, kondisi udara di Kota Bukittinggi untuk semua parameter baik SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub> dan TSP dan Pb masing tergolong baik karena hasil analisa laboratorium untuk masing-masing parameter berada dibawah baku mutu.

## **h. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama 5 (lima) tahun terakhir penduduk Kota Bukittinggi selalu meningkat. Begitu juga dengan perkembangan penduduk laki-laki, yang cenderung selalu melihatkan angka kenaikan. Kelompok umur mayoritas terlihat pada kelompok umur laki laki 0-4 tahun, yakni 6.400 jiwa dan disusul kelompok umur laki laki usia 15-19 tahun, yaitu sejumlah 5.921 jiwa. Jika kita kaji pada dua kelompok tersebut, maka ini artinya, bahwa pemerintah daerah harus banyak memberikan perhatian pada ibu dan bayi. Memperbanyak fasilitas pendidikan kelompok usia dini agar semua murid laki laki tersebut dapat mengikuti pendidikan di usia dini, yang akan menjadi cikal bakal kelompok produktif sebagaimana terkenal dengan bonus demografi.

### **1) Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan Penduduk**

Dari Sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan jumlah penduduk yang wajib KTP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61**  
**Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan**  
**Penduduk yang Wajib Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Penduduk yang telah memiliki KTP	30.645	48.108	66.375	73638	78141

2	Penduduk wajib KTP	53.294	85.071	85.666	81.345	82.723
3	Rasio	57,50	56,55	77,48	90.5	94.5

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Dari data yang ada terlihat, bahwa dari tahun ke tahun masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, dengan rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Pada tahun 2016 dan 2017 tergambar bahwa rasio penduduk yang telah memiliki KTP terhadap penduduk yang wajib KTP semakin meningkat. Pada tahun 2017 terlihat rasionya adalah 94,5. Untuk menindaklanjuti hal di atas, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Dalam hal ini, dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya melengkapi administrasi kependudukan antara lain KTP, melakukan razia kependudukan, serta memperbanyak himbauan kepada seluruh stakeholder kota agar menyertakan persyaratan KTP dalam setiap pengurusan administrasi. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

#### **i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

##### **1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut:

**Tabel 2.62**  
**Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mandiingin Koto Selayan	425	425	425	425	425
2.	Guguak Panjang	388	388	388	388	388
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	288

*Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi*

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiingin Koto Salayan yakni 425, disusul Kecamatan Guguk Panjang 388 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 288. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

## 2) Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop). LSM menjalankan berbagai jasa dan fungsi kemanusiaan, membawa keprihatinan dalam masyarakat kepada pemerintah, memonitor

berbagai kebijakan dan mendorong partisipasi politik dalam tataran masyarakat. Berikut data Jumlah LSM yang ada di Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.63**  
**Jumlah LSM Tahun 2016 s.d 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah LSM	144	152	155	160	136

*Sumber : Dinas Kesbangpol*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah LSM mengalami penurunan pada tahun 2017, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik memberlakukan persyaratan untuk pendirian suatu organisasi. Hal ini berdampak pada organisasi tersebut yang tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga banyak oganisasi yang tidak melakukan pendaftaran ulang untuk tercatat sebagai anggota.

### **3) PKK Aktif**

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim Pengerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

### **4) Posyandu Aktif**

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

Jumlah pos yandu aktif yang tersebar di 3 ( tiga ) kecamatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.64**  
**Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016 s.d 2017**

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	132	132	132	132	132

*Sumber : Dinas Kesehatan*

Terlihat pada data berikut, jumlah pos yandu aktif konstan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah yang konstan lebih diarahkan dengan peningkatan kualitas dari pos yandu yang telah ada. Harapan yang terpenting adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

#### **j. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **1) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana. Rata-rata jumlah anak juga menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Menurut data statistik Kota Bukittinggi tahun 2016 jumlah anak-anak sebanyak 29.375 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 28.616 jiwa, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1 s.d. 2 orang per keluarga. Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Hal ini menggambarkan bahwa program keluarga berencana telah hampir mencapai sarannya yaitu 2 orang anak lebih baik. Selain itu juga digalakkannya program KB untuk laki-laki, merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan dalam menurunkan angka pertambahan penduduk.

##### **2) Rasio Akseptor KB**

Rasio Akseptor KB menggambarkan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 dan 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
	<b>Tahun 2016</b>					
1	Guguk Panjang	5897	1241	21.04	3685	63.49
2	Mandiingin Koto Selayan	6856	1277	18.62	4120	60.09

3	Aur Birugo Tigo Baleh	3591	834	23.22	2283	63.58
	Total	16344	3352	20.51	10088	61.72
	<b>Tahun 2017</b>					
1	Guguk Panjang	5932	1550	26.13	3784	63.79
2	Mandiingin Koto Selayan	6943	1382	19.90	4325	62.29
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3580	932	26.03	2387	66.68
	Total	16455	3864	23.48	10496	63.79

Sumber : Dinas DP3APPKB

Pada tahun 2017 tercatat jumlah akseptor KB yang aktif sebanyak 10.496 orang, sedangkan jumlah pasangan usia subur berjumlah 16.455 pasang. Rasionya adalah 63,79%. Dapat diartikan bahwa terdapat sebanyak 63,79% Pasangan Usia Subur menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB. Semakin tinggi persentase angka absolutnya berarti program KB semakin dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya program KB ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara maksimal. Agar usaha ini berhasil maka program KB perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang lebih efektif.

#### k. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, maka kinerja pelayanan urusan perhubungan di kota Bukittinggi tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Keur Angkutan Umum, Jumlah Terminal Bis, Pemasangan rambu-rambu dan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

##### 1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dengan luas wilayah Kota Bukittinggi yang terbatas (seluas 25,239 Km<sup>2</sup>), Kota Bukittinggi hanya melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi pada satu terminal dengan penumpang bis dari tahun 2013 sampai tahun 2017 seperti tabel berikut:

**Tabel 2.66**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	2.005.866	396.846	396.846	362.563	*
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	514.725	284.528	284.528	177.677	*
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	-	-	-	-	
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	-	-	-	-	
5.	Total Jumlah Penumpang	2.520.591	681.374	681.374	540.240	

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

\*Data dari SKPD sampai bulan Juni 2016, Terminal Aur kuning 2017 sudah menjadi kewenangan propinsi.

Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Disamping angkutan umum juga ada angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran yang juga berkembang pesat di Kota Bukittinggi.

Hal ini menunjukkan kecenderungan orang yang berkunjung ke Bukittinggi selalu meningkat, namun cenderung menggunakan jasa angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.

## 2) Rasio Izin Trayek

Untuk melayani masyarakat Kota Bukittinggi, semenjak tahun 2013-2017 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.67**  
**Rasio Izin Trayek Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24

2.	Jumlah penduduk	118.260	120.469	122.621	124.715	124.715
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dishub Kota Bukittinggi, BDA 2017

Dari tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak terjadi peningkatan izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan, ini berarti tidak ada pembukaan trayek angkutan umum baru di dalam Kota Bukittinggi.

### 3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengawasan dan penerapan pengujian kir angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi harus diperketat demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum. Perkembangan penumpang umum dan bus umum serta yang dilakukan uji kir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.68**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Angkutan umum	922	742	539	539	539
2.	Jumlah Uji Kir	1.305	1.130	1.639	1.734	1.734
<b>RASIO</b>		70,75	65,66	32,88	31,08	31,08

Sumber: Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase kendaraan umum yang melakukan uji kir pada tahun 2017 adalah sebanyak 31,08%. Uji kir kendaraan umum ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dengan artian 1 (satu) kendaraan umum akan melakukan uji kir sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Jumlah kendaraan umum yang wajib kir adalah 539 yang terdiri dari angkutan umum perkotaan, taksi dan bus.

### 4) Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

Di Kota Bukittinggi hanya terdapat 1 (satu) terminal, yaitu terminal tipe A Simpang Aur, Jumlah terminal bis, Pelabuhan Laut dan udara dari tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.69**  
**Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2017

Semenjak tahun 2016 terminal Simpang Aur telah diserahkan ke Pemerintah Pusat karena Terminal Tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 2017 tidak adanya data terminal untuk wilayah kota Bukittinggi.

#### 5) Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014.

**Tabel 2.70**  
**Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	-	-	-	-	621
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	-	-	-	-	1.500
3.	Persentase	-	-	-	-	0.414
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.121</b>

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2017

Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di kota Bukittinggi yang tercatat menurut data-data dari Dinas Perhubungan adalah 621 untuk Jumlah pemasangan rambu-rambu, 1,500 untuk Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia. Sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, data tidak tercatat.

#### 6) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dibawah ini adalah tabel yang menampilkan panjang jalan yang adalah di kota Bukittinggi dengan jumlah kendaraan yang melewatinya.

**Tabel 2.71**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang jalan	198,18	194,11	192,99	192,99	164,48
2.	Jumlah kendaraan	558	424	538	539	539
<b>Persentase</b>		0.355	0.458	0.358	0.358	0.305

*Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2017*

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan di kota Bukittinggi di tahun 2017 adalah 0,305 % dengan panjang jalan 164,48 km dan Jumlah kendaraan 539 unit.

#### **a. Komunikasi Dan Informatika**

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bukittinggi.

#### **7) Kelompok Informasi Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan, maka perlu dilaksanakan dan dikembangkan dalam elemen masyarakat suatu kelompok yang dapat memberikan informasi yang tepat dan menyeluruh, kelompok informasi ini disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok sosial masyarakat yang dibentuk karena kebutuhan masyarakat akan informasi yang selalu berkembang dimana legalitas keberadaan ini disahkan dengan SK pimpinan kelurahan atau kecamatan. Kelompok ini muncul dalam komunitas kehidupan atau kumpulan individu yang mempunyai kesamaan

tujuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintah..

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga komunikasi pedesaan yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. KIM dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan dinas-dinas di tingkat Kota. KIM yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. KIM juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM untuk Kota Bukittinggi sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.72**  
**Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2017**

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiangan Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2018*

*CTT. Cakupan KIM untuk Kecamatan telah 100% hanya saja belum semua kelurahan dalam kecamatan tersebut yang membentuk KIM*

Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bukittinggi sampai Tahun 2018 hampir mencakup seluruh Kecamatan, untuk Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah dibentuk di Kelurahan Koto Selayan, Gulai Bancah, Garegeh, Campago Ipuah, Puhun Pintu Kabun, dan Manggis Gantiang, untuk tahun selanjutnya perlu pengembangan ke Kelurahan Pulai Anak Aia, Kubu Gulai bancah dan Campago Guguak Bulek. Pengembangan KIM di Kecamatan Guguak Panjang meliputi Kelurahan Kayu Kubu, Bukik Cangang Kayu Ramang, Benteng Pasar Ateh, dan Bukik Apit Puhun, dan untuk tahun selanjutnya perlu pembentukan KIM di Kelurahan Tarok Dipo, Pakan Kurai dan Aua Tajungkang Tengah Sawah. Sementara itu Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh telah membentuk KIM di Kelurahan Aua Kuning, Ladang Cakiah, Sapiran, dan Belakang Balok, dan ditahun berikutnya perlu dibentuk di

Kelurahan, Birugo, Pakan Labuah dan Parit Antang.

## 1. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Salah satu pelaku ekonomi yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah keberadaan dari Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, dimana pada masa krisis pun KUKM mampu bertahan dan tetap tumbuh.

### 1) Persentase Koperasi aktif

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi aktif adalah koperasi dalam 2 ( dua ) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) atau koperasi yang dalam 2 ( dua ) tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**  
**Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015*	2016*	2017*
1.	Jumlah koperasi aktif	82	81	84	87	87
2.	Jumlah koperasi	101	100	100	105	92
3.	Persentase koperasi aktif	81,18	81,00	82,00	82,8	94,6%

*Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2015*

*\*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi*

Keberadaan koperasi di Kota Bukittinggi cukup banyak, dimana pada tahun 2013 terdapat 101 koperasi yang terdaftar di Kota Bukittinggi, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kekurangan satu koperasi sehingga koperasi yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 100 koperasi. Pada tahun 2016 terjadi penambahan Koperasi di Kota Bukittinggi menjadi 105 koperasi, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi mengalami penurunan kembali. Sehingga persentase koperasi aktif untuk tahun 2017 sebesar 94,6 %.

### 2) Jumlah UKM Non BPR / LKMUKM

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.

Perkembangan jumlah UKM di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.74**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	7.803	9.433	9.527	9.302	9.302
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	7.754	9.384	9.478	9.253	9.253

*Sumber: Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi*

Jumlah UKM di Kota Bukittinggi cukup banyak, hal ini dipicu oleh keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota Perdagangan dan Jasa serta pariwisata. Dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi, sektor Perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling dominan. Perkembangan UKM di Kota Bukittinggi selalu meningkat setiap tahunnya, selain permintaan pasar, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga sangat intensif dalam menumbuh kembangkan UKM tersebut melalui pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Perkembangan UKM non BPR/LKM pada tahun 2013 sebanyak 7.754 pada tahun 2017 menjadi 9.253 unit.

### 3) Jumlah BPR/LKM

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Jumlah BPR dan LKM di Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d. 2017 tidak mengalami perubahan, dimana jumlah BPR sebanyak 3 BPR dan Jumlah LKM sebanyak 46 LKM.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah BPR / LKM Tahun 2013 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2.	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

*Sumber: Bagian Perekonomian Setda*

### **m. Penanaman Modal**

Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

#### **1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)**

Penanaman modal dapat dibagi atas 2 (dua) bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Jumlah Investor PMDN/PMA pada tahun 2017 seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.76**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2017**

<b>Tahun</b>	<b>PMDN</b>	<b>PMA</b>	<b>Total</b>
Akumulasi sampai Tahun 2017	12	7	19

*Sumber: Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi, 2018*

Hingga tahun 2017 di Kota Bukittinggi terdapat 19 investor yang terdiri dari 12 Penanaman Modal Dalam Negeri dan 7 Penanaman Modal Asing seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

#### **2) Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

Nilai investasi berskala nasional untuk PMDN tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya. Sedangkan untuk PMA adalah total nilai investasi diatas 10 milyar diluar tanah dan bangunan.

Jumlah nilai investasi PMDN/PMA sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2017**  
**Kota Bukittinggi**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2017	12	6.987.128.748.080	7	21.438.200

*Sumber: Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi*

Hingga tahun 2017, jumlah investasi di Kota Bukittinggi dari 12 investor PMDN tercatat sebesar Rp. 6.987.128.748.080 dan dari 7 investor PMA tercatat sebesar US\$21.438.200. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai upaya seperti promosi investasi dan juga meningkatkan iklim investasi serta peningkatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **n. Kepemudaan dan Olah Raga**

Kinerja pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2013–2017 di Kota Bukittinggi terdapat beberapa indikator seperti yang akan diuraikan berikut ini. Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

##### **1) Jumlah Organisasi Pemuda**

Kelompok pemuda yang kreatif biasanya sering berkumpul hingga membentuk organisasi sesuai dengan kreatifitas mereka dan menyusun suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu organisasi pemuda juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kepemudaan. Semakin banyak organisasi kepemudaan di suatu wilayah maka menggambarkan bahwa tingginya peran serta pemerintah daerah dalam membina organisasi kepemudaan. Jika banyaknya aktifitas pemuda yang terorganisir akan

mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada masing-masing kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 2.78.**  
**Jumlah Organisasi Pemuda**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mandiangan Koto Selayan	10	10	10	25	25
2.	Guguk Panjang	14	14	14	19	19
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6	6	6	24	24
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi, 2018

Tahun 2017 jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di Kota Bukittinggi sebanyak 68 yang tersebar pada 3 kecamatan. Organisasi terbanyak terdapat pada wilayah kecamatan Mandiangan Koto Selayan dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Disini terlihat tingginya minat pemuda untuk berorganisasi dan tingginya peran pemerintah dalam memfasilitasi aktifitas pemuda sehingga mereka eksis pada setiap kegiatan. Pada Kecamatan ABTB dan Guguk Panjang juga hampir merata, (24 dan 19 organisasi pemuda). Namun demikian diharapkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan pada khususnya berupaya mengajak para pemudanya untuk berorganisasi sehingga program pemerintah juga dapat tersalur melalui program organisasi mereka.

## 2) Jumlah Kegiatan Olahraga

Organisasi yang ada, jika kurang atau tidak ada melakukan kegiatan, sama saja dengan organisasi yang sia-sia. Harapan kita tentunya setiap organisasi yang ada selalu beraktifitas sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi tersebut. *Event* yang paling sering dilakukan oleh organisasi pemuda adalah di bidang keolahragaan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Sangat banyak *event* keolahragaan yang dilakukan sampai ketingkat nasional bahkan internasional. Jika kita selalu melakukan pembinaan yang rutin terhadap kegiatan olahraga dan dalam mencari bibit dan bakat seseorang di bidang keolahragaan, niscaya di Kota Bukittinggi akan bertaburan insan olahraga yang berpestasi.

Perkembangan kegiatan keolahragaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.79.**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mandiingin Koto Selayan	3	3	3	1	2
2.	Guguk Panjang	3	3	3	2	3
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	5	5	1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi*

Selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat dari data bahwa di Kota Bukittinggi cukup banyak kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan dari organisasi kepemudaan yang ada. Jika diambil rata-rata perbulan maka terdapat 2 *event* olahraga yang dilakukan masing-masing kecamatan untuk memberdayakan para pemuda dibidang olahraga. Selain bakat mereka tersalur, maka yang paling penting adalah para pemuda di Kota Bukittinggi selalu disibukkan dengan kegiatan positif sehingga diharapkan pengaruh negatif terhadap lingkungan akan dapat ditekan terus.

Sarana dan prasarana olah raga juga harus menjadi perhatian pemerintah. Meningkatkan dan memperbaharui sarana yang ada sesuai dengan perkembangan keolahragaan juga menjadi prioritas program dan kegiatan selanjutnya

#### **o. Statistik**

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Dari beberapa dokumen dan data tentang informasi pembangunan di Kota Bukittinggi yang selama ini dikerjasamakan penyusunannya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Badan Pusat Statistik antara lain Buku Bukittinggi Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi dan Statistik Daerah. Mulai tahun 2014 sudah merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi dan tidak lagi dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, sedangkan untuk kebutuhan data masih didukung oleh dinas instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Semua

dokumen dan data tersebut merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik untuk menyusun sekaligus mempublikasikannya setiap tahun.

Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya dari tahun 2013-2017.

**Tabel 2.80.**  
**Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2013 s.d 2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku "Kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : BPS Kota Bukittinggi*

**p. Persandian**

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

Email sandi adalah system/ perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia yang mana email ini langsung dipantau oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui.

Persentase pemanfaatan Persandian oleh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.81**  
**Pemanfaatan Persandian Tahun 2017**

NO	Nama Alat Sandi	SKPD pemanfaat	Jumlah Total SKPD	% Pemanfaatan	Keterangan
1.	Email Sandi	7	28	29,7%	Terpantau BSSN
2.	Kriptografi	1	28	3,6%	Hanya digunakan oleh Pimpinan Daerah

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2018*

Perangkat daerah yang telah menggunakan alat sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah yang menjadi sasaran oleh alat sandi yang merupakan tanggung jawab dan dioperasionalkan oleh seksi persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi baru sebanyak 7 (tujuh) perangkat daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alat sandi yang digunakan adalah Email Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

#### **q. Kebudayaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan baik urusan pemerintah maupun urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu melestarikan nilai sosial budaya merupakan kewajiban pemerintah/daerah.

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya.

Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan pagelaran seni budaya yang menampilkan atraksi seni budaya masing-masing, sebagaimana

dilaksanakan pada event Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) yang dicanangkan tahun 2000.

### 1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan seni budaya Kota Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai event seni dan budaya dengan mengikut sertakan sanggar atau kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi baik di tingkat regional maupun nasional. Festival atau pagelaran seni budaya yang telah diikuti sebagai berikut:

**Tabel 2.82**  
**Festival Seni dan Budaya yang Diikuti**  
**oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No	Uraian	Tanggal	Tempat	Kelompok Seni
1	Audisi Duta Budaya Minang	18 Mei 2017	Kota Padang	Pelaku Seni
2	Festival Gandorih	20 Mei 2017	Kota Pariaman	Pelaku Seni
3	Gita Bahana Nusantara	09 Juli 2017	Kota Padang	Pelaku Seni
4	Lomba Baca Puisi Perjuangan	08 Agustus 2017	Kota Bukittinggi	Pelaku Seni
5	Lomba Karya Tari Kreasi	28/29 Agustus 2017	Kota Padang	Al-Azhar
6	Payakumbuh Baralek Godang	01 November 2017	Kota Payakumbuh	Pelaku Seni
7	Pendokumentasian Pakaian Minang	03/04 November 2017	Kota Padang	Ibu Pejabat BKT/Bundo Kandung
8	Festival Randai	27 November 2017	Kota Padang	Rabuang Kuniang
9	Pawai Budaya	29 November 2017	Kota Batusangkar	Tim Disdikbud

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari tabel diatas, promosi kebudayaan Kota Bukittinggi khususnya seni tradisional Minangkabau telah dilakukan, namun dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah kota, tidak semua event seni budaya yang diadakan dapat diikuti.

Namun Pemerintah Kota Bukittinggi memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 26 kelompok seni ada di Kota Bukittinggi, yaitu :

**Tabel 2.83.**

### Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	26
2	Guguk Panjang	15
3	Aur Birugo Tigo Baleh	15
	Jumlah	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Keberadaan kelompok seni tradisional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 berjumlah 56 ( lima puluh enam ) kelompok seni tradisional yang tersebar di 3 ( tiga ) kecamatan, dengan jumlah terbesar yaitu pada kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (*panitahan*) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

## 2) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Bukittinggi antara lain *Medan Nan Balinduang* yang terletak di belakang Hotel Jogja, dan *Medan Nan Bapaneh* di daerah Panorama secara berkala menampilkan atraksi seni budaya Minangkabau, sedangkan sarana lainnya yang sering digunakan dalam penyelenggaraan atraksi budaya masih memanfaatkan gedung atau areal terbuka seperti *Sport Hall*, lapangan kantin / Wirabraja, PGSD IKIP dan Aula Perpustakaan Bung Hatta.

Sejak Februari 2016 pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pagelaran atau atraksi seni dan budaya bertempat di pelataran Jam Gadang setiap malam minggu, yang menampilkan kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi. Dengan adanya *event* ini selain mengembangkan bakat dan kemampuan masyarakat terutama generasi muda dibidang seni budaya, diharapkan memberi hiburan baru bagi pengunjung dan memberi tempat bagi kelompok seni dalam mengembangkan kemampuan dibidang seni budaya.

Namun kedepan kiranya perlu ada upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif guna mengapresiasi kreatifitas seni masyarakat khususnya generasi muda

### **3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Undang–undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan Benda Cagar Budaya ini secara umum telah menetapkannya dalam

Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah, diantaranya Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Gua Jepang Panorama (Lobang Jepang), Benteng *Fort de Kock* dan Rumah Kelahiran Bung Hatta, Masjid Surau Gadang (Masjid Jami'), Bangunan Sekolah Rajo (SMA Negeri 2 Bukittinggi) dan beberapa rumah tinggal.

Untuk Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kota Bukittinggi telah dilakukan deliniasi zona inti dan zona penyangga pada *Masterplan* Kota Pusaka Bukittinggi namun hal ini belum berupa ketetapan Walikota.

#### 4) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi

Adapun benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.84.**  
**Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	42
2	Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	11
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	381,818

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah benda, situ dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi berjumlah 42 buah, total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah sebanyak 11 buah dan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 381.818 buah.

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.85**  
**Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No	Uraian	Asal
1	RUDI FAMELA	PELAKU SENI
2	ANGGA SEPTIAWAN	PELAKU SENI
	SURYANI RENANDA PUTRI	PELAKU SENI
3	DEA ANANDA PUTRI	SMA N 2
	RIO SAPUTRA	SMA N 2
	ARIF BUDIMAN	UNP BUKITTINGGI
4	NABILA HAFIZAH (juara I)	SDN 07 KGB
	SUCI MUTIAH. R (juara II)	SDN 14 ATTS
	AILA AZZURA (juara III)	SDN 03 PAKAN KURAI
	RAISA ZAHRA WAHAB (harapan I)	SDN 11 AUR KUNIANG
	SYIFA FAIZAH (harapan II)	SDN 10 SAPIRAN

	SALSABILA DENARA PUTRI (harapan III)	SDN 04 BIRUGO
5	ALIF FARHAN	SMPN 1 BUKITTINGGI
	SALSABILA NADIASMARA	SD AL AZHAR
	JIHAN FITRI SAKINAH	MTSN 1 BUKITTINGGI
	INTAN AULIA IRLIN	MTSN 1 BUKITTINGGI
	M. FURQON ALFADINI	MTSN 1 BUKITTINGGI
6	TIM RANDAI BINAAN DISDIKBUD	RABUANG KUNIANG
7	BERLIANSYAH PUTRI	SMA 1 BUKITTINGGI
8	RIO SAPUTRA	SMK 1 BUKITTINGGI
9	TIM BUDAYA DISDIKBUD	KOTA BUKITTINGGI

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data diatas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi adalah 9 ( sembilan ) buah, yang merupakan karya seni dari anak bangsa yang merupakan pelaku seni di Kota Bukittinggi dan para pelajar dari SD, SMP, MTSn maupun SMA dan SMK yang diseleksi pada saat dilaksanakannya event penampilan karya seni di Kota Bukittinggi.

#### 5) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.86**  
**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu**  
**oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No	Uraian	Lokasi
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Bukittinggi
10	LEMBAGA PERMASYARAKATAN BUKITTINGGI	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
11	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

Terlihat ada 11 buah Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dan menjadi aset yang harus selalu dijaga dalam rangka pelestarian benda-benda budaya dan merupakan juga sebagai sarana daya tarik wisata.

#### **r. Perpustakaan**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2013-2017 di Kota Bukittinggi tergambar pada beberapa indikator yaitu Jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

##### **1) Jumlah perpustakaan**

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perkembangan jumlah perpustakaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.87**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2013 s.d. 2017**

### Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pusat)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	*)	*)	*)	185	185
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemerintah Daerah	*)	*)	*)	49	52
<b>TOTAL PERPUSTAKAAN (1+2)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>235</b>	<b>238</b>

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi*

\*) Data tidak tersedia

Kota Bukittinggi mempunyai 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Masyarakat tidak peduli apakah sebuah perpustakaan milik pemerintah pusat atau tidak, yang penting kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan melalui penyaluran minat baca dapat tersalur melalui sebuah perpustakaan. Tentunya kebutuhan dan budaya minat baca diharapkan tetap meningkat di Kota Bukittinggi. Karena hanya mempunyai 2 (dua) perpustakaan, pemenuhan minat baca masyarakat diperbanyak dengan kegiatan Pustaka Keliling dengan mobil pustaka kelilingnya. Disamping itu keberadaan Pustaka Sekolah turut mendongkrak pemenuhan minat baca bagi para siswa.

#### 2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dan 1 (satu) perpustakaan milik Perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah kita masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat

representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung dalam membaca lebih fokus.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

Kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan pada Tahun 2017, ini dapat menggambarkan semakin tingginya minat baca warga masyarakat bukittinggi yang dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.88**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	*)	*)	3.750	3.801	5749
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	*)	*)	*)	*)	*)
<b>Total pengunjung Perpustakaan (1+2)</b>		<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>3.750</b>	<b>3.801</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

\*) Data tidak tersedia

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 jumlah pengunjung perpustakaan semakin meningkat, dan peningkatan yang signifikan dapat dilihat pada Tahun 2017 sebanyak 5749 orang. Hal ini seiring dengan dibukanya pelayanan pengunjung Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada tahun 2015. Dengan kondisi ini diharapkan budaya minat baca (literasi) ditengah masyarakat Kota Bukittinggi semakin tumbuh meningkat.

Dari data yang ada dapat dilihat tingginya minat baca penduduk Kota Bukittinggi dan penduduk sekitar yang datang memenuhi kebutuhan minat bacanya. Ini berarti bahwa penduduk Kota Bukittinggi sangat tahu bahwa dengan meningkatkan minat baca akan pasti meningkatkan ilmu pengetahuan dan intelektual seseorang.

### 3) Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Bukittinggi, baik itu milik pemerintah pusat maupu daerah dan perpustakaan milik non Pemda dapat tergambat berikut ini :

**Tabel 2.89**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 dan 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)/pusat	186	186
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	49	52
3.	Total Perpustakaan (1+2)	235	238

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Dari data diatas jumlah perpustakaan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 3 unit sehingga pada tahun 2017 berjumlah 238 unit.

#### 4) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung pertahun dan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.90**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun			3.750	3801	5.749
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	63.261	63.261	63.261	63.261	89.598
3.	Total pengunjung Perpustakaan			3.750	3801	5.749

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Dari gambar di atas terlihat bahwa dari Tahun 2017 sejak dibukanya perpustakaan daerah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi kalau dilihat dari populasi yang harus dilayani baru 6,4 % yang memiliki minat baca (minta literasi).

Jadi masih sebagian kecil saja penduduk Kota Bukittinggi yang memanfaatkan perpustakaan daerah ini.

#### 5) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.91**  
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	400	4.938	8.012	8.618	9.881
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	5.408	9.083	11,073	18.326	20.511
3.	Total pengunjung Perpustakaan	-	-	3.750	3.801	5.749

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan*

Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah koleksi buku. Dengan meningkatkan koleksi buku akan menambah minat baca seseorang, karena semakin banyaknya pilihan buku yang ada.

#### 6) Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio Perpustakaan Persatuan Pendudukan merupakan jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Adapun di Kota Bukittinggi rasio perpustakaan Per Satuan Penduduk dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.92**  
**Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perpustakaan	-	-	1	235	238
2.	Jumlah penduduk	63.261	63.261	63.261	63.261	80.598
3.	Rasio	-	-	0,015	3,72	2,66

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Kalau dilihat dari tabel di atas, pada Tahun 2015 dengan jumlah perpustakaan yang baru 1 buah, memperlihatkan rasio sebesar 0,015, sedangkan pada Tahun 2016 sebesar 3,72 dan pada Tahun 2017 menunjukkan penurunan yaitu 2,66.

#### 7) Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun adalah :

**Tabel 2.93**  
**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata pengunjung pertahun	-	-	3.750	3.801	5.749

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari tahun ketahun memang terjadi peningkatan dalam jumlah pengunjung perpustakaan, dan meningkat drastis pada Tahun 2017. Akan tetapi walaupun demikian, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, mencerminkan masih rendahnya daya minat baca masyarakat.

#### 8) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi buku sangat menentukan jumlah pengunjung pada perpustakaan, semakin banyak jumlah buku maka semakin banyak jumlah pengunjung yang datang pada perpustakaan.

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.94**  
**Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	400	4.938	8.012	6.618	9.881

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah koleksi perpustakaan dari tahun ketahun juga mengalami kenaikan, tapi masih belum cukup mampu untuk menarik minat masyarakat Kota Bukittinggi dalam membaca. Sehingga perlu usaha yang lebih keras dalam rangka peningkatan minat budaya baca (minat literasi) ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi.

#### s. Kearsipan

Adapun persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota

Bukittinggi dari Tahun 2013 s/d Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.95**  
**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	2	4	7
2.	Jumlah perangkat daerah	29	29	29	29	29
3.	Persentase	6,90	6,90	6,90	13,79	24,14

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari Tahun 2016 dan 2017 baru terjadi peningkatan dalam jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, sehingga dalam hal persentase dapat digambarkan bahwa telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi.

#### 1) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Pengelola Kearsipan yang kompeten akan dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien. Kalau dilihat peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.96**  
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**  
**Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	2	2

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Hal ini mengakibatkan dalam kualitas dan pelayanan pengelolaan kearsipan di Kota Bukittinggi.

## 8. Layanan Urusan Pilihan

### 1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

### 1) Kunjungan Wisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No.	Wisatawan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mancanegara	32.067	32.501	25.970	27.516	30.412
2.	Domestik	404.145	400.538	434.935	443.244	448.427
<b>JUMLAH</b>		<b>436.212</b>	<b>433.039</b>	<b>460.905</b>	<b>470.760</b>	<b>478.839</b>

*Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2016 & Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, dimana pada tahun 2016 berjumlah 470,760, Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 478.839 wisatawan yang terdiri dari 30.412 wisatawan mancanegara dan 448.427 wisatawan domestik.

### 2. Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobial) untuk kepentingan

manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan.

### 1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi tahun 2013 s/d 2017 dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.98**  
**Produktivitas Padi Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2017	5.480,46	807	67,66
2.	2016	5.227	809	65,33
3.	2015	4.200	633	66,7
4.	2014	5.063	763	64,53
5.	2013	4.463	823	54,24

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2013-2016 & Dinas Pertanian dan Pangan*

Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Pada tahun 2017, dengan luas area tanaman 807 ha dapat memproduksi padi sebanyak 5.480,46 ton atau dengan tingkat produktivitas 67,66 kw/ha, dimana pada tahun sebelumnya tingkat produktivitas 65,33 kw/ha.

Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena penurunan produksi tanaman

Jagung. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2013 s.d. 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.99**  
**Produktivitas Jagung Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2017	73,61	38	43,30
2.	2016	77	32	45,38
3.	2015	104,84	50	67
4.	2014	111,06	58	61,67
5.	2013	84,35	42	76,68

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dan Dinas Pertanian dan Pangan*

Dari tabel diatas terlihat penurunan produktivitas jagung dengan angka tertinggi pada tahun 2013 sebesar 76,68 kw/ha menjadi 43,30 kw/ha pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan berkurangnya areal penanaman jagung mungkin disebabkan berkurangnya minat penduduk terhadap produksi jagung ini.

Produktivitas Ketela Rambat di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya luas area tanaman sehingga produksi ketela rambat juga mengalami penurunan.

Produktivitas ketela rambat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.100**  
**Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2017	1.008,66	31	272,61
2.	2016	1.355	44	307,95
3.	2015	907.20	39	245,19
4.	2014	1.324,18	48	245,19
5.	2013	1.222,94	47	260,22

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2013-2015 dan Dinas Pertanian dan Pangan*

Dari tabel diatas terlihat adanya penurunan produktivitas ketela rambat, dimana pada tahun 2016 merupakan angka tertinggi yang pada tahun 2017 sebesar 272,61 kw/ha. Penurunan ini disebabkan menurunnya luas areal tanaman menjadi 31 ha.

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017 mengalami penurunan karena dipengaruhi dengan luas area tanaman Ketela Pohon tersebut. Perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.101.**  
**Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2013 s.d. 2017**  
**Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2017	284,56	13	218,89
2.	2016	784	12	326,67
3.	2015	367,50	14	367,50
4.	2014	587,92	26	367,50
5.	2013	712,80	18	375,16

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2013-2015 dan Dinas Pertanian dan Pangan*

Dari tabel diatas produktivitas ketela pohon mengalami penurunan pada tahun 2017 berjumlah 218,89 kw/ha yang sebelumnya produktivitas tertinggi pada tahun 2013 berjumlah 375,16 kw/ha.

## 2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik dilihat melalui atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan karakteristik sebuah kota, dimana struktur perekonomiannya tidak lagi bertopang kepada kelompok primer.

Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi tahun 2012 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.102.**  
**Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d. 2016**

No	Kategori	Tahun
----	----------	-------

		2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,51	1,42	1,39	1,35	1,30

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2012 - 2016

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2012 masih berkontribusi sebesar 1,51%, seiring bertambahnya tahun terus tergerus sampai pada tahun 2016 hanya berkontribusi sebesar 1,30%.

Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan pun mengalami penurunan setiap tahunnya. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.103.**  
**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan (2010)**  
**Tahun 2012 s.d. 2016**

No	Sub Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,48	1,38	1,35	1,30	1,24

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2012 - 2016

Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian ini hanya 1,24%, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penurunan 0,06%, yang mana pada tahun 2012 masih berkontribusi sebesar 1,48%.

### 3. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ni menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

#### 1) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.104.**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 s.d. 2016**

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	32,39	32,23	32,71	33,51	33,59

*Sumber : PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016*

Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 33,59% naik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 33,51%.

#### 4. Perindustrian

Pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

##### 1) Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB yang dilihat melalui peranan sektor industri pengolahan mempunyai kecenderungan penurunan setiap tahunnya baik dilihat melalui atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Perkembangan peranan sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2012 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.105**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 s.d. 2016**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*)	2016*)
1.	Industri Pengolahan	8,20	7,76	7,27	6,80	6,56

*Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016*

\*) Angka sementara

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar 6,56% terjadi penurunan 1,64% dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada tahun 2012 kontribusinya masih 8,20%. Sama halnya dengan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami penurunan sebesar 0,96% dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.106**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s.d. 2016**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>*)</sup>
1.	Industri Pengolahan	8,19	7,98	7,80	7,57	7,23

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016

\*) Angka sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 sampai dengan 2016 adanya penurunan dari tahun 2015.

## 9. Penunjang Urusan

### a. Perencanaan Pembangunan

Terdapat enam indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi pada tahun 2017. Dokumen perencanaan dimulai dari RPJPD yang ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.

Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2.107**  
**Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan**  
**Tahun 2017**

NO	INDIKATOR	Tahun 2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada

3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$= \frac{300}{298} \times 100\%$ $= 100,67\%$
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$= \frac{304}{300} \times 100\%$ $= 101,33\%$

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, tahun 2018.

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017. Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017.

#### **b. Keuangan**

Dalam urusan keuangan terdapat tujuh indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan dan Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kota, Penetapan APBD.

Berikut tabel indikator urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 :

**Tabel 2.108.**  
**Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No.	Indikator	Tahun 2017
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP (wajar tanpa pengecualian)
2.	Persentase SILPA	11,93%
3.	Persentase belanja pendidikan	21,01%
4.	Persentase belanja kesehatan	11,24%
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	62,94%
6.	Bagi hasil kota	2,26
7.	Penetapan APBD	Tepat waktu

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintrah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan sebesar 21,01% yang artinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional. Pada tahun 2017, belanja kesehatan Kota Bukittinggi sudah diatas yang diamanatkan UU kesehatan yaitu sudah 11,24%.

Untuk indikator Bagi hasil kota 2,26 dan Penetapan APBD tepat waktu.

### c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

#### 1) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam mengembangkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan.

Kalau dilihat dari rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di dapat dilihat sebagai beriku

**Tabel 2.109.**  
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam				

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jam dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dapat dilihat masih kurangnya kesempatan dari pegawai untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

## 2) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualiatas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Bukittinggi di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.110**  
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**  
**Tahun 2016 dan 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	162	365
2.	Jumlah total ASN	2923	2795
3.	Persentase	5,64	13,10

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dari data tersebut di atas pada Tahun 2016 masih 5,54 % Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dan pada Tahun 2017 menunjukkan sedikit kenaikan yaitu 13,10%. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kesempatan Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

### 3) **Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat Struktural bagi ASN bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara professional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur Negara yang mampu sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.111.**  
**Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	4	22	14	31	35
2.	Jumlah total jabatan ASN	572	589	589	589	595
3.	Persentase	0,70	3,74	2,38	5,26	5,88%

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa dari tahun ketahun masih kecilnya persentase pejabat Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Padahal syarat untuk menduduki jabatan struktural bagi Aparatur Sipil Negara adalah telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Pada tahun 2017 dari total jabatan ASN sebanyak 595, baru 35 yang telah mengikuti diklat structural atau sekitar 5,88%.

### 4) **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi pemerintah:**

Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi,

Kasubag dan Kasubid. dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.112.**  
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017**

NO	Uraian	2017
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1772
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	999

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dari tabel diatas Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 26, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 1772, Jumlah pemangku jabatan fungsional sebanyak 999 buah.

#### **d. Penelitian dan Pengembangan**

Penunjang urusan penelitian dan pengembangan yang ada di Kota Bukittinggi berada pada Bapelitbang yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dalam rangka problem solving.

Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

**Tabel 2.113.**  
**Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2017**

NO	INDIKATOR	Tahun 2017
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
	Penerapan SIDA :	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2018

Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan urusan baru dan pada tahun 2018 masih bergabung dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sehingga 2 ( dua ) indikator belum dapat dilaksanakan.

#### e. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut.

**Tabel. 2.114**  
**Indikator Penunjang Urusan Pengawasan**  
**Tahun 2017**

NO	INDIKATOR	Tahun 2017
1.	Persentase tindak lanjut temuan	$= \frac{114}{178} \times 100\% = 64,04\%$
2.	Jumlah Temuan BPK	14 Temuan

Sumber: Inspektorat, 2018

Dari tabel diatas dapat Persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 64,04 % dan jumlah temuan BPK sebanyak 14 temuan.

#### f. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugasnya memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 ( tiga ) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Selanjutnya tabel Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

**Tabel 2.115.**  
**Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan**  
**Tahun 2017**

No.	Indikator	Tahun 2017
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan	Ada

	DPRD Kota	
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Untuk Fungsi pembentukan Perda pada tahun 2017 lalu memang belum ada Perda inisiatif Dewan, namun tahun 2018 ini rencananya ada Perda inisiatif DPRD tersebut.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

##### A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pemerintah Daerah bertugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, salah satunya dalam bentuk penjagaan keamanan, ketertiban, ketentraman, sehingga diharapkan jauh dari kriminalitas. Beberapa kasus kriminal yang dapat ditangani dengan baik dari waktu ke waktu akan berpengaruh terhadap ketenangan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupan.

**Tabel 2.116**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013 s.d 2017**  
**Kota Bukittinggi**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kriminal yang tertangani	470	440	638	549	465
Jumlah penduduk	118.260	120.469	122.621	124.715	119.183
Angka kriminalitas yang	39,735	37,29	52,03	44,02	

tertangani per 10.000 penduduk.						39,01
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------

*Sumber: Polres Bukittinggi*

Dilihat dari perkembangannya, selama 5 (lima) tahun kebelakang pada tahun 2013 sampai keadaan tahun 2017, terjadi naik turun angka kriminalitas di lingkungan wilayah Polres Bukittinggi. Pada tahun 2017 tercatat angka kriminal yang terjadi dan dapat ditangani sebanyak 465 kasus dari jumlah penduduk 119.183, atau angka kriminalitas yang tertangani 39.01. Dilihat dari perkembangannya kasus kriminal yang tertangani telah terjadi penurunan sejumlah 84 kasus dari tahun 2016. Penurunan kriminalitas ini juga tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pengawasan keamanan lingkungan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga dan menindak kejahatan di Kota Bukittinggi. Kedepan, tentunya kita berharap angka kriminalitas di Kota Bukittinggi dapat ditekan terus. Mengingat Kota Bukittinggi adalah kota tujuan wisata maka tentunya sedikit banyak kondisi keamanan dan ketertiban kota akan mempengaruhi kunjungan wisata yang datang ke Kota Bukittinggi.

## **B. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif.

**Tabel 2.117**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
----	--------	------	------	------	------	------

1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	32.701	33.148	33.597	33.999	34.375
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.187	5.728	5.399	5.557	5.751
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	37.888	38.426	38.996	39.556	40.126
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	78.187	79.834	81.495	83.065	84.589
5.	Rasio Ketergantungan	48,46	48,13	47,85	47,62	47,44

*Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2016*

Dari tabel di atas terlihat kecendrungan semakin berkurang rasio ketergantungan di Kota Bukittinggi selama tahun 2012-2016. Ini berarti beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia yang tidak produktif lagi semakin berkurang dan ini berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Tabel 2.118  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD  
Kota Bukittinggi

No	Kode		Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tw. I - Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2			3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			<b>Pendidikan</b>																		
1	1.01.01.	01	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	450%	62,359,262,767	200%	11,454,490,230	25%	5,108,129,000	1%	30,553,000	0	4%	204%	11,485,043,230	45.33%	229,700,864,600			
2	1.01.01.1.01	01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan anak usia dini	450%	4,531,315,963	200%	829,378,896	25%	583,257,800	0%	2,799,847	0	0%	200%	832,178,743	44.44%	16,643,574,860			
3	1.01.01.1.01	01	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	100%	169,138,252,114	11%	17,765,138,968	100%	22,960,485,585	1%	257,747,247	0	1%	0	18,022,886,215	11.63%	360,457,724,300			
4	1.01.01.1.01	01	18 Program Pendidikan Non Formal	penuntasan wajib belajar sembilan tahun	445%	2,612,712,874	200%	986,618,643	75%	209,630,360	2%	3,784,257	0	2%	202%	990,402,900	45.39%	19,808,058,000			
5	1.01.01.1.01	01	21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP	450%	8,379,663,396	200%	1,377,007,277	25%	118,456,820	29%	34,079,700	0	29%	229%	1,411,086,977	50.89%	28,221,739,540			
6	1.01.01.1.01	01	Program BOS		100%	81,164,283,550	18%	14,813,806,890	90%	12,001,220,021	0%	0	0	0%	0	14,813,806,890	18.25%	296,276,137,800		Program BOS masuk ke Disdikbud Kota Bkt tahun 2017 tahun sebelumnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	
			<b>Kesehatan</b>																		
			1. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan di puskesmas	561	22,876,492,616	185	1,370,001,925	95	1,010,795,115	15	31,784,760	15.78947368	3	200	1,401,786,685	35.7	6.1			
				Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan																	
			2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	600	63,218,206,782	200	7,581,895,278	100	6,200,757,501	45	2,060,087,749	45	33	245	9,641,983,027	40.8	15.3			
				Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai																	
				Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan																	
			3. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	600	4,037,251,820	200	268,138,721	100	186,932,080	100	83,433,612	100	45	300	351,572,333	50	8.7			
				Persentase penggunaan obat secara rasional																	
				Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan																	
				Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani																	
			4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota	451	10,094,919,035	135	707,484,401	77	393,108,700	20	75,342,469	25.97402597	19	155	782,826,870	34	7.8			
				Cakupan Kelurahan Siaga aktif																	
				Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya...																	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .																	
			Cakupan posyandu dengan srata mandiri																	
		5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	428	4,632,309,500	100	394,873,855	100	168,546,165	35	41,034,900	35	24	135	435,908,755	31.5	9.4			
			Prevalensi anemia ibu hamil .																	
			Persentase balita gizi buruk .																	
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .																	
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .																	
			Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .																	
			Persentase kekurangan gizi pada balita .																	
			Persentase remaja gizi lebih .																	
		6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	317	1,600,609,900	100	66,507,950	56	108,109,000	100	27,962,000	178.5714286	26	200	94,469,950	63.1	5.9			
			Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan																	
			Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan																	
		7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	400	10,331,415,600	100	824,202,200	100	732,674,710	100	107,381,580	100	15	200	931,583,780	50.0	9.0			
			Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .																	
			Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .																	
			Cakupan penemuan penderita diare .																	
			Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .																	
			Cakupan Keluarahan yang Universal Child Immunization (UCI) .																	
			Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .																	
			Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .																	
			Insiden rate HIV																	
			Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang dibina .																	
			Cakupan Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .																	
			Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular																	
			Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi																	
			Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.																	
			Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi																	
			Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard.																	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	35	10,093,738,806	7	3,761,595,701	7	265,430,000	7	45,881,000	100	17	0	14	3,807,476,701	40.0	37.7		
		9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya sesuai standar pelayanan	600	14,591,840,000	200	1,489,306,150	100	2,237,444,000	90	6,012,976	90	0	290	0	1,495,319,126	48.3	10.2		
			Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas, pustu dan poskeskel yang sesuai standar																	
		10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .	3	406,116,000,000	0	1,691,892,989	8	12,625,552,000	0	55,811,400	0	0	0	0	1,747,704,389		0.4		
			Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD																	
			Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi																	
			Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal																	
		11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	401	298,821,500	100	28,111,600	100	25,018,600	100	4,117,250	100	16	200	0	32,228,850	49.9	10.8		
		12. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	590	4,037,251,820	190	28,302,300	100	27,731,000	100	-	100	-	290	0	28,302,300	49.2	0.7		
		13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal)	400	590,500,000	100	185,237,520	100	105,885,510	100	14,827,150	100	14	200	0	200,064,670	50.0	33.9		
			2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar																	
			3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar																	
			4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar																	
			5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining)																	
		18. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	560	796,161,832	200	39,831,710	100	7,300,000	100	750,000	100	10	300	0	40,581,710	53.6	5.1		
		21. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit .	150	40,000,000,000	50	-	25	1,365,003,600	25	1,015,147,560	100	74	75	0	1,015,147,560	50.0	2.5		
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota .																	
		<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																		DPUPR
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang ber kondisi baik	397	36,314,931,652	197	25,597,737,850	100	12,362,276,590	0	-	0%	0%	197.00	0	25,597,737,850	49.62%	5,119,547,570		
		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	517	47,125,007,228	155	6,442,698,500	85	2,986,548,360	0	-	0%	0%	155.00	0	6,442,698,500	29.98%	128,853,970,000		
		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase titik pengamanan bahaya longsor	385	6,256,396,869	78.34	1,820,986,000	50	1,131,150,300	0	-	0%	0%	78.34	0	1,820,986,000	20.35%	36,419,720,000		

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	546	21,747,196,769	173	636,450,907	90	14,339,202,860	0	-	0%	0%	173.00	636,450,907	31.68%	12,729,018,140			
		Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinarmargaan	Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinarmargaan	375	1,750,000,000	33.34	230,018,646	80	547,150,000	20	49,019,250	25%	9%	53.34	279,037,896	14.22%	5,580,757,920			
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	497	7,349,200,000	98	1,288,239,000	99	1,891,117,275	0	-	0%	0%	98.00	1,288,239,000	19.72%	25,764,780,000			
		Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	75	0	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	-	0.00%	#DIV/0!			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	343	35,083,071,400	103	428,662,000	55	1,502,000,000	0	-	0%	0%	103.00	428,662,000	30.03%	8,573,240,000			
		Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	20	2,314,476,907	5	153,440,000	4	348,221,650	0	-	0%	0%	5.00	153,440,000	25.00%	3,068,800,000			
		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	460	253,360,000,000	135	15,094,256,835	75	68,399,786,305	0.45	24,187,570	#VALUE!	0%	135.45	15,118,444,405	29.45%	302,368,888,100			
		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	137	1,350,193,021	7	-	20	131,898,350	10	-	50%	0%	17.00	-	12.41%	-			
		Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	397	10,135,362,928	197	2,671,082,108	100	-	0	-	0%	#DIV/0!	197.00	2,671,082,108	49.62%	53,421,642,160			
		Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	100	10,135,362,928	0	-	90	4,881,930,365	18.59	478,609,199	21%	10%	18.59	478,609,199	18.59%	9,572,183,980			
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	310	2,411,794,400	30	21,477,705	20	-	0	-	0%	#DIV/0!	30.00	21,477,705	9.68%	429,554,100			
		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	50	1,702,365,588	67.63	146,536,377	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	67.63	146,536,377	135.26%	2,930,727,540			
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah kawasan strategis yang dibangun	1,000	81,670,765,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	-	0.00%	0%			
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	100	81,670,765,000	0	-	0	137,791,500	0	-	#DIV/0!	0%	0.00	-	0.00%	0%			
		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang	85	2,158,781,502	75.43	1,196,016,410	65	670,319,585	0	-	0%	0%	75.43	1,196,016,410	89%	23,920,328,200			
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	410	2,864,300,000	77.43	230,151,450	65	426,445,585	0	-	0%	0%	77.43	230,151,450	18.8%	4,603,029,000			
	1.01.01.	<b>Perumahan dan Pemukiman</b>																Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
1	1.01.01.01	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	150%	Rp 17,115,183,000	16%	Rp 379,769,850	30%	Rp 795,311,460	0%	Rp -	0%	0	16%	Rp 379,769,850	23%	2.218906161		
2	1.01.01.01	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan PSU sesuai RTRW	455%	Rp 49,472,388,309	95%	Rp 8,031,312,100	30%	Rp 19,165,488,760	0%	Rp -	0%	0	95%	Rp 8,031,312,100	21%	16.23392841		
3	1.01.01.01	17	Program Pemberdayaan Komunitas	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	330%	Rp 4,730,765,000	46%	Rp 2,168,109,375	30%	Rp 1,326,610,230	0.33%	Rp 4,448,000	1%	0.335290645	47%	Rp 2,172,557,375	67%	45.9240181		
4	1.01.01.01	18	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman yang Ada	510%	Rp 1,178,870,505	0%	Rp -	30%	Rp 33,200,000	0%	Rp -	0%	0	0%	Rp -	0%	0		
		<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>																		
		<b>Sub Urusan Kebakaran</b>																Dinas Kebakaran		

1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	1.01.05.01.15		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat	465%	15,579,110,000	130%	632,662,400	80%	1,185,957,280	5%	63,602,350	6%	5.36	135%	696,264,750	29.03%	13,925,295,000			
			<b>Sub Urusan Bencana</b>																		
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	% peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat	530	19,075,274,496		1,331,584,313	100	923,980,360	100	251,521,900	100	27	100	1,080,062,413	18.87	20	BPBD		
			Program Pendidikan/pelatihan kepada Aparatur Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Kapasitas dan Kualitas petugas BPBD meningkat dalam penanggulangan Bencana	420	3,584,910,400			100	43,017,900	100	43,017,900	100	100	70	43,017,900	16.67	1			
			Program Sistem Kebencanaan	% Jumlah data dan informasi tentang kebencanaan terpenuhi	500	671,974,100			100	488,633,630	0			-		-					
			<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>																Kesbangpol		
1	4.00.01.4.00	01	10	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan	300	Rp 197,320,513	0 kasus	Rp 234,193,775	0 kasus	Rp 181,985,500	0 kasus	Rp -	0 kasus	Rp 234,193,775	0	Rp 234,193,775	0	Rp 234,193,775		
2	4.00.01.4.00	01	07	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada	200	Rp 31,622,332	0 kasus	Rp -	0 kasus	Rp 327,597,300	0 kasus	Rp -	0 kasus	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		
3	4.00.01.4.00	01	04	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan konflik sosial	200	Rp 595,331,198	0 kasus	Rp 542,694,515	0 kasus	Rp 498,629,000	0 kasus	Rp 498,629,000	0 kasus	Rp 1,041,323,515	0	Rp 1,041,323,515	0	Rp 1,041,323,515		
4	4.00.01.4.00	01	08	Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	400	Rp 490,844,365	20%	Rp 12,533,500	15%	Rp 125,646,500	13%	Rp -	12%	Rp 12,533,500	33	Rp 12,533,500	8,25%	Rp 12,533,500		
			<b>Sosial</b>																Dinas Sosial		
1	1.01.1.06.1.01.06.01.16			Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	75%	4,245,966,299	70%	284,133,799	70%	89,331,680	25%	6,866,300	8%	48%	291,000,099	70%	5,820,001,980			
2	1.01.1.06.1.01.06.01.17			Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	45%	100,000,000	80%	20,295,200	40%	46,000,000	30%	2,287,600	5%	55%	22,582,800	40%	451,656,000			
3	1.01.1.06.1.01.06.01.18			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	30%	253,864,564	80%	58,983,950	20%	35,000,000	0%	-	0%	40%	58,983,950	20%	1,179,679,000			
4	1.01.1.06.1.01.06.01.19			Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	100%	7,507,676	75%	4,246,600	75%	7,197,660	35%	2,775,000	39%	55%	7,021,600	75%	140,432,000			
5	1.01.1.06.1.01.06.01.21			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	60%	1,340,000,000	40%	253,175,625	40%	278,698,990	5%	4,612,000	2%	23%	257,787,625	40%	5,155,752,500			
	1.01.1.06.1.01.06.01.22			Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	92%	1,092,569,601	85%	419,104,575	85%	518,039,340	5%	2,200,000	0%	45%	421,304,575	85%	8,426,091,500			
6	1.01.1.06.1.01.06.01.24			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	350%	-	0%	-	80%	3,496,418,695	15%	178,567,385	5%	8%	178,567,385	2,29%	3,571,347,700			
				<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>																	
				<b>Tenaga Kerja</b>															Dinas PMPTSP, Perindustrian Tenaga Kerja		
1	1.02.01.1.02.12.01.14			Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM	550	304,839,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
2	1.02.01.1.02.12.01.15			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian	367	5,895,767,278	112	501,200,700	60	366,073,235	0	0	0	0	112	501,200,700	30.52%	8.50%		

1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	1.02.01.1.02 12.01.16		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	44	5,209,793,642	11	62,093,500	19	56,604,825	0	0	0	0	11	62,093,500	25.00%	1.19%		
4	1.02.01.1.02 12.01.17		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja	23	137,640,731	17	13,504,250	19	13,685,290	0	0	0	0	17	13,504,250	73.91%	9.81%		
			<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
1	02.02.1 02.02.01	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	250%	930,000,000	100	265,760,850	55	239,767,050	38.40	54,330,000	69.82	22.66	138.4	320,090,850	55.36	6,401,817,000		
2	02.02.1 02.02.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	180%	1,917,786,208	100	204,845,302	30	255,328,055	49.65	86,122,013	69.82	33.73	149.65	290,967,315	83.14	5,819,346,300		
3	02.02.1 02.02.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	26.46	1,593,660,725	7.4	209,822,997	7.4	171,913,300	5.18	95,934,994	69.82	55.80	12.58	305,757,991	47.54	6,115,159,820		
4	02.02.1 02.02.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	68%	2,268,301,520	0	209,822,997	8	923,725,080	28.07	161,595,534	69.82	17.49	28.07	371,418,531	41.28	7,428,370,620		
			<b>Pangan</b>																	Dipertapang
1	1.02.03.2.00 03.01.15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	12,063	3,471,335,990.00	2,463	322,447,439	2,400	85,003,985.00	2,522.00	4,853,910.00	105.08%	5.71%	4,985	327,301,349.00	41.32%	9.43%		
	2.00.03.2.00 03.01.16			Ketersediaan protein perkapita	63		63	63												
2	1.02.03.2.00 03.01.16		Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	508	2,629,990,472.00	168	502,828,007	85%	231,903,590.00	87.3%	3,163,250.00	102.71%	1.36%	255.30	505,991,257.00	50.26%	19.24%		
			<b>Pertanahan</b>																	DPUPR
1			Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tingkat ketersediaan informasi pertanahan	300	175,000,000	74.93	19,348,300	55	65,252,040	0	-	0%	0%	74.93	19,348,300	24.98%	386,966,000		
2			Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	554	6,929,428,000	92	146,546,873	92	17,131,867,790	0.17	20,320,000	#VALUE!	0%	92.17	166,866,873	16.64%	3,337,337,460		
3			Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan pengguna tanah	494	387,286,390	161	131,996,589	90	431,159,010	0	12,247,000	0%	3%	164.00	144,243,589	33%	2,884,871,780		
			<b>Lingkungan Hidup</b>																	Dinas Lingkungan Hidup
1	1.02.05.1.02 05.01.	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Pemenuhan RTH	145	24,504,744,783	22	3,993,005,040	25	2,868,434,900	0.1	2,555,000	0.09	100	3,995,560,040	15.24	79,911,200,800			
2	1.02.05.1.02 05.01.	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan/Pelayanan/Pengelolaan Persampahan	580	39,971,503,377	180	6,101,519,539	80	7,200,354,260	4.7	338,466,368	5.90	0.05	185.90	6,439,985,907	32.05	128,799,718,140		
3	1.02.05.1.02 05.01.	17	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase Peningkatan Akses dan Informasi Lingkungan Hidup	430	4,516,474,592	130	628,476,165	80	456,285,425	0.3	1,439,450	0.30	0.00	133	629,915,615	30.93	12,598,312,300		
4	1.02.05.1.02 05.01.	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	280	3,806,698,488	130	910,915,905	50	737,960,375	0.7	5,083,000	1.40	0.01	137	915,998,905	48.93	18,319,978,100		
5	1.02.05.1.02 05.01.	18	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Peningkatan Pengendalian Polusi	400	3,545,000,000	-	-	65	308,528,370	0.9	2,670,100	0.01	0.90	2,670,100	0.23	53,402,000			
			<b>Pencatatan Sipil</b>																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat dan dapat dimanfaatkan	490%	5,935,495,462	75%	2,331,174,275	5%	2,039,059,050	2%	136,923,270	40%	7%	77%	2,468,097,545	43%	42%		
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	Kec.MKS
1	3.03.01.01.1 5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		189%	10,554,099,191	45%	2,150,278,110	100%	786,437,900	16.73%	85,648,775	17%	11%	61.73%	2,936,716,010	32.66%	420,230,000		
2	3.03.01.01.1 6		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		90%	614,595,581			60%	21,011,500	0.00%	-	0%	0%	60.00%	21,011,500	66.67%	420,230,000		
3	3.03.01.01.1 7		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun		600%	452,635,048	200%	623,183,937	12%	192,422,200	8.54%	115,821,275	71%	60%	212.00%	815,606,137	35.33%	16,312,122,740		

1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa GC</b>																	Kec.Guguk Panjang	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	600	6,706,499,800	200%		100%	1,528,486,290.00	14.62%	223,435,670.00	14.62%	14.62%	214.62	223,435,670.00	35.77%	4,468,713,400			
			Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat	600	1,476,903,032	200%		100%	68,079,675.00	26.39%	17,968,900.00	26.39%	26.39%	226.39	17,968,900.00	36.73%	359,378,000			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	600	1,456,233,930	200%		100%	1,142,761,095.00	49.70%	567,897,169.00	49.70%	49.70%	249.7	567,897,169.00	41.62%	11,357,943,380			
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa GC</b>																	Kec.ABTB	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	18%	7,381,136,560	6%		100%	1,528,486,290.00	14.62%	223,435,670.00	14.62%	14.62%	6	223,435,670.00	28.57%	4,468,713,400			
			Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat	600	1,476,903,032	200%		100%	68,079,675.00	26.39%	17,968,900.00	26.39%	26.39%	226.39	17,968,900.00	36.73%	359,378,000			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	600	1,456,233,930	200%		100%	1,142,761,095.00	49.70%	567,897,169.00	49.70%	49.70%	249.7	567,897,169.00	41.62%	11,357,943,380			
			<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>																	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
1	02.02.1	02.02.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	272%	10,771,517,591	0		2,789,759,158	68	1,625,140,340	20	254,799,690	29.41	15.68	20	3,044,558,848	7.35	60,891,176,960	
2	02.02.1	02.02.01	18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK R aktif	25	445,000,000	100		158,895,000	25	131,983,985	65	79,270,650	69.82	60.06	165	238,165,650	6.60	4,763,313,000	
3	02.02.1	02.02.01	01	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru dan KB Aktif		276,145,000			17,120,000		17,999,900		-	69.82	0.00	0	17,120,000	#DIV/0!	6.20	
4				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK	55%	390,000,000	0		-	40	60,936,870	5	625,000		1.03					
5	02.02.1	02.02.01	01	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah pendamping kelompok Bina Keluarga yang terlatih.	83	476,917,161	100		80,413,150	80	107,883,900	30	29,203,200	69.82	27.07	130	109,616,350	48.19	22.98	
				<b>Perhubungan</b>																Dinas Perhubungan	
1	1.02.09.1.02	09.01.07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	369	12,450,000,000	145		195,279,290	73	151,339,250	0	-	0.00	145.00	195,279,290	46.07	3,905,585,800		
2	1.02.09.1.02	09.01.22	22	Program Pengikatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang laik operasi	500	1,613,855,223	163		186,038,664	83	277,360,840	1.69	4,691,900	2.03	1.69	164.69	190,730,564	32.93	3,814,611,280	
3	1.02.09.1.02	09.01.05	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai dan berwawasan lingkungan	440	36,560,608,667	143		3,403,724,264	73	4,061,529,185	8.97	364,141,070	12.28	8.97	155.28	3,767,865,334	35.29	75,357,306,680	
4			17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah angkutan umum yang mempunyai izin trayek	500	460,657,042	163		110,663,765	83	42,148,050	0	-	0	163.00	110,663,765	27.16	2,213,275,300		
5	1.02.09.1.02	09.01.21	21	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujudnya pengendalian lalu lintas	471	5,013,737,400	143		656,387,750	75	1,593,995,610	11.08656479	176,719,356	11.09	143.00	833,107,106	30.36	16,662,142,120		
6			16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya rambu rambu yang layak	468	2,085,748,000	143		1,321,157,300	73	490,580,000	0	-	0	143.00	1,321,157,300	30.55	26,423,146,000		
				<b>Statistik</b>																Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Pengembangan Sistem Informasi ( Aplikasi Perangkat Lunak)	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik	100	500,000,000	71.74%		432,364,846	20	850,000,000	66%	8,730,556	3%	1%	137.74%	441,095,402	1%	88%	
				Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang teknologi dan informasi	16	1,639,231,600	7		44,714,103	4	155,000,000	0.27	34,372,860	1.13	22%	7.00	79,086,963	43.75%	5%	
				Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalui Media Informasi	291	8,862,238,666				24	677,500,000	6	14,320,391	25%	2%	6	14,320,391	2.06%	0%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	4,461	6,647,718,066	2,056	1,163,594,290	1,028	795,500,000	250	26,994,556	24%	3%	2306	1,190,588,846	51.69%	18%		
		Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	502	1,701,658,600	162	61,576,070	85	280,000,000	0.05	0	0%	0%	162	61,576,070	32.28%	4%		
		<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>																	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
1	1.02.11.1.02.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	86	543,055,248.00	24	182,553,350	14	87,266,820	14	36,826,585	1.00	42	38	219,379,935	44.10	4,387,598,700		
2	1.02.11.1.02.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan (%)	45%	112,615,144.00	15%	54,475,200							0.15	54,475,200	33.33	1,089,504,000		
3	1.02.11.1.02.11.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit)	100 usaha mikro	1,151,177,024.00	20 usaha mikro	365,722,734								365,722,734	-	7,314,454,680		
4	1.02.11.1.02.11.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Jumlah koperasi sehat (unit)	16 koperasi	725,742,037.00	20 koperasi	155,101,650								155,101,650	-	3,102,033,000		
5	1.02.11.1.02.11.01.19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM	Jumlah UMI yang meningkat kinerja usahanya	80 UMI	1,336,551,807	-	-	20	153,649,820.00	59.82	91,920,100.00	2.99	60	59.82	91,920,100	25	1,838,402,000		
6	1.02.11.1.02.11.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanya	16%	630,842,346	-	-	4%	42,055,350.00	3.82	1,605,000.00	95.41	4	3.82	1,605,000	25	32,100,000		
		<b>Penanaman Modal</b>																	Dinas PMPTSP, Perindustrian Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	620	292,589,822	170	15,817,500	100	24,382,570	4	997,500	4.00%	4.09%	240	16,815,000	38.71%	5.75%		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	220	1,022,977,723	35	47,608,630	45	56,524,495	0	0	0	0	35	47,608,630	15.91%	4.65%		
		Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	5	355,000,000	1	46,522,275	2	-	-	-	-	-	1	46,522,275	20.00%	13.10%		
		Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	560	5,166,301,666	200	248,054,850	90	469,321,236	55	61,577,200	61.11%	13.12%	255	309,632,050	45.54%	5.99%		
		<b>Parpora</b>																	Disarpورا
1		Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	600	5,566,909,662	200.00%	1,636,516,648	100	1,013,000,744	0.2%	301,064,200	-	30%	202%	1,937,580,848	33.67%	38,751,616,960		
2		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	600	956,804,891	200.00%	111,970,100	100	401,287,463	0.1%	5,279,900	-	1%	201%	117,250,000	33.5%	2,345,000,000		
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	22	38,152,378,097	6 unit	979,884,100	4 unit	3,682,934,237	0.11%	88,470,500	0.0275%	2%	4,11	1,068,354,600	18.86%	21,367,092,000		
4		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemsarakatan olahraga	600	5,743,218,028	178.75%	859,144,240	100	89,661,768	0.21%	85,143,000	-	95%	178,96%	944,287,240	29.82%	18,885,744,800		
5		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	280	465,000,000			40											
		<b>Persandian</b>																	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan data strategis daerah	550	1,352,601,734	150	95,069,475	100	156,000,000	0	0	0%	0%	150	95,069,475	27.27%			
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Informasi yang diamankan	513	1,883,000,000	162	1,083,500,630	85	167,000,000	17	0	25%	0%	179	1,083,500,630	34.89%			
	1.02.16	<b>Kebudayaan</b>																	Disdikbud
1	1.02.16.1.01.01.01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang diikuti	12 kali	4,380,000,000	4 kali	77,881,500	2 kali	120,372,000	0%	0	0%	0%	4 kali	77,881,500	33.33%	1,557,630,000		

1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
2	1.02.16.1.01	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	cakupan kajian seni	150%	3,576,224,250	50%	461,771,560	25%	1,562,338,000	0%	0	0%	0	50%	461,771,560	33.33%	9,235,431,200		
3	1.02.16.1.01	01	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	6 kali	2,705,784,981	2 kali	256,787,759	1 kali	137,106,000	0%	0	0%	0	2 kali	256,787,759	33.33%	5,135,755,180		
4	1.02.16.1.01	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	60,621,000,000	15%	411,330,501	18%	259,542,550	11%	27,648,630	0%	11%	26%	438,979,131	26%	8,779,582,620		
	1.02.17.			<b>Perpustakaan</b>																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	1.02.1.02.17	01	05	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	280%	3,562,046,774	200%	466,106,537	20%	310,344,920	5%	78,521,950	25.00%	25%	205%	544,628,487	73.21%	10,892,569,740		
2	1.02.1.02.17	01	16	Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan	Tingkat Tersedianya data dan informasi perpustakaan	80%	408,000,000	0%	0	20%	59,245,840	5%	20,098,973	25.00%	34%	5%	20,098,973	6.25%	401,979,460		
	1.02.18			<b>Kearsipan</b>																	
1	1.02.18.1.02	01	15	Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan	Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi perkantoran	400%	674,500,000	0%	0	20%	19,732,265	5%	2,376,830	25.00%	12%	5%	2,376,830	1.25%	47,536,600		
2	1.02.18.1.02	01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	400%	3,108,415,500	20%	489,404,200	20%	314,252,745	5%	23,682,804	25.00%	8%	25%	513,087,004	6.25%	10,261,740,080		
3	1.02.18.1.02	01	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tingkat Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	460%	859,235,804	20%	180,208,079	20%	20,585,685	5%	4,029,465	25.00%	20%	25%	184,237,544	5.43%	3,684,750,880		
				<b>Kelautan dan Perikanan</b>																	Dipertapang
1	2.00.03.2.00	03.01.30		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	16	694,797,667	4	105,259,775	3	110,682,850.00	1.05%	4,431,000.00	35.00%	4.00%	4.05%	109,690,775.00	25.31%	15.79%		
2	2.00.03.2.00	03.01.29		Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	2.119 ton	1,925,964,072	703	395,868,281	353 ton	252,871,790.00	340 ton	40,722,865.00	96.32%	16.10%	1.043 ton	436,591,146.00	49.22%	22.67%		
3				Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan	20%	138,767,385	0	0	5%	0	1.10%	0	22.00%	0%	1.1%	0.00	5.5%	0.00%		
4	2.00.03.2.00	03.01.28		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	270%	395,000,000	10%	0	50%	0	20%	0	40.00%	0%	15%	0.00	12.96%	0.00%		
				<b>Pariwisata</b>																	
1				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan	3262376	18,221,698,465	992,098	4,423,625,021	533555	2,221,642,393	0,10%	229,216,310	#VALUE!	10%	1318335,2	4,652,841,331	40,41%	93,056,826,620	Dispora	
2				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata - Rata lama tinggal wisatawan	13,06	127,354,764,000	3,06	13,838,170,737	1,56	11,960,000,000	0,12%	1,862,257,877	7,6	16%	3,18	15,700,428,614	24,34 %	314,008,572,280		
				<b>Pertanian</b>																	Dipertapang
1	2.00.03.2.00	03.01.19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi padi	67 kw/ha	220,200,000.00	67 kw/ha	208,942,910	67 kw/ha	2,045,241,755.00	20 kw/ha	30,212,150.00	30.77%	1.48%	20 kw/ha	239,155,060.00	29.85%	108.61%		
					palawija	2%				2%		0.20%		10.00%							
					hortikultura	2%				2%		0.42%		21.00%							
2	2.00.03.2.00	03.01.17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	6	1,393,422,289.00	2%	487,518,930	2%	48,737,950.00	0%	0.00	0.00%	0.00%	2%	487,518,930.00	33.33%	34.99%		
3	2.00.03.2.00	03.01.18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	68	212,535,355.00	12 kelompok	25,486,450	13 kelompok	43,629,570.00	0%	610,000.00	0.00%	1.40%	12 kelompok	26,096,450.00	17.65%	12.28%		
4	2.00.03.2.00	03.01.15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	30	575,929,265.00	10%	72,980,800	5%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	10%	72,980,800.00	33.33%	12.67%		
5	2.00.03.2.00	03.01.20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	600%	1,246,633,744.00	200%	176,486,684	100%	118,432,905.00	33,423,325.00	0.00%	28.22%	200%	209,910,009.00	33.33%	16.84%			
6	2.00.03.2.00	03.01.21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	600	2,743,389,566.00	151%	316,031,336	80%	170,594,035.00	22%	3,033,172.00	27.50%	1.78%	173%	319,064,508.00	28.83%	11.63%		
7	2.00.03.2.00	03.01.22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	12	20,465,652,331.00	4%	43,776,550	2%	102,674,385.00	0.35%	9,100,000.00	17.50%	8.86%	4.35%	52,876,550.00	36.25%	0.26%		
8	2.00.03.2.00	03.01.25		Program Pengembangan Data Informasi pertanian/Perikanan/Kelautan	Laporan data statistik dan Informasi pertanian, Laporan Data Ubinan pangan, palawija dan horti kultura, Pengkajian LP2B Kota Bukittinggi	1			89,830,340				0.00	0.00%	0.00%	0%	89,830,340.00	0.00%			

1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	2.00.03.2.00	03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	12%	926,167,712.61	4%	260,683,388	2%	214,326,445.00	0.25	32,512,834.00	12.50%	15.17%	4.25%	293,196,222.00	35.42%	31.66%		
			<b>Perdagangan</b>																	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PASAR	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)	600%	2,094,919,229	200%	138,568,500	100%	396,841,870.00	24.13347337	95,771,727.00	24.13	24	26.13	234,340,227	41.67	4,686,804,540		
			PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	Tingkat sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan (%)	100%	14,458,224,810	200%	4,540,707,925.00	100%	9,748,049,820.00	16.30403033	1,589,324,999	16.30	16	18.30	6,130,032,924	41.67	122,600,658,480		
			PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	jumlah usaha dari pelaku usaha yang terakomodir	500 usaha	4,126,509,200	350	1,123,644,083.00	400	363,224,000.00	400	77,796,600.00	1.00	21	400	1,201,440,683	80	24,028,813,660		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EXPORT IMPOR	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri (Persh)	2 IKM	729,792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Tertatanya lokasi PKL (lokasi)	5 lokasi	30,617,000	1 lokasi	10,396,750	1 lokasi	6,597,380.00	1 lokasi	695,800.00	1 lokasi	11	1 lokasi	11,092,550	20	221,851,000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Jumlah Pengaduan Konsumen	50 kasus	1,627,523,000	12 kasus	904520710	12 kasus	321,737,960.00	7 kasus	244,852,113.00	5,7%	76	19 kasus	1,149,372,823	38	22,987,456,460		
			<b>Industri</b>																	Dinas PMPTSP, Perindustrian Tenaga Kerja
1	2.00.07.1.02	12.01.15	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Penambahan Nilai Penjualan IKM	15	4,695,479,150	4	240,414,405	2	303,993,530	1	17,611,500	50.00%	5.79%	5	258,025,905	33.33%	5.50%		
2	2.00.07.1.02	12.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang Berkembang	110	5,398,656,525	15	516,003,550	15	291,475,400	1	26,980,000	6.67%	9.26%	16	542,983,550	14.55%	10.06%		
3	2.00.07.1.02	12.01.17	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	10	393,850,305	4	10,824,600	4	-	-	-	-	-	4	10,824,600	40.00%	2.75%		
4	2.00.07.1.02	12.01.18	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Non Formal menjadi Industri Formal	35	75,000,000	14	-	14	35,514,850	0	0	0	0	14	-	40.00%	0.00%		
5	2.00.07.1.02	12.01.19	Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial	Persentase Peningkatan Pendapatan anggota KUB	6	1,433,213,000	2	93,496,550	4	94,663,100	0	0	0	0	2	93,496,550	33.33%	6.52%		
			<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>																	
	1.01.01.		<b>Perencanaan</b>																	Bapelitbang
1	3.02.01.3.02	01	15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		580	19,852,934,518	200	1,923,464,300.00	52,755,690.00	80	398,591,520.00	30	110,411,714.00	38	27.70	238	163,167,404.00	41.03	
2	3.02.01.3.02	01	16	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR		600	978,039,296	200	307,427,600.00	28,925,445.00	100	127,925,400.00	15	15,408,095.00	15	12.04	215	44,333,540.00	35.83	
3	3.02.01.3.02	01	17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		600	760,580,290	200	100,768,900.00	13,573,000.00	100	140,780,120.00	15	14,503,650.00	15	10.30	215	28,076,650.00	35.83	
4	3.02.01.3.02	01	18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH		460	2,185,955,103	200	502,265,500.00	71,475,672.00	75	142,492,300.00	17	18,693,090.00	22.60	13.12	217	90,168,762.00	47.17	
5	3.02.01.3.02	01	19	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA		600	1,472,820,848	200	368,891,100.00	89,536,865.00	100	422,534,350.00	13	48,460,180.00	13	11.47	213	137,997,045.00	35.50	
			<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																	Bapelitbang
1	3.02.01.3.02	01	21	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		400	200,000,000	50			0	100	202,971,250.00	10	12,544,900.00	10	6.18	60	12,544,900.00	15
2	3.02.01.3.02	01	22	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		110	7,000,000,000	10			0	20	1,865,818,540.00	15	26,619,684.00	75%	1.43	25	26,619,684.00	22.72
			<b>Keuangan</b>			<b>47,086,468,365</b>		<b>7,772,146,166</b>		<b>7,312,630,874</b>		<b>923,934,679</b>		<b>57.77</b>		<b>8,696,080,845</b>		<b>1,739,216,169</b>		Badan Keuangan

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3.02.02.3.02.02.02.15		Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi	570%	1,106,490,000	200	235,551,631	80	454,952,600		69,319,980	15.24	200	304,871,611	35.08%	60,974,322			
2	3.02.02.3.02.02.02.15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	18%	18,825,812,093	6	2,798,948,761	3	3,547,144,214		374,461,021	10.56	6.25	3,173,409,782	34.72%	634,681,956			
3	3.02.02.3.02.02.02.16		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	240,638	16,009,828,262	66,869	3,353,588,278	38,432	1,389,998,360	20.97%	351,065,325	10.49%	25.26	87,839	3,704,653,603	0.06%	740,930,721		
4	3.02.02.3.02.02.02.16		Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase penyelesaian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota Bukittinggi	265%	11,144,338,010	35	1,384,057,496	30	1,920,535,700	13% Objek BMD dimanfaatkan	129,088,353	26% Objek BMD dimanfaatkan	6.72	58% Objek BMD dimanfaatkan	1,513,145,849	21.89%	302,629,170		
	3.02.03.		<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			27,815,287,002		4,031,677,236		5,334,713,505	20%	1,067,764,240		26%	5,099,441,476		101,988,829,520	BKPSDM		
	3.02.04.3.02.03.01.15.		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	3265	8,560,049,055	1100	1,312,607,295	530	1,902,898,910	14%	269,914,765		14%	1,100	1,582,522,060	33.69	31,650,441,200		
	3.02.03.3.02.03.01.15.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	490	6,325,884,104	130	593,584,752	80	713,777,110	23%	162,387,676		23%	314	755,972,428	64.08	15,119,448,560		
	3.02.03.3.02.03.01.17.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	490	1,775,603,364		687,985,632		995,714,655	15%	148,758,405		15%	15%	836,744,037		16,734,880,740		
	3.02.03.3.02.03.01.18.		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kegiatan yang Dikelola dengan Sistem Otomisasi	30	3,053,750,479	4		5	347,611,690	5	78,693,375	100%	23%	5	78,693,375	16.67	1,573,867,500		
	3.02.03.3.02.03.01.18.		Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	6,000	8,100,000,000	959	1,437,499,557	1500	1,374,711,140	791	408,010,019	53%	30%	1750	1,845,509,576	29.67	36,910,191,520		
			<b>Bidang Pengawasan</b>															Inspektorat		
1	3.02.06.01.17		Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	600	1,652,125,555	200	964,717,757	100	207,650,730	56.33	58,440,011	56.33	28.14%	56.33	58,440,011	42.72	1,168,800,220		
2	3.02.06.01.18		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	600	1,132,544,000	200	595,032,920	100	300,500,000	50%	92,829,135	50%	30.89%	250%	92,829,135	41.67	1,856,582,700		
			<b>Bidang Pemerintahan Umum</b>															Sekretariat Daerah		
1			Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	374%	512,410,240	121%	2,825,280	62%	62,167,858	0	-	0	0	121%	2,825,280	32.35%	56,505,600		
2			Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Penda Bukittinggi kepada masyarakat	90	6,219,703,853	74	1,678,019,970	85	2,703,495,135	4	29,183,500	4,70	1,08	78	1,707,203,470	86.67	34,144,069,400		
3			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	445	114,954,000	80	169,595,514	85	456,706,987	11	176,125,500	13,4	38,6	91	345,721,014	20.45%	6,914,420,280		
4			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	400	400,000,000	0	-	85	625,325,351	0	-	0	0	0	-	0	0		
5			Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	277	5248219439	117	101,967,924	50	77,710,842	0	-	0	0	117	101,967,924	42.24%	2,039,358,480		
6			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	494	7,875,090,064	161	1,117,335,979	82	988,898,145	2	8,011,897	2,43	0,81	163	1,125,347,876	32.96%	22,506,957,520		
7			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	550	42,281,284,600	165	9,776,649,081	90	8,296,480,823	6	417,977,784	6,67	5,04	171	10,194,626,865	31.09%	203,892,537,300		
8			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	494	2,107,929,824	161	163,654,100	82	266,681,766	9	10,501,000	1,10	3,94	170	174,155,100	34.41%	3,483,102,000		
9			Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	242	5,248,210,439	117	617,740,485	50	784,676,087	5	22,677,775	10	2,89	122	640,418,260	50.41%	12,808,365,200		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	600%	13,994,191,924	200%	1,306,972,398	100%	1,923,492,799	13.00%	119,586,370	13.00%	6.22%	213%	1,426,558,768	35.50%	28,531,175,360	Setwan	
10			Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	420	166,350,052	160	-	80	33,438,288	4	1,609,000	5	4,81	164	1,609,000	39.05%	32,180,000	Kecamatan	
			Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	300	1,200,000,000	85	145,360,401	100	-	1	3,848,560	0	0	86	149,208,961	28.67%	2,984,179,220		
11			Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	25,52	4,659,059,043	15	133,122,563	5	626,342,531	6	4,996,200	1,2	0,80	21	138,118,763	82,28	9,58		
12			Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	600%	5,054,760,977	200	843,573,447	100	625,325,351	25	26,673,630	25%	4,27	225	870,247,077	37,5%	17,404,941,540		
13			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Pembinaan dan Pengembangan Aparatur )	Persentase tercapainya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	420%	166,350,052	161	184,915,987	82	130,533,329	0	-	0	0	161	184,915,987	38,33%	3,698,319,740		
	3.03.01.01.19		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa		600%	1,057,671,800	200%		113%	104,873,500	7.69%	18,465,980	7%	18%	207.00%	104,873,500	34.50%	2,097,470,000	MKS	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	600	845,000,000	200%		100%	201,489,900.00	15.88%	31,996,500.00	15.88%	15.88%	215.88%	31,996,500.00	35.98%	639,930,000	GGP	
		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	600	845,000,000	200%		100%	201,489,900.00	15.88%	31,996,500.00	15.88%	15.88%	215.88%	31,996,500.00	35.98%	639,930,000	ABTB	

## **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **A. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya**

Permasalahan pada prioritas pertama adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama

#### **B. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik**

Berbagai permasalahan dari prioritas Kota Bukittinggi yang kedua ini sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal
3. masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
4. manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri
5. gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota
6. luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh
7. sarana dan prasarana lainnya berupa mobiler, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik
8. peningkatan sarana dan prasarana berupa hardware dan software serta peningkatan sumber daya manusia berupa brain ware.
  9. belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenhi Kota Bukittinggi sebagai smart city

#### **C. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan**

Secara umum permasalahan dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah:

1. Belum maksimalnya pendidikan berbasis aqidah sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan
2. belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat.
3. Permasalahan tingkat kompetensi tenaga pendidik
4. manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik

#### **D. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat**

Pada prioritas keempat masih terdapat permasalahan berupa:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi
2. Permasalahan penanganan penyakit yang relatif ekstra dan diakses secara cepat
3. belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat
4. Permasalahan kualitas tenaga kesehatan
5. Masih kurangnya ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

#### **E. Pengembangan Pariwisata**

Secara umum permasalahan dari pengembangan pariwisata adalah:

1. Sarana dan prasarana daerah destinasi pariwisata masih terbatas
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif dan daya saing
3. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
5. Kelembagaan pengelolaan pariwisata belum maksimal
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif

#### **F. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada prioritas keenam sebagai berikut:

1. belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah.
2. permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran.
3. Keterbatasan penggunaan teknologi produksi karena spesifik masing-masing produk dan bahkan pelaku usaha.
4. Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan
5. Permasalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan.

#### **G. Penanggulangan Kemiskinan**

Secara umum permasalahan pada penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya
2. Masih tinggi tingkat pengangguran
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur

#### **H. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur**

Permasalahan pada prioritas nomor delapan adalah:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

#### **I. Pelestarian lingkungan hidup**

Permasalahan untuk pelestarian lingkungan hidup berupa:

1. Permasalahan kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi

sebagai drainase.

2. Permasalahan fungsi-fungsi drainase tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota.
3. Permasalahan kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam antara lain adalah seperti berikut ini :

#### **a. Persampahan**

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukungnya dari TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (reduce, reuse and recycle) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam, dan juga mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

## **b. Air bersih**

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Kondisi eksisting prasarana air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok, Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang belum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoir dengan total kapasitas sebesar 3.180 m<sup>3</sup>. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoir tersebut berfungsi. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasi dan penggantian pipa secara bertahap semenjak tahun 2011 sampai 2017 ini. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

## **c. Sanitasi Kota**

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya. Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Sementara kondisi drainase kota belum sepenuhnya mampu mengendalikan pemasalahan titik genangan air pada beberapa kawasan yang akan berdampak pada kondisi kawasan tersebut. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas untuk ditangani untuk pencapaian universal access dan peningkatan pelayanan sanitasi di Kota Bukittinggi.

#### **d. Genangan Air**

Permasalahan genangan air sewaktu hari hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya. Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu dilakukan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya yang perlu diseriuskan adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **A. Urusan Wajib**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan:

1. Kekurangan guru di Sekolah Dasar
2. Kekurangan guru bidang studi di SMP

## **2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan:

Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi

## **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan:

Pelaksanaan perbaikan drainase Jln. Padang Luar Bukittinggi sampai tahun 2017, mengakibatkan debit air menuju Kota Bukittinggi semakin besar. Drainase Kota Bukittinggi tidak mampu menampung debit air dari Padang Luar sehingga perlu solusi untuk pengalihan debit air dari hulu/padang luar dan Jambu Air menuju Batang Tambuo atau dihantar langsung ke Batang Sianok

## **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan:

1. Belum adanya regulasi/peraturan dari provinsi tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran/bencana kepada kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Seringnya terjadi musibah di wilayah provinsi Sumatera Barat, dimana setiap kabupaten/kota diharapkan memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang terkena musibah,

terutama kepada kabupaten/kota tetangga sementara aturan daerah untuk hal tersebut belum ada.

2. Masih banyaknya personil damkar yang belum mengikuti diklat tentang penanggulangan kebakaran. Meningkatnya pembangunan gedung/bangunan serta untuk mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran di Kota Bukittinggi, diharuskan seluruh personil Damkar memiliki kemampuan/keahlian dalam penanggulangan kebakaran.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional Damkar. Tingginya tingkat kebakaran di Kota Bukittinggi, sementara sarana dan prasarana pendukung operasional Damkar masih kurang dan sudah berumur tua.
4. Belum adanya regulasi atau peraturan dari Provinsi tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran atau bencana kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
5. Masih banyaknya personil Damkar yang belum mengikuti Diklat tentang penanggulangan kebakaran
6. Masih kurangnya sarandan prasarana pendukung operasional Damkar.
7. Belum adanya kantor BPBD yang representatif
8. Belum adanya rencana induk penanggulangan bencana

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan:

1. Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi. Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada rumah penampungan sementara untuk Gelandangan dan Pengemis tersebut.
2. Meningkatnya jumlah eks. Penderita penyakit kejiwaan. Penderita penyakit kejiwaan yang telah melewati perawatan di RSJ Saanin Padang dan Membutuhkan rehabilitasi lebih lanjut di Panti Rehabilitasi agar penyakit kejiwaan mereka tidak muncul lagi.
2. Jumlah eks Pengguna narkoba, cenderung meningkat setiap tahunnya. Penanganan Eks. Pengguna Narkotika, Napza dan Psikotropika di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal.

## **7. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan:

1. Tidak ada data jumlah pencari tenaga kerja (pencaker)
2. tidak sebangunnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
3. terbatasnya kesempatan kerja
4. masih rendahnya kualitas pencari kerja,

## **8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan:

1. Masih rendahnya pemahaman perempuan dalam upaya perwujudan keluarga berkualitas agar terwujud ketahanan dalam keluarga
2. Didapatkan data-data dimana perempuan menjadi kepala keluarga di Kota Bukittinggi yaitu 629 perempuan kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 2146 orang (data LKKS 2017), ini sangat berdampak kepada kesenjangan ekonomi.
3. Adanya perempuan korban kebakaran Pasar Ateh dan Pasar Aur Kuning
4. Rendahnya angka partisipasi perempuan di legislatif
5. Belum tertanganinya perempuan korban kekerasan secara maksimal
6. Belum tertanganinya anak korban kekerasan secara maksimal
7. Masih minimnya sarana rumah anak dalam mendukung Kota Layak Anak dan 24 indikator kota layak anak belum terpenuhi.

## **9. Urusan Pangan**

Permasalahan:

Tidak dapat digunakan dengan maksimal karena belum ada mesin penggiling padi dan peralatan jemur serta alat untuk menjahit karung beras.

## **10. Urusan Pertanian**

Permasalahan:

1. Pengadaan tanah selalu terkendala oleh masyarakat: 1.) Rencana lokasi pertama (1)

ada 7 pemilik tanah, 4 sudah bersertifikat 3 belum bersertifikat dan tanah kaum atas nama Ir. H. Mursyid Dt. Mudo, hingga saat ini belum mengizinkan tanahnya untuk dijadikan pembangunan jalan kantor DPRD, 2. Rencana lokasi kedua (2) tidak jadi dilaksanakan karena banyak rumah msyarakat yang terkena dampak perencanaan jalan kantor DPRD, 3. Rencana lokasi ketiga (3) ada 6 pemilik, 2 bersertifikat, 4 tanah kaum, diantara 6 pemilik 1 tanah kaum atas nama ibuk Jus tidak setuju

2. Pengadaan tanah untuk instansi vertikal harus jelas. Tanah eks Lembaga Perumahan dan Permukiman Bukittinggi (Menhumkam RI) tersebut belum ada kejelasan MOU dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

## **11. Urusan Lingkungan Hidup\**

Permasalahan:

1. Terjadinya longsor pada TPA Regional Payakumbuh
2. Tercemarnya Sungai Batang Agam
3. Sulitnya mengatasi sampah dari daerah tetangga

## **12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan:

1. Intensitas advokasi KIE yang masih rendah serta koordinasi yang terbarukan yang selama ini masih belum intensif antar lembaga dan institusi sehingga akan berdampak pada angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk.
2. Pengetahuan bidang kependudukan, petugas ini yang masih kurang, termasuk sistem intensitas serta kepanutan
3. Melemahnya kemitraan antar lembaga yang sifatnya bekerja bersama
4. Menu yang ada dipetunjuk operasional tidak semuanya memenuhi kebutuhan pada dana DAK sub bidang KB
5. Masih rendahnya akseptor baru MKJP
6. Kekurangan alat atau teknologi untuk produksi poktan UPPKS

### **13. Urusan Perhubungan**

Permasalahan:

1. Dengan kondisi Traffick Light yang sudah berumur maka terjadi kerusakan yang tidak bisa diprediksi
2. Zona Selamat Sekolah yang ada tidak memadai
3. Kepemilikan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor belum jelas
4. Kurangnya kesadaran pengemudi Angkutan Umum mengikuti Peraturan Berlalulintas, banyak pengemudi angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya terutama dalam retribusi angkutan
5. Bukittinggi tidak memiliki terminal angkutan barang
6. Ruas jalan By Pass yang melintasi Kota Bukittinggi belum bersambung sesuai trase jalan rencana awal
7. Kondisi pengelolaan parkir masih terdapat kendala dengan adanya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap Jukir yang bertugas terutama gangguan premanisme. Lokasi parkir saat ini banyak yang masih on street sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas

### **14. Urusan Komunikasi dan Informatika**

**Permasalahan:**

1. Masih kurang optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
2. Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah

### **15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Permasalahan:**

1. 414 UMKM anggota koperasi terkena dampak musibah kebakaran Lantai II Pasar Atas pada tanggal 30 Oktober 2017
2. Akses pemasaran produk UMKM masih relatif rendah.
3. Kurangnya SDM pembina koperasi baik kualitas maupun kuantitas
4. Biaya notaris terasa memberatkan bagi koperasi baru yang didirikan oleh para pengusaha mikro
5. Wirausaha baru mengalami kendala dalam hal kecukupan modal.

6. Koperasi pemula yang beranggotakan UMKM lambat berkembang karena kekurangan modal

#### **16. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan:

1. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi
2. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

#### **17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

**Permasalahan:**

1. Pada tahun 2013 dari dana APBD dibangun tiang-tiang sebanyak 32 buah dan tiang-tiang tersebut tidak dirancang untuk pembangunan bertingkat, tidak memiliki basement. Sehubungan dengan belum jelasnya status KDP Sporthall maka Pemko (Disparpora) akan memintakan pendapat hukum dari TP4-D pada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi.
2. Bahwa kolam renang Atas Ngarai tidak bisa dimanfaatkan karena ukuran kedalaman kolam tidak standar dan proses sterilisasi air tidak layak karena tidak mempunyai sistem penyaringan air. Pada saat ini keberadaan kolam renang Bantola dalam kawasan simpadan Ngarai Sianok 100m dari bibir ngarai dan lebih kurang 1/3 nya termasuk dalam kawasan 50m dari bibir ngarai.

#### **18. Urusan Persandian**

Permasalahan:

1. Tidak tersedianya dana untuk sosialisasi sertifikat transaksi elektronik
2. Permasalahan peningkatan kapasitas dan keahlian ASN fungsional persandian

#### **19. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan:

1. Belum memiliki grand design kebudayaan
2. Rancangan pembangunan Hatta memorial Heritage di Istana Bung Hatta Bukittinggi
3. Pengembangan dan pemanfaatan LP
4. Kurang terkelolanya sanggar
5. Belum optimalnya ABS-SBK

## **20. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional pustakawan

## **21. Urusan Kearsipan**

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional arsiparis.

## **B. Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pariwisata**

Permasalahan:

1. Banyaknya proposal kerjasama/promosi yang tidak dapat diikuti karena terbatasnya dana promosi yang berasal dari APBD
2. Permasalahan penanganan konservasi satwa liar. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung aktivitas Konservasi penanganan konservasi satwa liar.
3. Belum adanya persamaan persepsi/kesepakatan antara masyarakat dengan PEMKO Bukittinggi tentang Pengembangan Kawasan Panorama Baru
4. Belum adanya SK Gubernur tentang penetapan kawasan Ngarai Sianok sebagai Geo Area dalam pengembangan Geopark Ranah Minang dan
5. Belum adanya BKSDA untuk kawasan konservasi

### **2. Urusan Pertanian**

Permasalahan:

1. Belum adanya perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. Batas wilayah pertanian belum sinkron dengan RTRW Kota Bukittinggi
3. Keterlambatan penyaluran pupuk dilapangan sering terjadi karena keterbatasan jumlah stok di gudang pengecer yang tidak memiliki modal, sehingga harus mengumpulkan uang dari petani sebelum melakukan penebusan ke distributor.

### **3. Urusan Perdagangan**

Permasalahan:

1. Aset Kemetrolagian yang berada di Bukittinggi belum diserahkan kepada Kota Bukittinggi oleh Pemerintah Provinsi
2. Biaya Operasional Belum memadai untuk BPSK. Usulan untuk dibantu oleh Kabupaten/Kota belum didukung dengan Surat Gubernur
3. Permasalahan timbul setelah terjadi kebakaran Pasar atas
  - Pasca kebakaran hasil uji labor bangunan tidak layak
  - Jumlah penampungan tidak Cukup
  - Pakir kendaraan roda empat tidak tersedia
  - Ruang terbuka hijau & rest area hanya berpusat di area jam gadang sehingga bagian blok c, blok e dan blok f sepi pengunjung
  - Kendaraan roda 4 yang pakir harian sangat banyak seharusnya ditata
  - Penegakan aturan masih lemah
  - Pengunjung sering tersesat karena tidak ada penunjuk arah (lantai dasar)
4. Permasalahan yang timbul setelah terjadi kebakaran di Pasar Simpang Aur:
  - Pasca kebakaran hasil uji labor sebahagian stuktur bangunan tidak layak
  - Pasar tradisional tidak layak kurang luas
  - Tidak ada terminal bongkar muat barang ( tempat khusus)
  - Draenase pasar tidak lancar
  - Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak memadai.
5. Pasar bawah Kurang bersih dan tidak layak sebagai Pasar Tradisional. Pengelompokan jenis dagangan tidak berjalan sesuai rencana. Drainase pasar sering bermasalah

### **4. Urusan Perindustrian**

Permasalahan:

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah.
2. Kurangnya penguasaan teknologi dan kapasitas SDM.
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk.

4. Masih banyak produksi industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga

## **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan:

Belum ada juknis tentang pemanfaatan sisa DAK

## **C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Fungsi Perencanaan**

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas
2. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi
3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
5. Belum adanya pengintegrasian sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi

### **2. Fungsi Kepegawaian**

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya

4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
5. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

### **3. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan**

1. Evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
3. Rendahnya waktu lama diklat yang diikuti aparatur
4. Belum maksimalnya upaya pengembangan Widyaiswara
5. Masih kurangnya sumber daya kediklatan yang modern dan profesional
6. Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
7. Belum adanya sistem informasi kediklatan

### **4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasinya fungsi kelitbangan sebagai dasar penciptaan inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
2. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas
3. Minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Kelitbangan
4. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim
5. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas
6. Minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi pada Pemerintahan
7. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

## 5. Fungsi Pengawasan

### Permasalahan:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bukittinggi
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
5. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

## 6. Fungsi lainnya

### Permasalahan:

1. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun adanya kebijakan pusat yang menyatakan bahwa untuk dikota yang tidak mempunyai desa urusan tidak dilaksanakan. Dengan tidak adanya instansi khusus tersebut menyebabkan kesulitan juga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kota khususnya yang tidak menyelenggarakan urusan tersebut. Kondisi saat ini bahwa bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara parsial oleh beberapa SKPD atau bagian yakni dinas P3APPKB, bagian Pemerintahan dan kecamatan.
2. PP Nomor 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan namun PP tersebut tidak dicabut. Ini berakibat terhadap batas wilayah Kota Bukittinggi yang belum ada ketegasan, dimana untuk menetapkan batas segmen batas antar daerah harus ditetapkan dengan Permendagri, sampai saat ini Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam belum memiliki batas yang ditetapkan Permendagri. Hal ini berimplikasi juga terhadap penegasan batas kecamatan dan kelurahan di Kota Bukittinggi yang belum memiliki legalitas hukum

yang pasti dan masih berpedoman pada batas-batas alam.

3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 364 menyatakan bahwa daerah yang berbatasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib melakukan kerjasama antar daerah. Kondisi saat ini bahwa banyaknya permasalahan Kabupaten Agam yang berimbas dan menjadi permasalahan bagi kota diantaranya yakni terkait masalah persampahan yakni banyaknya sampah yang berasal dari wilayah Agam, masalah drainase yang berakibat bagi kota, permasalahan tata ruang dsb. Kalau terus dibiarkan permasalahan ini lama kelamaan akan menjadi beban bagi Kota Bukittinggi.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Perkembangan ekonomi global cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017 perekonomian global agak membaik naik 2,7% yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,4%. Kenaikan ini didorong dengan adanya kenaikan pada sektor manufaktur dan perdagangan dan juga karena adanya kepercayaan pasar. Stabilitasnya harga komoditas juga mendorong pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian. Dengan kondisi diatas pertumbuhan negara maju sebesar 1,9% yang juga akan memberi dampak pada negara mitra dagang negara maju termasuk Indonesia.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 sebesar 5,07%, merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014, namun lebih rendah sedikit dari target tahun 2017 yaitu 5,2%. Agak membaiknya pertumbuhan ekonomi disebabkan Lingkungan global yang mendukung, Pengelolaan dan kredibilitas fiskal yang telah membaik, Pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor, Pertumbuhan konsumsi swasta menguat, didukung nilai rupiah yang stabil dan menurunnya inflasi, Pertumbuhan investasi terus menguat dan pemulihan harga komoditas berlanjut, reformasi yang terus berlanjut untuk memperbaiki lingkungan bisnis, Menurunnya tingkat suku bunga dan sentimen bisnis yang lebih baik.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 secara umum berpengaruh pada kondisi perekonomian Kota Bukittinggi dalam 3 ( tiga ) tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2014-2016 berturut-turut sebesar 6,18 %, 6,12 %, 6,04 %. Sedangkan tingkat inflasi berkisar 8,89 %, 2,99 % dan 8,19 %. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat bertambahnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sektor- Sektor yang dimaksud Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil

dan sepeda motor, Transportasi dan pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Disamping untuk meningkatkan PDRB, tujuan pembangunan yang dilaksanakan juga untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, inflasi dan meningkatkan investasi.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2019.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada Rancangan Pemerintah Rancangan APBN 2019 asumsi target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 berkisar 5,4-5,8 %. Langkah yang akan ditempuh untuk dapat terwujudnya angka tersebut adalah percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan tertinggal, dan mendorong kegiatan ekonomi bernilai tambah agar tidak terlalu bergantung pada komoditas yang harganya rentan terhadap gejolak. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas.

Dalam hal menjaga konsumsi rumah tangga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, dan untuk menjamin daya beli masyarakat, pemerintah juga menargetkan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah, dengan rentang inflasi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2019 adalah 3,5 plus minus 1 persen.

Dalam hal perluasan usaha dilakukan dengan memelihara momentum pertumbuhan investasi dan ekspor dengan melakukan berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor,

menghilangkan berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dan melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan ketenaga kerjaan agar minat investasi semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi dan berbagai resiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2019 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional dan daerah.

Meskipun demikian, perbaikan tersebut dengan menghadapi sejumlah resiko terjadinya gejolak ekonomi global cukup signifikan yang ditandai dengan kebijakan Amerika yang semakin proteksionis dengan dilakukannya pengenaan tarif bea masuk pada beberapa komoditas penting.

Selain itu, dengan adanya resiko global lain seperti rebalancing ekonomi China, pasar keuangan akan mengalami pengetatan dengan adanya normalisasi moneter Amerika, dan kemungkinan terjadinya tensi geopolitik pada Laut China Selatan, Korea Utara, dan negara-negara Timur Tengah. Dengan adanya arah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) yang mendorong kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, kebijakan moneter di Amerika Serikat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan Amerika Serikat, yang juga akan mempengaruhi pergerakan arus modal secara global, sehingga pada tahun 2019 banyak faktor yang akan menjadi tantangan nilai tukar rupiah.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2019, adalah :

- (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8% ;
- (2) inflasi sebesar 3,5 plus minus 1%;
- (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.700 – 14.000 per dolar Amerika Serikat.

Sementara pada tahun 2020 hingga 2021, ekonomi Indonesia baru akan mengalami kenaikan di atas 6%, karena investasi yang akan tumbuh di kisaran 6% sampai 7% di periode tersebut. Serta, ekspor akan tumbuh 4% di 2020-2021.

Pembangunan di daerah juga akan dipengaruhi capaian dan target pembangunan regional. Misi kedua Gubernur Sumatera Barat adalah mewujudkan peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif yang berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan kawasan sentra produksi pertanian ( tanaman pangan dan hortikultura ), pengembangan komoditi unggulan perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri melalui pengembangan sentra-sentra industri komoditi unggulan dan daya saing industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 sebesar 6,18,%, pada tahun 2014 sebesar 5,9 % melampaui angka pertumbuhan nasional, pada tahun 2015 sebesar 5,41% melampaui angka pertumbuhan nasional, pada tahun 2016 sebesar 5,26%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 yakni sebesar 5,38 % juga melampaui target pertumbuhan nasional.

Dari uraian target makro ditingkat nasional dan regional Sumatera Barat tersebut dapatlah dilakukan analisa perbandingan dan proyeksi kinerja makro Kota Bukittinggi, dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas

perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi selama lima tahun mengalami sedikit penurunan dari 6,18% menjadi 6,12%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Bukittinggi sebesar 6,04%, selanjutnya pada tahun 2017 diperkirakan juga turun menjadi 6,01%.

Penurunan ini disebabkan agak berkurangnya PDRB dari beberapa Sektor yang cukup dominan untuk Kota Bukittinggi, yaitu Sektor Pertanian dan Kehutanan tahun 2015 dan 2016 dari 1,42% menjadi 1,38% , Sektor Industri pengolahan yang jumlahnya cukup dominan di Bukittinggi dari 6,8% menjadi 6,56% , Konstruksi dari 6,41% menjadi 6,22% serta transportasi dan pergudangan dari 10,83% menjadi 10,6%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang agak menurun, Kota Bukittinggi juga mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2015 dan 2016 dari 2,99% menjadi 8,19%. Tingginya tingkat inflasi ini antara lain disebabkan meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan 2,69%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,04%, sandang 0,86%, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,04%. Tingginya inflasi ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti jika tingkat inflasi di daerah tinggi, karena peningkatan pendapatan masyarakat dirasakan lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa di pasar.

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Bukittinggi menurut dokumen RPJPD adalah mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu berdaya saing. Peningkatan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kebijakan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat secara lebih merata. Fokus pengembangan ekonomi kerakyatan

Kota Bukittinggi terletak pada kegiatan perdagangan, jasa, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan kerajinan rumah tangga.

Dalam rangka percepatan pengembangan usaha perdagangan, koperasi, UKM dan kerajinan rumah tangga perlu dibangun kemitraan usaha antara Koperasi dan UKM dengan perusahaan besar ( swasta besar, BUMN dan BUMD)

Kemitraan usaha lebih diutamakan kepada usaha yang mempunyai saling keterkaitan sehingga kemitraan dapat berjalan sinergis dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terwujud pola saling mendukung antara usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar.

Sejalan dengan hal ini perlu pula diciptakan iklim usaha yang baik dan kondusif untuk mendorong peningkatan investasi yang akan berdampak secara langsung bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pekerja dan keuntungan pengusaha.

Pengembangan industri kerajinan dilakukan melalui pendekatan sentra atau kawasan untuk mendorong pertumbuhan industri secara sinergis melalui pemanfaatan keterkaitan usaha satu sama lainnya. Disamping itu, perlu pula dilakukan lebih memudahkan pembinaan baik dari segi manajemen usaha maupun pengembangan bertugal bentuk latihan dan pendidikan praktis baik dibidang manajemen, teknologi dan pengawasan mutu. Kebijakan pengembangan industri kecil perlu didukung pula oleh penguatan kelembagaan usaha dengan memfasilitasi pengembangan teknologi atau disain produk dan kemudahan dalam pemasaran serta sumber modal usaha.

Dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2025 mendatang, peningkatan daya saing produk sangat penting artinya untuk dapat meningkatkan ekspor daerah. Peningkatan daya saing tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor yang sudah ada selama ini disamping mengembangkan berbagai jenis komoditas ekspor baru yang didukung oleh potensi daerah. Dalam hal ini, pengembangan ekspor akan diarahkan pada produk-produk usaha kecil dan menengah serta kerajinan rumah tangga yang sudah mempunyai jumlah produksi

besar, kualitas baik dan daya saing memadai. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk tersebut antara lain dilakukan melalui penetapan standarisasi produk dan mengontrol kualitas sesuai standar baku terutama untuk industri kecil, dan menengah serta kerajinan rumah tangga yang potensial. Disamping itu, perlu pula disediakan fasilitas dan dukungan untuk pengembangan teknologi produksi, dan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) khususnya dibidang industri kecil dan kerajinan rakyat guna mendorong peningkatan kualitas produk dan menciptakan produk unggulan baru yang berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut peningkatan jaringan informasi dan promosi usaha perlu terus diusahakan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Melalui kebijakan ini diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan serta pariwisata. Untuk mengefektifkan pelaksanaan promosi, kegiatan akan dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi, sinergis (KISS) dengan berbagai pihak terkait.

Disamping meningkatkan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dilakukan dengan mewujudkan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Wisata. Sudah sejak lama kota Bukittinggi dikenal sebagai kota wisata utama di Propinsi Sumatera Barat. Dengan potensi pariwisata yang lebih menonjolkan kealamian daerah serta didukung oleh kegiatan ekonomi rakyat dan budaya masyarakat ini, akan terus dikembangkan menjadi kawasan pariwisata utama untuk Indonesia bagian Barat. Potensi pariwisata ini menjadi semakin besar dengan adanya Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang dapat mendorong kedatangan wisata Nusantara maupun mancanegara dan adanya *Fly-over* Kelok Sembilan, yang melintasi Kota Bukittinggi juga turut pula meningkatkan arus wisatawan ke Kota Bukittinggi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2025.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019**

Perkembangan ekonomi global di tahun 2018 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017 meski masih diwarnai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh 3,9 % pada tahun 2018 dan 2019.

Pertumbuhan global tersebut akan disumbangkan dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang akan meningkat pada 2018. hal itu didukung dengan membaiknya perdagangan global dan kebijakan fiskal Amerika Serikat (AS) yang melonggar dan meningkatnya investasi dunia usaha.

Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan meningkat menjadi 2,5 persen pada 2018 dari sebelumnya 2 persen. Ini didorong stimulus fiskal yang lebih tinggi. Agak sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik bakal mengalami sedikit penurunan dibandingkan 2017 lalu. Adapun penurunan tersebut hanya 0,1 persen, yakni dari 6,1 persen pada 2017 kemudian menjadi 6,0 persen pada 2018. Penurunan tersebut kemungkinan masih akan berlanjut pada 2019, yakni menjadi 5,9 persen.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2019, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8 persen; (2) inflasi sebesar 3,5 plus minus 1 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.700 – Rp. 14.000 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,6 - 5,2 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) berkisar 60 – 70 dollar AS per barrel. (6) lifting minyak bumi diprediksi mencapai 722-805 ribu barrel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1.210-1.300 ribu barrel setara minyak per hari per barel.

Kondisi perekonomian Sumatera Barat tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai 6,26 persen, sesuai dengan target yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. kondisi ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan kinerja industri pengolahan di Sumbar yang terus

tumbuh. dan pemerintah terus menggenjot konsumsi pemerintah untuk menaikkan serapan belanja, didorong oleh perluasan pembukaan lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan transportasi, juga mengupayakan peningkatan pertumbuhan dengan mendorong kemandirian pangan, pengembangan industri kakao, karet, dan minyak sawit mentah (CPO) yang selama ini menjadi primadona komoditas ekspor Sumatra Barat. Dari sektor transportasi dan pergudangan akan meningkat dengan adanya pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat dan beroperasinya layanan kereta bandara pada 2018 mendatang.

Dengan perkiraan agak membaiknya pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019 juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bukittinggi.

Kondisi ekonomi daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dari 32,71% menjadi 33,51% namun pada tahun 2016 naik menjadi 33,59%. Pertumbuhan juga terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan dan makan minum, jasa keuangan dan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan dan jasa lainnya. Sektor industri dan pengolahan walaupun mengalami penurunan tetapi cukup banyak dalam menyumbang PDRB Kota Bukittinggi yaitu 6,56% begitu juga dengan sektor konstruksi dan transportasi dan pergudangan sebesar 10,66%

Penurunan pertumbuhan sektor pertanian (primer) tidak berarti produksi sektor tersebut turun, namun pertumbuhannya kalah cepat dengan sektor yang lain.

Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan ekonomi domestik nasional. Penyerapan anggaran pemerintah serta pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. PRDB ADHB Kota Bukittinggi dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi, dengan peningkatan PDRB pada beberapa sektor yang baru tumbuh. Pendapatan produk sektor pertama pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang banyak berkontribusi di dalam PDRB. Sedangkan sektor kedua yang berkontribusi pada PDRB adalah sektor transportasi dan pergudangan dan sektor ketiga adalah industri pengolahan sebagai indikator

keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berhasil membawa perubahan yang diinginkan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator.

Sesuai dengan misi ketiga dalam RPJMD Kota Bukittinggi adalah :

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan”

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan Peningkatan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kebijakan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan iklim usaha yang baik dan kondusif untuk mendorong peningkatan investasi yang akan berdampak secara langsung bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pekerja dan keuntungan pengusaha. Pengembangan industri kerajinan dilakukan melalui pendekatan sentra atau kawasan untuk mendorong pertumbuhan industri kerajinan dan peningkatan daya saing industri terutama yang menjadi komoditi unggulan daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang paling dominan dilakukan adalah dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pertumbuhan dan pengembangan destinasi pariwisata yang telah menjadi sektor unggulan Kota Bukittinggi.

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2017 dan 2018 dan perkiraannya pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2014 - 2016 berikut dengan proyeksi tahun 2017- 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	4.487,8	6.141,5	6.749,7	7.948,7	8.295,7	8.919,4
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar)	4.592,5	4.873,7	5.168,0	5.549,7	5.883,4	6.649,8
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,18	6,12	6,04	6,20	6,30	6,40
4.	Tingkat Inflasi (%)	8,89	2,99	8,19	1,38	4,0	4,5
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	•Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,38	1,28	1,26	1,24
	•Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•Industri Pengolahan	7,27	6,80	6,56	6,45	6,30	6,28
	•Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,66	0,70	0,70	0,75	0,80
	•Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	•Konstruksi	6,40	6,41	6,22	6,03	6,03	6,03
	•Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	33,51	33,59	33,11	33,15	33,17
	•Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,83	10,66	10,60	10,68	10,66
	•Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	5,44	5,74	5,85	5,85	5,97
	•Informasi dan Komunikasi	6,59	5,97	5,95	6,14	6,14	6,35
	•Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,12	6,23	6,45	6,45	6,50
	•Real Estat	3,51	3,57	3,59	3,36	3,35	3,23
	•Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,67	0,61	0,61	0,63
	•Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,19	6,15	6,64	6,64	6,33

	•Jasa Pendidikan	5,24	5,29	5,39	5,60	5,60	5,62
	•Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,08	3,07	3,05	3,05	3,04
	•Jasa lainnya	3,86	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	6,04	6,04	3,62	3,54	3,52
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,02	78,72	79,11	79,47	79,82	79,93

Sumber: Data tahun 2014 -2016 dari BPS Kota Bukittinggi

Data tahun 2017 s/d 2019 hasil proyeksi dari Bapelitbang

Keterangan: \* angka diperbaiki

\*angka sementara

### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

PDRB Atas Harga Berlaku dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terlihat adanya kenaikan adalah 4.487,8 ; 6,141,5; 6,749,7 dan proyeksi untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah 7,948,7; 8.295,7 ; 8,919,4.

Nilai PDRB Atas Harga Konstan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 4.592,5 ; 4.873,7 ; 5,168,0 dan proyeksi tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah 5,549,7 ; 5,883,4 ; 6,649,8.

### B. Tingkat pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 namun masih diatas target pertumbuhan provinsi Sumatera Barat. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 6,18 ; 6,12 ; 6,04 dan proyeksi tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah 6,20 ; 6,30 dan 6,40.

### **C. Pendapatan perkapita**

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk.

### **D. Laju inflasi**

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga.

Laju inflasi dari tahun 2014 sampai 2018 adalah 8,89 % ; 2,99 % ; 8,19 % ; 1,38%; dan Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun ke depan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD).proyeksi tahun 2019

### **E. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari

pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Angka Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah 3,93% ; 6,04 % ; 6,04 % dan proyeksi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 3,62% ; 3,54% dan 3,52%.

#### **F. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah 78,02% ; 78,72% ; 79,11% dan proyeksi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 79,47% ; 79,82% dan 79,93%.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

#### **3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Selama Periode Tahun Anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan

(3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line system* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Intensifikasi PAD melalui penyesuaian tarif pajak dan tertribusi.
7. Peningkatan kebijakan PAD yang berasal dari pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, penerangan jalan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB.
8. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah

melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.

3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur.
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM).
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- f) Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas output dan outcomenya.
- g) Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- i) Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penganggaran ( Silpa ) tahun sebelumnya yang besaran angkanya diperkirakan sewaktu melakukan pembahasan anggaran tahun yang akan datang atau besaran angkanya yang pasti diperoleh setelah dilakukan audit oleh BPK, sementara itu Pengeluaran pembiayaan bersumber dari Pembentukan dana cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Secara umum Silpa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menutupi defisit setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam rangka melaksanakan proses perencanaan pembangunan, dengan arti kata Silpa tahun sebelumnya direncanakan untuk mengerjakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Bukittinggi terjadi kenaikan Silpa yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah serta kurang akuratnya dalam perhitungan belanja, baik pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung.

## Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber utama pendanaan pembangunan daerah adalah berasal dari Pendapatan Daerah. Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya dan tahun berjalan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 93.527.242.411,00 dengan rincian pajak daerah dapat tercapai sebesar Rp. 45.293.035.421,00, retribusi daerah Rp. 20.078.534.219,00, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.352.600.766,00 serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 22.803.072.005,00.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>593,323,296,014</b>	<b>647.045.711.855,85</b>	<b>703,137,133,154</b>	<b>688.391.605.084</b>	<b>688.391.605.084</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>66,027,359,716</b>	<b>71.303.771.735,85</b>	<b>97,524,097,154</b>	<b>93.561.077.670</b>	<b>93.561.077.670</b>
1.1.1	Pajak Daerah	29,002,139,678	30.709.690.231,00	46,068,135,193	45.293.035.421	45.293.035.421
1.1.2	Retribusi Daerah	17,031,261,904	21.070.502.562,00	36,468,949,414	20.078.534.219	20.078.534.219
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	3,884,306,585	4.636.543.697,00	3,448,620,797	5.352.600.766	5.352.600.766
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,109,651,549	14.887.035.245,85	11,538,391,750	22.803.072.005	22.803.072.005
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>449,872,722,059</b>	<b>547.829.867.933,00</b>	<b>577,015,505,000</b>	<b>592.863.505.745</b>	<b>592.863.505.745</b>
1.2.1	Bagi Hasil	12,555,527,059	15.128.297.227,00	17,789,622,000	17.653.790.038	17.653.790.038

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
	Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak					
1.2.2	Dana Alokasi Umum	408,640,651,000	458.968.482.000,00	458,968,482,000	540.939.366.142	540.939.366.142
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	28,676,544,000	73.733.088.706,00	100,257,401,000	34.270.349.565	34.270.349.565
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>77,423,214,239</b>	<b>27.912.072.187,00</b>	<b>28,597,531,000</b>	<b>86.171.991.572</b>	<b>86.171.991.572</b>
1.3.1	Hibah	-	-		32.221.258.238	32.221.258.238
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21,308,056,239	22.912.072.187,00	21,097,531,000	53.950.733.334	53.950.733.334
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,991,158,000	5.000.000.000,00	7,500,000,000		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,124,000,000	-			

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018

Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi pelaksanaan RPJMD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi 2017	Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	351.010.851.917	285.762.968.858	377.260.127.919	404.925.382.491,30	412.415.760.682,99
2.1.1	Belanja Pegawai	336.101.758.265	263.665.444.864	361.721.489.356	378.807.563.823,80	398.797.942.014,99
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	11.063.426.045	14.978.563.326	11.114.839.895	19.000.000.000	9.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.333.685.699	2.001.142.000	2.405.980.000	2.500.000.000	1.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada	511.981.908	617.818.668	617.818.668	617.818.668	617.818.668

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi 2017	Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
	Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa					
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	1.400.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
.	<b>Belanja Langsung</b>	78.733.088.706	107.757.401.000	366.454.452.503	445.210.916.797,38	437.720.538.606,19
	Belanja DAK	73.733.088.706	100.257.401.000	361.454.452.503		
	Belanja DID	5.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000		
	Pagu Indikatif					

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Untuk masa yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan strategi penambahan sumber pendanaan pembangunan melalui alternatif pinjaman dari dalam negeri sepanjang memungkinkan menurut ketentuan yang berlaku. Disamping pendapatan daerah, dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dan 2017 serta Proyeksi 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d. 2018**  
**dan Proyeksi / Target Tahun 2019 dan 2020**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi 2017	Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	65.263.139.853	142.030.505.824	132.030.505.824	77.573.559.561,18	77.573.559.561,18
<b>1.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	88.463.139.853,	146.030.505.824	377.260.127.919	79.573.559.561,18	79.573.559.561,18
1.1.1	Silpa Tahun sebelumnya	88.463.139.853	75.220.682.946	75.220.682.946	79.573.559.561,18	79.573.559.561,18
1.1.2	Pencairan dana cadangan	-	70.809.822.878	70.809.822.878	53.552.400.861,00	
	Pembangunan RSUD	-	70.809.822.878	70.809.822.878	53.552.400.861,00	
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	-	-		
<b>1.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	23.200.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	-	-		
1.2.2	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	-	-		
1.2.3	Penyertaan Modal	8.200.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

*Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018*

Proyeksi Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 77.573.559.561,18 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 79.573.559.561,18 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp.53.552.400.861,00 - Sementara untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dialokasikan untuk:

1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp. -
2. Revitalisasi kawasan jam gadang dan sekitarnya sebesar Rp. 0-

3. Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp.0,-
4. Penyertaan modal pada BUMD (BPR) Bukittinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga netto pembiayaan daerah sebesar Rp. 77.573.559.561,18.

**Tabel 3.5.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>883.141.670.275</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>105.087.802.438</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	52.548.979.695
1.1.2.	Retribusi Daerah	21.210.963.549
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.956.374.132
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	25.603.289.247
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>633.169.798.440</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	19.777.540.975
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	593.951.424.023
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	36.367.694.958
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>144.884.069.397</b>
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.983.560.205
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.274.437.734
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, bersifat makro, dan dapat diwujudkan 5 tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dibutuhkan sasaran yang merupakan alat untuk pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran RPJPD.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021, visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. RPJMD Kota Bukittinggi telah dirubah melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Perubahan pada dokumen tersebut meliputi perubahan terhadap tujuan dan sasaran dimana tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

<b>VISI :</b>			
<b>“TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	2	3	4
1.	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan
			Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya reformasi birokrasi
			Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan
3.	Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota
			Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan
			Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)
		Peningkatan Penataan Ruang Kota	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota
		Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia	Meningkatkan pelestarian cagar budaya

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana
4.	Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
		Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan pelayanan pariwisata
		Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Unggul	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
			Meningkatkan kualitas pendidikan
			Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
			Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
			Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan
		Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dan jasa
			Terjaganya stabilitas harga
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi	Terkendalnya jumlah penduduk
			Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat
			Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

## **4.2 Prioritas Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kepada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019**

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 **“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”**

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 telah disepakati 5 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

### **4.2.2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2019 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna

mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Berdasarkan tema RKP tahun 2019 yaitu Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas maka Provinsi Sumatera Barat memiliki tema RKPD untuk tahun 2019 adalah:

**‘PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN DASAR, PENINGKATAN INVESTASI, INFRASTRUKTUR UNTUK MENURUNKAN MEMISKINAN DAN DAERAH TERTINGGAL’.**

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif; (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan dan; (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
	Pendidikan	Pendidikan
4.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5.	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6.	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7.	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9.	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Penyelarasan Antara prioritas Nasional Tahun 2019 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah**

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat	Keterangan
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Prioritas 1
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat	Keterangan
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	Prioritas 5
		Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2 (Kesbangpol, Satpol PP)

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:

**1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian:

- 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif,
- 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai,
- 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi,
- 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat,
- 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau,
- 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan
- 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah social
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat

## **2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan**

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### **3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan**

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya integritas peserta didik
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

#### **4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

#### **5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola

pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
3. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

## **6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

## **7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang

laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai: Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

## **8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

## **9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan

pemukiman.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

#### **10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
4. Berkurangnya resiko bencana
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
6. Terpeliharanya debit sungai
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah:

**“PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SEKTOR UNGGULAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Nawacita adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI</b>
1.	Pendidikan	1	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	1	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
2.	Kesehatan	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3.	Perumahan dan Pemukiman	3	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	3	Pelestarian Lingkungan Hidup
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	4	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi	4	Pengembangan Pariwisata
5.	Ketahanan Energi	5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
9.	Pembangunan Wilayah				
6.	Ketahanan Pangan	6	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7.	Penanggulangan Kemiskinan	7	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
8.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	8	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan		
10.	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	9	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	8	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
		10	Pembangunan mental da pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	9	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya

Pada tabel diatas tergambar keterkaitan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas Kota Bukittinggi. Keseluruhan program prioritas nasional

terdapat keselarasannya dengan program prioritas provinsi dan 9 program prioritas provinsi adanya sinkronisasi program prioritas di daerah dan 1 (satu) program prioritas provinsi yang tidak menjadi program prioritas Kota Bukittinggi yaitu Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman (program nasional), Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan (program provinsi).

Sinkronisasi prioritas nasional, prioritas provinsi Sumatera Barat dan prioritas Kota Bukittinggi sebanyak 9 (Sembilan) prioritas adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 Provinsi : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan  
Prioritas 1 Kota : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
2. Prioritas 2 Provinsi : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat  
Prioritas 2 Kota : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Prioritas 3 Provinsi : Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam  
Prioritas 3 Kota : Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Prioritas 4 Provinsi : Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam  
Prioritas 4 Kota : Pengembangan Pariwisata
5. Prioritas 5 Provinsi : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur  
Prioritas 5 Kota : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
6. Prioritas 4 Provinsi : Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi  
Prioritas 4 Kota : Pengembangan Pariwisata
7. Prioritas 5 Provinsi : Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis  
Prioritas 5 Kota : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

8. Prioritas 6 Provinsi : Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
- Prioritas 6 Kota : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
9. Prioritas 7 Provinsi : Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
- Prioritas 7 Kota : Penanggulangan Kemiskinan
10. Prioritas 9 Provinsi : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
- Prioritas 9 Kota : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
11. Prioritas 10 Provinsi : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
- Prioritas 10 Kota : Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan prioritas nasional, provinsi Sumatera Barat dan prioritas Kota Bukittinggi tahun 2019 juga bertujuan untuk pencapaian visi dan misi kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Prioritas Pembangunan Tahun 2019**

<b>MISI</b>	<b>PRIORITAS</b>
1	2
MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi	PRIORITAS 9 Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama,

<b>MISI</b>	<b>PRIORITAS</b>
1	2
berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	Adat dan Budaya
MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
MISI 3 Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	PRIORITAS 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
	PRIORITAS 4. Pelestarian Lingkungan Hidup
MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	PRIORITAS 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	PRIORITAS 8. Penanggulangan Kemiskinan
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
	PRIORITAS 6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
	PRIORITAS 7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	PRIORITAS 1. Pengembangan Pariwisata

- Misi 1 : Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai

potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat) melalui Prioritas 9 : Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya

- Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan, melalui Prioritas 2 : Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan, melalui prioritas 3 : Peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur dan prioritas 4 : Pelestarian lingkungan hidup
- Misi 4 : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna, melalui prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan
- Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat, melalui prioritas 9 : Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya, prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan, prioritas 6 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata

#### 4.2.4. Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Pembangunan Tahun 2019 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai pada tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

##### 1) Prioritas 1: Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 1.</b> Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan	1.	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	0	100

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2016	TARGET 2021
budaya dalam pendidikan			

## 2) Prioritas 2: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 2:</b> Terlaksananya reformasi birokrasi	1. Nilai SAKIP	SAKIP C	SAKIP A
	2. Peringkat LPPD	LPPD RANKING 65	LPPD RANKING 30
	3. Indeks RB		B
	4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	30	80
<b>SASARAN 3:</b> Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan	Rasio kemandirian keuangan daerah	0,124	0,140

## 3) Prioritas 3: Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 4.</b> Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1. Harapan lama sekolah	14,7	15
	2. Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,85	11,20
	3. APK PAUD (3 - 6 TH)	86%	88,50%
	4. Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP	0,22%	0,04%
<b>SASARAN 5.</b> Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	81,35%
	2. Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	90,90%

## 4) Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 6.</b> Peningkatan kualitas layanan kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	73,13	73,12 Tahun
<b>SASARAN 7.</b> Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	1.	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	91%	93%
	2.	Persentase sarana air minum memenuhi syarat	80	100
<b>SASARAN 8 :</b> Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	1	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	30	100
	2.	persentase pelayanan kesehatan dasar	100	100
	3.	persentase keluarga miskin yang terlayani	100	100

#### 5) Prioritas 5: Pengembangan Pariwisata

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 9.</b> Meningkatkan pelayanan pariwisata	1.	Kunjungan Wisatawan	460.905 orang	588.245 orang
	2.	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	1,5 Hari	3 Hari

#### 6) Prioritas 6: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 10.</b> Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,12%	6,50%
	2.	PDRB Perkapita	49,88 Juta	56 Juta
	3.	Indeks Gini	0,34	<0,3
	4.	Jumlah Investasi	25% (80 Perusahaan)	65% (120 Perusahaan)

<b>SASARAN 11.</b> Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1.	Tingkat Kemiskinan	4,23	2,84
<b>SASARAN 12.</b> Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	4,93

#### 7) Prioritas 7: Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 13.</b> Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1.	Tingkat Kemiskinan	4,23	2,84

#### 8) Prioritas 8: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 14.</b> Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55	70%
<b>SASARAN 15.</b> Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1.	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	81%	86%
	2.	Jalan berkondisi baik	86%	95%
<b>SASARAN 16.</b> Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.	Persentase bencana yang tertangani	60%	90%

#### 9) Prioritas 9: Pelestarian Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 17.</b> Terpenuhinya RTH Kota	1.	% RTH Publik yang dikelola	8	12%

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2021
<b>SASARAN 18.</b> Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	1.	Persentase pembangunan fasilitas sosial memenuhi standar lingkungan	75%	90%
	2.	Persentase pembangunan Fasum yang memenuhi standar lingkungan	55%	85%
<b>SASARAN 19.</b> Pemenuhan target universal access	1.	Penyediaan air minum layak	85	100
	2.	Kawasan Kumuh	2	0
	3.	Persentase sanitasi layak	85	100
<b>SASARAN 20.</b> Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya	1.	persentase pelestarian cagar budaya	80	100

Sasaran yang akan dicapai pada setiap prioritas dengan pencapaian target indikator pada tahun 2021 :

**Prioritas 1: Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya,** mewujudkan **SASARAN 1** Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan, indikator Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal, capaian 2016 : 0, target 2021 : 100 %

**Prioritas 2: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik,** mewujudkan **SASARAN 2** : Terlaksananya reformasi birokrasi, indikator

- Nilai SAKIP, capaian 2016 : C, target 2021 : A
- Peringkat LPPD, capaian 2016 : 65, target 2021 : 30
- Indeks RB, capaian 2016 : 0, target 2021 : B
- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, capaian 2016 : WTP, target 2021 : WTP
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, capaian 2016 : 30, target 2021 : 80

**SASARAN 3:** Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan, indikator Rasio kemandirian keuangan daerah, capaian 2016 : 0,124 target 2021 : 0,140

**Prioritas 3: Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan** mewujudkan

**SASARAN 4** : Meningkatkan akses layanan bidang pendidikan, indikator

- Harapan lama sekolah, capaian 2016 : 14,7 target 2021 : 15
- Angka rata-rata lama sekolah, capaian 2016 : 10,85 target 2021 : 11,20
- APK PAUD ( 3-6 th), capaian 2016 : 86 % target 2021 : 88,50 %
- Angka putus sekolah jenjang SD, SMP capaian 2016 : 0,22 target 2021 : 0,44 %

**SASARAN 5** : Meningkatkan kualitas pendidikan, indikator

- Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SD, capaian 2016 : 72,88 target 2021 : 81,35
- Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP, capaian 2016 : 54,50 target 2021 : 90,90

**Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** mewujudkan

**SASARAN 6** Peningkatan kualitas layanan kesehatan, indikator

- Angka harapan hidup, capaian 2016 : 73,13 target 2021 : 73,12

**SASARAN 7** Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, indikator :

- Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap, capaian 2016 : 91 target 2021 : 93
- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat, capaian 2016 : 8 % target 2021 : 100 %

**SASARAN 8** Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan, indikator :

- Persentase Puskesmas yang terakreditasi, capaian 2016 : 30% target 2021 : 100%
- Persentase pelayanan kesehatan dasar, capaian 2016 : 100% target 2021 : 100%
- Persentase keluarga miskin yang terlayani, capaian 2016 : 100% target 2021 : 100%

**Prioritas 5: Pengembangan Pariwisata** mewujudkan **SASARAN 9**

Meningkatkan pelayanan pariwisata, dengan indikator :

- Kunjungan wisatawan, capaian 2016 : 460.905 orang target 2021 : 588.245 orang

**Prioritas 6: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)** mewujudkan **SASARAN 10** Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan indikator :

- Pertumbuhan ekonomi, capaian 2016 : 6,12% target 2021 : 6,50%
- PDRB per kapita, capaian 2016 : 49,88 juta target 2021 : 56 juta
- Indeks gini, capaian 2016 : 0,34 target 2021 <0,3
- Jumlah investasi, capaian 2016 : 25 % ( 80 perusahaan) target 2021 : 65% (120 perusahaan)

**SASARAN 11** Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indikator :

- Tingkat kemiskinan, capaian 2016 : 4,23 target 2021 : 2,84

**SASARAN 12** Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator :

- Tingkat pengangguran terbuka, capaian 2016 : 5,84% target 2021 : 4,93%

**Prioritas 7:** Penanggulangan Kemiskinan mewujudkan **SASARAN 13** Menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator :

- Tingkat kemiskinan, capaian 2016 : 4,23 target 2021 : 2,84

**Prioritas 8: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur** mewujudkan **SASARAN 14** Mengendalikan dan pemanfaatan ruang kota dengan indikator :

- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota, capaian 2016 : 55% target 2021 : 70%

**SASARAN 15** Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan indikator :

- Cakupan daerah yang terlayani angkutan umum, capaian 2016 : 81% target 2021 : 86%
- Jalan yang berkondisi baik, capaian 2016 : 86% target 2021 : 95%

**SASARAN 16** Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dengan indikator :

- Persentase bencana yang tertangani, capaian 2016 : 60% target 2021 : 90%

**Prioritas 9: Pelestarian Lingkungan Hidup** mewujudkan **SASARAN 17** Terpenuhinya RTH Kota dengan indikator :

- Persentase RTH publik yang dikelola, capaian 2016 :8 target 2021 : 12

**SASARAN 18** Fasilitasi publik yang memenuhi standar dengan indikator :

- Persentase pembangunan fasilitas sosial memenuhi standar lingkungan, capaian 2016 : 75% target 2021 : 90%
- Persentase pembangunan fasilitas umum yang memenuhi standar lingkungan, capaian 2016 : 55% target 2021 : 85%

**SASARAN 19** Pemenuhan target universal access dengan indikator :

- Penyediaan air minum layak, capaian 2016 : 85% target 2021 : 100%
- Kawasan kumuh, capaian 2016 : 2 target 2021 : 0
- Persentase sanitasi layak, capaian 2016 : 85% target 2021 : 100%

**SASARAN 20** Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya dengan indikator :

- Persentase pelestarian benda cagar budaya, capaian 2016 : 80% target 2021 : 100%

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2019 dan perkiraan maju 2020 yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Untuk melihat Program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 beserta jumlah dana pendukung kegiatan berdasarkan urusan/SKPD disajikan dalam tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Jumlah Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	227
2	Dinas Kesehatan	19	84
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	141
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	33
5	Dinas Kebakaran	5	36
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8	45
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	38
8	Dinas Sosial	10	38
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	47
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	91
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	24

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN</b>
12	Dinas Perhubungan	11	64
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	38
14	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	13	97
15	Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja	14	59
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	62
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11	80
18	Dinas Pertanian dan Pangan	15	76
19	Sekretariat Daerah	16	121
20	Sekretariat DPRD	3	42
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12	60
22	Badan Keuangan	7	77
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	59
24	Inspektorat	6	44
25	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	8	174
26	Kecamatan Guguk Panjang	9	138
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	6	135
28	Kantor Kesbangpol	11	49

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				<b>82,714,140,161</b>				<b>90,985,554,177</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,294,970,538</b>				<b>1,424,467,592</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Disdikbud	3.143 lembar	14,999,000	APBD		3.143 lembar	16,498,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	3 rekening / bulan	75,000,000	APBD		3 rekening / bulan	82,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Disdikbud	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	173,500,000	APBD		4 unit roda 4, 45 unit roda 2	190,850,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Disdikbud	1 paket	125,000,000	APBD		10 item dan 2 orang cs	137,500,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral	Disdikbud	5 macam, 5 jenis	30,000,000	APBD		6 macam, 6 jenis	33,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disdikbud	1 paket	70,000,000	APBD		46 jenis	77,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	7 macam	30,124,135	APBD		11 macam	33,136,549
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdikbud	19 macam	10,549,000	APBD		10 macam	11,603,900
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Disdikbud	1 tahun	75,000,000	APBD		1 tahun	82,500,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Adanya SPPD	Disdikbud	1 tahun	300,000,000	APBD		1 tahun	330,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	Disdikbud	1 orang	27,024,500	APBD		4 Pekerja Kantor, 1 Sopir dan 3 petugas lapangan	29,726,950
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor	Disdikbud	6 orang	200,000,000	APBD		4 orang	220,000,000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Disdikbud	150 Paket	163,773,903	APBD		200 Paket	180,151,293
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Disdikbud</b>		<b>75,000,000</b>				<b>82,500,000</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Disdikbud	1 macam	75,000,000	APBD		2 macam	82,500,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Disdikbud</b>		<b>0</b>	<b>APBD</b>			<b>-</b>
	Analisis Rencana Kebutuhan Belanja Operasional Sekolah bersumber dana APBD	Terukurnya Rencana kebutuhan sekolah bersumber APBD	Disdikbud	1 Kegiatan	0	APBD		1 Kegiatan	-
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini</b>			<b>812,281,720</b>				<b>893,509,892</b>
	Penyelenggaraan TK N Pembina	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK	Sekolah	12 Bulan	60,000,000	APBD		12 bulan	66,000,000
	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di T	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	12 bulan	55,000,000	APBD		1 tahun	60,500,000
	Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya lomba HAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107 lembag	35,000,000	APBD		107 lembag	38,500,000
	Jambore Pendidik PAUD	Terlaksana jambore pendidik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107 lembag	30,234,000	APBD		107 lembag	33,257,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Reward PAUDNI Berprestasi (tingkat provinsi dan nasional)	Pemberian reward PAUDNI berprestasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15 orang	40,000,000	APBD		15 orang	44,000,000
	Pelaksana Apresiasi PTK PAUDNI	Terlaksana apresiasi/lomba PTK PAUDNI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15 cabang	59,467,670	APBD		15 cabang	65,414,437
	Pengelolaan Izin Operasional PAUDNI, PKBM, LKP	Tertata lembaga PAUD Dikmas sesuai k	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 lembaga	5,230,000	APBD		20 lembaga	5,753,000
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Terlaksana kegiatan kompetensi paket C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80 warga belajar	34,624,750	APBD		80 warga belajar	38,087,225
	Operasional Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi (DAK Non Fisik)	Meningkatnya kreatifitas dan pola pikir p	Disdikbud	40 Orang		APBD		40 Orang	-
	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK	Disdikbud	12 Bulan		APBD		12 Bulan	-
	Fasilitasi penunjang program HIMPAUDI	Terfasilitasi pengurus HIMPAUDI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80 orang	84,314,000	APBD		80 orang	92,745,400
	Penunjang program bunda PAUD	Terfasilitasi bundaPAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60 orang	31,670,000	APBD		60 orang	34,837,000
	Orientasi Program PAUD	Terlaksananya orientasi program PAUD	Bukittinggi	60 orang	30,643,000	APBD			33,707,300
	Penunjang DAK PAUD PNF	Terlaksananya Kegiatan DAK PAUD	Bukittinggi		19,698,300	APBD			21,668,130
	Pengadaan Sarpras TK N 1 Bkt	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		-	APBD			-
	Bantuan untuk PAUD dan TPA Flamboyan Blakang Balok	Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah	Bukittinggi		25,000,000	APBD			27,500,000
	Pembuatan pagar dan rehab rumah penjaga sekolah PAUD Darul Ulum	Tersedianya pagar di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Perbaikan Sarana Prasarana PAUD SPS Semai Bebih Batu Hampa Bkt	Terlaksananya perbaikan Sarpras di sek	Bukittinggi		76,400,000	APBD			84,040,000
	Rehab Paud STS Nurul Huda Bukik Cangang	Terlaksananya Rehab di sekolah /Paud	Bukittinggi		30,000,000	APBD			33,000,000
	Pembuatan/ Rehabilitasi tempat bermain TK Flora Komplek Pertanian	Tersedianya tempat bermain di sekolah	Bukittinggi		40,000,000	APBD			44,000,000
	Pengadaan peralatan mobiler/tempat bermain anak-anak pada TK/PAUD Daut	Tersedianya meubiler di sekolah	Bukittinggi		30,000,000	APBD			33,000,000
	Bantuan operasional TK Alwirda	Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah	Bukittinggi		75,000,000	APBD			82,500,000
	Saranan dan Prasarana PAUD	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	TK N Pembina	20 ruang		APBD		20 ruang	-
	Saranan dan Prasarana PAUD	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	TK N 1 Bukittinggi	20 ruang		APBD		20 ruang	-
	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD	TK N Pembina	20 paket		APBD		20 Paket	-
	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD	TK N 1 Bukittinggi	20 paket		APBD		20 paket	-
	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan buku koleksi PAUD	TK N Pembina	10 paket		APBD		10 paket	-
	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan buku koleksi PAUD	TK N 1 Bukittinggi	5 paket		APBD		5 paket	-
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Tingkat APM dan APK SD, SMP</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>69,328,788,633</b>	<b>APBD</b>			<b>76,261,667,496</b>
	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 1 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	100,634,900	APBD		12 bulan	110,698,390
	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 2 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	120,954,000	APBD		12 bulan	133,049,400
	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 3 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	85,665,000	APBD		12 bulan	94,231,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 4 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	90,535,000	APBD		12 bulan	99,588,500
	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 5 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	81,178,270	APBD		12 bulan	89,296,097
	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN6 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	150,010,575	APBD		12 bulan	165,011,633
	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 7 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	84,874,978	APBD		12 bulan	93,362,476
	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	123,979,000	APBD		12 bulan	136,376,900
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	20,842,700	APBD		12 bulan	22,926,970
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Sekolah	12 bulan	25,917,400	APBD		12 bulan	28,509,140
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Sekolah	12 bulan	140,287,000	APBD		12 bulan	154,315,700
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Garegeh	Sekolah	12 bulan	32,285,000	APBD		12 bulan	35,513,500
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Pujun Pintu Kabun	Sekolah	12 bulan	126,100,000	APBD		12 bulan	138,710,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Sekolah	12 bulan	36,245,000	APBD		12 bulan	39,869,500
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Sekolah	12 bulan	29,229,600	APBD		12 bulan	32,152,560
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	22,282,500	APBD		12 bulan	24,510,750
	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Manggis Ganting	Sekolah	12 bulan	28,506,550	APBD		12 bulan	31,357,205
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 PuhunPintu Kabun	Sekolah	12 bulan	25,680,000	APBD		12 bulan	28,248,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Sekolah	12 bulan	27,692,800	APBD		12 bulan	30,462,080
	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Puhun Pibtu Kabun	Sekolah	12 bulan	24,001,223	APBD		12 bulan	26,401,345
	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Sekolah	12 bulan	26,411,500	APBD		12 bulan	29,052,650
	Penyelenggaraan SD Negeri14 Tanjung Alam	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Tanjung Alam	Sekolah	12 bulan	18,598,650	APBD		12 bulan	20,458,515
	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Sekolah	12 bulan	25,087,700	APBD		12 bulan	27,596,470
	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri16 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	25,180,000	APBD		12 bulan	27,698,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Manggis Ganting	Sekolah	12 bulan	28,298,000	APBD		12 bulan	31,127,800
	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Sekolah	12 bulan	25,504,415	APBD		12 bulan	28,054,857
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Sekolah	12 bulan	132,607,300	APBD		12 bulan	145,868,030
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Percontohan	Sekolah	12 bulan	36,006,200	APBD		12 bulan	39,606,820
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Kurai	Sekolah	12 bulan	103,027,000	APBD		12 bulan	113,329,700
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	25,997,600	APBD		12 bulan	28,597,360

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	78,950,000	APBD		12 bulan	86,845,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Sekolah	12 bulan	28,939,600	APBD		12 bulan	31,833,560
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Bukit Cangang	Sekolah	12 bulan	30,812,800	APBD		12 bulan	33,894,080
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	27,308,700	APBD		12 bulan	30,039,570
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Sekolah	12 bulan	28,050,450	APBD		12 bulan	30,855,495
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	26,200,000	APBD		12 bulan	28,820,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Bukit Cangang	Sekolah	12 bulan	22,288,400	APBD		12 bulan	24,517,240
	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	24,806,600	APBD		12 bulan	27,287,260
	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Sekolah	12 bulan	58,521,000	APBD		12 bulan	64,373,100
	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 16 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	32,630,000	APBD		12 bulan	35,893,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Pakan Kurai	Sekolah	12 bulan	20,040,000	APBD		12 bulan	22,044,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	27,379,000	APBD		12 bulan	30,116,900
	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 19 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	Sekolah	12 bulan	27,122,600	APBD		12 bulan	29,834,860
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Sekolah	12 bulan	23,910,000	APBD		12 bulan	26,301,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Aur Kuning	Sekolah	12 bulan	24,546,000	APBD		12 bulan	27,000,600
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Labuah	Sekolah	12 bulan	91,307,000	APBD		12 bulan	100,437,700
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Birugo	Sekolah	12 bulan	40,460,000	APBD		12 bulan	44,506,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Birugo	Sekolah	12 bulan	56,985,200	APBD		12 bulan	62,683,720
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Parit Antang	Sekolah	12 bulan	23,259,200	APBD		12 bulan	25,585,120
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	60,300,000	APBD	Musrenbang	12 bulan	66,330,000
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Sekolah	12 bulan	26,793,000	APBD		12 bulan	29,472,300
	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	24,415,000	APBD		12 bulan	26,856,500
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Sapiran	Sekolah	12 bulan	26,563,000	APBD		12 bulan	29,219,300
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Aur Kuning	Sekolah	12 bulan	71,783,052	APBD		12 bulan	78,961,357
	Penyelenggaraan US Sd/MI	Terlaksananya US SD/MI	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	98,000,800	APBD		100%	107,800,880

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan UN SMP/MTs	Terlaksananya UN jejang SMP/MTs	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	26,523,000			100%	29,175,300
	Olimpiade Sains Nasional SD/Mi	Terpilihnya siswa SD/Mi untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	115,128,870	APBD		100%	126,641,757
	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilihnya siswa SD/Mi untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	100,000,000	APBD		100%	110,000,000
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	124,510,000	APBD		100%	136,961,000
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/Mi	Terpilihnya siswa SD/Mi untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	116,520,400	APBD		100%	128,172,440
	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	29,747,200	APBD		100%	32,721,920
	Pesantren Pelajar	Optimalnya pelaksanaan Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan Pesantren Pelajar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	250,000,000	APBD		100%	275,000,000
	Pelatihan Penulisan Soal USBN guru SD dan SMP	terwujudnya guru yang mampu merakit soal USBN jenjang SD dan SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	350,000,000	APBD		100%	385,000,000
	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	278,256,000	APBD		100%	306,081,600
	Fasilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	78,227,000	APBD		100%	86,049,700
	Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 13 bagi guru SD dan SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	216,946,300	APBD		100%	238,640,930
	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	43,800,000	APBD		100%	48,180,000
	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya motivasi siswa Kota Bukittinggi yang berprestasi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	74,267,000	APBD		100%	81,693,700
	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	199,393,000	APBD		100%	219,332,300
	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	Optimalnya pelaksanaan beasiswa pada jenjang SD Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	24,404,000	APBD		100%	26,844,400
	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	70,000,000	APBD		100%	77,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Optimalnya pelaksanaan Beasiswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang SMP Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	27,933,600	APBD		100%	30,726,960
	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pemberian Reward kepada Siswa dan Sekolah berprestasi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	60,000,000	APBD		100%	66,000,000
	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah ( UKS/M ) Kota Bukittinggi	Optimalisasinya Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	242,842,500	APBD		100%	267,126,750
	Operasional DAK SD	Terlaksananya Pengelolaan DAK SD	Disdikbud Bukittinggi	100%	60,000,000	APBD		100%	66,000,000
	DAK SD/SDLB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sek	Disdikbud Bukittinggi	100%	-	APBN		100%	-
	DAK SMP/SMPLB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sek	Disdikbud Bukittinggi	100%	-	APBN		100%	-
	Operasional DAK SMP	Terlaksananya Pengelolaan DAK SMP	Disdikbud Bukittinggi	100%	60,000,000	APBD		100%	66,000,000
	Studi Kelayakan Izin Operasional	Terverifikasinya izin operasional sekolah	Disdikbud Bukittinggi	100%	20,000,000	APBD		100%	22,000,000
	Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 17 Pakan Kurai	SDN 17 Pakan Kurai	100%	3,600,000,000	APBD		100%	3,960,000,000
	Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 09 Manggis Ganting	SDN 09 Manggis Ganting	100%	1,000,000,000	APBD		100%	1,100,000,000
	Lanjutan Pembangunan SDN 10 ATTS	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 10 ATTS	SDN 10 ATTS	100%	2,500,000,000	APBD		100%	2,750,000,000
	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Tersedianya RKB, Lapangan Olahraga dan Pagar SMPN 5 Bukittinggi	SMPN 5 Bukittinggi	100%	4,622,000,000	APBD		100%	5,084,200,000
	Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bkt	Tersedianya lokal utk belajar di SMP N 8 Bkt	SMPN 8 Bkt	100%	1,500,000,000	APBD		100%	1,650,000,000
	Pembangunan SDN 19 ATTS	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 18 ATTS	SDN 19 ATTS	100%	4,500,000,000	APBD		100%	4,950,000,000
	Pembangunan RKB SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya RKB SDN 01 Campago Ipuh	SDN 01 Campago Ipuh	100%	5,000,000,000	APBD		100%	5,500,000,000
	Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 05 Tarok Dipo	SDN 05 Tarok Dipo		5,000,000,000	APBD			5,500,000,000
	Pembangunan SDN 06 ATTS	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 06 ATTS	SDN 06 ATTS		5,500,000,000	APBD			6,050,000,000
	Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Bancah	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 07 Kubu Gulai Bancah	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	100%	5,000,000,000	APBD		100%	5,500,000,000
	Pembangunan SDN 11 Aur Kuning	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 11 Aur Kuning	SDN 11 Aur Kuning	100%	4,500,000,000	APBD		100%	4,950,000,000
	Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air				4,500,000,000				4,950,000,000
	Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Tersedianya Sarpras di SMP N 4 Bkt	SMP N 4 Bkt		6,000,000,000	APBD			6,600,000,000
	Pengadaan Tanah SDN 11 Campago Gugk Bu	Tersedianya tanah untuk SDN 11 CGB	Disdikbud	12 bulan	429,100,000	APBD			472,010,000
	Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi	Tersedianya Laboratorium dan RKB pada SMPN 7 Bukittinggi	SMPN 7 Bukittinggi	100%	5,600,000,000	APBD		100%	6,160,000,000
	Pengadaan Meubiler SMP	Tersedianya Meubiler SMP	SMP	100%	200,000,000	APBD		100%	220,000,000
	Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP)	Terseleksinya siswa berbakat dalam cabang sepak bola jenjang SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100%	149,582,500	APBD		100%	164,540,750
	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Terlaksananya ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer			96,416,000				106,057,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	Tersedianya meubiker SDN 03 Pakan Kurai	SDN 03 Pakan Kurai	100%	200,000,000	APBD		100%	220,000,000
	Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Tersedianya Pagar SMPN 1 Bkt	Disdikbud	12 bulan	220,000,000	APBD			242,000,000
	Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	SD Negeri Kota Bukittinggi	100%	430,000,000	APBD		100%	473,000,000
	Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	SMP Negeri Kota Bukittinggi	100%	548,000,000	APBD		100%	602,800,000
	Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Tersedianya Mushalla di SDN 01 BPA	SDN 01 BPA	1 paket	450,000,000	APBD			495,000,000
	Pengadaan Sarpras SD N 16 Campago Ipuh	tersedianya sarpras di sekolah	Bukittinggi		300,000,000	APBD			330,000,000
	Pengadaan Moubeler SD 05 Tarok	tersedianya meubiler sekolah	Bukittinggi		100,000,000	APBD			110,000,000
	Perbaikan Lantai SD 01 Ladang cangkiah	Terlaksananya perbaikan lantai sekolah	Bukittinggi		-	APBD			-
	Pengadaan Sarpras SD 17 Pakan Kurai	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		120,000,000	APBD			132,000,000
	Pembuatan gerbang SD 10 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya pagar di sekolah	Bukittinggi		-	APBD			-
	Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	Terlaksananya Worshop keagamaan di sekolah	Bukittinggi		60,000,000	APBD			66,000,000
	Diklat metodologi pengajaran program Tahfizhul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Terlaksananya diklat keagamaan di sekolah	Bukittinggi		60,000,000	APBD			66,000,000
	Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guquak Bulek	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		40,000,000	APBD			44,000,000
	Pengadaan Sarpras SD N 11 Aur Kuning	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		140,000,000	APBD			154,000,000
	Pengadaan Pagar dan gerbang SD 9 Belakang Balok	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		100,000,000	APBD			110,000,000
	Pembangunan pagar, SD N 17 Manggis ganting	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		80,000,000	APBD			88,000,000
	Pembangunan pagar, SD N 11 Campago Guquak Bulek	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Pengadaan Peralatan mobiler SD N 01 Campago Ipuh	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Pembangunan WC SD N 04 Garegeh	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		70,000,000	APBD			77,000,000
	Rehab Pagar SD 05 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		355,200,000	APBD			390,720,000
	Revitalisasi halaman sekolah SD 05 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		140,000,000	APBD			154,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sd 06 Kel Pulau Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah)	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		70,000,000	APBD			77,000,000
	Pengadaan Sarpras SDN 03 Pulau Anak Air	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Pengadaan Sarpras SD 15 Pulau Anak Air	Tersedianya Sarpras di sekolah	Bukittinggi		150,000,000	APBD			165,000,000
	Pembangunan Wc di SD N 02 Campago Guquak Bulek	Tersedianya WC di sekolah	Bukittinggi		80,000,000	APBD			88,000,000
	Pengadaan Alat Dramband SD AL Azhar	Terdianya alat dramband di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Pengadaan Alat Dramband SDIT Insan Kamil	Terdianya alat dramband di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Pengadaan Alat Dramband MTsN Bkt	Terdianya alat dramband di sekolah	Bukittinggi		150,000,000	APBD			165,000,000
	Pengadaan Alat Dramband SD Fransiskus	Terdianya alat dramband di sekolah	Bukittinggi		50,000,000	APBD			55,000,000
	Penunjang Operasional Dana Hibah	terlaksananya Operasional Hibah sekolah	Bukittinggi		75,000,000	APBD			82,500,000
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>454,051,250</b>				<b>499,456,375</b>
	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	Disdikbud	12 Bulan	9,094,000	APBD		12 Bulan	10,003,400
	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	Penyelenggaraan operasional SPNF SKB selama 1 th	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	1 tahun	61,802,500	APBD		1 tahun	67,982,750

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD	Penyelenggaraan operasional Paket A 1 th	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	1 tahun	27,988,000	APBD		1 tahun	30,786,800
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP	Penyelenggaraan operasional Paket B 1 th	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	1 tahun	31,979,500	APBD		1 tahun	35,177,450
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA	Penyelenggaraan operasional Paket C 1 th	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	1 tahun	35,000,000	APBD		1 tahun	38,500,000
	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	Terlaksana UN Paket A, B dan C		250 warga belajar	56,022,400	APBD		250 warga belajar	61,624,640
	Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik)	Terfasilitasinya lembaga penerima BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107 lembaga	22,389,950	APBD		107 lembaga	24,628,945
	Lomba LKP berprestasi Tk Kota, Propinsi, Nasional	Terlaksananya apresiasi/lomba LKP berprestasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 lembaga	33,200,000	APBD		10 lembaga	36,520,000
	Peningkatan kompetensi lembaga Pendidikan NON Formal	Terfasilitasi instruktur kursus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50 orang	39,097,000	APBD		50 orang	43,006,700
	Seleksi tutor berprestasi	Terpilih tutor berprestasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 orang	49,382,900	APBD		30 orang	54,321,190
	Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terlaksananya akreditasi PAUD PNF			28,095,000				30,904,500
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A, B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A, B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C (30 orang)	60,000,000	APBD		Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C (30 orang)	66,000,000
	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	Rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotnya	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	2 ruang	0	APBD		2 ruang	-
	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	9 ruang	0	APBD		9 ruang	-
	Pengadaan Komputer dan Jaringan internet	pengadaan unit Komputer dan jaringan internet	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	30 unit Komputer dan jaringan internet	0	APBD		30 unit Komputer dan jaringan internet	-
	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan Ruang Praktek/bengkel kerja baru beserta perabotnya	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	4 ruang	0	APBD		4 ruang	-
	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	13 ruang	0	APBD		13 ruang	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik)	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	2 paket	0	APBD		2 paket	-
	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Pengadaan Peralatan Pendidikan	SPNF SKB Kota Bukittinggi Jl. Panorama Baru	60 paket	0	APBD		60 paket	-
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>6,245,927,000</b>	<b>APBD</b>			<b>6,870,519,700</b>
	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Terukurnya kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya dan guru memperoleh sertifikat profesional	Bukittinggi	300 orang	50,000,000	APBD		300 orang	55,000,000
	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya	Bukittinggi	700 orang	101,061,000	APBD		700 orang	111,167,100
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	Bukittinggi	1000 orang	5,261,732,000	APBD		1000 orang	5,787,905,200
	Gebyar Expo pendidikan	Kota Bukittinggi dapat mengikuti even gebyar expo ke tingkat propinsi	Bukittinggi	1 kali kegia	231,550,000	APBD		1 kali kegia	254,705,000
	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Terbinanya guru berprestasi	Bukittinggi	62 orang	254,946,000	APBD		62 orang	280,440,600
	Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan olimpiade sains guru SD	Bukittinggi	118 orang	75,000,000	APBD		118 orang	82,500,000
	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	Terbitnya jurnal guru dan pengawas	Bukittinggi	2 buah buku jurnal	100,000,000	APBD		2 buah buku jurnal	110,000,000
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru, penilik dan pamong belajar	Bukittinggi	1350 orang	71,638,000	APBD		1350 orang	78,801,800
	Penilaian Kinerja dan peningkatan Kompetensi Mutu Kepala sekolah SD dan SMP	Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah	Bukittinggi		100,000,000	APBD			110,000,000
	Pembinaan Pengelolaan administrasi sekolah bagi Tata Usaha di sekolah	Meningkatnya kompetensi pelaksana di sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah	Bukittinggi	120 orang	-	APBD		120 orang	-
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>1,087,313,520</b>	<b>APBD</b>			<b>1,196,044,872</b>
	Pengelolaan Website Disdikbud Kota Bukittinggi	Adanya website Disdikpora Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	251,555,100	APBD		12 bulan	276,710,610
	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	terlatihnya operator dapodik kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali kegia	142,079,000	APBD		1 kali kegia	156,286,900
	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan				91,704,020				100,874,422
	Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK	Buku profil pendidikan dan profil PTK kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 buku pro	36,975,400	APBD		12 buku pro	40,672,940
	Pengelolaan Data Back Bone	Tersedianya data pendidikan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali kegia	75,000,000	APBD		1 kali kegia	82,500,000
	Fasilitasi Kerjasama Sekolah Kembar Bukittingi Malaysia	Terlaksananya kerjasama dana untuk sekolah kembar			490,000,000				539,000,000
									-
	<b>Program BOS</b>	<b>Proses Belajar Mengajar Berjalan dengan Lancar</b>			<b>0</b>				<b>-</b>
	Kegiatan BOS	Tersedianya dana BOS untuk SD dan SI	Bukittinggi	65 SD dan 11 SMP	0			65 SD dan 11 SMP	-
	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Peran Serta Lembaga Adat</b>			<b>1,273,367,000</b>				<b>1,400,703,700</b>
	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	peran serta lembaga adat dalam membangun adat dan budaya	Bukittinggi	3 kali	905,000,000	APBD		3 kali	995,500,000
	Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	Terpeliharanya adat dan budaya	Bukittinggi	100 orang	35,500,000	APBD		100 orang	39,050,000
	Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	Terlaksananya pelatihan nilai tradisi adat dan budaya	Bukittinggi	200 orang	133,955,000	APBD		200 orang	147,350,500
	fasilitasi pelatihan pencak silat	Terlaksananya Pelatihan Pencak Silat	Bukittinggi	3 Kecamatan	12,000,000	APBD			13,200,000
	Bantuan untuk Perguruan pencak Silat Ganggang Sapadi	Tersedianya sarana perguruan silat	Bukittinggi	1 paket	50,000,000	APBD			55,000,000
	Buat Pendopo silat/Pasambaham di RW II	Tersedianya sarana perguruan silat	Bukittinggi	2 paket	80,000,000	APBD			
	Bantuan untuk perguruan pencak silat Buni Harimau Sigulincia	Tersedianya sarana perguruan silat	Bukittinggi	3 paket	10,852,000	APBD			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan pencak silat Mambang Sari Alam Kelurahan Campago Ipuh	Tersedianya sarana perguruan silat	Bukittinggi	4 paket	46,060,000	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak Kurai Limo Jorong	Meningkatkan Pengetahuan ttg budaya	Bukittinggi		-				
	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Persentase cagar budaya yang dilestarikan</b>			<b>1,240,787,500</b>	-		-	<b>1,199,866,250</b>
	Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang didaftarkan	Bukittinggi	25%	47,222,000	APBD		25%	51,944,200
	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang direkomendasikan	Bukittinggi	10 CB	67,547,500	APBD		10 CB	74,302,250
	Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan	Bukittinggi	25%	100,000,000	APBD		25%	110,000,000
	Perumusan Kebijakan Kepurbakalaan	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan	Bukittinggi	75%	40,628,000	APBD		75%	44,690,800
	Studi sejarah Kota Bukittinggi	Terdokumentasikannya Sejarah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	25%	165,390,000	APBD		25%	181,929,000
	Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Lembur Pegawai dan Belanja Lainnya	Bukittinggi	25%	65,000,000	APBD		25%	71,500,000
	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terpeliharanya Rumah Kelahiran Bung Hatta	Bukittinggi	25%	185,000,000	APBD		25%	203,500,000
	Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya Koleksi Museum	Bukittinggi	25%	200,000,000	APBD		25%	220,000,000
	Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terpeliharanya Koleksi Museum	Bukittinggi	25%	120,000,000	APBD		25%	132,000,000
	Studi Keluarga Prolamator Bung Hatta	Terdokumentasikannya Sejarah Bung Hatta	Bukittinggi, Daerah, & Nasional	25%	-	APBD		25%	-
	Pemeliharaan Tugu Takakosi/Cerobong asap	Terpeliharanya warisan budaya	Bukittinggi	80%	100,000,000	APBD	musrenbang Kec MKS		110,000,000
	Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Bancah	Terpeliharanya warisan budaya	Bukittinggi	80%	150,000,000	APBD			165,000,000
	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				<b>510,159,000</b>	APBD		-	<b>561,174,900</b>
	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Peningkatan Nilai Budaya & Nasionalisme	Bukittinggi	7000 orang	69,322,000	APBD		7000 orang	76,254,200
	Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya program-program pemajuan kebudayaan	Bukittinggi	7 pertemuan	146,333,000	APBD	UU No 5 Th 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan	7 pertemuan	160,966,300
	Memperingati Milad Bung Hatta	Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya	Bukittinggi	1 Kegiatan	100,000,000	APBD		1 Kegiatan	110,000,000
	Fasilitasi Budaya Daerah	Terlaksananya kreatifitas Seni dan Budaya	Bukittinggi	5 kegiatan	194,504,000	APBD	UU No 5 Th 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan	5 kegiatan	213,954,400
	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>				<b>391,494,000</b>	-		-	<b>430,643,400</b>
	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	Jumlah kerjasama seni Budaya	Bukittinggi, Daerah Sumatera Barat, & Nasional	5 kegiatan/k kerjasama	73,000,000	APBD		5 kegiatan/k kerjasama	80,300,000
	Fasilitasi Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan	jumlah kerjasama pendidikan dan Budaya	Bukittinggi	5 kegiatan/kerjasama	68,494,000	APBD		5 kegiatan/kerjasama	75,343,400
	Diplomasi Budaya	Terlaksananya partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	Dalam Negeri	3 kali	250,000,000	APBD		10 kali	275,000,000

**Tabel 5.2**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS KESEHATAN</b>				<b>115,271,256,493</b>				<b>74,650,056,970</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .</b>		<b>100</b>	<b>1,352,329,337</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>1,460,963,500</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos . Jumlah materai 3000 tersedia . Jumlah materai 6000 tersedia .	DKK	50 200 150	5,000,000	APBD		50 200 150	5,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar .	DKK	48	200,000,000	APBD		48	220,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara .	DKK	12	219,000,000	APBD		12	232,463,500
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor . jumlah alat kebersihan dan bahan kebersihan yang disediakan	DKK	12 30	71,998,300	APBD		12	73,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	DKK	12	50,000,000	APBD		12	70,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli .	DKK	45	32,866,675	APBD		50	35,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia . Jenis barang cetakan yang dicetak .	DKK	12 5	15,998,700	APBD		12 10	18,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara . Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .	DKK	2 15	10,000,000	APBD		3 20	12,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur	DKK	100	30,870,000	APBD		100	35,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri .	DKK	100	149,000,000	APBD		100	170,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan . Jumlah bulan premi asuransi ketenagakeriaan yang dibayar	DKK	12 12	432,474,452	APBD		12 12	440,000,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor .	DKK	9	60,000,000	APBD		9	65,000,000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah tersedianya honor untuk PPK,PP,PTK dan PPHP .	DKK	80	75,121,210	APBD		50	85,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>122,441,125</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>143,170,605</b>
	Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data Buku profil kesehatan Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data profil Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui web DKK Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk kegiatan komunikasi data	DKK	100 25 30 60 1	33,496,050	APBD		100 25 30 60 1	36,845,655
	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan aplikasi e-Puskesmas Adanya capaian SPM Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	DKK	7 12 1	41,204,500	APBD		7 12 1	56,324,950

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		3	47,740,575	APBD		3	50,000,000
		Jumlah monev perencanaan dan keuangan		4				4	
		Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan		3				3	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .</b>			<b>1,632,500,000</b>	<b>APBD</b>			<b>718,950,000</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV)	DKK	1 pkt	90,000,000	APBD		1	205,950,000
	Pengadaan peralatan kantor Puskesmas Gulai Banch	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (AC, Kursi Futura, Genset dan LCD	DKK	1 pkt	100,000,000	APBD			
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	DKK	1 pkt	30,000,000	APBD			65,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara .	DKK	1 pkt	300,000,000	APBD		1 ls	233,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana .	DKK	1 pkt	12,500,000	APBD		1 ls	15,000,000
	Pengadaan Konsultan DED Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah konsultan DED Puskesmas Tigo Baleh	DKK	1 pkt	100,000,000	APBD		1 pkt	200,000,000
	Pengadaan Konsultan DED Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah konsultan DED kantor dinas kesehatan	DKK	1 pkt	1,000,000,000	APBD			
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Cakupan PHBS Tingkat Kota .</b>	<b>DKK</b>	<b>30</b>	<b>811,437,725.00</b>	<b>APBD</b>		<b>77</b>	<b>903,600,000.00</b>
		jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan .		3				100	
		Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya .		100					
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .		70					
		Cakupan posyandu dengan strata mandiri		10					
		Persentase pembinaan kecamatan sehat		100					
		Persentase pembinaan kelurahan sehat		100					
	Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina PHBS	DKK	24	51,642,500	APBD		24	60,000,000
		Jumlah kelurahan yang dibina kelompok TOGA		24				24	
		Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota		3				3	
		Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk Propinsi		1				1	
	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi	3 1						
	Pembinaan dan Monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD	Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan posyandu dan monitoring oleh Pokjanel posyandu dan DBD	DKK	24	31,199,125	APBD	hasil musrenbang kelurahan	24	35,000,000
	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anaqota Saka Bakti Husada	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	DKK	30	95,340,900	APBD		30	105,600,000
		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti		1				1	
	Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat	Jumlah kelurahan yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat .	DKK	24	13,775,200	APBD		24	20,000,000
		Jumlah pertemuan kesehatan dengan PKK		3				3	
	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun	DKK	1	350,000,000	APBD			385,000,000
	Pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat .	DKK	55	200,000,000	APBD		55	210,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah media elektronik untuk promosi kesehatan		3				3	
		Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan		6				6	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	12						
		Jumlah sekolah yang dibina untuk penilaian tingkat Provinsi	4						
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olah raga	DKK	7	69,480,000	APBD		7	88,000,000
		Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan		30				30	
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja		7				7	
		Jumlah pos UKK yang dibina		15				15	
		Jumlah kelompok olah raga yang dibina		15				15	
		Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan		40				40	
		Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan		2				2	
		Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasmani		75				75	
		Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke provinsi		4				4	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar</b>		100	<b>5,678,404,640</b>			100	<b>6,860,971,620</b>
		<b>Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan</b>		<b>97</b>				<b>98</b>	
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	4	200,000,000	APBD		4	220,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	3	200,000,000	APBD		3	220,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	4	250,000,000	APBD		4	275,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	2	150,800,000	APBD		2	794,940,960
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gulai banch	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	1	150,000,000	APBD		1	165,880,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tigo baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	UPT	8	157,710,000	APBD		8	173,481,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	DKK	2	135,000,000	APBD		2	148,500,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manaiemen Puskesmas	DKK	7	318,628,700	APBD		7	330,628,700
		Terlaksananya kegiatan P3K PAM lebaran, Paskibra, hari besar dan keramaian kota		1				1	
		Terlaksananya pelayanan ambulance siaga		1				1	
		Terlaksananya pelayanan ambulance luar kota		1				1	
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)		7				7	
		Jumlah LAPAS yang mendapatkan layanan kesehatan		1				1	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kuniungan Keluarga Sehat		7				7	
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi		7				7	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer		7				7	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan gigi dan mulut		7				7	
		Jumlah puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan unit transfusi darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu		7				7	
		Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi tenaga penjamah makanan di pedagang kaki lima		2				2	
	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	UPT	7	45,000,000	APBD		7	49,500,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	3	831,000,000	APBD		3	914,100,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	4	900,000,000	APBD		4	990,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	8	630,000,000	APBD		8	693,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	2	722,673,600	APBD		2	794,940,960
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	1	300,000,000	APBD		1	330,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	2	260,000,000	APBD		2	286,000,000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	UPT	4	350,000,000	APBD		4	385,000,000
	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penungsi korban bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana .	DKK	1	50,000,000	APBD		1	55,000,000
		Data faktor resiko bencana yang terkumpul.		1				1	
		Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana .		1				1	
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana .		3				3	
		Jumlah petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana .		2				2	
		Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan		1				1	
	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	DKK	100	27,592,340	APBD		100	35,000,000
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .		100				100	
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air .		100				100	
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .		100				100	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar</b>		<b>100</b>	<b>47,444,900</b>			<b>100</b>	<b>52,000,000</b>
	Peningkatan kesehatan Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti workshop / pelatihan kader Lansia	DKK	50 org	47,444,900	APBD		50 org	52,000,000
		Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia		21 org				21 org	
		Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi program lansia		20				20	
		Jumlah pemenang lomba senam lansia		7				7	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Prevalensi anemia ibu hamil .</b>		<b>100</b>	<b>327,080,800</b>	APBD		<b>100</b>	<b>395,000,000</b>
		<b>Persentase balita gizi buruk .</b>		<b>21</b>				<b>20</b>	
		<b>Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .</b>		<b>0.15</b>				<b>0.15</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .		100				100	
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .		50				50	
		Persentase kekurangan gizi pada balita .		0				0	
		Persentase balita gizi lebih .		13				12	
	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan	DKK	30	139,800,000	APBD		30	175,000,000
		Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan		35				35	
		Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan		15				15	
	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.	Jumlah petugas pembina wilayah yang mengikuti pelatihan revitalisasi posyandu	DKK	50	138,017,800	APBD		50	165,000,000
		Jumlah tripot, mikrotois dan alat ukur panjang badan yang diadakan		7				7	
	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi pada Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop pencegahan penanggulangan anemia pada remaja	DKK	25	49,263,000	APBD		25	55,000,000
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada remaja		25				25	
		Frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemberian tablet Fe remaja putri, PMT remaja dan penanggulangan masalah gizi remaja		15				15	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal)		100	256,856,340	APBD		100	306,000,000
		2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar		100				100	
		3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		100				100	
		4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100				100	
		5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining)		100				100	
	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah BPS, klinik, panti, sekolah dan PAUD/TPA yang mendapatkan pembinaan program kesehatan keluarga	DKK	180	146,159,600	APBD		180	176,000,000
		Jumlah evaluasi program kesga yang dilaksanakan		1				1	
		Jumlah sosialisasi pemeriksaan tripel eliminasi pada ibu hamil yang dilaksanakan		2				2	
		Jumlah evaluasi supervisi fasilitator bikor yang dilaksanakan		1				1	
		Jumlah buku KIA dan barang cetakan kesga yang dicetak		12000				1	
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan penguatan program P4K dengan LS LP		40				2	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi kespro catin		7				2	
		Jumlah monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas		7				14	
	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas puskesmas	DKK	25	110,696,740	APBD		25	130,000,000
		Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK		250				250	
		Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan		2				2	
		Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP		20				20	
		Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial		25				25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja</b>		100	274,731,800	APBD		100	217,500,000
	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar secara mandiri	DKK	15	249,731,800	APBD		15	192,500,000
		Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan		1				1	
		Jumlah tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesmas, Tenaga Gizi, Sanitarian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Kefarmasian Teladan		3 org dokter, 3 org dokter gigi, 3 org perawat, 3 org bidan, 3 org tenaga kesmas, 3 org tenaga gizi, 3 org sanitarian, 3 org ahli teknologi laboratoriu m, 3 org tenaga kefarmasian				3 org dokter, 3 org dokter gigi, 3 org perawat, 3 org bidan, 3 org tenaga kesmas, 3 org tenaga gizi, 3 org sanitarian, 3 org ahli teknologi laboratoriu m, 3 org tenaga kefarmasi an	
		Frekuensi pertemuan sosialisasi hasil pelatihan/workshop/seminar kesehatan dari SDM kesehatan yang telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar kepada SDM kesehatan lainnya		1				1	
		Jumlah mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian		500				500	
		Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan kota Bukittinggi		1			Mengakomodir hasil Forum SKPD : Termasuk rencana kebutuhan tenaga RSUD Kota Bukittinggi	1	
		Terlaksananya kebutuhan data dan informasi deskripsi SDM kesehatan kota Bukittinggi		1				1	
	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi		2				2		
	Pelaksanaan uji kompetensi pejabat fungsional medis dan paramedis	Frekuensi uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan		150	25,000,000			150	25,000,000
	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .</b>		0	100,887,641,871	APBD		0	59,270,652,245
		<b>Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD</b>		100				100	
		<b>Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi</b>		60				60	
		<b>Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal</b>		100				100	
	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Teknis.	DKK	10	53,552,400,871	APBD		1	19,270,652,245
		Jumlah Monitoring yang dilakukan oleh Tim		50				1	
		Jumlah konsultasi yang dilakukan oleh Tim pada Propinsi dan Pusat		20				1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun .		1				1	
	Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jumlah item alat kesehatan yang diadakan untuk RSUD	DKK	1 pkt	46,835,241,000	APBD		120	40,000,000,000
	Pengadaan konsultan disain interior ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jumlah konsultan disain interior ruangan RSUD	DKK	1	500,000,000	APBD			
	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan</b>		<b>100</b>	<b>30,232,500</b>				<b>32,000,000</b>
	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	DKK	2	30,232,500	APBD		2	32,000,000
		Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan		4 kali				4 kali	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas		30				30	
	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Jumlah Puskesmas yang terakreditasi</b>		<b>7</b>	<b>30,000,000</b>			<b>7</b>	<b>33,000,000</b>
		<b>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan / fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk pemberian izin	DKK	10	30,000,000	APBD		10	33,000,000
		Jumlah peraturan kesehatan/perizinan yang disosialisasikan kepada masyarakat		2				2	
		Jumlah sarana kesehatan/fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan dan visitasi		40				40	
	Akreditasi Puskesmas	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi	2			APBD			
		Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7						
		Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh surveyor	2						
		Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penialian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7						
		Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi	1						
		Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	1						
	<b>Program Obat dan Pembekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan di puskesmas</b>		<b>95</b>	<b>319,993,325</b>	APBD		<b>95</b>	<b>352,000,000</b>
		<b>Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan</b>		<b>92</b>				<b>93</b>	
	Pengadaan Obat dan pembekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan terpenuhi .	DKK	30	230,000,000	APBD		30	253,000,000
	Penunjang Pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi yang terpenuhi .	DKK	12	89,993,325	APBD		12	99,000,000
	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>		<b>100</b>	<b>476,417,700</b>	APBD		<b>100</b>	<b>533,753,000</b>
		<b>Persentase penggunaan obat secara rasional</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bagi tenaga teladan	DKK	1	25,144,140	APBD		1	38,500,000
		Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan puskesmas		1				1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBA/Gema cermat		1				1	
		Jumlah puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya		47				47	
	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian	DKK	1	47,509,050	APBD		1	55,000,000
		Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan		1				1	
		Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina		30				30	
		Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes		60				60	
		Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat		2				2	
	Pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum	DKK	12	24,031,000	APBD		12	30,000,000
		Pertemuan sosialisasi/penyuluhan bagi pengelola depot air minum		1				1	
		Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum		1				1	
		Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi		4				4	
	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah item kelengkapan kelengkapan yang tersedia	DKK	1	307,000,000	APBD		1	315,000,000
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia		12				12	
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh		7				7	
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang dikalibrasi		15				15	
		Jumlah Parameter pemeriksaan untuk program PME Laboratorium yang terpenuhi		2				2	
		Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium		12				12	
		Jumlah alat laboratorium yang diadakan		1 paket				1 paket	
		Jumlah pengadaan alat keamanan dan perlindungan		1				1	
		Terlaksananya kegiatan magang pemeriksaan bakteriologis airmetode CFU (Coloni Forming Unit)		1				1	
		Meningkatnya pengetahuan/keterampilan petugas laboratorium dalam pemeriksaan bakteriologis air metoda CFU (Coloni Forming Unit)		3				3	
	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Persentase pelayanan pemeriksaan air di UPTD Laboratorium terlaksana	DKK	100	72,733,510	APBD		1001	95,253,000
		Jumlah media promosi pelayanan Laboratorium yang diadakan							
	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	<b>Persentase pangan yang memenuhi syarat</b>		97	49,703,150	APBD		98	66,000,000
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Frekuensi pelatihan keamanan pangan	DKK	2	49,703,150	APBD		2	66,000,000
		Frekuensi penyuluhan kewaspadaan pangan bagi pengelola kantin sekolah dan guru UKS		2				2	
		Jumlah terbina dan terawasinya industri rumah tangga		100				100	
		Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan		80				80	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan</b>		56	189,410,000	APBD		58	200,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan</b>		45				50	
		<b>Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</b>		25				30	
	Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	DKK	15	189,410,000	APBD		15	200,000,000
		Jumlah TPM yang diperiksa higiene dan sanitasi		15				15	
		Jumlah pemeriksaan laik sehat hotel, rumah makan/restoran		15				15	
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)		24				24	
		Jumlah kelurahan yang dibina STBM		24				24	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah cair		7				7	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah medis/ B3		7				7	
		Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi/pusat/luar daerah		4				4	
		Jumlah peserta lintas sektor dan lintas program yang mengikuti pertemuan / sosialisasi program TTU /TPM		70				70	
		Frekuensi pertemuan / sosialisasi pengelolaan limbah medis / B3 dengan fasilitas pelayanan kesehatan		1				1	
		Jumlah survey EHRA yang dilaksanakan		1					
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Cakupan penderita DBD yang ditangani .</b>		100%	<b>740,940,280</b>	APBD		100%	<b>837,000,000</b>
		<b>Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .</b>		87				90	
		<b>Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .</b>		80				90	
		<b>Cakupan penemuan penderita diare .</b>		100				100	
		<b>Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .</b>		87				90	
		<b>Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) .</b>		100				100	
		<b>Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .</b>		15				20	
		<b>Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .</b>		0.9				0.9	
		<b>Insiden rate HIV</b>		0				0	
		<b>Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang dibina .</b>		1				1	
		<b>Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .</b>		100				100	
		<b>Persentase angka keberhasilan pengamatan,pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular</b>		82				83	
		<b>Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi</b>		82				83	
		<b>Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.</b>		100				100	
		<b>Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi</b>		100				100	
		<b>Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehtaan sesuai standard.</b>		100				100	
	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah bahan medis untuk pemeriksaan cepat penyakit menular yang diadakan	DKK	1	217,694,280	APBD		80	230,000,000
		Jumlah sampel penyakit menular yang diperiksa oleh pihak ketiga		5				100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Monitoring / evaluasi program penyakit menular		7				100	
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang penyakit TB, Pneumonia dan diare		30				84	
	Peningkatan dan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	DKK	7	36,361,220	APBD		5	55,000,000
		Jumlah Puskesmas, pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi.		36				14 Pustu, 26 Poskeskel	
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi		100				100	
	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM.	DKK	24	74,541,620	APBD		24	80,000,000
		Jumlah puskesmas melaksanakan PTM terpadu		7				7	
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servix dan kanker payudara .		12				12	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku		7				7	
	Peningkatan imunisasi	Jumlah peserta LS yang mengikuti sosialisasi program imunisasi	DKK	60	117,682,500	APBD		100	150,000,000
		Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi program imunisasi		40					
		Jumlah monitoring / evaluasi program imunisasi yang dilakukan ke Puskesmas		12					
	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti Malam Renungan AIDS Nusantara .	DKK	200	274,660,660	APBD		1	300,000,000
		Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari AIDS Sedunia .		200				20	
		Jumlah focus Group Diskusi yang dilakukan		3				1	
		Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS .		3				3	
		Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang mendapat bantuan		3				3	
		Frekuensi LSM Peduli AIDS, jaringan AIDS, jaringan ODHA dan kelompok resti yang mengikuti pertemuan		3				1	
	Pengembangan IPWL	Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) bagi pecandu narkoba	DKK	4	20,000,000	APBD		1	22,000,000
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba		2				1	
	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .</b>		90	<b>2,043,691,000</b>	APBD		90	<b>2,267,496,000</b>
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .</b>		100				100	
	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN. .	DKK	9120	2,013,696,000	APBD		9120	2,234,496,000
	Pengembangan dan peningkatan Pengelolaan JKN	Jumlah pertemuan yang dilakukan	DKK	3	29,995,000	APBD		3	33,000,000
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan JKN		7				7	

**Tabel 5.3**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>148,924,035,837</b>				<b>57,104,374,370</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>2,863,679,863</b>				<b>3,150,047,849</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>2,790,729,863</b>				<b>3,069,802,849</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat		5 Jenis	6,655,000	APBD		5 Jenis	7,320,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening belanja jasa kantor		12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	259,600,000	APBD		12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	285,560,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan		9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	201,079,560	APBD		9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	221,187,516
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli		59 Jenis	45,448,084	APBD		59 Jenis	49,992,892
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan		16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	50,919,935	APBD		16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	56,011,929
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli		13 jenis	9,898,724	APBD		13 jenis	10,888,596
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli		874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	31,845,000	APBD		874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	35,029,500
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		12 bulan	450,000,000	APBD		12 bulan	495,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar		41 orang	1,218,804,070	APBD		41 orang	1,340,684,477
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan		1 paket (6 orang)	198,000,000	APBD		1 paket (6 orang)	217,800,000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		126 Paket	218,479,490	APBD		126 Paket	240,327,439
	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek		126 Paket	100,000,000	APBD		126 Paket	110,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan pakaian dinas</b>			-				-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		stel	-	APBD		stel	-
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>			-				-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan SKPD yang disusun		2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		1 laporan	0	APBD		1 laporan	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis laporan keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya		2 jenis laporan	0	APBD		2 jenis laporan	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian</b>			<b>72,950,000</b>				<b>80,245,000</b>
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bimtek/diklat ke PU an		15 Orang	72,950,000	APBD		15 Orang	80,245,000
					<b>129,593,749,625</b>				<b>38,074,218,669</b>
	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Presentase jalan dan Jembatan Kota Terbangun yang berkondisi baik</b>			<b>39,270,850,190</b>				<b>26,230,191,000</b>
	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 3 paket pekerjaan	17,720,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	3,724,830,000
	Peningkatan Trotoar Pedestrian Jl. Sudirman	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		termasuk lampu kursi dan lampu (kiri kanan) ± 3,125 km (kanan 679 m + kiri 884 m)					
	Peningkatan Trotoar Jln. Soekarno Hatta	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		kanan 0,4 km + kiri 1,3 km					
	Peningkatan Trotoar Jl. A. Rivai	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		kanan 235 m + kiri 410 m					
	Peningkatan Trotoar Jl. Agus Salim	Panjang Trotoar yang ditingkatkan, Jumlah lampu dan bangku		1 paket termasuk pemasangan lampu dan bangku trotoar timbal					
	Peningkatan Trotoar Jl. Imam Bonjol	Panjang trotoar yang ditingkatkan		1 paket					
	Peningkatan Trotoar Jl. Yos Sudarso	panjang trotoar yag ditingkatkan		1 paket					
	Peningkatan Trotoar Jalan Hajerat Talao	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		450 m					
	Rehab Trotoar Jalan Angku Basa	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		700 m					
	Pembuatan Batu Alam /Paving Slover trotoar atas Bandar Samping mesjid Tarok	Panjang Trotoar yang ditingkatkan		220 m					
	Peningkatan trotoar Simpang Ikua Pakan Sebelah Kiri Jalan arah ke kubu ateh	Panjang Trotoar yang ditingkatkan							
	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan	7,900,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket pekerjaan	8,690,000,000
	Pemasangan dam penahan jalan dan pengaspalan jalan gg ceremai	panjang dam penahan jalan yang dibuat dan panjang jalan yang diaspal		1 paket					
	Pendampan jalan ke Embung	panjang dam penahan jalan yang dibuat		1 paket					
	Pengecoran Bahu Jalan Paninjauan Garegeh	panjang dam penahan jalan yang dibuat dan panjang jalan yang diaspal							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Jalan yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket pekerjaan	6,350,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 3 paket pekerjaan	2,477,486,000
	Pembangunan Jalan Talao			1 paket					
	Pembukaan Jalan Banda Tengah Ladang Cakiah	Jalan yang dibangun		1 paket					
	Pemotongan tebing dan pembuatan jalan antara batas Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo	Jalan yang dibangun							
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun			-	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	5,331,000,000
	Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	6,800,850,200	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	4,014,375,000
	Lanjutan trotoar di sebelah kiri jalan Kubu Tanjung	Panjang Trotoar yang dibangun		25 m					
	Lanjutan Pembangunan Trotoar dan drainase sampai ke Kel Pakan Labuah	Panjang Trotoar yang dibangun		100 m					
	Pembangunan Trotoar Jalan Kinantan	Panjang Trotoar yang dibangun		300 m					
	Pembangunan Trotoar Jalan Veteran	Panjang Trotoar yang dibangun		495 m					
	Pembangunan trotoar Bukit Apit Puhun	Panjang Trotoar yang dibangun							
	Pembangunan Aliran air dan Trotoar RT/RW: 03/04 Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guuk Panjang	Panjang Trotoar yang dibangun							
	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 laporan monitoring dan evaluasi	49,999,990	APBD		1 laporan monitoring dan evaluasi	50,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 laporan monitoring dan evaluasi	-	APBD		1 laporan monitoring dan evaluasi	50,000,000
	Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun / ditingkatkan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	1,210,000,000
	Pengecoran bahu/badan jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bahu/ badan jalan yang dicor		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	187,500,000
	Perencanaan DAK Jalan 2019	Dokumen perencanaan, laporan perencanaan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	450,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	495,000,000
	<b>Program Normalisasi Sungai</b>	<b>Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik</b>			<b>200,000,000</b>				<b>220,000,000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penataan dan FS Jalan Inspeksi Batang Agam ( <b>Prioritas</b> )	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket	200,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	220,000,000
	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong</b>	<b>Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik</b>			<b>2,707,437,400</b>				<b>2,978,181,140</b>
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	1,109,713,900	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	1,220,685,290
	Pembangunan Drainase Jl. H. Miskin, Kusuma Bakti	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun		2 paket					
	Pembuatan riol bandar Samping Balai Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun		400 m					
	Pendalaman Banda Kapalo Koto								
	Perbaikan Drainase Palolok								
	Lanjutan pembangunan saluran air/banda	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun		500 m					
	Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan		1 dokumen perencanaan	1,247,724,000	APBD		1 dokumen	1,372,496,400
	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara		1 tahun	349,999,500	APBD		100%	384,999,450
	<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	<b>Presentase Pengamanan titik bahaya longsor</b>			<b>3,700,000,000</b>				<b>1,095,300,000</b>
	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	3,700,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	1,095,300,000
	Pemasangan Batu Bronjong /Dam tebing di Tambuo depan balai adat sampai Mushalla Arafah	Panjang pemasangan batu bronjong/dam jalan		1 paket					
	<b>Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Presentase peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan</b>			<b>16,871,680,875</b>				<b>1,133,000,000</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan dalam kota yang direhab/dipelihara			14,731,680,875				
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin		12 Bulan	500,000,000	APBD		12 Bulan	550,000,000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara			300,000,000	APBD		12 Bulan	330,000,000
	Pelebaran Jembatan (Jalan Bahder Johan)	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara			500,000,000	APBD	Musrenbang		
	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin			230,000,000	APBD	Musrenbang	12 Bulan	253,000,000
	Pengecatan Trotoar di sepanjang jalan Kubu Tanjuang	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin							
	Pembuatan drainase dan pemasangan pavin blok serta trotoar (gg. Lubuak Tendo dan Jl. Kurai menuju perbatasan dengan Kelurahan Parit Antano)	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin		200 m	430,000,000	APBD	Musrenbang		
	Rehab trotoar serta jembatan di depan kadai nasi Salero Kampuang sampai perbatasan Kelurahan Pakan Labuah	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin		500 m	180,000,000	APBD	Musrenbang		
	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2019)	Jumlah Jalan yang dipelihara		12 Bulan				12 Bulan	-
	Pengaspalan jalan di sepanjang jalan Kubu Tanjuang	Panjang jalan yang diaspal		1012 m					
	Pengaspalan Jalan lingkaran di Garegeh	Panjang jalan yang diaspal		700 m					
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Presentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik</b>			<b>3,749,999,290</b>				<b>5,736,674,029</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan	2,200,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	882,192,000
	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara		12 Bulan	250,000,000	APBD		12 Bulan	275,000,000
	Perbaikan dam banda nagari jl tengah jua II	Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara		1 paket					
	Pembangunan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang dibangun		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	250,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	600,000,000
	DAK Fisik Bidang Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan perencanaan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan		APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	2,500,000,000
	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Saluran Irigasi yang rehab/ditingkatkan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	200,000,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	1,429,482,029
	Pendamam Bandar Surian	panjang banda yang direhab		1 paket	200,000,000				
	Pendamam Bandar Malang	panjang banda yang direhab		1 paket	600,000,000				
	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Saluran Irigasi yang rehab/ditingkatkan		1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan					
	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 laporan monitoring dan evaluasi	49,999,290	APBD		1 laporan monitoring dan evaluasi	50,000,000
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih</b>			<b>2,500,000,000</b>				<b>-</b>
	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan		1 paket	1,000,000,000	APBD			1,100,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum ( DAK Air Minum 2018)	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/ ditingkatkan		1 paket		APBD		1 paket	-
	Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara		1 paket		APBD		100%	-
	Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun/ direvitalisasi			1,500,000,000				
	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Presentase pengurangan titik genangan</b>		12 Bulan	<b>-</b>				<b>-</b>
	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Dok Perencanaan, Dok Pengawasan Bak resapan		1 dok. Perencanaan, 1 dok. Pengawasan, 1 bak resapan		APBD		1 dok. Perencanaan, 1 dok. Pengawasan, 1 bak resapan	-
	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibangun		1					
	<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>	<b>Presentase Pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum</b>			<b>59,974,806,870</b>				<b>-</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan Pengawasan, Bangunan Rumah Dinas (lanjutan)		1 laporan pengawasan, 1 unit Bangunan (lanjutan)	8,000,000,000	APBD		0%	-
	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua)	Dokumen manajemen konstruksi, bangunan kantopr DPRD Kota Bukittinggi		1 dokumen manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap 2)	51,179,106,870	APBD		0%	-
	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	Administrasi pendukung pembangunan kembali pasar atas		1 paket	700,000,000	APBD			
	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah Event Daerah yang dilaksanakan		5 even	95,700,000	APBD		5 even	105,270,000
	<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>	<b>Presentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi</b>			<b>250,000,000</b>				<b>275,000,000</b>
	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana		9 kali sidang, 18 SLF	250,000,000	APBD		9 kali sidang, 12 SLF	275,000,000
	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	<b>Presentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi pada SIPJAKI</b>			<b>368,975,000</b>				<b>405,872,500</b>
	Pembinaan Jasa Konstruksi	peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek		120 orang	166,605,000	APBD		120 orang	183,265,500
	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain	Jumlah pendampingan		44 paket	34,720,000	APBD		44 dokumen	38,192,000
	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi		4 bidang	114,000,000	APBD		4 bidang	125,400,000
	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang disusun		4 dokumen	53,650,000	APBD		4 dokumen	59,015,000
					<b>1,772,872,900</b>				<b>1,241,096,675</b>
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Presentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah</b>			<b>1,253,227,545</b>				<b>669,486,784</b>
	Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi	Jumlah Peserta Sosialisasi		960 orang 24 kelurahan	174,424,120	APBD			
	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi		475 orang	244,533,440	APBD		475 orang	268,986,784
	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya Peta tata Ruang		40 Buah	28,000,000	APBD		30 Buah	30,000,000
	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota		300 KRK	159,330,415	APBD		300 KRK	80,000,000
	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak		20 Sertifikat	80,086,300	APBD		20 Sertifikat	90,500,000
	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Terlaksananya pendataan arsip tata ruang serta digitalisasi data / sistem informasi tata ruang		1 Dokumen	184,278,990	APBD		1 Dokumen	200,000,000
	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok (lanjutan)	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok		1 kegiatan	112,116,095	APBD		-	-
	Pendataan Bangunan	Terlaksananya pendataan bangunan		1 paket	270,458,185	APBD		-	-
	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang		jenis	-	APBD		jenis	-
	Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang							
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Presentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditertibkan</b>			<b>519,645,355</b>				<b>571,609,891</b>
	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan		12 bulan	195,285,960	APBD		12 bulan	214,814,556
	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun		1 Dokumen	55,056,585	APBD		1 Dokumen	60,562,244
	Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	Jumlah Billboard yang dibuat		3 Unit	200,000,000	APBD		3 Unit	220,000,000
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Penataan Ruang Daerah		1 laporan tahunan	69,302,810	APBD		1 laporan tahunan	76,233,091
	Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan	Terlaksananya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					995,305,860				980,424,530
	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>Presentase ketersediaan informasi pertanahan</b>			262,929,590				70,000,000
	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya peralatan, perlengkapan dan pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi		Data tanah aset pemerintah Kota Bukittinggi, 1 bh GPS, 1 bh Total Station, perlengkapan jaringan komputer	262,929,590	APBD		Data tanah aset pemerintah Kota Bukittinggi	70,000,000
	<b>Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah</b>			266,631,010				380,424,530
	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan		5 sertifikat	164,022,300	APBD		10 sertifikat	180,424,530
	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	2 paket	2 paket	102,608,710	APBD		1 paket	200,000,000
	Pengadaan Tanah Perkantoran	Luas Lahan yang diadakan + Appraisal + DED	1 paket		7,000,000,000				
	Pengadaan Tanah Penggantian Lapas	Luas Lahan Pengganti Lapas	1 paket		2,000,000,000				
	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>Presentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah</b>			465,745,260				530,000,000
	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Tanah Pemerintah dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass, Tanah Pemerintah dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan		1 kegiatan	465,745,260	APBD		1 kegiatan	530,000,000
	<b>UPTD</b>				13,698,427,589				13,658,586,647
	<b>UPTD Perlengkapan dan Peralatan</b>				4,617,516,750				4,375,668,425
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				446,866,750				491,553,425
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan		2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	428,500,000	APBD		2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	471,350,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara		3 item, 6 jenis	18,366,750	APBD		3 item, 6 jenis	20,203,425
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			1,087,000,000				492,100,000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape		1 gedung	100,000,000	APBD		1 gedung	110,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan		paket	200,000,000	APBD		paket	150,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor		paket	81,000,000	APBD		paket	89,100,000
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional		pick up DG, pick up SG, truk, dump truk, mini bus	690,000,000	APBD		1 unit	143,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya		stel	16,000,000	APBD		stel	17,600,000
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinarmargaan</b>	<b>Presentase pemenuhan alat berat kebinarmargaan</b>			3,083,650,000				3,392,015,000
	Pengadaan alat berat	Jumlah Alat Berat yang diadakan kembali		Compressor, compeching melengkap i jack hammer	2,060,000,000	APBD		100%	2,266,000,000
	Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Operasionalisasi	Jumlah alat berat yang dipelihara		12 bulan	963,650,000	APBD		12 unit	1,060,015,000
	Peralatan bengkel				60,000,000	APBD		12 unit	66,000,000
	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Terlaksananya Operasional dan administrasi UPTD		12 bulan	50,000,000				55,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>UPTD Penerangan Fasilitas Umum</b>				<b>9,080,910,839</b>				<b>9,282,918,222</b>
	<b>Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan</b>	<b>Presentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap</b>			<b>9,080,910,839</b>				<b>9,282,918,222</b>
	Pemeliharaan Rutin Penerangan Fasilitas Umum	Pekerjaan Pemeliharaan Lampu PJU		12 bulan	390,095,630	APBD		12 bulan	429,105,193
	Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	1,483,920,209	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	1,154,482,029
	pengadaan lampu jalan belakang mesjid iamiak aur kuning	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		5 unit					
	pengadaan lampu jalan gang melur	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		2 unit					
	pemasangan tiang lampu jalan di Jl. Perwira	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		4 titik					
	Pemasangan tiang dan lampu jalan di Garegeh	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		12 titik					
	Pemasangan lampu jalan, tiang dan jaringan jl. Veteran, Jl. Kirab Remaja, Jl. Eks APDN, Jl. Kabun Pulasan Dalam	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		20 paket					
	Penambahan Tiang Listrik jl. Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		3 unit					
	Pemasangan Lampu Sorot di Lapangan Voli Jalan Kubu Taniuang	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		4 unit					
	Lampu jalan	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah		15 buah					
	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar		12 bulan	3,993,000,000	APBD		12 bulan	4,392,300,000
	Revitalisasi Jaringan Penerangan Fasilitas Umum	Jumlah jaringan penerangan jalan umum direvitalisasi		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	2,963,895,000	APBD		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	3,257,031,000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penerangan Fasilitas Umum	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 laporan monitoring dan evaluasi	50,000,000	APBD		1 laporan monitoring dan evaluasi	50,000,000
	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	Database Penerangan Fasilitas Umum			200,000,000	APBD			220,000,000

**Tabel 5.4**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>				<b>20,973,858,061</b>				
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,185,173,830</b>				<b>981,597,998</b>
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	DPKP	12 Bulan	13,200,000	APBD		12 Bulan	15,972,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	DPKP	12 Bulan	12,000,000	APBD		12 Bulan	13,310,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	DPKP	12 Bulan	228,000,000	APBD		12 Bulan	356,950,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	DPKP	12 Bulan	14,182,490	APBD		12 Bulan	17,160,813
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	DPKP	12 Bulan	5,633,600	APBD		12 Bulan	14,309,460
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis Kantor	DPKP	12 Bulan	35,002,660	APBD		12 Bulan	29,888,918
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	DPKP	12 Bulan	32,259,700	APBD		12 Bulan	37,228,070
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPKP	12 Bulan	6,226,840	APBD		12 Bulan	7,973,343
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	DPKP	12 Bulan	30,580,000			12 Bulan	33,638,000
	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	Dalam dan Luar Daerah Bukittinggi	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	226,270,000
	Pelayanan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Pegawai Non PNS dan Asuransi	DPKP	12 Bulan	208,088,540	APBD		12 Bulan	228,897,394
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	DPKP	12 Bulan	300,000,000	APBD		12 Bulan	465,996,664
	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Persentase Jumlah Paket yang Ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	DPKP	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	219,776,331
	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>290,345,000</b>				<b>304,859,500</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2	DPKP	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	DPKP	1 Paket	277,145,000	APBD		1 Paket	304,859,500
	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	DPKP	1 Paket	13,200,000	APBD		1 Paket	-
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				<b>7,073,657,600</b>				<b>566,335,000</b>
	Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	450,000,000	APBD		1 Dokumen	495,000,000
	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Verifikasi Dan Monitoring Kegiatan Hibah/ Bansos	Kota Bukittinggi	110 Paket	64,850,000	APBD	Perwako No. 44 Perubahan ke III tahun 2017	120 Paket	71,335,000
	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	Kota Bukittinggi	82 Unit	4,058,807,600	APBD			
	Pendamping Pembangunan Rusunawa	Terbangunnya Rusunawa	Kota Bukittinggi	4 Blok	2,500,000,000	APBD	Permen PUPR RI No. 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	-	-
	<b>Program Lingkungan Sehat</b>				<b>10,463,283,971</b>				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Kota Bukittinggi	77 Paket	1,402,086,850	APBD		79 Paket	1,542,295,535
	Pembangunan Riol	Pembangunan Riol	Kota Bukittinggi	45 Paket	1,830,597,350	APBD		47 Paket	2,013,657,085
	Rehab/ Peningkatan Riol	Rehab/ Peningkatan Riol	Kota Bukittinggi	25 Paket	6,404,045,125	APBD		27 Paket	7,044,449,638
	Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Perumahan	Tersedianya Lampu Jalan	Kota Bukittinggi	7 Paket	-	APBD		9 Paket	-
	Pembangunan Jalan Lingkung	Jalan Lingkung Dalam Kota	Kota Bukittinggi	8 Paket	500,000,000	APBD		-	-
	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara	Kota Bukittinggi	12 Bulan	326,554,646	APBD		12 Bulan	359,210,111
	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>				<b>1,705,877,660</b>				
	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Manunggal Sakato Tahun 2018	Kota Bukittinggi	24 Kelurahan	130,980,480	APBD		24 Kelurahan	144,078,528
	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura	Kota Bukittinggi	30 Paket	1,250,748,000	APBD		30	-
	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang Dientaskan	Kota Bukittinggi	1 Laporan, 3 BKM	100,000,000	APBD		1 Laporan, 3 BKM	110,000,000
	Pendamping Kegiatan BPS	Jumlah Rumah BPS	Kota Bukittinggi	220 Rumah	79,149,180.00	APBD		220 Rumah	87,064,098
	Pendamping Penyusunan Perda RP3KP	Perda Tentang RP3KP	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	145,000,000	APBD		1 Dokumen	0
	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan	Perwako Perumahan	DPKP	-	-	APBD		1 Dokumen	75,000,000
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>				<b>255,520,000</b>				<b>209,384,975</b>
	Pembuatan Pagar TPU	Pagar TPU Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 Paket	219,000,000	APBD			
	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	2 TPU	36,520,000	APBD		2 TPU	209,384,975

Tabel 5.5  
Program dan Kegiatan  
Dinas Kebakaran  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS KEBAKARAN</b>				3,817,592,511.13				28,832,509,697
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				1,702,592,511	APBD			2,132,228,827
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				1,702,592,511	APBD			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli	Dinas Kebakaran	Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh, Cek bermaterai 6buku	1,800,000	APBD		Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh, Cek bermaterai 6buku	1,700,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Listri, air dan tlp yang terbayar	Dinas Kebakaran	Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 2,	50,000,000	APBD		Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 2,	59,894,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di perbaiki	Dinas Kebakaran	roda 2(6 unit), roda 4(6unit), Mobil Damkar (6unit), Mesin (apung, sinso perahu)	543,260,000	APBD		roda 2(6 unit), roda 4(6unit), Mobil Damkar (6unit), Mesin (apung, sinso perahu)	816,750,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat-alat kebersihan tersedia	Dinas Kebakaran	31 bh alat dan Bahan Pembersih serta 1 jenis retribusi	10,000,000	APBD		31 bh alat dan Bahan Pembersih serta 1 jenis retribusi	12,100,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantoryang diperbaiki	Dinas Kebakaran	6 macam	3,000,000	APBD		6 macam	6,600,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	Dinas Kebakaran	59 macam	26,500,000	APBD		59 macam	42,350,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan Penggandaan	Dinas Kebakaran	3 item	12,000,000	APBD		3 item	29,282,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kebakaran	9 macam	5,500,000	APBD		9 macam	8,000,000
	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan Minum	Dinas Kebakaran	nasi 330 bungkus,snack 300 kotak	15,000,000	APBD		nasi 330 bungkus,snack 300 kotak	15,400,000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	Dinas Kebakaran	12 bulan	250,000,000	APBD		12 bulan	266,200,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non Pns Dan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Non Pns	Jumlah Pegawai Non PNS	Dinas Kebakaran	47 orang	783,411,301	APBD		47 orang	860,952,827
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	JumlahPenerima Honorarium tim barang dan Jasa PPHP, PPK dan PPBI	Dinas Kebakaran	4 orang	2,121,210	APBD		4 orang	13,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			527,400,000	APBD			21,260,028,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Kebakaran	2 macam		APBD		2 macam	700,000
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor(Lanjutan Pembangunan Sektor Pemadam Di Mks)	Luas area Gedung yang dibangun dan direhap	Dinas Kebakaran	3 unit	344,400,000	APBD		1 unit	800,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor Yang terbeli	Dinas Kebakaran	2 jenis		APBD		2 Macam	282,305,000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang terbeli	Dinas Kebakaran	6 Jenis		0 APBD		4Jenis	155,727,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas terbeli	Dinas Kebakaran	1 mobil Pemadam Kebakaran			APBD	Mobil Tangga	20,000,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB, Reservoir yang terpelihara, Pengecatan dan Perbaikan atap dan lantai	Dinas Kebakaran	1 PBB dan 7 Reservoir, pengecatan dan perbaikan atap	183,000,000		APBD	1 PBB dan 7 Reservoir, pengecatan dan perbaikan atap	13,310,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	Dinas Kebakaran	Meja, kursi, almari dll			APBD	Meja, kursi, almari dll	7,986,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Dinas Kebakaran	55 stel	<b>160,600,000</b>		APBD	55 stel	<b>247,720,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Dinas Kebakaran	55 stel	160,600,000		APBD	55 stel	247,720,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu			-	-	-		-
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kebakaran	1 Laporan			APBD	1 Laporan	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester	Dinas Kebakaran	10 laporan			APBD	10 laporan	-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan rencana kerja dan keuangan	Dinas Kebakaran	4 laporan			APBD	4 laporan	-
	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat			<b>1,427,000,000</b>		-	-	<b>5,192,532,870</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran	Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Dinas Kebakaran	isi ulang tabung apar, dan alat pemadam kebakaran 6 ienis	527,000,000		Musrembang	isi ulang tabung apar, dan alat pemadam kebakaran 6 ienis	1,327,617,500
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya pengawasan terhadap alat kebakaran pada bangunan bertingkat	Dinas Kebakaran	24 kali	50,000,000		APBD	24 kali	82,764,000
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran yang teratasi	Dinas Kebakaran	100%	450,000,000		APBD	100%	82,764,000
	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat	Dinas Kebakaran	15 orang			APBD	10 orang	420,000,000
	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	jumlah peserta bimtek	Dinas Kebakaran	55 orang	25,000,000		APBD	55 orang	27,500,000
	Pelatihan pertolongan penyelamatan korban dan layanan medis darurat serta bencana lainnya	Jumlah peserta pelatihan	Dinas Kebakaran	8 kelurahan (160 orang) dan 10 sekolah (500 orang)			APBD	8 kelurahan (160 orang) dan 10 sekolah (500 orang)	74,820,350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peringatan HUT Damkar	Terlaksananya Peringatan HUT Damkar	Dinas Kebakaran	Upacar, Simulasi, Demontrasi makan dan Minum	100,000,000	APBD		Upacar, Simulasi, Demontrasi makan dan Minum	110,000,000
	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Penyiraman, Penyemprotan dan Penyelamatan	Dinas Kebakaran	100%	30,000,000	APBD	-	100%	33,000,000
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Dinas Kebakaran	8 Kelurahan (160 org),5 sekolah (250 org)	120,000,000	APBD		8 Kelurahan (160 org),5 sekolah (250 org)	132,000,000
	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	penyediaan Jasa Informasi Kebakaran	Dinas Kebakaran	Spanduk 28 bh, Baliho 2bh, Stiker 200Bh, Baner 8bh, dan Kontruksi Baliho	125,000,000	APBD		Spanduk 28 bh, Baliho 2bh, Stiker 200Bh, Baner 8bh, dan Kontruksi Baliho	137,500,000
	Fasilitasi Kegiatan Barisan Relawan Kebakaran) BALAKAR	Jumlah anggota balakar	Dinas Kebakaran	120 orang		APBD	Kepmen PU No. 11/KPTS/2000	120 orang	1,137,087,020
	Pengadaan sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Sektor MKS	jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Dinas Kebakaran	23 Jenis		APBD		23 Jenis	1,217,480,000
	Pembangunan/Rehabilitasi Bak Penampungan air/Resevoar	Rehab berat Resevoar(Di aur kuning)	Dinas Kebakaran	1 resevoir		APBD		perbaikan 3 resevoir	10,000,000
	Pembangunan Hidran Kota	terbangunnya hidran kota	Dinas Kebakaran	di sepanjang jalan protokol		APBD		perbaikan 3 resevoir	400,000,000

**Tabel 5.6**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7	8	9	10
	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>13,797,750,274</b>				<b>19,430,246,824</b>
	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>13,797,750,274</b>				<b>19,430,246,824</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>2,281,682,044</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,750,246,824</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Satpol PP	561 bh, 3 buku	3,108,000	APBD		600 bh, 4 buku	3,000,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Satpol PP	48 bulan	35,800,000	APBD		48 bulan	35,000,000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	Satpol PP	30 unit	493,159,750	APBD		30 unit	700,000,000
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	Satpol PP	25 jenis, 12 bulan, 5 orang	208,071,460	APBD		25 jenis, 12 bulan, 5 orang	260,000,000
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Satpol PP	12 bulan	5,000,000	APBD		12 bulan	13,000,000
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripheral kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Satpol PP	55 jenis	9,619,440	APBD		60 jenis	14,000,000
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	Satpol PP	6 jenis/12 bulan	5,360,000	APBD		6 jenis/12 bulan	9,000,000
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	Satpol PP	5 jenis	1,470,500	APBD		5 bulan	2,000,000
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	Satpol PP	100%	12,914,000	APBD		100%	17,000,000
	10 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	Satpol PP	95%	122,400,000	APBD		95%	250,000,000
	11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	Satpol PP	38 org/12 bln	985,246,824	APBD		38 org/12 bln	985,246,824
	12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibavarkan	Satpol PP	23 org	369,999,360	APBD		28 org	450,000,000
	13 Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	Satpol PP	7 org	29,532,710	APBD		7 org	12,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>590,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>150,000,000</b>
	1 Pengadaan Mebeleur	Jenis mobiler yang diadakan	Satpol PP	9 jenis	200,000,000	APBD			50,000,000
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah jendaraan yang diadakan	Satpol PP	14 unit, 2 jenis	0	APBD			
	3 Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Satpol PP	8 jenis	150,000,000	APBD			50,000,000
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Satpol PP	1 unit	25,000,000	APBD		1 unit	50,000,000
		Pembangunan gedung kantor	Satpol PP	1 unit	200,000,000	APBD			
	5 Pengadaan Tanaman Hias	Jenins tanaman hias yang diadakan	Satpol PP	50 bgt	15,000,000	APBD			
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>278,925,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>350,000,000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Satpol PP	205 stel	278,925,000	APBD		350	350,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>285,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>710,000,000</b>
	1 Latihan Pembinaan Kesatuan	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan	Satpol PP	40 org	70,000,000	APBD		150 org	120,000,000
	2 HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Satpol PP	50 org	200,000,000	APBD		50 org	200,000,000
	3 Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Satpol PP	30 org	15,000,000	APBD		150 org	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kabupaten Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7	8	9	10
	4	Latihan Pengendali Huru-Hara	Jumlah anggota Pol.PP latihan pengendali Huru-hara, kelengkapan PHH	Satpol PP	150 org, 30 stel	0	APBD	150 org	20,000,000
	5	Pelatihan Dasar Secata	Jumlah anggota yang mengikuti Latsar Secata	Satpol PP	35 org	0	APBD	35 org	220,000,000
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu						
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu						
		Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu						
		Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu						
		<b>Program peningkatan pembrantasan penyakit masyarakat</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
		Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat		48 kali				
		Razia Warung Kelambu	Jumlah razia warung kelambu selama Bulan Ramadhan		15 kali				
		<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Penurunan kasus pelanggaran perda</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>600 kasus</b>	<b>9,588,934,130</b>	<b>APBD</b>	<b>500 kasus</b>	<b>14,860,000,000</b>
	1	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Satpol PP	10 titik	5,103,999,470	APBD	10 bulan	8,000,000,000
	2	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat PTI	pengamanan, pengawasan dan patroli siaga	Satpol PP	12 bln	96,000,000			
	3	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	Satpol PP	150 kasus	60,000,000	APBD	150 kasus	70,000,000
	4	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	Satpol PP	53 kasus	141,693,300	APBD	60 kasus	270,000,000
	5	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Satpol PP	12 kegiatan	349,491,000	APBD	45 org	450,000,000
	6	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Satpol PP	4 kegiatan	29,997,690	APBD	4 kegiatan	40,000,000
	7	Pemantauan tindak pelanggaran Perda Trantibum	Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum	Satpol PP	24 kali	90,000,000	APBD	12 bulan	180,000,000
	8	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK4	Satpol PP	936 kali	2,799,999,470	APBD	12 bulan	5,000,000,000
	9	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	Satpol PP	46 kali	867,753,200	APBD	12 bulan	850,000,000
	10	Monitoring Pengawasan Pemilu	Jumlah kegiatan monitoring	Satpol PP	6 kali	0	APBD		
	11	Penertiban alat peraga kampanye pemilu	jumlah kegiatan penertiban alat peraga	Satpol PP	8 kali	50,000,000	APBD		
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>30%</b>	<b>773,209,100</b>	<b>APBD</b>	<b>40%</b>	<b>610,000,000</b>
	1	Sosialisasi keliling Perda, Peraturan Kepala Daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan sosialisasi	Satpol PP	100 kali	50,000,000	APBD	4360 org	60,000,000
	2	Pembinaan dan operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Satpol PP	120 orang	347,032,600		338 orang	550,000,000

Tabel 5.7  
Program dan Kegiatan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				1,801,235,000				2,110,358,500
	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>				330,595,000				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lain yang terbeli	BPBD	4 item	600,000	APBD		100%	660,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	BPBD	12 bulan/rekening	11,000,000	APBD		100%	12,100,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang yang terpelihara	BPBD	3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw	178,000,000	APBD		100%	195,800,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli	BPBD	28 item	4,000,000	APBD		100%	4,400,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki	BPBD	6 jenis	2,000,000	APBD		100%	2,200,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	BPBD	59 item	11,000,000	APBD		100%	12,100,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang terilid	BPBD	3 item	8,000,000	APBD		100%	8,800,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	BPBD	7 item	3,000,000	APBD		100%	3,300,000
	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia	BPBD	12 bulan	9,995,000	APBD		100%	10,994,500
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti	BPBD	12 bulan	100,000,000	APBD		100%	110,000,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	BPBD	1 tahun	3,000,000	APBD		100%	3,300,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				-				
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli	BPBD	-	-	-		-	-
	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	BPBD	-	-	-		-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	BPBD	-	-	-		-	-
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang terbeli	BPBD	-	-	-		-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan	BPBD	1 Paket	-	-		-	-
	Pengadaan tanah Gedung Kantor	lokasi Gedung Kantor yang tersedia	BPBD	-	-	-		-	-
	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor yang terbangun	BPBD	1 Paket	-	APBD		100%	-
	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	BPBD	-	-	-		-	-
	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala gedung Kantor	BPBD	1 Paket	-	APBD		1	-
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				-				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terbeli	BPBD	1 Paket					
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
	Penyusunan Revisi Renstra	Revisi Renstra SKPD	BPBD	-	-	-		-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	BPBD	-	-	-		-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam bulan berikutnya	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	BPBD	-	-	-		-	-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana kerja dan rencana keuangan yang tersusun	BPBD	-	-	-		-	-
	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam</b>				<b>1,360,640,000</b>				
	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, jumlah sekolah yang ikutserta, jumlah masyarakat	Kota Bukittinggi	1 kegiatan	82,250,000	APBD		100%	90,475,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah barang penanggulangan bencana yg diadakan	BPBD	1 Paket	75,000,000	APBD		100%	82,500,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalops	Jumlah barang yang diadakan	BPBD	1 Paket		APBD		100%	-
	Operasional Pusdalops	Jumlah pembayaran honorarium Pusdalops	BPBD	1 Paket	1,070,740,000	APBD		100%	1,177,814,000
	Pendamping keg BPBD Prov Jambore PRB	Jumlah relawan yang ikut Jambore PRB	BPBD	2 kegiatan	80,130,000	APBD		100%	88,143,000
	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	BPBD	1 Kegiatan	52,520,000	APBD		100%	57772000
	Penyediaan Dana Siap Pakai Darurat Bencana	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana	BPBD	1 Paket		APBD		100%	0
	Pembangunan scub penahan tebing Panorama II Kelok Cindua (Musreimbang)	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana	BPBD	1 Paket		APBD	Musreimbang	100%	0
	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana</b>				<b>70,000,000</b>				
	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalops	Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih	BPBD	1 kegiatan	70,000,000	APBD		100%	250,000,000
	<b>Program Sistem Kebencanaan</b>				<b>40,000,000</b>				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana	Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana	BPBD	-	-	0		0%	-
	Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNPB	Jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana	BPBD	-	-	0		0%	-
	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	BPBD	1 dokumen	40,000,000	APBD		100%	-
	Penyediaan Informasi kebencanaan	Jumlah informasi kebencanaan tersedia	BPBD	0	-	0		0%	-

Tabel 5.8  
Program dan Kegiatan  
Dinas Sosial  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS SOSIAL</b>				<b>6,242,793,888</b>				<b>8,975,880,500</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>BKT</b>	<b>100%</b>	<b>680,012,950</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>721,487,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan materai, perangko, dan benda pos lainnya	BKT	400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	4,000,000	APBD		400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	4,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	BKT	4 rek. 12 bulan	41,000,000	APBD		4 rek. 12 bulan	55,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	BKT	5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua	101,350,000	APBD		5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua	140,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	BKT	12 bulan	146,422,950	APBD		12 bulan	70,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKT	12 bulan	12,500,000	APBD		12 bulan	12,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli	BKT	43 jenis	13,020,000	APBD		43 jenis	14,355,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	BKT	7 jenis, 12 bulan	13,900,000	APBD		7 jenis, 12 bulan	13,750,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor	Jenis alat listrik dan elektronik terbeli	BKT	5 jenis	5,320,000	APBD		5 jenis	5,852,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	BKT	12 bulan	16,000,000	APBD		12 bulan	15,380,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	BKT	12 bulan	180,000,000	APBD		12 bulan	220,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah penyediaan jasa NON PNS	BKT	12 bulan, 5 orang	141,500,000	APBD		12 bulan, 5 orang	155,650,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah kegiatan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ	BKT	8 kegiatan	5,000,000	APBD		8 kegiatan	15,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>BKT</b>	<b>100%</b>	<b>434,365,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>765,000,000</b>
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BKT	1 gedung	60,000,000	APBD		1 gedung	80,000,000
	DED Kantor Dinas Sosial	Jumlah DED kantor tersedia		1 gedung					
	Pengadaan Peralatan kantor	jumlah peralatan terbeli	BKT	11 item	67,140,000	APBD		11 item	80,000,000
	Pengadaan Perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan terbeli	BKT	6 item	35,000,000	APBD		11 item	80,000,000
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	BKT	12 bulan	175,000,000	APBD		12 bulan	400,000,000
	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	temu ramah pejuang terfasilitasi	BKT	1 kegiatan	52,225,000	APBD		1 kegiatan	57,000,000
	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah kegiatan hari pahlawan	BKT	1 kegiatan	45,000,000	APBD		1 kegiatan	68,000,000
	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>BKT</b>	<b>80%</b>	<b>2,557,335,088</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>4,731,672,000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan	BKT	12 bulan	221,501,000	APBD	SPM N0.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009	12 bulan	185,672,000
	Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan fakir miskin dan Data PMKS dan PSKS	Jumlah data dimutakhirkan	BKT	2 dokumen	412,096,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	2 dokumen	700,000,000
	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	BKT	1800 KK	395,390,000	APBD	SPM N0.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009	3786 KK	681,000,000
	Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial	Jumlah penyaluran bantuan pangan dan bantuan sosial termonev	BKT	12 bulan	80,000,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	12 bulan	100,000,000
	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Bantuan Pangan yang disalurkan	BKT	12 bulan	1,407,348,088	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	12 bulan	3,000,000,000
	Asistensi Lanjut Usia Miskin	Jumlah Lansia Terlantar yang tertangani	BKT	250 orang	41,000,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	350 orang	65,000,000
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan</b>	<b>BKT</b>	<b>750 KK</b>	<b>1,120,484,600</b>	<b>APBD</b>		<b>990 KK</b>	<b>700,000,000</b>
	Fasilitasi dan Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Jumlah KUBE terfasilitasi	BKT	75 KUBE / 1 kali	253,109,600	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	85 KUBE / 1 kali	500,000,000
	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah PRSE penerima manfaat	BKT	24 kelurahan	800,000,000	APBD			
	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi	BKT	108 orang / 1 kegiatan	67,375,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	200 orang	200,000,000
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial</b>	<b>BKT</b>	<b>70%</b>	<b>144,495,250</b>	<b>APBD</b>		<b>73%</b>	<b>165,000,000</b>
	Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar	BKT	12 bulan	69,495,250	APBD	SPM N0.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009	12 bulan	75,000,000
	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan diskriminasi	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan, eksploitasi	BKT	12 bulan	75,000,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	12 bulan	90,000,000
	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma</b>	<b>Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya</b>	<b>BKT</b>	<b>20%</b>	<b>169,351,500</b>	<b>APBD</b>		<b>25%</b>	<b>185,746,500</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit	BKT	20 orang	85,746,500	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	20 orang	85,746,500
	Pembinaan Penyandang Disabilitas	jumlah penyandang disabilitas yang terbina	BKT	524 orang	83,605,000	APBD	SPM no.2 th 2018/Permensos no.8 th 2012/ UU no.11 th 2009	50 orang	100,000,000
	<b>program pembinaan panti asuhan/panti jompo</b>	<b>Panti Asuhan/ Jompo yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>	<b>BKT</b>	<b>75%</b>	<b>43,094,000</b>	<b>APBD</b>		<b>75%</b>	<b>90,000,000</b>
	Pembinaan panti sosial anak	Jumlah panti dibina	BKT	3 Panti	43,094,000	APBD		3 Panti	90,000,000
	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>	<b>BKT</b>	<b>40%</b>	<b>425,788,500</b>	<b>APBD</b>		<b>45%</b>	<b>800,000,000</b>
	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina	BKT	15 orsos/yayasan	143,588,500	APBD		20 orsos/yayasan	350,000,000
	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Jumlah bulan LKS yang Terfasilitasi	BKT	12 bulan	282,200,000	APBD		12 bulan	450,000,000
	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Tingkat Anak terlantar yang Terentaskan</b>	<b>BKT</b>	<b>40%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>42%</b>	<b>100,000,000</b>
	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	BKT	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	100,000,000
	<b>Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>	<b>BKT</b>	<b>87%</b>	<b>617,867,000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>716,975,000</b>
	Pembinaan Pilar-pilar sosial	Pilar - pilar sosial kelurahan terbina	BKT	24 kelurahan	511,127,000	APBD		24 kelurahan	600,000,000
	Operasional dan Penguatan Tagana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan tagana dan KSB	BKT	12 Bulan	106,740,000	APBD	Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009	12 Bulan	116,975,000

**Tabel 5.9**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>4,778,183,985</b>				<b>6,044,401,819</b>
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	tingkat ketersediaan layanan administrasi	100%	100%	<b>701,177,859</b>	APBD		100%	<b>900,496,488</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia	materai dan perangko	1001 buah	4,050,000	APBD		710 buah	4,657,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	3 rek	3 rek	45,600,000	APBD		3 rek	60,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	service dan periperal komputer	7 jenis	4,000,000	APBD		7 jenis	7,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	R4 dan R2	6 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	219,367,000	APBD		5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2	270,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang	100%	23 macam	6,714,970	APBD		23 macam	7,722,216
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	100%	16 macam	8,224,045	APBD		20macam	9,457,652
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	6 macam	10,530,000	APBD		7 macam	12,109,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	100%	8 macam	1,721,412			8 macam	1,979,624
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	80%	700 paket	20,040,000	APBD		750 paket	33,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi	80%	255 kali	150,000,000	APBD		260 kali	225,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	100%	6 orang	218,180,432	APBD		6 orang	250,907,497
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	spanduk	9 spanduk	2,750,000	APBD		10 spanduk	3,162,500
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan	Jumlah pejabat/panitia	1 tahun	10 orang	10,000,000	APBD		10 orang	15,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai	70%	70%	<b>0</b>	APBD		70%	<b>55,000,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	1 tahun	60 stel	0	APBD		60 stel	55,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	-	70%	<b>0</b>	APBD		70%	<b>0</b>
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit	-	10 orang	0	APBD		11 orang	-
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	<b>52,792,500</b>	APBD		80%	<b>540,711,375</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	80%	6 unit	29,792,500	APBD		8 unit	34,261,375

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	80%	1 Kantor	23,000,000	APBD		1 Kantor	26,450,000
	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terrehab		1 gedung	0	APBD		1 gedung	100,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli.		1 kendaraan R4, 2 R2	0	APBD		1 kendaraan R4, 2 R2	380,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</b>	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun dengan baik	80%	80%	0	APBD		80%	<b>15,000,000</b>
	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja SKPD	Tersedianya LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	5,000,000
	penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	2,500,000
	penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	2,500,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	-	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	5,000,000
	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Perempuan di lembaga legislatif</b>		<b>20%</b>	<b>1,417,899,260</b>			<b>20%</b>	<b>1,517,476,635</b>
	Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif,		25 Organisasi, PHI	379,988,500	APBD		25 Organisasi	455,986,200
	Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Yang Aktif		3 Kecamatan, 3 Lomba, 2 Kegiatan.	944,141,860	APBD		3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan	950,000,000
	Pembinaan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan pelaku usaha ekonomi klasifikasi		-	73,124,000	APBD		-	87,748,800
	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi		1 Organisasi	20,644,900	APBD		1 Organisasi	23,741,635
						APBD			
	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang aktif</b>		<b>60%</b>	<b>56,165,000</b>	APBD		<b>65%</b>	<b>64,589,750</b>
	Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak	Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus		50 orang	56,165,000	APBD		140 orang	64,589,750
	<b>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</b>	<b>Persentase kelembagaan PUG yang aktif</b>	<b>20.00%</b>	<b>40%</b>	<b>654,212,521</b>			<b>50%</b>	<b>752,344,399</b>
		<b>Jumlah Forum anak dan lembaga penyedia layanan anak yang terbentuk dan aktif</b>	<b>1 aktif</b>	<b>3 Forum , 4 aktif</b>	<b>654,212,521</b>	APBD		<b>3 Forum , 4 aktif</b>	<b>752,344,399</b>
	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, jumlah korban KDRT yang		30 Org Pengurus Inti dan relawan, 40 kasus terlayani.	299,260,436	APBD		30 Org Pengurus dan	344,149,501
	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah ( Forda ) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).	Jumlah Forum Anak terbentuk, jumlah anak yang berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	2 kegiatan	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	127,024,100	APBD		7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	146,077,715
	Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah focal point aktif, Tingkat capaian APE.	SKPD	29 SKPD	40,654,000	APBD		29 SKPD	46,752,100
	Penyusunan informasi Gender dan Anak	tersedianya Buku profil gender dan anak	-	50 buku	36,080,485	APBD		1 Dokumen	41,492,558

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak, jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak.		6 kelurahan, 7 Puskesmas, 9 sekolah, 5 fasilitas bermain dan draft Perda KLA	151,193,500	APBD		9 kelurahan, 7 Puskesmas, 12 sekolah, 7 fasilitas bermain dan Perda KLA	173,872,525
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>294,122,250</b>	APBD		<b>6,36</b>	<b>338,240,588</b>
	Penyusunan Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Penanganan serta Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Tersedianya sistem Pelaporan dan demografi pengalaman hidup perempuan		1 Dokument	-	APBD		1 Dokument	-
	Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Pertemuan Forum Koordinasi terlaksana		4 kali	32,353,250	APBD		4 kali	37,206,238
	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang d bina pada sekolah keluarga		720 orang	261,769,000	APBD		540 orang	301,034,350
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase PUS Ber KB</b>	<b>65%</b>	<b>68%</b>	<b>389,969,250</b>	APBD		<b>68%</b>	<b>439,464,638</b>
	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak	24 kali KIE, 12 kali	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 4 kali liputan elektronik	135,412,300	APBD		24 Kel, 12 kali liputan,	155,724,145
	Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya	Jumlah Peserta KB	Bukittinggi	1850 orang	38,997,000	APBD		1860 orang	44,846,550
	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional. Propinsi	Jumlah Penghargaan yang diberikan dan jumlah fungsi	Bukittinggi, Prov	10 jenis lomba, 3 kali Peringatan	101,129,000	APBD		10 jenis lomba	116,298,350
	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang		1 seminar, dan 1 majalah	54,430,950	APBD		1 dokumen	62,595,593
	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Tersedianya grand desain Pembangunan		1 kali	60,000,000	APBD		130 orang	60,000,000
	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru metode Kontrasepsi jangka panjang</b>	<b>65%</b>	<b>99%</b>	<b>100,062,500</b>	APBD		<b>99%</b>	<b>115,071,875</b>
	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah peserta KB baru MKJP		4 Kali	100,062,500	APBD		4 Kali	115,071,875
	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>	<b>Persentase anggota tribuna dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB</b>	<b>60%</b>	<b>65%</b>	<b>828,076,830</b>	APBD		<b>68%</b>	<b>1,021,912,355</b>
	Manunggal KB-KES	Jumlah Masyarakat yang dilayani KB		4 kegiatan dan 5 mitra	204,847,400	APBD		5 kegiatan dan 5 mitra	235,574,510
	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah kader yang aktif		24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	374,240,000	APBD		24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	500,000,000
	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK dan Kampung KB	Jumlah IMP berprestasi serta jumlah Kampung KB yang dibina		50 orang	124,266,855	APBD		55 orang	142,906,883
	Pendataan Keluarga	Jumlah KK yang terdata	1 Kali	200 org peserta orientasi dan sarasehan, 27.00 KK	60,386,575	APBD		200 peserta orientasi dan sarasehan 27.000 KK	69,444,561
	Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif		3 kali	64,336,000	APBD		3 kali	73,986,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	0.30%	0.20%	<b>229,841,700</b>	APBD		0.18%	<b>264,317,955</b>
	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah remaja, Generasi Berencana ( Genre )		20 orang , 2 kali	199,151,700	APBD		40 orang, 2 kali	229,024,455
	Triad Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan.	Jumlah Pendidik Sebaya, Jumlah Konselor Sebaya dan Jumlah Guru BK yang Memahami Triad KRR		60 orang	30,690,000	APBD		90 Orang	35,293,500
	<b>Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	Persentase Kelurahan yang memiliki Tribina KB Aktif	66,67 %	70,83 %	<b>53,864,315</b>	APBD		75%	<b>19,775,762</b>
	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang		4 kali	<b>17,196,315</b>	APBD			19,775,762
	Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Jumlah peserta Pelatihan tenaga Pendamping Bina		60 Orang	36,668,000	APBD		60 Orang	42,168,200

**Tabel 5.10**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>19,159,872,683</b>				<b>24,244,853,208</b>
	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya	DLH	<b>100%</b>	<b>7,182,789,656</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>9,430,582,109</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Jasa surat menyurat	DLH	12 Bulan	5,000,000	APBD		12 Bulan	5,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, rekening Air, Rekening Telpon yang dibayar	DLH	12 Bulan	60,000,000	APBD		12 Bulan	78,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	DLH	12 Bulan	3,703,625,000	APBD		1 tahun	5,654,951,553
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	DLH	12 Bulan	160,000,000	APBD		12 Bulan	175,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	DLH	1 tahun	15,000,000	APBD		1 tahun	20,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	DLH	ATK 1 paket	25,000,000	APBD		ATK 1 paket	25,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	DLH	1 tahun	25,000,000	APBD		1 tahun	38,465,900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	DLH	12 Bulan	5,000,000	APBD		Alat-alat listrik 1 tahun	20,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	DLH	12 Bulan	40,000,000	APBD		makan dan snack rapat serta lembur untuk 1 tahun	40,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	DLH	12 Bulan	225,000,000	APBD		Pejalanan dinas dalam dan luar daerah untuk 1 tahun	370,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	DLH	107 orang Non PNS	2,689,060,656	APBD		107 orang Non PNS	2,689,060,656
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	DLH	1 tahun	10,000,000	APBD		1 tahun	75,000,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (Satpam)	DLH	1 tahun	200,104,000	APBD		1 tahun	200,104,000
	Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Dana Resiko untuk kecelakaan	DLH	1 tahun	20,000,000	APBD		1 tahun	40,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung	DLH	<b>100%</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,195,000,000</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	DLH	1 paket	-	APBD		1 paket	195,000,000
	Pengadaan Mobiler Kantor	Mobiler Kantor	DLH	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	500,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor terbeli	DLH	1 paket	100,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	DLH	1 Unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2	-	APBD		1 Unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2	400,000,000
	Pembangunan dan Penataan Landscape, gedung kantor DLH	Landscape, gedung kantor DLH	DLH	1 Paket	1,000,000,000	APBD			
	Pembangunan Pool Kendaraan Operasional DLH	Pool Kendaraan Operasional DLH	DLH	1 Paket	-	APBD			
			DLH						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketsediaan pakaian dinas</b>	DLH	100%	186,430,000	APBD		100%	400,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DLH	206 orang petugas lapangan	186,430,000	APBD		206 orang petugas lapangan, 62 orang Pegawai Kantor	400,000,000
			DLH						
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan laporan dan dokumen perencanaan SKPD/dinas</b>	DLH	100%		APBD		100%	11,729,974
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	1,654,070
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jenis Laporan Keuangan Semesteran	DLH	2 laporan	-	APBD		2 laporan	1,575,904
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	1,000,000
			DLH		-				
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan</b>	DLH	100%	6,227,594,737	APBD		100%	7,530,219,720
	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dibeli	DLH	12 Bulan	848,104,502	APBD		12 Bulan	1,815,000,000
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	DLH	12 Bulan	129,877,835	APBD		12 Bulan	300,000,000
	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, belanja jasa kebersihan, kontribusi ke TPA Regional dan Jasa kebersihan terbayarkan	DLH	12 bulan	4,604,596,680	APBD		12 bulan	4,606,734,000
	Penunjang operasional rumah kompos	Operasional rumah kompos yang beroperasi maksimal	DLH	1 tahun	164,287,000	APBD		1 tahun	164,287,000
	Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kegiatan Razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	DLH	36 kali kegiatan	15,000,000	APBD		36 kali razia	30,000,000
	Pembinaan kepada Masyarakat (Taruna ASRI/Aman Sejuk,Rindang dan Indah) melalui program Bina Pegas My Darling (Pembinaan Petugas dan Masyarakat Sadar Lingkungan)	Jumlah Petugas dan Masyarakat yang dibina	DLH	170 petugas dan 48 orang Masyarakat	153,480,000	APBD		24 kelurahan	153,480,000
	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	DLH	49 buah TPSS	115,000,000	APBD		49 buah TPSS	115,000,000
	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Operasional Pengelolaan Persampahan	DLH	1 Tahun	197,248,720	APBD		1 Tahun	235,718,720
	Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan dan lingkungan hidup	DLH	10 orang	-	APBD		10 orang	110,000,000
	Pengadaan Mesin Pencacah plastik	Mesin Pencacah plastik (se Kec. MKS)	DLH	9 unit	-	APBD			
	Pengadaan Tong sampah Organik dan An organik	Jumlah Pengadaan Tong Sampah yang diadakan	DLH	20 Paket	-	APBD			
	Pengadaan Becak Motor	Becak Motor ( Kel.Bukit Apit)	DLH	2 Unit	-	APBD			
	Pembangunan Sarana pembuatan kompos	Sarana Pembuatan Kompos (RW.2 Kel.Manggis Ganting)		1 ls	-	APBD			
	Pendampingan Pengolahan Sampah (Kelurahan Kayu Kubu RW 01)	Pengolahan Sampah		1 Unit		APBD			
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>	<b>Persentase penurunan pencemaran lingkungan</b>	DLH	40%	781,717,090	APBD		30%	3,770,181,725
	Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diawasi	DLH	50 Usaha	9,485,570	APBD		50 Usaha	9,500,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Adanya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup oleh masyarakat	DLH	20 kasus	6,000,000	APBD		20 kasus	16,000,000
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Gerakan Bukittinggi Bersih	DLH	1 Tahun	350,000,000	APBD		1 Tahun	350,000,000
	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, rekomendasi izin SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	DLH	12 bulan	11,764,000	APBD		12 bulan	11,764,000
	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus	DLH	20 kasus	9,777,520	APBD		20 kasus	9,777,725
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED dan UKL&UPL)	DLH	2 Dokumen	-	APBD			-
	Pembangunan Instalasi Lumpur Tinja terbangun	Jumlah Instalasi Lumpur Tinja terbangun	DLH			APBD		1 Paket	3,000,000,000
	Penyusunan kajian RPPLH	Jumlah Dokumen Draf Ranperda	DLH	1 Ranperda	106,550,000	APBD		1 Perda	200,000,000
	penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	Operasional Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup	DLH	1 tahun	65,000,000	APBD		1 tahun	100,000,000
	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Titik Pantau	DLH	3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan	223,140,000	APBD		3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan	73,140,000
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan</b>	DLH	<b>90%</b>	<b>1,016,341,200</b>	<b>APBD</b>		<b>95%</b>	<b>425,437,000</b>
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti ProgramAdiwiyata	DLH	10 Sekolah	100,000,000	APBD		10 Sekolah	100,000,000
	Penyusunan dokumern informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Buku kondisi lingkungan hidup Kota Bukittinggi tersusun	DLH	1 buku SLHD dari 1 buku	55,146,000	APBD		1 buku SLHD dari 1 buku	85,000,000
	Pembinaan masyarakat di sekitar Batang Agam	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	DLH	4 kali pembinaan	-	APBD		4 kali pembinaan	50,000,000
	Penyusunan Produk hukum tentang RTH	Produk Hukum tentang RTH	DLH	1 Perwako	15,000,000	APBD			
	Revisi PERDA No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan serta Peraturan Pendukung lainnya	Produk hukum tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan	DLH	1 Perda dan 2 Perwako	59,995,800	APBD			
	Penyebarluasan informasi tentang Lingkungan Hidup dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi (Media Elektronik, Media Cetak, Baliho, Spanduk, Benner, Stiker Arcrylic)	DLH	7 media	167,237,000	APBD		7 media	190,437,000
	Pembinaan Bank Sampah (Studi Banding, Pelatihan Lanjutan Pengurus Pelatihan Daur Ulang, Pemasaran Hasil Karya Daur Ulang, Pemasaran Hasil Karya Daur Ulang dan Pengadaan 5 Timbangan Posyandu)	Jumlah Peserta Pelatihan pelatihan dan pengadaan 6 Timbangan Bank Sampah	DLH	50 ORANG	149,541,000	APBD	Musrenbang MKS		
	Pelatihan Pengolahan sampah/limbah rumah tangga dengan sistem teknologi tepat guna se kecamatan MKS	Jumlah Peserta Pelaaatihan	DLH		31,000,000	APBD			150,000,000
	Pelatihan pengolahan sampah plastik			Pakan Kurai	30,000,000	APBD			
	Pembuatan mini garden dalam rangka penunjang event daerah	Dekorasi untuk penunjang event daerah	DLH	1 Tahun	100,000,000	APBD		12 Bulan	100,000,000
	Pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang mengikuti Saka Kalpataru	DLH	30 siswa	93,000,000	APBD		30 siswa	87,000,000
	Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	kampung iklim yang dibina	DLH	3 RW	115,421,400	APBD		3 RW	115,421,400
	Pelatihan Pengelolaan Sampah se kelurahan Parit Antang (USULAN MUSREMBANG)	Jumlah peserta pelatihan		4 bulan	-	APBD	Musreimbang		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi membangun kesadaran masyarakat untuk peduli sampah (Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal dipinggir drainase untuk tidak membuang sampah ke drainase, dampak dan sanksi sesuai Perda) (kegiatan ini sudah ditampung pada kegiatan pembinaan masyarakat (batang asam))	Jumlah peserta Sosialisasi		1 paket		APBD	Musrebang Kec.Guguak panjang		
	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup (HPSN,HLH,Hari Bumi,HariOzon dll) dan Penunjang lainnya	DLH	1 Tahun	100,000,000	APBD		1 Tahun	175,000,000
	<b>Program Peningkatan pengendalian polusi</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian polusi</b>	DLH	<b>70%</b>	-	<b>APBD</b>		<b>70%</b>	<b>327,421,400</b>
	Upaya Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca	0	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	25,000,000
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	DLH	14%	<b>2,165,000,000</b>	<b>APBD</b>		15%	<b>1,320,000,000</b>
	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Taman Kota yang dipelihara	DLH	1 Tahun	895,000,000	APBD		12 Bulan	895,000,000
	Pengelolaan pembibitan taman kota	Bibit tanaman hias untuk penyisipan taman-taman dalam kota	DLH	1 Tahun	825,000,000	APBD		12 Bulan	225,000,000
	Pengadaan pot dan bunga	Jumlah Pot dan Bunga	DLH	150 Pot beserta Bunga	-	APBD		150 Pot beserta Bunga dan 250 batang pohon peneduh	200,000,000
	Rehab Taman Tugu Imam Bonjol	Rehab Taman Tugu Imam Bonjol	DLH	1 Paket	-				-
	Pembuatan Bak Bunga	Bak Bunga Jalan Perintis kemerdekaan	DLH	1 Paket	-				-
	Lanjutan Rehab Taman Ngarai Maaram	Rehab Taman Ngarai Maaram (Lightang dan Fasilitas taman)	DLH	1 Paket	-				-
	Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66	Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66	DLH	1 Paket	-				-
	Revitalisasi Bak Bunga dalam kota	Revitalisasi Bak Bunga Jalan Pemuda, Jalan Sudirman	DLH	1 Paket	-				-
	Pembuatan Taman Pendakian Wowo	Jumlah Taman yang dibuat							
	Pembuatan Taman Bundaran	Pembuatan Taman Bundaran (Bundaran Simpang Mandiangin dan Bundaran Simpang Kangkung)	DLH	2 Lokasi	-				-
	Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah	Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah	DLH	1 Lokasi	-				
	Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang (Pikir DPRD Rismaidi)	Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang	DLH	1 Paket	-				
	Pengadaan mesin potong rumput			30 unit	120,000,000	APBD			
	Pembuatan Taman Bunga Pekarangan Kantor Lurah Birugo (USULAN MUSREMBANG )	Pembuatan Taman Bunga Pekarangan Kantor Lurah Birugo		1 Paket	-				
	Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai	Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai		1 paket	200,000,000	APBD	Musrebang Kec.Guguak Panjang		
	Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan			1 ls	-		Musrebang Kel. Benteng Pasar Atas		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembuatan masterplan dan DED Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati)	masterplan dan DED		2 Dokumen	-				
	Pengadaan alat penyemprot hama	Alat Penyemprot Hama (RT 02 RW 04)			20,000,000	APBD			
	Pengadaan Plank Nama Panganak				30,000,000	APBD			
	Pembangunan Rumah Bunga Begonia				75,000,000	APBD			
	Revitalisasi Taman Tugu Adipura	Revitalisasi Taman Tugu Adipura		1 Paket					
	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan)	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan)		6 unit					
	Pengadaan Mesin Potong Rumput RW 05 Talao	Pengadaan Mesin Potong Rumput Kelurahan Campago Guguak Bulek (RW 05 Talao)		5 unit					
	Pengadaan Mesin Potong Rumput (untuk RW dan kelurahan Campago Guguak Bulek)	Mesin Potong Rumput (kelurahan Campago Guguak Bulek)		7 unit					
	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Taniuang )	Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Taniuang )		5 unit					
	Pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Bukit Apit Puhun RW I,II,III,IV,V)								
	Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor	Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor		1 paket					
	Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan			1 ls					

**Tabel 5.11**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<b>2,194,794,700</b>				<b>2,346,074,170</b>
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>731,228,870</b>				<b>804,351,757</b>
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, materai, benda pos lainnya dan buku cek materai yang terbeli	Dinas Dukcapil	4 jenis	1,875,000	APBD		4 jenis	2,062,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Jumlah Rekening bulan terbayarkan	Dinas Dukcapil	60 rekening / bulan	73,560,000	APBD		60 bulan	80,916,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Dinas Dukcapil	5 Kendaraan roda 4, 11 kendaraan roda 2	165,568,000	APBD		4 Kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2	182,124,800
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Dinas Dukcapil	1 paket	112,533,200	APBD		1 paket	123,786,520
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Dinas Dukcapil	5 jenis	20,400,000	APBD		5 jenis	22,440,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis yang terbeli	Dinas Dukcapil	35 jenis	27,662,670	APBD		18 jenis	30,428,937
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbeli	Dinas Dukcapil	3 jenis	14,950,000	APBD		2 jenis	16,445,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor yang terbeli	Dinas Dukcapil	3 jenis	3,500,000	APBD		4 jenis	3,850,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat dan	Dinas Dukcapil	3 paket	24,100,000	APBD		3 paket	26,510,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	Dinas Dukcapil	2 jenis	132,000,000	APBD		12 bulan	145,200,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honor, pekerja	Dinas	5 orang	155,080,000	APBD		5 orang	170,588,000
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Tingkat kelengkapan</b>			<b>42,190,000</b>				<b>7,909,000</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang terbeli	Dinas Dukcapil	2 jenis	7,190,000	APBD		2 jenis	7,909,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang terbeli	Dinas Dukcapil	4 unit PC AIO dan 2 Unit Printer	35,000,000	APBD			
	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan petugas pengamanan kantor menggunakan atribut</b>			<b>27,000,000</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Pakaian khusus pelayanan	Dinas	48 stel	27,000,000	APBD			
	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,394,375,830</b>				<b>1,533,813,413</b>
	Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah jaringan dan peralatan pendukung	Dinas Dukcapil	2 jenis	380,851,040	APBD		2 jenis	418,936,144
	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga, KTP dan KIA yang	Dinas Dukcapil	7000 KK, 8000 KTP, 4000 KIA	450,265,100	APBD		98%	495,291,610
	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	3000 Akta	190,287,400	APBD		90%	209,316,140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	4000 dokumen	17,648,230	APBD		100%	19,413,053
	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	500 akta	24,181,000	APBD		80%	26,599,100
	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jenis Laporan Informasi Kependudukan yang tersedia tepat waktu	Dinas Dukcapil	12 bulan	93,367,600	APBD		2 Jenis	102,704,360
	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	500 orang	17,937,800	APBD		200 akta	19,731,580
	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah Penduduk terdata pada Database Kependudukan	Dinas Dukcapil	1000 orang	11,802,260	APBD		80%	12,982,486
	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen / Arsip Kependudukan yang tersedia	Dinas Dukcapil	6000 KK	55,185,400	APBD		100%	60,703,940
	Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Dukcapil	23 SKPD	152,850,000	APBD		23 SKPD	168,135,000

Tabel 5.12  
Program dan Kegiatan  
Dinas Perhubungan  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>8,158,642,748</b>				<b>23,014,328,900</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>1,339,017,793</b>				<b>11,809,328,900</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>839,017,793</b>				<b>1,271,328,900</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelaksanaan Surat Menyurat	Dishub	500 bh materai 600, 100 bh maretai 3000, 10 bk cek	3,600,000	APBD		12 Bulan	3,350,000
	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening)	Dishub	60 bh rekening	66,200,000	APBD		12 Bulan	101,200,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dishub	6 kend.roda 4, 15 kend 2	127,014,433	APBD		12 Bulan	150,560,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Bersih	Dishub	10 item bhn pembersih, 1 paket CS dan th ret sampah	100,414,600	APBD		12 Bulan	154,449,600
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dishub	10 Komp, 13 laptop, 15 printer, 26 Ht, 2 mesin tik	5,000,000	APBD		12 Bulan	15,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dishub	50 item	20,158,460	APBD		1 Paket	33,219,300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	Dishub	17 cetakan, Ls Foco dan jilid	19,282,000	APBD		1 Paket	25,150,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang dibeli	Dishub	8 item	2,730,000	APBD		1 Paket	5,500,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Dishub	425 porsi	8,300,000	APBD		12 Bulan	7,900,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti	Dishub	12 Bulan	120,000,000	APBD		12 Bulan	300,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Dishub	12 orang	351,318,300	APBD		12 Bulan	450,000,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Lancarnya Pekerjaan Administrasi	Dishub	12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
	Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	Dishub	12 Bulan		APBD		12 Bulan	0
	Pendataan dan penataan arsip	Menyelamatkan dan melestarikan arsip	Dishub	1 keg	-	APBD		1 Kegiatan	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>500,000,000</b>				<b>10,285,000,000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Dishub	1 unit	-	APBD		1 Unit	100,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor	Dishub	10 haldy taki, Anroid sms getaway, mesin absensi dan 2 bh laptop		APBD		1 Paket	60,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Dishub	27 unit	-	APBD		1 Paket	60,000,000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Dishub	2 lemari ,2 kursi tamu	-	APBD		1 Paket	65,000,000
	Pembangunan DED Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Dishub	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	0
	Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	0
	Pengadaan gedung baru kantor	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Dishub	1 Paket	-			1 Paket	10,000,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai</b>			<b>-</b>				<b>125,000,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa	Dishub	100 orang	-	APBD		1 Paket	125,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>-</b>				<b>120,000,000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	Dishub	3 orang		APBD		1 Kegiatan	120,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan</b>			-				<b>8,000,000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	2,000,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran	Dishub	2 Laporan	-	APBD		2 Laporan	1,500,000
	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		-	0
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	Dishub	2 Dokumen	-	APBD		2 Dokumen	2,000,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	Dishub	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	2,500,000
	<b>URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN</b>				<b>6,819,624,955</b>				<b>11,205,000,000</b>
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Memadai</b>			<b>3,888,663,285</b>				<b>7,150,000,000</b>
	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Jumlah PNS/Non PNS dan Jukir	Dishub	117 org	2,628,527,100	APBD		12 Bulan	3,500,000,000
	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Operasional terminal dan parkir 12 bulan	Dishub	12 Bulan	156,996,185	APBD		12 Bulan	900,000,000
	Pengelolaan Gedung parkir	2 buah gedung parkir	Dishub	2 Gedung	467,140,000	APBD		12 Bulan	1,100,000,000
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	0
	Pengecatan Marka Jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	100,000,000
	Pengadaan Road Barrier	Jumlah Road Barrier	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	300,000,000
	Pengadaan Rubber Speed Humb	Jumlah Rubber Speed Humb dipasang	Dishub	1 Paket	200,000,000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	1 Paket	250,000,000
	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Tersedianya RPPJ	Dishub	1 Paket		APBD		-	250,000,000
	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Alat Pengarah dan Pengatur Lalu Lintas	Dishub	1 Paket		APBD		-	250,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Yang Kritis	Dishub	1 Paket	218,000,000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	-	250,000,000
	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang	Dishub	1 Paket	218,000,000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	-	250,000,000
	Pengadaan Traffic Light	Jumlah Traffick yang terpasang	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	0
	DED pengadaan Trafficligh ACTS	Tersedianya trafficligh + CC Room	Dishub	1 Doc		-			250,000,000
	<b>Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik</b>			<b>612,535,970</b>				<b>800,000,000</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu yang terpelihara	Dishub	12 Bulan	612,535,970	APBD		12 Bulan	800,000,000
	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)		Dishub			-			0
	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS ( Area Traffic Control System)		Dishub			-			0
	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>			<b>321,000,000</b>				<b>300,000,000</b>
	Pembangunan Jembatan penyeberangan Orang	Tersedianya Jembatan penyeberangan Orang Untuk Mengurangi Konflik Lalu Lintas	Dishub	1 Paket		-	APBD	1 Paket	0
	Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota	Dokumen data jaringan jalan	Dishub	1 Dokumen			APBD	-	0
	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	Tersedianya Ranperda Lalu Lintas	Dishub	1 Dokumen		-	APBD	-	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City	Dishub	1 Paket	-	APBD		-	0
	Kajian Geometrik Persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	Dishub	-	-	APBD		1 Dokumen	0
	Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian	Tersedianya Fasilitas Bagi Pejalan Kaki	Dishub	1 Paket	-	APBD		-	0
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Jumlah Zoss yang terpasang	Dishub	1 Paket	211,000,000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	1 Paket	300,000,000
	Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	Dishub	1 Paket	110,000,000	APBD		1 Paket	0
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum</b>			<b>48,739,000</b>				<b>350,000,000</b>
	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Dokumen Tingkat kinerja angkutan umum dan faktor muat	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		4 Dokumen	160,000,000
	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Dokumen Pelayanan angkutan umum ( jaringan trayek )	Dishub	1 Dokumen		APBD		-	0
	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Jumlah juru mudi	Dishub	30 Orang	11,995,000	APBD		30 Orang	25,000,000
	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Laporan Kegiatan permasalahan angkutan umum	Dishub	12 Kali		APBD		12 Kali	10,000,000
	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak angkutan umum teladan yang dipilih	Dishub	3 Orang	36,744,000	APBD		3 Orang	85,000,000
	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Jumlah papan stiker yang dicetak	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	30,000,000
	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Jumlah pengemudi angkutan umum yang dibina	Dishub	30 Orang		APBD		30 Orang	20,000,000
	Up date data perbengkelan	Jumlah bengkel yang didata	Dishub	dokumen	-				20,000,000
	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas</b>			<b>1,697,598,700</b>				<b>2,105,000,000</b>
	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih Piala WTN	Dishub	1 Kegiatan	39,994,870	APBD		1 Kegiatan	70,000,000
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya Lalu Lintas Kota	Dishub	20 org upah Non PNS,50 org lembur PNS dan Non PNS	1,612,238,930	APBD		12 Bulan	1,900,000,000
	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas	Dishub	30 orang		APBD		12 Sekolah	55,000,000
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar yang terpilih	Dishub	30 peserta	45,364,900	APBD		1 Kegiatan	80,000,000
	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Meningkatnya kelayakan kendaraan umum</b>			<b>251,088,000</b>				<b>500,000,000</b>
	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang di uji kelayakannya	Dishub	12 Bulan	251,088,000	APBD		12 Bulan	500,000,000

Tabel 5.13  
Program dan Kegiatan  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>4,338,652,189</b>				<b>7,364,000,000</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>433,648,650</b>				<b>499,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, Buku Cek, Pengiriman Barang	Dinas Ko	100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 3 Buku Cek	1,750,000	APBD		100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 5 Buku Cek	2,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	Dinas Ko	12 Rekening	20,000,000	APBD		12 Rekening	60,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dinas Ko	3 roda 4, 1 Roda 2	134,832,000	APBD		3 roda 4, 1 Roda 2	150,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor	Dinas Ko	9 Jenis	2,201,000	APBD		9 Jenis	5,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	Dinas Ko	10 Jenis	15,000,000	APBD		10 Jenis	15,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dinas Ko	54 Jenis	19,502,650	APBD		54 Jenis	25,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ko	7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid	9,000,000	APBD		7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid	7,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Dinas Ko	9 Jenis	1,416,790	APBD		9 Jenis	4,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	Dinas Ko	100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat	10,000,000	APBD		100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat	10,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Dinas Ko	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan	Dinas Ko	18 Paket Pekerjaan	19,946,210	APBD		18 Paket Pekerjaan	20,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			-				<b>230,000,000</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan (Paket)	Dinas Ko		-			3 Jenis	50,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan (Paket)	Dinas Ko		-			4 item	50,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen)	Dinas Ko		-			3 Unit Roda 2	70,000,000
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeler Yang di Adakan	Dinas Ko		-			12 item	60,000,000
	<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Presentase ASN yang memiliki kompetensi di bidang TI, Persandian dan Statistik</b>			-				<b>450,000,000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	0	0	-	APBD		6 orang	100,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				-				<b>325,000,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas ASN dan kelengkapannya diadakan	Dinas Ko	0	-	APBD			25,000,000
	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City</b>			<b>88,913,500</b>				<b>150,000,000</b>
	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi	Bukittinggi	1 aplikasi	88,913,500	APBD			150,000,000
	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>		<b>Bukittinggi</b>		<b>281,995,000</b>	<b>APBD</b>			<b>340,000,000</b>

	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan / 1 dok	92,140,000	APBD			120,000,000
	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dokumen Kerjasama dibidang TIK tersusun	Bukittinggi	1 dokumen	104,675,000	APBD			0
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government	Monev E-Government	Bukittinggi	4 kali	85,180,000	APBD			120,000,000
	Pengembangan sumber daya TIK bagi ASN Pemko Bukittinggi (*)	Diklat TIK bagi ASN Kominfo	Bukittinggi	5 ASN	-	APBD			100,000,000
	<b>Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik</b>			<b>500,405,879</b>				<b>810,000,000</b>
	Pembinaan warnet dan internet sehat	Jumlah pembinaan dan warnet	Bukittinggi	6 kegiatan	49,920,000	APBD			75,000,000
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Bukittinggi	1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan	128,718,879	APBD			120,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi	DIP, Sosialisasi, Bimtek, Rakor	Bukittinggi	1 kali sosialisasi, 3 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	113,708,000	APBD			175,000,000
	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Bukittinggi terkelola	Bukittinggi	12 bulan	61,393,000	APBD			40,000,000
	Pembinaan Media Tradisional (Metra)	Kelompok Metra yang dibina	Bukittinggi	2 kali sosialisasi, 1 kali pemilihan metra terbaik dan 1 video metra terbaik	146,666,000	APBD			
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK</b>			<b>2,737,991,760</b>				<b>4,550,000,000</b>
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Jaringan Intranet dan Internet terpelihara	Bukittinggi	12 bulan	1,875,000,000	APBD			2,000,000,000
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah lelang Barang dan Jasa Secara Elektronik	Bukittinggi	40 lelang	154,570,000	APBD			350,000,000
	Pengadaan CCTV Online	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	Bukittinggi	10 titik	260,400,000	APBD			200,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Jenis Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) yang diadakan	Bukittinggi		-	APBD			500,000,000
	Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Comamnd Center terkelola	Bukittinggi	12 bulan/ 2 jenis	435,381,760	APBD			750,000,000
	Pengelolaan domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemerintah Kota Bukittinggi	Domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemko Bukittinggi tersedia	Bukittinggi	12 bulan	12,640,000	APBD			750,000,000
	<b>Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</b>	<b>Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi</b>			<b>99,894,000</b>				<b>0</b>
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	Perda Menara Telekomunikasi tersusun	Bukittinggi	1 Dokumen	99,894,000	APBD	Tindak lanjut dari perda No.11 tahun 2017		0
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD</b>			<b>49,777,500</b>				<b>150,000,000</b>
	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Data dan sistem informasi Pemda yang dikelola	Bukittinggi	12 bulan	49,777,500	APBD			150,000,000
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi</b>	<b>Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>			<b>146,025,900</b>				<b>185,000,000</b>
	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi	Dinas Ko	200 informasi	81,607,450	APBD			85,000,000

		Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Persandian	Diklat dasar persandian, fungsional sandimen dan diklat teknis persandian.	Dinas Ko	1 diklat fungsional, 1 diklat dasar persandian	64,418,450	APBD			100,000,000

**Tabel 5.14**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				<b>9,150,870,263</b>				<b>170,600,342,653</b>
	<b>NON URUSAN</b>				<b>3,126,211,534</b>				<b>3,514,700,849</b>
	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)</b>		<b>100</b>	<b>2,320,212,631</b>			<b>100</b>	<b>2,601,630,750</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia (paket)	Kota Bukittinggi	3 paket	3,000,000	APBD		3 paket	3,201,660
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening)	Kota Bukittinggi	12 14	200,000,000	APBD		12 14	296,105,618
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	Kota Bukittinggi	12	14,934,868	APBD		12	15,681,611
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara (unit)	Kota Bukittinggi	12 unit 5 unit	219,233,903	APBD		12 unit 5 unit	284,400,158
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Retribusi sampah yang terbayar (bulan) Jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor terbeli (jenis)	Kota Bukittinggi	12 20	84,911,240	APBD		12 20	89,156,802
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)	Kota Bukittinggi	50 jenis	31,916,715	APBD		50	33,512,551
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan) Jenis barang cetakan (jenis)	Kota Bukittinggi	12 16	115,387,000	APBD		12 16	106,202,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli (jenis)	Kota Bukittinggi	12 jenis	64,797,500	APBD		12 jenis	68,037,375
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu, lembur (%)	Kota Bukittinggi	100	47,883,780	APBD		100	50,277,969
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Persentase rapat yang diikuti (%)	Kota Bukittinggi	90	200,000,000	APBD		90	250,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya iuran BPJS (bulan) Tersedianya jasa pegawai non PNS (orang)	Kota Bukittinggi	12 41	1,319,052,000	APBD		12 41	1,385,004,600
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi (%)	Kota Bukittinggi	100	10,000,000	APBD		100	10,500,000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jasa pengadaan barang dan jasa ( bulan )	Kota Bukittinggi	12	9,095,625	APBD		12	9,550,406
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)</b>		<b>100</b>	<b>752,088,903</b>			<b>100</b>	<b>792,757,750</b>
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kerja	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) Jumlah peralatan kantor yang diadakan (jenis)	Kota Bukittinggi	10 2	288,600,000	APBD		12 3	303,030,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	Kota Bukittinggi	100	24,255,000	APBD		100	25,467,750
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	Kota Bukittinggi	3	80,000,000	APBD		3	215,750,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	Kota Bukittinggi	1	140,000,000	APBD		1	200,000,000
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Pagar rumah dinas (paket)	Kota Bukittinggi		-	-			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	Kota Bukittinggi	2 1	219,233,903	APBD		2	48,510,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)</b>		<b>100</b>	<b>53,910,000</b>			<b>100</b>	<b>56,605,500</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)	Kota Bukittinggi	94	53,910,000	APBD		94	56,605,500
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)</b>		<b>100</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>63,706,849</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	3	-	APBD		3	2,285,745
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan per semester yang tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	2	-	APBD		2	2,106,159
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	2	-	APBD		2	59,314,945
	<b>KOPERASI</b>				<b>860,880,705</b>				<b>2,256,312,328</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		<b>15.00</b>	<b>206,784,140</b>			<b>16.00</b>	<b>446,797,664</b>
	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan (kop)	Kota Bukittinggi	75	97,550,535	APBD		75	140,089,092
		Jumlah koperasi yang dilakukan bimbingan dan pendampingan (kop)							
	Pelatihan akuntansi koperasi	Jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi (org)	Kota Bukittinggi	75	48,023,135	APBD		75	90,430,244
	Pengawasan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan dan jumlah koperasi yang terawasi (unit)	Kota Bukittinggi	75 50	51,210,585	APBD		75 50	128,244,772
	Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat (org)	Kota Bukittinggi	25	9,999,885	-	Musrenbang kel. Aur kuning	50	88,033,556
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi</b>	<b>Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanya (%)</b>		<b>2</b>	<b>156,445,205</b>			<b>2</b>	<b>428,183,684</b>
	Pengembangan usaha koperasi	Peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi (kop)	Kota Bukittinggi	50	118,286,035	APBD		75	291,888,192
		Jumlah koperasi yang ikut serta pada pameran dalam rangka hari koperasi tingkat Nasional (kop)		2				2	
	Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi	Koperasi yang dimonev	Kota Bukittinggi	20	22,392,535	APBD		20	83,006,666
	Monitoring Peningkatan Dana Berqulir (UEM-SP)	Laporan monev	Kota Bukittinggi	1	15,766,635	APBD		1	53,288,826
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit)</b>		<b>65</b>	<b>497,651,360</b>			<b>85</b>	<b>1,381,330,980</b>
		<b>Jumlah UMI yang meningkat kinerja usahanya</b>		<b>10</b>				<b>10</b>	
	Pengembangan usaha mikro	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro (org)	Kota Bukittinggi	100	298,699,120	APBD		100	627,389,730
		Jumlah Umi yang ikut serta pameran (unit)		2				8	
	Penumbuhan wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (org)	Kota Bukittinggi	75	78,952,885	APBD		50	86,157,072

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan UMKM di kampung wisata	Jumlah peserta pelatihan (org)	Kota Bukittinggi	25	19,999,835	APBD	Musrebang kel mangis gantina	100	627,389,730
	Inkubator Wirausaha (dengan perguruan tinggi)	Usaha Mikro yang diinkubator (unit)	Kota Bukittinggi	50	99,999,520	-	Musrebang	1	40,394,448
	<b>PERDAGANGAN</b>				<b>1,454,993,600</b>				<b>3,252,883,278</b>
	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>Tertatanya lokasi PKL (lokasi)</b>		<b>1</b>	<b>108,587,130</b>			<b>1</b>	<b>22,186,260</b>
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tersedianya lokasi PKL (lokasi)	Kota Bukittinggi	0	97,037,130	APBD		3	22,186,260
	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima ( Sosialisasi Kebijakan dan Aturan Pedagang Kaki Lima )	Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan (PKL)	Kota Bukittinggi	0	11,550,000			0	-
	<b>Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang</b>		<b>43 pelaku usaha</b>	<b>710,005,000</b>			<b>43 pelaku usaha</b>	<b>1,655,034,627</b>
	Fasilitasi Pasar Lelang dan Kontak Dagang	Jumlah pasar lelang yang diikuti (kl)	Kota Bukittinggi	7	63,750,000	APBD		7	140,639,940
		Jumlah forum dagang yang diikuti (kl)		2				2	-
	Gelar produk unggulan Kota Bukittinggi diluar propinsi	Jumlah gelar produk unggulan yang dilaksanakan (kl)	Kota Bukittinggi	1	-			0	-
	Promosi/pameran dalam negeri bersama mitra kerja	Jumah pameran dalam dan luar daerah yang diikuti (kl)	Kota Bukittinggi	4	646,255,000	APBD		4	1,514,394,687
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri (Persh)</b>		<b>2</b>	<b>-</b>			<b>2</b>	<b>461,148,144</b>
	Sosialisasi ekspor & import bagi aparat dan pelaku usaha	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan ekspor impor (org)	Kota Bukittinggi	10	-	APBD		10	461,148,144
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan ekspor impor (org)		20	-			20	
	Monitoring dan Motivasi produk Export IKM	Data perusahaan/ IKM yang melakukan export	Kota Bukittinggi	15	-	APBD		0	-
	<b>Program Perlindungan Konsumen dan tertib niaga</b>	<b>Pengawasan Perdagangan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>636,401,470</b>			<b>12 bulan</b>	<b>1,114,514,247</b>
		<b>Jumlah Pengaduan konsumen</b>		<b>12 kasus</b>				<b>12 kasus</b>	
	Pengawasan SIUP , TDP dan TDG	Laporan pengawasan SIUP ,TDP dan TDG	Kota Bukittinggi	4	3,750,000	APBD		4	15,692,256
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang beredar (kl)	Kota Bukittinggi	15	9,342,000	APBD		15	55,562,774
		Update data harga sembako (kl)		100				100	
	Fasilitasi Penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi penyelesaiannya	Kota Bukittinggi	12	0	APBD		12	144,123,088
	Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga	Jumlah KK miskin yang dibantu (KK)	Kota Bukittinggi	2867	382,169,500	APBD		2867	514,711,520
	Pengawasan pendistribusian pupuk,gas dan BBM bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi (bl)	Kota Bukittinggi	3	5,000,000			3	5,250,000
		Jumlah agen pupuk yang terawasi (bl)		4				4	-
		Jumlah pangkalan yang terawasi (pangkalan)		30				30	-
	Pengawasan dan pelayanan pengujian UTP	Jumlah pengawasan UTP	Kota Bukittinggi		0	-			
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Operasional UPT (bl)	Kota Bukittinggi	12 bulan	236,139,970	APBD	uu.n023 th.2014	12 bulan	379,174,610
	<b>PASAR</b>				<b>3,708,784,424</b>				<b>161,576,446,199</b>
	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar</b>	<b>Jumlah sarana dan Prasarana Pasar yang dikembangkan (lokasi)</b>		<b>3 pasar</b>	<b>3,096,538,664</b>			<b>3 pasar</b>	<b>160,865,998,841</b>
	Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi	Penggantian/ kompensasi (paket)	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		1	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehab los daging pasar bawah	Terlaksananya rehab	Kota Bukittinggi	1 paket	600,000,000	APBD			630,000,000
	DED dan perencanaan pembangunan gedung parkir kendaraan roda 2 di Blok M pasar simpang aur	Tersedianya DED dan dokumen perencanaan	Kota Bukittinggi	2 dok	600,000,000	APBD			630,000,000
	Pemeriksaan Instalasi Listrik Pasar	Terlaksananya pemeriksaan (bulan)			100,000,000				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	605,000,000	APBD		1	665,500,000
	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Tersedianya data pedagang yang akurat	Kota Bukittinggi	0	176,000,000			0	
	Pembuatan profil pasar	Profil pasar Kota Bukittinggi (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah	Tersedianya pasar penampungan	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	3,060,000,000
	Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah	diterimanya lokasi penampungan sementara oleh pedagang	Kota Bukittinggi	0	-	APBD		1	400,000,000
	Perencanaan Revitalisasi pasar bawah	Tersedianya DED revitalisasi pasar bawah (paket)	Kota Bukittinggi		-				100,000,000
	Revitalisasi pasar bawah Kota Bukittinggi	Tersedianya pasar tradisional modern	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	150,600,000,000
	Probability audit kegiatan revitalisasi pasar bawah	Kegiatan sesuai dengan regulasi	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	100,000,000
	Manajemen konstruksi revitalisasi pasar bawah	Tersedianya jasa manajemen konstruksi untuk revitalisasi pasar	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	2,560,200,000
	Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar atas	Pasar penampungan pasar atas (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	-
	Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pedagang pasar atas	Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pasar atas (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	-
	Perencanaan revitalisasi pasar atas	DED Revitalisasi pasar atas	Kota Bukittinggi	1	-	APBD			
	Revitalisasi pasar atas Kota Bukittinggi	Pasar yang terevitalisasi (unit)	Kota Bukittinggi		-			0	-
	Probability audit kegiatan revitalisasi pasar atas	Probability audit kegiatan revitalisasi pasar atas (paket)	Kota Bukittinggi		-			0	-
	Manajemen konstruksi revitalisasi pasar atas	Jasa manajemen konstruksi revitalisasi pasar atas (1 paket)	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	
	Rehab WC dan mushalla di kawasan pasar	WC dan mushalla yang terehab (paket)	Kota Bukittinggi	6	-	APBD		0	
	Pemasangan folding gate plaza pasar bawah	Folding gate yan terpasang (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Pembuatan tangga ke Lt. II Al-Ibat pasar simpang aur	Tangga yang terbuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Rehab kanopi blok A pasar atas	Kanopi yang terehab (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Pembuatan pintu dan pagar kawat blok 432 pasar simpang aur	Pintu dan pagar yang terbuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Renovasi 4 Unit WC Umum Pasar Simpang Aur	WC umum yang terenovasi (unit)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Renovasi 3 Unit WC Umum Pasar Atas	WC umum yang terenovasi (unit)	Kota Bukittinggi	0	-			0	
	Penggantian dan Pembuatan Baru Pintu-Pintu Masuk Komplek Pertokoan Pasar Atas	Pintu Masuk Komplek Pertokoan Pasar Atas yang diganti dan dibuat(paket)	Kota Bukittinggi		-				-
	Pembangunan ulang jembatan penghubung pasar putih-pasar wisata	Jembatan yang terbuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	-
	Pembuatan Nomor Petak Toko/ Kios, Lapangan Bulanan dan Marka Penunjuk Arah Wilayah Pasar	Pengadaan dan pemasangan nomor toko/kios/lap. bulanan dan penunjuk lokasi jenis dagangan di 2 lokasi pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	96,000,000			0	100,800,000
	Pembuatan Jembatan ke Lokasi Parkir Lt 2 Pasar Simpang Aur	Jembatan yang terbuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	-
	Penguatan Struktur Bangunan Untuk Parkir di Lt 2 Pasar Simpang Aur	Struktur bangunan yang lebih kuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	-
	Pembuatan Eskalator/Travelator Pasar Simpang Aur	Eskalator/Travelator yang terbuat (paket)	Kota Bukittinggi	0	-			0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar (peningkatan drainase kawasan pasar)	Sarana dan Prasarana Pasar (paket)	Kota Bukittinggi	3	141,000,000	APBD		1	148,050,000
	Rehab berat & Peningkatan Bangunan Blok H Pasar Simpang Aur		Kota Bukittinggi	1	-	APBD			
	Reitalisasi Bangunan Kawasan pasar blok M & Blok N Pasar Simpang aur		Kota Bukittinggi		-	APBD			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Atas (penggantian dan renovasi atap bangunan pasar di pasar atas)	Sarana dan Prasarana Pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	-	APBD		0	-
	Kajian dan perencanaan bangunan dan kawasan blok C dan blok E pasar atas	Kajian dan perencanaan (2 dok)	Kota Bukittinggi	1	-	APBD			
	Perencanaan Pengebangan Blok B pasar atas	Kajian dan perencanaan (2 dok)	Kota Bukittinggi		-	APBD			
	Rehab wc umum blok C pasar atas		Kota Bukittinggi		-	APBD			
	Rehab berat Plafon petokoan pasar atas untuk Ruang Pusat Radio dan Instalasi Jaringan Interkom		Kota Bukittinggi	1 Paket	-	APBD			
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Terpeliharanya sistem komputerisasi pengelolaan retribusi (aplikasi)	Kota Bukittinggi	1	50,304,700	APBD		1	182,384,388
	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Pengelolaan yang baik dan transparan terhadap hasil retribusi (bulan)	Kota Bukittinggi	12	609,225,964	APBD		12	1,312,107,605
	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Tersedianya data pedagang dan sarana pasar	Kota Bukittinggi	2921	-	APBD		2921	176,956,848
	Operasional pemungutan retribusi lapangan harian pasar	Terlaksananya pemungutan retribusi lapangan harian pada hari libur biasa dan nasional (bulan)	Kota Bukittinggi					12	100,000,000
	Pembangunan Blok Penghubung Blok A dan Blok C Pasar Atas	Blok Penghubung Blok A dan Blok C pasar atas	Kota Bukittinggi		-				
	Sosialisasi Perda Pasar kepada Pedagang	Adanya pemahaman pedagang tentang peraturan daerah tentang pasar	Kota Bukittinggi	6 kali	-				
	Intensifikasi pemungutan retribusi pasar	Terlaksananya pemungutan retribusi lapangan harian pada hari libur biasa dan nasional (bulan)	Kota Bukittinggi	12 bulan	119,008,000	APBD		12	100,000,000
	Pembuatan Videotron di Wilayah Pasar	Tersedianya Videotron di wilayah pasar (unit)	Kota Bukittinggi	3 unit	-	APBD			-
	Mapping dan pendataan sarana wilayah pasar	Tersedianya peta wilayah pasar	Kota Bukittinggi	3 peta pasar	-	APBD			-
	Revitalisasi pasar bawah dan pasar aur tajungkang	Tersedianya manajemen konstruksi, perencanaan dan AMDAL	Kota Bukittinggi	2 pasar	-	APBD			-
	Rehab pasar aur kunig	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan	Kota Bukittinggi	2 dok	-	APBD			-
	<b>Program Pengawasan dan Penertiban Pasar</b>	<b>Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)</b>		<b>100</b>	<b>612,245,760</b>			<b>100</b>	<b>710,447,358</b>
	Penertiban dan Penyegehan Toko, Kios, Lap. Bulanan Yang Menunggak Retribusi	Toko,kios,lap. Bulanan yang ditertibkan dan disegel (kali)	Kota Bukittinggi	18	25,000,000	APBD		21	93,839,310
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar (kali)	Kota Bukittinggi	144	437,245,760	APBD		144	459,108,048
	Pembuatan naskah akademik Perda	Jumlah naskah Perda (dokumen)	Kota Bukittinggi	3	150,000,000	APBD		12	157,500,000

**Tabel 5.15**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				10,325,930,138				7,679,109,600
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	941,686,000			100%	960,969,720
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket		175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	APBD		175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	3,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rRekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy		48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000	APBD		48 Rekening/ 12 Bulan	81,600,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara		8 unit roda 4;14 unit roda 2	200,000,000	APBD		7 unit roda 4;14 unit roda 2	204,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli		12 bulan; 12 Jenis	147,352,000	APBD		12 bulan; 12 Jenis	150,299,040
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	10,200,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli		46 Jenis	21,744,000	APBD		40 Jenis	22,178,880
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah		7 Jenis; 30050 Lembar; 90	35,400,000	APBD		7 Jenis; 30028	36,108,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli		11 Jenis	5,000,000	APBD		11 Jenis	5,100,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia		12 bulan	20,000,000	APBD		12 bulan	20,400,000
	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri		90%	250,000,000	APBD		90%	255,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS		5 org/12 bln; 5 org/12 bln	144,690,000	APBD		5 org/12 bln; 5 org/12 bln	147,583,800
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK		5 paket	25,000,000	APBD		4 paket	25,500,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>		100%	5,215,000,000			100%	3,719,300,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	200,000,000	APBD		12 bulan	204,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)		1 jenis	15,000,000	APBD		1 Jenis	15,300,000
	Pembangunan Kantor DPMPSPPTK(Mall Pelayanan Publik)	Jumlah pembangunan gedung kantor		1 unit	5,000,000,000	APBD		1 dokumen	3,500,000,000
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>		100%	735,201,170			100%	749,905,193
	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan		10 orang	735,201,170	APBD		12 bulan	749,905,193
	<b>Urusan Wajib</b>								
	<b>Penanaman Modal</b>								
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat (%)</b>		100%	708,482,198			100%	722,651,842
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Ahli Programmer		4 Orang/12 Bulan dan 2	111,679,398	APBD		5 Orang/12 Bulan	113,912,986
	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan		2500 surat izin	80,071,685	APBD		150 surat tugas	81,673,119
	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik		60 kasus	36,000,000	APBD		60 kasus	36,720,000

		Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan		6 dokumen	32,660,000	APBD		1 Dokumen	33,313,200
		Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line		81 Jenis Izin	50,000,000	APBD		86 Jenis Izin	51,000,000
		Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan		48 laporan	37,842,170	APBD		48 laporan	38,599,013
		Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi		3000 berkas	22,670,175	APBD		3000 berkas	23,123,579
		Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan		1200 surat izin	100,000,000	APBD		1200 surat izin	102,000,000
		Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan		90%	36,363,770	APBD		85%	37,091,045
		Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan		1 Laporan	34,195,000	APBD		1 Laporan	34,878,900
		Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola		90%	62,000,000	APBD		85%	63,240,000
		Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online		3000 berkas izin	55,000,000	APBD		3000 berkas izin	56,100,000
		Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha		60 kali	50,000,000	APBD		60 kali	51,000,000
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase peningkatan realisasi investasi</b>		<b>10%</b>	<b>83,603,260</b>			<b>10%</b>	<b>85,275,325</b>
		Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti		1 kali	83,603,260	APBD		2 kali	85,275,325
		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>		<b>100 perusahaan</b>	<b>24,998,590</b>			<b>110 perusahaan</b>	<b>25,498,562</b>
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM		1 dokumen	24,998,590	APBD		1 dokumen	25,498,562
		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>		<b>100 perusahaan</b>	<b>629,657,340</b>			<b>110 perusahaan</b>	<b>642,250,487</b>
		Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM		50 dok; 250 CD; 1000	629,657,340	APBD		1 dokumen	642,250,487
		<b>Tenaga Kerja</b>								
		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian</b>		<b>60%</b>	<b>512,130,540</b>			<b>60%</b>	<b>197,385,810</b>
		Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kiwirausahaan	DPMP TSPPT	16 orang/ 9 hari	53,215,900	APBD	Usulan Musrenbang Kel. Pakan Labuah	16 orang/ 9 hari	54,280,218
			Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan tuna netra	DPMP TSPPT	16 orang/ 9 hari	48,326,860	APBD			
		Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	DPMP TSPPT K	10 lembaga	26,811,600	APBD		2 Laporan; 13 Lembaga	27,347,832
		Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	DPMP TSPPT	16 orang	85,670,000	APBD		16 orang/30 hari	87,383,400
		Monev Eks.siswa Pelatihan	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	DPMP TSPPT K	1 Laporan	3,068,000	APBD		1 Laporan	3,129,360
		Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	DPMP TSPPT K	20 orang	24,750,000	APBD		30 orang	25,245,000
		Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	DPMP TSPPT K	16 orang	100,176,000	APBD	Usulan Musrenbang Kel. Puhun Tembok	16 orang/30 hari	102,179,520
		Pelatihan Pembuatan Tas Manik-manik bagi Tuna Netra	Jumlah peserta pelatihan tas manik-manik bagi tuna netra	DPMP TSPPT	16 orang	53,326,860	APBD			54,393,397
		Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	Jumlah peserta pelatihan pembuatan dendeng singkong	DPMP TSPPT K	16 orang	39,401,860	APBD			40,189,897
		Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste	DPMP TSPPT K	16 orang	77,383,460	APBD			78,931,129
		<b>Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang</b>		<b>70%</b>	<b>147,357,650</b>			<b>70%</b>	<b>63,411,003</b>

	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	DPMP TSPPT K	30 kasus	26,125,650	APBD		30 kasus	26,648,163
	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	DPMP TSPPT K	10 perusahaan	11,459,850	APBD		10 perusahaan	11,689,047
	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	DPMP TSPPT K	10 Laporan	11,092,750	APBD		10 Laporan	11,314,605
	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	DPMP TSPPT	1 posko	13,489,400	APBD		1 posko	13,759,188
	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	DPMP TSPPT	4 kali	85,190,000	APBD		4 kali	86,893,800
	<b>Program Peningkatan kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja</b>		<b>19%</b>	<b>83,685,290</b>			<b>19%</b>	<b>13,958,996</b>
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja	DPMP TSPPT K	12 Laporan	13,685,290	APBD		12 Laporan	13,958,996
	Job Fair	Jumlah penempatan pencari kerja secara langsung	DPMP TSPPT K	100 pencaker dan 20 perusahaan	70,000,000	APBD		100 pencaker dan 20 perusahaan	71,400,000
	<b>Urusan Pilihan</b>								
	<b>Industri</b>								
	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Jumlah industri kecil menengah yang berkembang</b>		<b>15 unit usaha</b>	<b>584,284,500</b>			<b>20 unit usaha</b>	<b>377,261,790</b>
	Fasilitasi bagi Indutsri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu		30 orang	19,864,500	APBD		30 orang	20,261,790
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah		5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	350,000,000	APBD	Usulan Musrenbang Kel.	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	357,000,000
	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2015-2035	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda)		1 Dokumen	214,420,000	APBD		-	-
	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>	<b>Peningkatan pendapatan anggota KUB</b>		<b>2%</b>	<b>154,980,000</b>			<b>2%</b>	<b>102,000,000</b>
	Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti		15 KUB; 1 IKM	100,000,000	APBD	Usulan Musrenb	15 KUB; 1 IKM	102,000,000
	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti		4 KUB; 1 event/IKM	54,980,000	APBD		4 KUB; 1 event/IKM	56,079,600
	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>Penambahan nilai penjualan IKM</b>		<b>2 persen</b>	<b>504,863,600</b>			<b>2 persen</b>	<b>19,240,872</b>
	Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur	Jml. IKM yang melakukan penerapan dan konvensi GKM		5 IKM	18,863,600	APBD		5 IKM	19,240,872
	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri		12 bulan	140,000,000	APBD		12 bulan	142,800,000
	Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang		20 orang	50,000,000	APBD		20 orang	51,000,000
	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing		10 lembar; 10 IKM	35,480,000	APBD		10 lembar; 10 IKM	36,189,600
	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan*	Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri*		1 Organisasi Dekranasda	260,520,000	APBD			265,730,400
	<b>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>	<b>Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal</b>							
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas	Jumlah IKM yang menerapkan GMP							

**Tabel 5.16**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				1,963,269,256				16,938,544,616
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>			635,920,628	APBD			722,514,961
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos		3 jenis	1,950,000	APBD		3 jenis	2,145,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan)		48 Rekening	48,000,000	APBD		48 Rekening	52,800,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)		1 Paket (12 jenis)	12,000,000	APBD		1 Paket	13,200,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)		4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua	140,920,800	APBD		4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua	155,012,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli (paket)		1 Paket	94,892,100	APBD		1 Paket	106,716,379
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)		44 Jenis	20,045,648	APBD		44 Jenis	22,272,495
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)		2 Paket	17,992,800	APBD		2 Paket	19,800,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)		4 jenis	1,699,280	APBD		4 jenis	1,869,087
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)		3 Paket	15,420,000	APBD		2 Paket	22,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)		2 Paket	150,000,000	APBD		2 Paket	165,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)		2 Orang	55,000,000	APBD		2 Orang	60,500,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)		1 Paket	8,000,000	APBD		1 Paket	13,200,000
	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya jasa keamanan (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)		2 Orang	70,000,000	APBD		2 Orang	88,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			87,500,000	APBD			12,475,000,000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebelair kantor yang akan dibeli (paket)		1 paket	-	APBD		1 paket	2,310,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)		1 Paket	37,500,000	APBD		1 Paket	110,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan mobil pintar perpustakaan		2 set	-	APBD		2 set	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan		1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	55,000,000
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun (DED)		1 Paket	-	APBD		1 Paket	10,000,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					APBD			
	Pengembangan Sumber Daya Pengelola					APBD			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tingkat Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>		0		APBD		0	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah LKIP yang tepat waktu (dokumen)		0	-	APBD		0	-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)		0	-	APBD		0	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)		0	-	APBD		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan</b>			<b>425,958,608</b>	<b>APBD</b>			<b>1,208,165,365</b>
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum		1 paket	62,000,000	APBD		1 Paket	68,200,000
	Penyediaan Bahan Pustaka Digital Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum		50 judul	-	APBD		1 Paket	165,000,000
	Lomba Bercerita bagi SD/MI Tk. Provinsi	Jumlah partisipan dalam mengikuti event		7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni	114,075,810	APBD		7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni	193,627,957
	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikunjungi untuk pembinaan		40 Kunjungan	19,999,935	APBD		99 Kunjungan	38,885,000
	Lomba Perpustakaan Terbaik	Jumlah Perpustakaan yang mengikuti perlombaan		81 Perpustakaan	-	APBD		81 Perpustakaan	44,000,000
	Bimtek Tenaga Literasi	Jumlah Pengelola Perpustakaan		40 peserta	-	APBD		40 peserta	55,000,000
	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah Peserta Bintek (untuk pemuda dan pelajar)		40 peserta	60,000,000	APBD		40 peserta	66,000,000
	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan		5000 Eksemplar koleksi monograf, 84 eksemplar koleksi serial, 50 judul koleksi digital	13,332,700	APBD		5000 Eksemplar	56,154,830
	Layanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling		115 kunjungan	16,312,000	APBD		115 Kunjungan	50,943,200
				- Perpustakaan Sekolah : 192 kunjungan		APBD			
				- Pojok Baca : 72 kunjungan		APBD			
				- Perpustakaan Mesjid : 12 kunjungan		APBD			
				- Taman Bacaan Masyarakat : 10 kunjungan		APBD			
				- Taman Kota/ Ivent Khusus : 4 kunjungan		APBD			
	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan umum		5.000 pengunjung setahun	66,624,540	APBD		12 Bulan	119,288,994
	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca		300 Orang	-	APBD		300 Orang	125,247,650
	Bedah Buku	Jumlah peserta		100 orang	-	APBD		1 kali	31,751,335
	Penelusuran Naskah Kuno/ Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah Naskah Kuno/ Koleksi Langka		3 Naskah Kuno	-	APBD		3 Naskah Kuno	78,566,400
	Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari	Jumlah Koleksi Perpustakaan Binaan		1 paket	30,000,000	APBD		1 paket	33,000,000
	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan	Jumlah Peserta		30 orang	43,613,623	APBD		50 orang	82,500,000
	<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN</b>	<b>Tingkat Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan</b>			<b>34,439,015</b>	<b>APBD</b>			<b>101,200,000</b>
	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online		1 Paket	34,439,015	APBD		1 Paket	63,800,000
	Alih Media Koleksi Perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan yang dialih mediakan		1000 halaman koleksi minangkabau, 1000 halaman koleksi khusus	-	APBD		150 Eksempla	37,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN</b>	<b>Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>			<b>40,923,000</b>	<b>APBD</b>			<b>60,500,000</b>
	Pembangunan/ Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah terpeliharanya data base kearsipan		1 Paket	14,977,000	APBD		1 Paket	16,500,000
	Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah terpeliharanya data base SIKEDA kearsipan		1 Paket (8 SKPD)	25,946,000	APBD		40 orang	44,000,000
	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>	<b>Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>527,608,225</b>	<b>APBD</b>			<b>1,656,164,290</b>
	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen yang bernilai sejarah		1 File Dokumen Bernilai Sejarah	35,951,500	APBD		1 Bundel Doku	220,000,000
						APBD			
	Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN	Jumlah Arsip elektronik		300 Lembar	21,351,000	APBD		1200 Lembar	176,000,000
	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah JRA yang tersusun		24 buku	92,963,640	APBD		24 Buku	165,000,000
	Lomba Arsip Bernilai Sejarah	Jumlah dokumen bernilai sejarah		Jumlah peserta	-	APBD		1 paket dokum	119,303,250
	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	dokumen arsip statis		1 Paket Arsip	25,365,685	APBD		1 Paket Arsip	82,500,000
						APBD			
	Penyusunan Album Bukittinggi dalam khasanah kearsipan	Album Bukittinggi dalam Khasanah Kearsipan		1 buku	-	APBD		1 buku	55,000,000
	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh		30 buku	-	APBD		30 buku	55,000,000
	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa		30 buku	-	APBD		30 buku	55,000,000
	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen		30 buku	-	APBD		30 buku	55,000,000
	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah pengelola otomasi kearsipan di SKPD		40 peserta	50,830,000	APBD		40 orang	66,000,000
	Promosi dan Pameran Arsip Statis	Jumlah pengunjung promosi dan pameran arsip statis		5 tema arsip statis yang dipromosikan	-	APBD		kegiatan	110,000,000
	Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD	jumlah kepala SKPD yang mengikuti sosialisasi		60 orang	-	APBD		60 orang	77,000,000
	Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Pengurus Arsip SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah Pengelola Kearsipan Dinamis di SKPD			-	APBD			55,000,000
	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan		5 SKPD	19,000,000	APBD		6 SKPD	44,000,000
	Semiloka Kearsipan	Jumlah Peserta yang mengikuti Semiloka		100 orang	282,146,400	APBD		150 orang	321,361,040
	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan</b>			<b>34,738,450</b>	<b>APBD</b>			<b>55,000,000</b>
	Perawatan berkala arsip dan koleksi Perpustakaan	Jumlah Arsip dinamis dan statis yang dirawat		110 box (2 bidang)	34,738,450	APBD		110 box	55,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>			<b>176,181,330</b>	<b>APBD</b>			<b>660,000,000</b>
	Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Arsip	Jumlah PERDA		1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	132,000,000
	Penyusunan Perwako sebagai Tindak Lanjut Amanat Perda tentang Kearsipan	Jumlah Perwako		30 pengguna arsip	38,898,950	APBD		30 pengguna	132,000,000
	Layanan Informasi Arsip Statis	Jumlah layanan		30 pengguna arsip	137,282,380	APBD		30 pengguna	330,000,000
	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah Peserta			-	APBD			33,000,000
	Penelusuran Tokoh- Tokoh Pemerintahan Kota Bukittinggi	Jumlah lembaga, SOPD, Masyarakat yang memanfaatkan arsip terhimpunnya dokumen tokoh-tokoh		5 Dokumen	-	APBD		5 Dokumen	33,000,000

**Tabel 5.17**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				<b>48,105,285,634</b>				<b>50,057,965,197</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>2,013,880,995</b>	-	-		<b>2,215,269,095</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek, benda pos lainnya terbeli	Disparpora	12 bulan	1,600,000	APBD		12 bulan	1,760,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	Disparpora	36 rekening/12 bulan	495,500,000	APBD		36 rekening/12 bulan	545,050,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda2 roda3, dan roda4 yang terpelihara	Disparpora	12 bulan	150,560,000	APBD		12 bulan	165,616,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	Disparpora	24 unit	30,000,000	APBD		24 unit	33,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Jasa cleaning service dan Pegamanan yang tersedia	Disparpora	4 Orang	150,000,000	APBD		4 orang	165,000,000
	Penyediaan Alat Tukis kantor	Jenis ATK terbeli	Disparpora	38 item	24,999,885	APBD		38 item	27,499,874
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	jumlah barang pengandaan, jumlah barang cetakan	Disparpora	12 bulan, 5 item	15,760,000	APBD		12 bulan, 11 item	17,336,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan listrik terbeli	Disparpora	8 item	3,479,360	APBD		10 item	3,827,296
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya	Disparpora	100%	35,000,000	APBD		100%	38,500,000
	Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi,Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	Disparpora	75%	250,000,000	APBD		75%	275,000,000
	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah gaji pegawai non PNS yang dibayar	Disparpora	12 bulan, 32 orang	845,740,000	APBD		12 bulan, 50 orang	930,314,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat pengadaan barang jasa (pphp, ppk, ppib, ptk) yang dibayar	Disparpora	8 orang	11,241,750	APBD		8 orang	12,365,925
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif</b>			<b>518,000,000</b>	-	-		<b>55,000,000</b>
	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang beli	3 Jenis						
	Penyediaan Peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang dibeli	2 jenis						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Disparpora	1 unit gedung	50,000,000	APBD		1 unit gedung	55,000,000
	Pembangunan Kantor DISPARPORA	DED/Pembangunan Kantor Pariwisata	Disparpora	1 Dokumen	468,000,000	APBD			
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>6,001,210</b>				<b>6,601,331</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip, LKPJ, LPPD yang tersusun tepat waktu	Disparpora	3 dokumen	1,501,730	APBD		3 dokumen	1,651,903
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Disparpora	2 dokumen	2,499,980	APBD		2 dokumen	2,749,978
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	Disparpora	2 dokumen	1,999,500	APBD		2 dokumen	2,199,450
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>								
	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>	<b>Sarana dan Parasaran Kawasan</b>			<b>1,701,231,000</b>				<b>2,074,805,100</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibra	Disparpora	105 orang	699,600,000	APDB		105 orang	980,000,000
	Penyelenggaraan Upacara Sumpah Pemuda dan HAORNAS	Jumlah upacara sumpah Pemuda dan hari olahraga yang diselenggarakan	Disparpora	2 upacara	69,990,000	APDB		2 upacara	70,000,000
	Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pemuda Berprestasi	Kategori prestasi yang diberikan penghargaan	Disparpora	tingkat nasional	80,000,000	APDB		tingkat nasional	88,000,000
	Pelatihan Dasar Pembinaan Karakter Pemuda	Jumlah Pemuda yang ikut training	Disparpora	150 orang	147,441,000	APDB		120 orang	162,185,100
	Perlombaan Paskibraka antar Sekolah Tingkat Sumatera	Jumlah peserta lomba tingkat Sumatera	Disparpora	30 Sekolah	200,000,000	APDB		35 Orang	220,000,000
	Fasilitasi Kegiatan Marching Band	Jumlah Peserta Pelatihan	Disparpora	75 Orang	429,200,000				472,120,000
	Pelatihan dasar Drumband bagi guru dan Umum (lanjutan)	Jumlah Pelatihan Marching Band	Disparpora	50 Orang	75,000,000	APBD		75 Orang	82,500,000
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Persentase peningkatan peran serta kepemudaan</b>	Disparpora		<b>50,000,000</b>				<b>55,000,000</b>
	Fasilitasi Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah fasilitasi kepemudaan	Disparpora	5 kegiatan	50,000,000	APDB		4 kegiatan	55,000,000
	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan</b>			<b>250,000,000</b>				<b>110,000,000</b>
	Pembekalan Bagi Pemuda untuk mengikuti program Kepemudaan daerah dan nasional	Jumlah pemuda yang dibekali	Disparpora	100 Orang	150,000,000	APBD	undang-undang kepemudaan no 40 tahun 2009	100 Orang	165,000,000
	Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemula	Terfasilitasinya Usaha Wirausaha Muda Pemula Kota Bukittinggi	Disparpora	30 Orang	100,000,000	APBD	Musrenbang	35 orang	110,000,000
	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemsarakatan olahraga</b>			<b>1,470,000,000</b>				<b>1,479,500,000</b>
	Kejurda Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Disparpora	5 cabor (ikut kegiatan Propinsi)	85,000,000	APBD		5 cabor	93,500,000
	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga berkebutuhan Khusus (Divabel)Tingkat kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah atlet divabel yang mengikuti kegiatan	Disparpora	5 cabor (ikut kegiatan Propinsi)	120,000,000	APBD		3 Cabor	132,000,000
	Pekan Olahraga dan seni Disabilitas se- Kota Bukittinggi	Jumlah siwa yang mengikuti porseni disabilitas	Disparpora		125,000,000	APBD			
	Kegiatan Pekan olahraga Pelajar daerah Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Disparpora	5 cabor (ikut kegiatan Propinsi)	160,000,000	APBD		5 cabang olahraga	176,000,000
	Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan olahraga masyarakat	Disparpora	kegiatan	500,000,000	APBD	Musrenbang	2 kegiatan	550,000,000
	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	Disparpora	24 tim	80,000,000	APBD		24 tim	88,000,000
	Fasilitasi Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car free day)	Jumlah olahraga yang difasilitasi Car free dey, HUT RI, Gala desa	Disparpora	pertandingan olahraga	400,000,000	APBD		6 macam lomba/pertandingan olahraga	440,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai</b>	Disparpora		<b>632,254,500</b>				<b>695,479,950</b>
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terpelihara	Disparpora	6 lapangan	282,254,500	APDB		6 lapangan	310,479,950
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Jumlah sarana yang diberikan	Disparpora	24 Kelurahan	350,000,000				385,000,000
	<b>Urusan Pilihan Pariwisata</b>								
	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya jumlah wisatawan</b>			<b>5,152,442,500</b>				<b>5,667,686,750</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti	Disparpora	6 Kali	400,000,000	APBD		6 Kali	440,000,000
	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah sarana promosi yang dibuat atau digandakan	Disparpora	15000000 lembar	300,000,000	APBD		15000000 lembar	330,000,000
	Pengelolaan Website Disparpora dan penerbitan majalah Pariwisata	Tersedianya media promosi dalam bentuk media cetak dan digital	Disparpora	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	165,000,000
	Fasilitasi Even event Pariwisata	Jumlah event-event pariwisata yang difasilitasi	Disparpora	10 Kegiatan	500,000,000	APBD		5 kali	550,000,000
	Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata	Jumlah hotel yang didata	Disparpora	12 Laporan Bulanan	10,000,000	APBD		74 Hotel	11,000,000
	Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah peserta sadar wisata	Disparpora	120 orang	150,000,000	APBD		200 orang	165,000,000
	Pembinaan Guide	Jumlah guide yang mengikuti pembinaan	Disparpora	30 orang	100,000,000	APBD		200 orang	110,000,000
	Festival Multi Etnis	Jumlah etnis yang mengikuti festival	Disparpora	10 etnis	400,000,000	APBD		5 etnis	440,000,000
	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi	Jumlah peserta yang terpilih sebagai duta wisata	Disparpora	10 pasang	200,000,000	APBD		10 pasang	220,000,000
	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah penampilan tim kesenian yang difasilitasi	Disparpora	40 Kali	350,000,000	APBD		44 Kali	385,000,000
	Bukittinggi Fashion on Street and Carnaval	Jumlah peserta Pelatihan	Disparpora	100 orang	500,000,000	APBD		20 sertifikat hallal	550,000,000
	Fasilitasi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Ekref	Disparpora	8 Kali	300,000,000	APBD	Musrenbang	10 kali	330,000,000
	Jam Gadang Performance Jazz	Penampilan Musik Jazz	Disparpora	1 Kali	400,000,000	APBD		1 Kali	440,000,000
	Lomba Aktrasi Anak Nagari Tingkat Regional dan Festival Olahraga Tingkat Nasional	Peserta Lomba Minat Khusus	Disparpora	5 Group	197,500,000	APBD		5 Group	217,250,000
	Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak	Jumlah sub event TDS yang dilaksanakan	Disparpora	1 kali	800,000,000	APBD		1 kali	880,000,000
	Fasilitasi atraksi Wisata dan Minat Khusus	Terfasilitasinya Kegiatan anak nagari	Disparpora	1 Paket	199,866,500	APBD		1 Paket	219,853,150
	Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional	Jumlah Peserta fotografi	Disparpora	200 Peserta	195,076,000	APBD		200 Peserta	214,583,600
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Rata - Rata lama tinggal wisatawan</b>			<b>36,311,475,429</b>				<b>37,698,622,972</b>
	Pengelolaan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang dikelola	Disparpora	1 kawasan	150,077,000	APBD		1 kawasan	165,084,700
	Operasional Bidang Destinasi	Jenis lembur yang dibayarkan	Disparpora	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	599,997,000	APBD		3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	659,996,700
	Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Disparpora	1 kawasan	188,923,000	APBD		1 kawasan	207,815,300
	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Jasa cleaning service yang tersedia	Disparpora	25 Orang	900,000,000	APBD			990,000,000
	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Kecelakaan pengunjung di obyek wisata yang dibayarkan	Disparpora	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	55,000,000
	Fasilitasi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi Destinasi	Disparpora	1 Paket	100,000,000	APBD	Musrenbang		
	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang	Sarana dan Parasaran Kawasan	Disparpora	1 Kawasan	400,000,000	APBD		1 Kawasan	440,000,000
	Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Pengembangan Panorama Baru dan Koto Barangai	Disparpora	1 unit	1,000,000,000	APBD	Musrenbang	1 unit	
	Pemeliharaan Objek Wisata	Terpeliharanya Objek Wisata Janjang 1000		1 Tahun	150,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Disparpora	10 sarana	499,999,629	APBD		10 sarana	549,999,592
	Jasa Kebersihan TMS-BK	Tenaga kebersihan dan pengamanan TMS-BK	Disparpora	18 Orang	750,000,000	APBD		40 Orang	825,000,000
	Jasa Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK	Disparpora	18 Orang	750,000,000	APBD			
	Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang terpelihara	Disparpora	50 Unit	185,300,000	APBD		50 Unit	203,830,000
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjuang	Rumah Adat yang terpelihara	Disparpora	1 unit	400,000,000	APBD		1 unit	440,000,000
	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang terpelihara	Disparpora	133 Spesies	2,820,241,800	APBD		133 spesies	3,102,265,980
	Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang	Disparpora	7 kandang	25,000,000,000	APBD		7 kandang	27,500,000,000
	Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung	Terbangunya RANB dan DED	Disparpora	1 Gedung	400,000,000	APBD		1 Gedung	440,000,000
	Fasilitasi Pelatihan Perawat Fauna dan Flora	Terfasilitasinya pelatihan Perawat Fauna dan Flora	Disparpora	30 Orang	278,768,000	APBD		30 Orang	306,644,800
	Pembuatan Sarana Edukasi Lembaga Konservasi	Sarana edukasi	Disparpora	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	110,000,000
	Penyediaan luran Organisasi/Keanggotaan	luran keanggotaan PKBSI	Disparpora	12 bulan	11,000,000	APBD		12 bulan	12,100,000
	Pemeliharaan Aquarium Ikan	Aqurium Ikan yang terpelihara	Disparpora	2 bangunan	24,169,000	APBD		2 bangunan	26,585,900
	Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan	Jenis lembur yang dibayarkan	Disparpora	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	1,013,000,000	APBD		3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	1,114,300,000
	Revitalisasi Jembatan Limpapeh	DED pembangunan Jembatan Limpapeh	Disparpora	1 Dokumen	500,000,000	APBD			550,000,000
	DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng	DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng		1 dokumen	40,000,000				

Tabel 5.18  
Program dan Kegiatan  
Dinas Pertanian dan Pangan  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>				<b>8,666,722,017</b>				<b>15,573,745,333</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1,055,438,828</b>			<b>100%</b>	<b>833,986,503</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko 3000	Bukittinggi	- 25 buah	5012000	APBD		- 25 buah	5513200
		Perangko 6000 Materai 3000 Materai 6000 Buku Cek Kiriman Paket/Kilat Khusus		- 15 buah - 150 buah - 100 buah -2 buah LS				- 15 buah - 150 buah - 100 buah -2 buah LS	
	Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang terbayarkan	Bukittinggi	12 bulan	50,900,000	APBD		12 bulan	55,990,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas/Operasional	jumlah kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 3 yang terpelihara	Bukittinggi	8 buah roda 4, 56 buah roda 2 dan 3 buah roda 3	229,499,638	APBD		8 buah roda 4, 56 buah roda 2 dan 3 buah roda 3	252,449,602
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan dan bahan pembersih terbeli	Bukittinggi	1 paket	136,309,300	APBD		12 bulan	149,940,230
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	Bukittinggi	1 paket	6,585,500	APBD		1 paket	7,244,050
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah Alat tulis kantor yang terbeli	Bukittinggi	45 item	29,886,510	APBD		50 item	32,875,161
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang Cetak terbeli, jumlah penggandaan yang terbayarkan	Bukittinggi	10 item, 5000 lembar	19,520,000	APBD		10 item, 5000 lembar	21,472,000
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terbeli	Bukittinggi	5 item	3,156,600	APBD		5 item	3,472,260
	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan yang terbeli	Bukittinggi	320 bks/ 300 ktk	18,300,000	APBD		500 bks/ 400 kt	20,130,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	jumlah Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi ke luar daerah	Bukittinggi	12 bulan	235,000,000	APBD		12 bulan	258,500,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	lamanya pekerja harian lepas dan pekerja kontrak yang dibayarkan honor dan asuransi kesehatan/ketenagakeriaan		12 bulan	297,269,280				
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah Honorarium PPK, PTK, PPHP dan PPBJ yang terbayarkan	Bukittinggi	15 paket	24,000,000	APBD		15 paket	26,400,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja</b>		<b>100%</b>	<b>415,269,280</b>			<b>100%</b>	<b>486,000,000</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah gorden terbeli	Bukittinggi	1 paket	60,000,000	APBD			36,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah mesin absensi	Bukittinggi	1 unit	25,000,000	APBD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	jumlah bangunan terpelihara	Bukittinggi	1 paket	33,000,000	APBD			
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa dan pekerja harian lepas dan pekerja kontrak yang terbayarkan	Bukittinggi	10 orang	297,269,280	APBD		10 orang	450,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Kinerja sesuai rencana kerja yang telah disusun</b>		<b>100%</b>	<b>161,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>205,000,000</b>
	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekon dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan DAK	Bukittinggi	1 laporan	110,000,000	APBD		1 laporan	165,000,000
	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Jumlah laporan statistik pertanian	Bukittinggi	1 laporan	51,000,000	APBD		1 laporan	40,000,000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya paratur</b>			<b>100%</b>					
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah pegawai yang dinilai		11 orang					
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Ketersediaan energi dan protein perkapita</b>		<b>2400 Kkal/kap/hr</b>	<b>149,204,400</b>			<b>2400 Kkal/kap/hr</b>	<b>116,000,000</b>
				<b>63 gr/kap/hr</b>				<b>63 gr/kap/hr</b>	
	Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Bukittingg	2 rekomendasi	12,000,000	APBD		2 rekomendasi	15,000,000
	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	laporan informasi harga pangan	Bukittingg	52 laporan	48,204,000	APBD		52 kali	42,000,000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun	Bukittingg	1 dokumen	10,000,000	APBD		1	12,000,000
	Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah rapat koordinasi	Bukittingg	3 kali	9,000,000	APBD		3	10,000,000
	Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi	Jenis data yang di update	Bukittingg	30 jenis	6,000,000	APBD		30	7,000,000
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang diuji	Bukittingg	15 jenis	30,000,000	APBD		20	30,000,000
	Bazar Bahan Pangan	jumlah pelaksanaan bazar		1 kali	34,000,400				
	<b>Program Diversifikasi Pangan</b>			<b>2400 Kkal/kap/hr 63 gr/kap/hr</b>	<b>523,031,590</b>			<b>2400 Kkal/kap/hr 63 gr/kap/hr</b>	<b>470,000,000</b>
	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	buku PPH	Bukittingg	1 buku	5,000,200	APBD		1	6,000,000
	Hari Pangan Sedunia	pameran yang diikuti	Bukittingg	3 kali	150,105,000	APBD		4	250,000,000
	Lomba Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah lomba yang diikuti (lomba)	Bukittingg	5 lomba	92,427,030	APBD		6	100,000,000
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	jumlah kelurahan yang mendapat bantuan	Bukittingg	15 kel	220,499,360	APBD	usulan musrenbang	500	57,000,000
	Pengembangan Galeri Pangan	sarana prasarana galeri	Bukittingg	1 paket	55,000,000	APBD		1	57,000,000
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>	<b>Peningkatan Produktivitas padi, palawija dan hortikultura</b>		<b>65 kwintal/ha; 2%; 2%</b>	<b>3,797,703,000</b>			<b>67 kwintal/ha; 2%; 2%</b>	<b>1,991,500,000</b>
	Dana Penunjang sinergis TP/Dekon	Tersedianya operasional kegiatan Prasarana dan Prasarana pertanian	Bukittingg	12 bulan	25,000,000	APBD		12 bulan	33,000,000
	Demplot Padi sawah sistem jarwo super dan teknologi salibu	luas lahan pertanian tertanam; jumlah peserta pelatihan	Bukittingg	0,25 Ha	15,120,000				
	Penangkaran Jabal Benih Padi	Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel	Bukittingg	0,25 Ha	33,455,500	APBD		0,25 Ha	45,000,000
	Optimalisasi Lahan Kering untuk pengembangan palawija	Luas lahan pertanian yang ditanami tanaman palawija	Bukittingg	2 ha	21,425,000	APBD		2 ha	32,000,000
	Pengembangan tanaman hortikultura	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan	Bukittingg	1 kelompok	100,000,000	APBD		1 kelompok	32,000,000
	Penunjang operasional laboratorium Kultur Jaringan dan pembibitan	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan		25 jenis					
	Perbibitan tanaman hortikultura	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan; entitas yang mendapat bantuan biofarmaka/toqa	Bukittingg	25 jenis; 25 dasawisma/posyandu/sekolah	50,000,000	APBD		15 jenis	37,000,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	jumlah pengendalian hama tikus dan ulat	Bukittingg	2 lokasi	14,750,000	APBD		2 lokasi	15,000,000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	Bukittingg	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	50,000,000
	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	jumlah peserta pelatihan	Bukittingg	50 orang	25,000,000	APBD	musrenbang		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelatihan menejer UPJA dan operator alsintan	jumlah peserta pelatihan	Bukittingg	25 orang	25,000,000	APBD		25 orang	27,500,000
	Penunjang kegiatan UPSUS tanaman pertanian	laporan kegiatan UPSUS tanaman pertanian	Bukittingg	12 laporan	30,000,000	APBD		12 laporan	50,000,000
	Penyusunan Rancangan Perda LP2B	rancangan perda LP2B	Bukittingg	1 draf ranperda	169,597,000	APBD	amanat UU no. 41 tahun 2009	1 ranperda	250,000,000
	Pengadaan bibit remaja buah-buahan untuk penghijauan	jumlah pohon pelindung	Bukittingg	100 btg	372,979,000	APBD			
	Pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian	handtraktor; tresher; handsprayer; alat potong rumput; cornsheller	Bukittingg	5 unit; 3 unit; 9 unit; 9 unit; 1 unit	335,650,000	APBD	usulan musrenbang	5 unit; 1 unit; 9 unit; 9 unit; 1 unit; 1 unit; 2 unit; 6 unit	250,000,000
	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun	Bukittingg	6 paket	1,510,500,000	PBD/APB	usulan musrenbang	4 paket	800,000,000
	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun	Bukittingg	1 paket	199,500,000	PBD/APB	usulan musrenbang	4 paket	200,000,000
	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	jumlah demplot	Bukittingg	2 lokasi	49,726,500	APBD			
	Pengadaan bibit buah-buahan	jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan	Bukittingg	5000 batang	750,000,000	PBD/APB	usulan musrenbang	3000 batang	150,000,000
	pemberdayaan dan pembinaan P3A	aktifnya kelembagaan P3A	Bukittingg	90%	20,000,000	APBD		95%	20,000,000
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Peningkatan pendapatan petani</b>		<b>5%</b>	<b>110,487,274</b>			<b>5%</b>	<b>175,000,000</b>
	Pembenahan, peningkatan kelas kemampuan kelompok dan penilaian/pemberian penghargaan kelompok	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya, jumlah kelompok tani yang dibenahi, jumlah penghargaan kelompok tani	Bukittingg	10 kelompok; 15 kelompok; 7 kategori	47,998,500	APBD		10 kelompok; 15 kelompok; 7 kategori	55,000,000
	Pelatihan dan Pembinaan dan temu teknis Gapoktan dan LKMA	jumlah pelatihan; jumlah pertemuan terlaksana	Bukittingg	16 gapoktan, 4 kali	62,488,774	APBD		16 gapoktan, 4 gapoktan	120,000,000
	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>	<b>Jumlah Pokdatan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>		<b>100</b>	<b>247,337,150</b>			<b>100</b>	<b>99,000,000</b>
	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian; Penyusunan RKPP; Pembuatan Leaflet	Bukittingg	1 dokumen	16,943,300	APBD		1 dokumen	17,000,000
	Pelaksanaan training dan review kegiatan	jumlah training penyuluh pertanian lapangan, temu teknis petani, KTNA	Bukittingg	24 kali; 2 kali; 2 kali	59,556,920	APBD		6 kali	65,000,000
	Penunjang Operasional BPP Model	Operasional BPP; booklet; demplot	Bukittingg	12 bulan;	75,027,930	APBD		1 tahun; 1 paket	17,000,000
	Pekan Daerah (PEDA), KTNA Sumbar dan rembuk KTNA	jumlah pameran diikuti		3 kali	70,823,000	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kompetensi Penyuluhan	Bukittingg	1 paket	24,986,000	APBD		1 paket	100,000,000
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan</b>	<b>Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi</b>		<b>13 kelompok</b>	<b>50,246,400</b>			<b>14 kelompok</b>	<b>57,000,000</b>
	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	Jumlah pelatihan terlaksana	Bukittingg	1 kali	50,246,400	APBD		1 kali	57,000,000
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)</b>		<b>80%</b>	<b>319,929,700</b>			<b>82%</b>	<b>331,500,000</b>
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	jumlah pelaksanaan sosialisasi; jumlah penangkapan anjing liar	Bukittingg	1 kali; 1 kali	41,898,500	APBD		50 orang	45,000,000
	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	jumlah pengambilan sampel BPAH dan penujian	Bukittingg	2 kali	24,542,000	APBD		2 kali	22,000,000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penunjang Operasional Puskesmas	Pelayanan kesehatan di UPTD Poskeswan; vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Kurban Kota Bukittinggi	Bukittingg	2500 ekor; 1000 ekor; 260 ekor; 60 ekor; 825 ekor	220,000,000	APBD		2500 ekor; 1000 ekor; 260 ekor; 60 ekor; 825 ekor	227,500,000
	Pelatihan pemotongan hewan kurban di mesjid/mushalla	Jumlah peserta pelatihan pemotongan hewan kurban	Bukittingg	1 kali	15,920,700	APBD		1 kali	26,000,000
	Pengawasan Obat Hewan	jumlah laporan	Bukittingg	1 laporan	17,568,500	APBD		1 laporan	11,000,000
	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Meningkatnya hasil produksi peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah</b>		<b>2%</b>	<b>102,600,000</b>			<b>2%</b>	<b>72,000,000</b>
	Operasional Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah Kuda Bibit Pejantan yang terpelihara	Bukittingg	1 ekor	52,600,000	APBD		1 ekor	47,000,000
	UPSUS SIWAB	Jumlah Laporan		12 laporan	15,000,000				
	Pembinaan, Pengawasan ternak dan pengolahan hasil peternakan	jumlah kelompok yang dibina	Bukittingg	4 kelompok	35,000,000	APBD		4 kelompok	25,000,000
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>Meningkatnya hasil produksi peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah</b>		<b>2%</b>	<b>746,403,245</b>			<b>2%</b>	<b>10,336,758,830</b>
	Penunjang Operasional RPH	jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Bukittingg	6300 ekor	221,000,245	APBD		6300 ekor	271,758,830
	DED Perluasan RPH Talao				300,000,000	APBD			
	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	jumlah acara promosi dan peternakan yang diikuti	Bukittingg	2 kali	70,000,000	APBD		1 paket	10,000,000,000
	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Bukittingg	2 Dokumen	155,403,000	APBD		2 kali	65,000,000
	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>jumlah Produksi Ikan</b>		<b>353</b>	<b>782,650,900</b>			<b>354</b>	<b>270,000,000</b>
	Penunjang Operasional BBIH	operasional BBIH	Bukittingg	12 bulan	212,650,900	APBD		12 bulan	270,000,000
	Pengembangan produksi ikan air tawar	jumlah pokdakan	Bukittingg	5 kelompok	410,000,000		usulan musrenbang		
	Pengembangan budidaya lele	jumlah bibit ikan	Bukittingg	1 paket	150,000,000	APBD			
	Pengadaan induk ikan	jumlah induk ikan	Bukittingg	2 Jenis	10,000,000	APBD			
	<b>Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan</b>		<b>2%</b>	<b>205,420,250</b>			<b>2%</b>	<b>130,000,000</b>
	Promosi dan Sosialisasi Gemarikan	Jumlah promosi dan sosialisasi terlaksana	Bukittingg	1 kali; 1 kali	128,220,250	APBD		1 kali; 1 kali	130,000,000
	Peningkatan mutu hasil perikanan	uji mutu perikanan, promosi	Bukittingg	2 kali; 2 kali	77,200,000	APBD			

**Tabel 5.19**  
**Program dan Kegiatan**  
**Sekretariat Daerah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>33,899,372,350</b>				<b>39,105,610,526</b>
<b>01</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>			5,483,898,835				6,521,585,725
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	Umper	1 Tahun	25,000,000	APBD		1 Tahun	35,000,000
002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Sumber daya air dan listrik	Umper	1 Tahun	339,000,000	APBD		1 Tahun	370,000,000
003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dians/ operasional	Pemeliharaan kendaraan	Umper	1 Tahun	1,727,900,000	APBD		1 Tahun	2,052,000,000
004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemeliharaan kendaraan	Umper	1 Tahun	274,548,040	APBD		1 Tahun	350,000,000
005	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang diperbaiki	Umper	1 Tahun	125,000,000	APBD		1 Tahun	200,000,000
006	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Umper	1 Tahun	133,615,495	APBD		1 Tahun	180,000,000
007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Umper	1 Tahun	247,394,500	APBD		1 Tahun	300,000,000
008	Penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor	Komponen listrik dan penerangan kantor	Umper	1 Tahun	99,986,000	APBD		1 Tahun	150,000,000
009	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minum rapat / lembur	Umper	1 Tahun	135,000,000	APBD		1 Tahun	150,000,000
010	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	Umper	1 Tahun	1,127,500,000	APBD		1 Tahun	1,400,000,000
011	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlaksananya jasa pegawai non PNS	Umper	1 Tahun	1,053,954,800	APBD		1 Tahun	1,053,954,800
015	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Adanya dokumentasi Pemerintahan Pemko Bukittinggi	Humas	90%	90,000,000	APBD		90%	100,000,000
016	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya langganan media cetak harian nasional, harian lokal ,mingguan dan majalah	Humas	100%	75,000,000	APBD		100%	90,630,925
017	Pembuatan buku kerja Pemko	Tersedianya buku kerja Pemko Bkt	Humas	100%	-	APBD		100%	60,000,000
018	Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Medical chek up kdh dan wkdh beserta keluarga	Umper	1 Tahun	30,000,000	APBD		1 Tahun	30,000,000
<b>02</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				1,102,043,500				6,250,000,000
001	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan kantor	Umper	1 Tahun	135,036,500	APBD		1 Tahun	600,000,000
002	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang diperbaiki	Umper	1 Tahun	200,000,000	APBD		1 Tahun	250,000,000
006	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Umper	1 Tahun	562,000,000	APBD		1 Tahun	1,000,000,000
009	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Rehab gedung kantor	Umper	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	1,200,000,000
011	Pengadaan peralatan rumah dinas/ jabatan	Peralatan rumah / dians jabatan	Umper	1 Tahun	100,007,000	APBD		1 Tahun	250,000,000
012	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan	Pemeliharaan rumah dinas / jabatan	Umper	1 Tahun	85,000,000	APBD		1 Tahun	350,000,000
013	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas/ jabatan	Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas / jabatan	Umper	1 Tahun	20,000,000	APBD		1 Tahun	1,000,000,000
014	Pengadaan kendaraan dinas	Kendaraan dinas / operasional	Umper	roda 6,4 dan roda24	-	APBD		roda 6,4 dan roda24	1,000,000,000
015	Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian putih	Pakaian dinas harian	Umper	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	100,000,000
016	Pengadaan mobiler	Mobiler kantor	Umper	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	500,000,000
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ( Nilai evaluasi SAKIP SKPD )</b>			<b>73,015,300</b>				<b>219,159,720</b>
001	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	Keuangan	1 laporan	2,458,700	APBD		1 laporan	6,000,000
002	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	Keuangan	12 bulan	18,250,000	APBD		12 bulan	26,000,000
003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan	Keuangan	1 laporan	5,646,880	APBD		1 laporan	9,500,000
004	Penyusunan LKIP	Laporan kinerja Kota Bukittinggi	Organisasi	BB	30,000,000			BB	75,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
005	Evaluasi Standar Kompetensi Manajerial ( SKM )	Laporan Evaluasi						100%	30,000,000
006	Evaluasi Standar Kompetensi Teknis	Laporan						100%	20,000,000
007	Aplikasi E-LKIP	Aplikasi	Organisasi	BB	-			BB	-
008	Penyusunan evaluasi jabatan	Perwako	Organisasi		-			100%	30,000,000
009	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pengelolaan keuangan	Keuangan	12 bulan	16,659,720	APBD		12 bulan	22,659,720
	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase agenda KDH dan WKDH sesuai standar protokoler nasional</b>			8,115,921,210				10,375,000,000
001	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Jumlah kali keprotokolan	Umper	1 Tahun	110,000,000	APBD		1 Tahun	150,000,000
002	Fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan	Jumlah kali fasilitasi	Umper	1 Tahun	625,000,000	APBD		1 Tahun	800,000,000
003	Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah	Jumlah kali penerimaan tamu	Umper	1 Tahun	1,575,000,000	APBD		1 Tahun	2,000,000,000
004	Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan kedinasan KDH	Pelayanan KDH	Umper	1 Tahun	3,000,000,000	APBD		1 Tahun	4,000,000,000
005	Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan kedinasan WKDH	Pelayanan WKDH	Umper	1 Tahun	2,100,000,000	APBD		1 Tahun	2,600,000,000
006	Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan tata usaha pimpinan	Pelayanan TUP	Umper	1 Tahun	325,921,210	APBD		1 Tahun	375,000,000
007	Fasilitas pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana	Umper	1 Tahun	380,000,000	APBD		1 Tahun	450,000,000
	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah</b>			<b>183,000,000</b>				<b>191,000,000</b>
001	Fasilitasi dan Monitoring Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU kerjasama yang terbit dan laporan movev	Pemerintahan	3 MoU	91,000,000	APBD		3 MoU	95,000,000
002	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar	Jumlah rakernas dan rakor yang diikuti	Pemerintahan	5 kali	92,000,000	APBD		5 kali	96,000,000
	<b>Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase penetapan peraturan perundang - undangan sesuai ketentuan</b>			542,090,955				618,332,446
001	Penanganan perkara-perkara pemda	Jumlah perkara yg ditangani	Hukum	2 perkara	41,893,500	APBD		2 perkara	46,082,850
002	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Hukum	200 orang	58,246,500	APBD		200 orang	64,071,150
003	Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	Hukum	jenis dokum	36,051,200	APBD		3 jenis dokumen	39,656,320
004	Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat	Jumlah Perjanjian yang diteliti	Hukum	30 perjanjian	17,353,900	APBD		30 perjanjian	19,089,290
005	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Hukum	35 produk hukum	200,295,350	APBD		35 produk hukum	242,357,280
006	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia	Jumlah peserta sosialisasi	Hukum	160 orang	13,929,100	APBD		160 orang	15,322,010
007	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah JDIIH	Hukum	50 peraturan	19,021,200	APBD		50 peraturan	20,923,320
008	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum	Jumlah kelurahan dan keluarga yang dibina	Hukum	240 orang	41,378,205	APBD		240 orang	45,516,026
010	Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	Jumlah produk hukum melalui website	Hukum	10 + 220 Bu	66,630,000	APBD		220 + 220 Bu	73,293,000
011	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan pelaksana Peraturan daerah berupa Perwako dan Keputusan Walikota yang berhasil guna	Hukum	15 Peraturan pelaksana	47,292,000	APBD		15 Peraturan pelaksana	52,021,200
	<b>Program Penataan Kelembagaan Daerah</b>	<b>Capaian nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah DAerah</b>		<b>100</b>	<b>470,593,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>465,000,000</b>
001	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi tahun 2018	Pemerintahan	8 buku	73,000,000	APBD		8 buku	67,000,000
002	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Wali Kota Bukittinggi TA 2018	Pemerintahan	45 buku	63,179,500	APBD		45 buku	68,000,000
003	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	Pemerintahan	1 laporan	15,413,500	APBD		1 laporan	21,500,000
004	Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah peserta sosialisasi	Pemerintahan	50 orang	-	APBD		50 orang	18,500,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
005	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota	Sarana dan prasarana	Pemerintahan	1 laporan	145,000,000	APBD		1 laporan	145,000,000
006	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota/ Kecamatan/Kelurahan	Rapat koordinasi Pemerintah Kota/Kec/Kel	Pemerintahan	4 kali	144,000,000	APBD		4 kali	145,000,000
007	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa Bumi	Jumlah usulan nama rupa bumi yang akan dibakukan	Pemerintahan	208 unsur buatan	30,000,000	APBD		208 unsur buatan	30,000,000
	<b>Program : Pengelolaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase pengadaan sesuai kontrak</b>			909,930,020				1,012,750,000
001	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring dalam satu tahun	Pembangunan	100%	88,061,360.00	APBD		100%	150,000,000.00
002	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Proses pengadaan barang dan jasa terlaksana untuk seluruh SKPD	Pembangunan	100%	649,739,700	APBD		100%	672,750,000
003	Asistensi Penyusunan RUP terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RUP	Pembangunan	100%	50,352,100.00	APBD		100%	65,000,000
004	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Laporan TEPRA	Pembangunan	100%	121,776,860.00	APBD		100%	125,000,000
	<b>Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah</b>				119,445,000				90,000,000
001	Pembuatan aplikasi anjab abk	Aplikasi anjab ABK	Organisasi	80%	99,815,000	APBD			
002	Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi	Perwako anjab ABK	Organisasi	100%	19,630,000	APBD			
004	Monev pelaksanaan Tusi Perangkat daerah	Laporan/rekomendasi						100%	50,000,000
005	Sosialisasi peningkatan pemahaman tusi perangkat daerah	Jumlah peserta sosialisasi						80%	40,000,000
	<b>Program Pengembangan Potensi Ekonomi</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi daerah</b>			<b>217,134,625</b>				<b>701,800,000</b>
001	Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya promosi gelar TTG tingkat propinsi dan nasional (kali)	Pemerintahan	2 kali	-	APBD		2 kali	280,000,000
002	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Perekonomian	6%	46,960,525	APBD		6%	58,800,000
	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	Perekonomian	6%	71,935,000	APBD		6%	153,000,000
003	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	Perekonomian	6%	49,550,000	APBD		6%	145,000,000
004	Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan	Laporan	Perekonomian	1%	48,689,100	APBD		1%	65,000,000
	<b>Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian</b>	<b>Tingkat inflasi daerah</b>			<b>141,523,800</b>				<b>291,000,000</b>
001	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Jumlah rekomendasi	Perekonomian	3%	76,700,000	APBD		3%	160,000,000
002	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan	Perekonomian	3%	41,338,800	APBD		3%	60,000,000
003	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev	Perekonomian	3%	23,485,000	APBD		3%	71,000,000
	<b>Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat</b>	<b>Persentase rumah ibadah yang menyelenggarakan ibadah secara rutin</b>			<b>9,537,776,400</b>				<b>8,404,908,400</b>
001	Pemberian bantuan tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA,Pondok Qur'an,Ponpes, Garin Masjid/Mushala	Jumlah penerima bantuan	Kesra	580 x 12 bulan	4,201,000,000	DAU		580 x 12 bulan	4,201,000,000
002	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal	Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal	Kesra	46 x	49,580,000	DAU		46 x	49,580,000
003	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	Kesra	350/2 x	350,000,000	DAU		350/2 x	350,000,000
004	Pengadaan Kalender Hijriah	Jumlah kalender hijriah	Kesra	95%	28,500,000	APBD		1	29,000,000
005	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	Kesra		73,000,000				850,000,000
006	Operasional Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid	Kesra	90%	1,447,351,000	APBD		1	78,000,000
007	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional	Jumlah mesjid	Kesra	190/ 4 x	83,198,500	APBD		190/ 4 x	1,592,086,000
008	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an	Meningkatnya Pemahaman Pengamalan kehidupan beragama masyarakat	Kesra	25/ 1 x	195,700,000	APBD		25/ 1 x	85,198,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
009	Pelatihan Dai dan Mubaligh Tingkat Kota Bukittinggi	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Pengamalan kehidupan beragama masyarakat	Kesra	63 Lembaga/ 1 x	77,500,000	APBD		63 Lembaga/ 1 x	195,700,000
010	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TPSQ, TKQ, Pondok Qur'an dan Ponpes	Jumlah dai yang dilatih	Kesra	25/1 x	59,643,900	APBD		25/1 x	28,500,000
011	Pembinaan administrasi Manajemen Masjid	Jumlah guru yang dilatih	Kesra	150 / 1 x	214,600,000	DAU		150 / 1 x	59,643,900
012	Pelatihan guru Didikan Subuh	Jumlah peserta	Kesra	6 Masjid/ 1 x	145,000,000	APBD		6 Masjid/ 1 x	234,600,000
013	Tabligh Akbar	Jumlah guru yang dilatih	Kesra	90%	164,250,000	APBD		1	155,000,000
014	Pelatihan Garin Masjid dan Mushalla	Jumlah peserta	Kesra	8500/1 x	45,850,000	DAU		8500/1 x	164,250,000
015	Lomba Penyelenggaraan Jenazah	Laporan	Kesra	150/ 1 x	50,000,000	DAU		150/ 1 x	45,850,000
016	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah	Jumlah peserta	Kesra	90%	15,000,000	APBD		1	75,000,000
017	Pembinaan dan Pelatihan Remaja Islam Masjid/Mushalla	Laporan	Kesra	85%	95,750,000	APBD		1	20,000,000
018	MTQ ke 38 Tk. Propinsi Sumatera Barat	Laporan	Kesra	60/2 x	1,991,853,000	DAU		60/2 x	95,750,000
020	Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Meskin Berprestasi	Jumlah kafilah	Kesra	25 org/1x	250,000,000				95,750,000
	<b>Program Peningkatan Peran Kehumasan</b>				<b>1,582,224,120</b>				<b>2,216,054,828</b>
001	Penunjang Pers & Kehumasan	Jumlah exemplar tulisan yang dihasilkan	Humas	100%	106,845,000	APBD		100%	319,887,669
002	Pengumpulan data Informasi ,kliping ,penelaah berita.	Data dan kliping	Humas	90%	9,500,000	APBD		90%	9,900,000
003	Promosi melalui mass media ,profil dan dokumentasi	Jumlah promosi dan liputan	Humas	90%	595,779,120	APBD		90%	625,000,000
004	Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak	Media cetak harian dan mingguan	Humas	90%	810,100,000	APBD		90%	1,186,267,159
005	Kegiatan Pers & Release	Berita tentang kebijakan , program dan kegiatan Pemko	Humas	90%	60,000,000	APBD		90%	75,000,000
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>				<b>773,908,000</b>				<b>1,070,019,407</b>
001	Survey Kepuasan masyarakat	Laporan hasil survey	Organisasi	80	-	APBD		80	50,000,000
002	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang mengikuti kompetisi	Organisasi		14,554,000.00	APBD			43,503,000.00
003	Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Laporan pencapaian SPM	Organisasi	100%	-	APBD		100%	55,000,000
005	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota	Pelaksanaan dialog interaktif	Humas	100%	32,000,000	APBD		100%	66,516,407
006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui media elektronik dan mobil unit	Informasi langsung pada masyarakat	Humas	90%	260,000,000	APBD		90%	340,000,000
007	Pembuatan Majalah, Tabloid Internal Pemerintah Kota Bukittinggi	Majalah dan Tabloid Pemko Bukittinggi	Humas	90%	240,000,000	APBD		90%	175,000,000
008	Kegiatan Pemasangan spanduk.brosur.leaflet .Pamflet	Jumlah spanduk, brosur, leaflet dan pamflet	Humas	90%	210,000,000	APBD		90%	250,000,000
010	Revisi Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan evaluasi	Organisasi	75%	17,354,000	APBD		75%	45,000,000
011	Penyelenggaraan Pengaduan melalui aplikasi SP4N	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Organisasi	100%	-	APBD		100%	45,000,000
	<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan</b>	<b>Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur</b>			<b>690,867,585</b>				<b>610,000,000</b>
001	Penunjang Operasional DPD LPM	Jumlah rapat yang difasilitasi	Pemerintahan	3 kali	-	APBD		3 kali	35,000,000
002	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Data profil dikelurahan	Pemerintahan	24 kelurahan	24,626,000	APBD		24 kelurahan	160,000,000
003	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Kelurahan berprestasi tingkat kota	Pemerintahan	3 tingkat perlombaan	132,314,655	APBD		3 tingkat perlombaan	130,000,000
004	Penilaian Kompetensi Lurah	Lurah berprestasi	Pemerintahan	2 lomba	52,992,930	APBD		2 lomba	58,000,000
005	Penilaian Kompetensi Camat	Camat berprestasi tingkat Kota	Pemerintahan	1 camat	67,934,000	APBD		1 camat	71,000,000
006	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan	Jumlah peserta bimtek	Pemerintahan	35 orang	400,000,000	APBD		35 orang	140,000,000
007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Laporan Monev	Pemerintahan	3 kecamatan	13,000,000	APBD		3 kecamatan	16,000,000
	<b>Program Penegasan Batas Wilayah</b>	<b>Terwujudnya kejelasan batas kota (%)</b>		<b>100</b>	<b>53,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>69,000,000</b>
001	Penegasan Batas Administratif Wilayah Kota Bukittinggi	Berita Acara batas kecamatan dan kelurahan	Pemerintahan	10 berita acara	53,000,000	APBD		10 berita acara	69,000,000

**Tabel 5.20**  
**Program dan Kegiatan**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>				<b>23,507,316,030</b>	-	-		<b>24,031,025,898</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>4,434,486,725</b>			<b>100%</b>	<b>4,877,935,398</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, perangko dan buku cek	Sekr. DPRD	Materai 500 buah, perangko 22 sheet dan buku 20 cek	5,800,000	APBD		Materai 500 buah, perangko 22 sheet dan buku 20 cek	6,380,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Telepon, air, listrik dan TV kabel	Sekr. DPRD	Rekening telp : 12, Rekening Air : 12, Rekening Listrik : 12, Rekening TV Kabel : 12	243,700,000	APBD		Rekening telp : 12, Rekening Air : 12, Rekening Listrik : 12, Rekening TV Kabel : 12	268,070,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua	Sekr. DPRD	22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2	432,930,000	APBD		22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2	476,223,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor	Sekr. DPRD	12 bulan	210,215,660	APBD		12 bulan	231,237,226
	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Sekr. DPRD	46 item	21,150,315	APBD		46 item	23,265,347
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Sekr. DPRD	12 bulan	50,038,710	APBD		12 bulan	55,042,581
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen alat listrik dan elektronik	Sekr. DPRD	12 bulan	17,309,300	APBD		12 bulan	19,040,230
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum pegawai lembur	Sekr. DPRD	12 bulan	20,000,000	APBD		12 bulan	22,000,000
	Rapat - rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	3 item perjalanan dinas	1,900,000,000	APBD		3 item perjalanan dinas	2,090,000,000
	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	Sekr. DPRD	13 orang	352,269,300	APBD		13 orang	387,496,230
	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jasa pengamanan Kantor	Sekr. DPRD	6 orang	200,000,000	APBD		6 orang	220,000,000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Sekr. DPRD	1 tahun	50,000,000	APBD		1 tahun	55,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Surat Kabar, Majalah, Buku , Peraturan dan Perundang - undangan	Sekr. DPRD	Surat Kabar : 9 item , Majalah : 840 paket dan Buku : 4 paket	350,000,000	APBD		Surat Kabar : 9 item , Majalah : 840 paket dan Buku : 4 paket	385,000,000
	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Makan minum tamu, plakat dan cendera mata	Sekr. DPRD	Makan minum tamu : 12 bulan, plakat : 100 buah, cendera mata : 1 paket	381,073,440	APBD		Makan minum tamu : 12 bulan, plakat : 100 buah, cendera mata : 1 paket	419,180,784
	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Sekr. DPRD	25 orang	200,000,000	APBD		25 orang	220,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,458,347,510</b>			<b>100%</b>	<b>1,604,182,261</b>
	Pengadaan peralatan kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekr. DPRD	5 paket	200,000,000	APBD		5 paket	220,000,000
	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Sekr. DPRD	5 paket	200,000,000	APBD		5 paket	220,000,000
	Pengadaan mebeleur	Mebeleur gedung kantor	Sekr. DPRD	5 paket	200,000,000	APBD		5 paket	220,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Sekr. DPRD	1 unit gedung kantor	210,000,000	APBD		1 unit gedung kantor	231,000,000
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	1 paket	270,140,000	APBD		1 paket	297,154,000
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Alat listrik & elektronik, alat kebersihan dan peralatan makan	Sekr. DPRD	1 paket	29,996,910	APBD		1 paket	32,996,601
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekr. DPRD	1 unit rumah jabatan	72,110,600	APBD		1 unit rumah jabatan	79,321,660
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Sekr. DPRD	12 bulan	10,000,000	APBD		12 bulan	11,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	16,500,000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	12 bulan	25,000,000	APBD		12 bulan	27,500,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	Pengisian Tabung Gas : 20 Tabung, dan alat rumah tangga : 7 item	6,100,000	APBD		Pengisian Tabung Gas : 20 Tabung, dan alat rumah tangga : 7 item	6,710,000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Sekr. DPRD	lemari, meja, kursi, gordena, genset, exhaust fan, tabung racun api, bendera, marawa, logo kemerdekaan RI, kompor gas, gerobak dorong, dll	20,000,000	APBD		lemari, meja, kursi, gordena, genset, exhaust fan, tabung racun api, bendera, marawa, logo kemerdekaan RI, kompor gas, gerobak dorong, dll	22,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas	Rehabilitasi bangunan rumah jabatan/dinas	Sekr. DPRD	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>17,614,481,795</b>			<b>100%</b>	<b>17,548,908,240</b>
	Penyelenggaraan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan	Penyelenggaraan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan	Sekr DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar	18 paket	9,760,854,715	APBD		18 paket	10,736,940,187
	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Rapat - rapat paripurna istimewa	Sekr. DP	10 kali rapat paripurna istimewa	850,556,450	APBD		10 kali rapat paripurna istimewa	935,612,095
	Kegiatan reses	Reses ke daerah pemilihan	Sekr. DP	84 kali reses	655,754,500	APBD		84 kali reses	721,329,950
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar yang diikuti	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	8 bimtek/ sosialisasi / pelatihan/ seminar	2,698,000,000	APBD		8 bimtek/ sosialisasi / pelatihan/ seminar	2,967,800,000
	Publikasi/sosialisasi produk kebijakan & kegiatan DPRD kota Bukittinggi	Publikasi dan sosialisasi	Sekr. DPRD	8 jenis	240,639,280	APBD		8 jenis	264,703,208
	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Artikel, berita, liputan, baliho, kalender, foto, spanduk dan website	Sekr. DPRD	12 jenis	283,748,000	APBD		12 jenis	312,122,800
	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	honor tenaga ahli fraksi	Sekr. DPRD	7 orang	189,000,000	APBD		7 orang	207,900,000
	Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Sekr. DPRD	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	55,000,000
	Penyusunan Standarisasi tunjangan transportasi pimpinan dan Anggota DPRD	Jasa appraisal transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Sekr. DPRD	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	55,000,000
	Penunjang kegiatan kerjasama Asosiasi DPRD Se Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD Se Indonesia	luran kontribusi, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah ADEKSI dan ASDEKSI	Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar	3 kali ADEKSI, 3 kali ASDEKSI	1,175,000,000	APBD		3 kali ADEKSI, 3 kali ASDEKSI	1,292,500,000
	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Produk hukum DPRD	Sekr. DPRD	4 produk h	685,928,850	APBD		4 produk hukum	754,521,735
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya	Sekr. DPRD	150 Stel	400,000,000	APBD		150 Stel	440,000,000
	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	RD Ketua DPRD	12 bulan	210,000,000	APBD		12 bulan	231,000,000
	Kegiatan Makan minum rapat - rapat DPRD	Kegiatan makan minum rapat-rapat DPRD	Sekr. DPRD	2 paket	365,000,000			2 paket	401,500,000

Tabel 5.21  
Program dan Kegiatan  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				8,927,801,795	APBD			4,605,901,189
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	SKPD	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	690,807,130	APBD		100%	794,428,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli	1 ls;1 ls;100 lembar;200 lembar	2,750,000	APBD		1 ls;1 ls;100 lembar;200 lembar	3,162,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar	2 rekening;1 rekening;1 rekening	59,600,000	APBD		2 rekening;1 rekening;1 rekening	68,540,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara	6 unit;4 unit	145,000,000	APBD		6 unit;4 unit	166,750,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli	1 paket;6 item	169,000,000	APBD		1 paket;6 item	194,350,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki	15 unit;1 ls;20 unit;25 unit	10,000,000	APBD		15 unit;1 ls;20 unit;25 unit	11,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Alat Tulis Kantor yang terbeli	34 item	21,458,930	APBD		34 item	24,677,770
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	1 ls;6 item	16,380,000	APBD		1 ls;6 item	18,837,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli	15 item	4,996,990	APBD		15 item	5,746,539

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan	1 ls;1 ls;1 ls	16,500,000	APBD		1 ls;1 ls;1 ls	18,975,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	100 Persen;12 bulan	169,500,000	APBD		100 Persen;12 bulan	194,925,000
	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Ls	-	APBD		1 Ls	-
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	SKPD	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS	1 Ls	60,000,000	APBD		1 Ls	69,000,000
	Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	SKPD	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	12 orang/paket	15,621,210	APBD		12 orang/paket	17,964,392
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>SKPD</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>5,444,500,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>358,675,000</b>
	Pengadaan peralatan kantor	SKPD	terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	1 gedung	47,000,000	APBD		1 gedung	54,050,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung	47,500,000	APBD		1 gedung	54,625,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas	6 motor	-	APBD		6 motor	250,000,000
	Pengadaan Tanah Kantor	SKPD	Pengadaan Tanah dan Apraisal Kantor Bapelitbang		5,250,000,000				-
	DED Kantor Bapelitbang, Badan Keuangan, dan BKPSDM	SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100,000,000				-
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>SKPD</b>	<b>Tingkat disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>38,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>43,700,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	38 orang	38,000,000	APBD		38 orang	43,700,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi</b>	<b>50%</b>	<b>82,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>50%</b>	<b>414,300,000</b>
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	15 orang	82,000,000	APBD		15 orang	94,300,000
	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan peneliti	SKPD	jumlah pegawai yang memiliki sertifikat perencana dan peneliti	23 orang	-	APBD		23 orang	320,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>8,200,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>9,430,000</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD	laporan keuangan semesteran Bapelitbang	1 dokumen	800,000	APBD		1 dokumen	920,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	SKPD	Dokumen RENJA Bapelitbang	8 buku	5,000,000	APBD		8 buku	5,750,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Laporan Kinerja Bapelitbang	2 Dokumen	1,200,000	APBD		2 Dokumen	1,380,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapelitbang	8 buku	1,200,000	APBD		8 buku	1,380,000
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>KOTA BUKITTI NGGI</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>886,280,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,019,222,000</b>
	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	1 dokumen	96,348,000	APBD		1 dokumen	110,800,200
	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	KOTA BUKITTI NGGI	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2019	1 dokumen	5,000,000	APBD		1 dokumen	5,750,000
	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	4 laporan triwulan	180,000,000	APBD		4 laporan triwulan	207,000,000
	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	1 dokumen	31,682,000	APBD		1 dokumen	36,434,300
	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	KOTA BUKITTI NGGI	Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota	100%	167,500,000	APBD		100%	192,625,000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan monev berkala pengelola DAK	4 laporan triwulan	105,000,000	APBD		4 laporan triwulan	120,750,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	KOTA BUKITTI NGGI	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota	3 Dokumen	300,750,000	APBD		3 Dokumen	345,862,500
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>KOTA BUKITTI NGGI</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>100%</b>	<b>147,989,565</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>91,617,125</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	100%	79,667,065	APBD		100%	91,617,125
	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan Pelaksanaan Ekonomi Kreatif	100%	68,322,500				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>KOTA BUKITTINGGI</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>100%</b>	<b>545,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>626,750,000</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	KOTA BUKITTINGGI	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 laporan	130,000,000	APBD		1 laporan	149,500,000
	Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	KOTA BUKITTINGGI	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	1 Laporan	170,000,000	APBD		1 Laporan	195,500,000
	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya kapasitas Pokja PUG	100%	50,000,000	APBD		100%	57,500,000
	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	KOTA BUKITTINGGI	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	115,000,000
	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	KOTA BUKITTINGGI	Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Website	4 triwulan	45,000,000	APBD		4 triwulan	51,750,000
	Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan	KOTA BUKITTINGGI	Dokumen Master Plan Pendidikan	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Sumber Daya Manusia	KOTA BUKITTINGGI	Laporan Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	50,000,000	APBD		4 triwulan	57,500,000
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>	<b>KOTA BUKITTINGGI</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>	<b>100%</b>	<b>155,262,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>178,551,875</b>
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	KOTA BUKITTINGGI	Laporan Pelaksanaan koordinasi air minum, drainase, sanitasi dan acara city summit	85%	37,919,500	APBD		85%	43,607,425
	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	KOTA BUKITTINGGI	Laporan pelaksanaan kegiatan dan data perumahan dan kawasan pemukiman	80%	37,343,000	APBD		80%	42,944,450
	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	KOTA BUKITTINGGI	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	100%		- APBD		100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Dokumen SSK	85%	80,000,000	APBD		85%	92,000,000
	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	80%	-	APBD		80%	-
	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran	KOTA BUKITTI NGGI	Perencanaan Penanganan Perparkiran	100%	-	APBD		100%	-
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>KOTA BUKITTI NGGI</b>	<b>PEMENUHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG FUNGSI KOTA</b>	<b>75%</b>	<b>172,762,600</b>	<b>APBD</b>		<b>75%</b>	<b>198,676,990</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	1 Laporan	69,776,350	APBD		1 Laporan	80,242,803
	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	1Dokumen	45,000,000	APBD		1Dokumen	51,750,000
	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	1Laporan	31,055,800	APBD		1Laporan	35,714,170
	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	1 Laporan	26,930,450	APBD		1 Laporan	30,970,018
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>	<b>KOTA BUKITTI NGGI</b>	<b>TERPENUHINYA DATA DAN INFORMASI YANG VALID DAN AKURAT TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>85%</b>	<b>267,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>307,050,000</b>
	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	KOTA BUKITTI NGGI	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi	1 Dokumen	167,000,000	APBD		1 Dokumen	192,050,000
	Penyusunan Profil daerah	KOTA BUKITTI NGGI	Profil Kota Bukittinggi		-	APBD		0%	-
	Penyusunan e-Database Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	KOTA BUKITTI NGGI	Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	70%	100,000,000	APBD		70%	115,000,000
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KOTA BUKITTI NGGI</b>	<b>MENINGKATNYA FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>490,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>563,500,000</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	KOTA BUKITTI NGGI	Jumlah Laporan Kelitbangan	1 laporan	250,000,000	APBD		1 laporan	287,500,000
	Penguatan Kelitbangan Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTI NGGI	Jumlah Kelembagaan yang terbentuk	3 kelembagaan	-	APBD		1 laporan	-
	Penelitian Kerja Sama bidang Sosial dan Pemerintahan	KOTA BUKITTI NGGI		1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	KOTA BUKITTI NGGI	Rekomendasi hasil valuasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Bid Ekonomi	2 rekomendasi		- APBD		2 rekomendasi	-
	Penguatan Inovasi Daerah	KOTA BUKITTI NGGI	SIDA dan Roadmap	1 Laporan	240,000,000	APBD		1 Laporan	276,000,000
	Penelitian kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan	KOTA BUKITTI NGGI	Penelitian kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan	1 Laporan		- APBD		1 Laporan	-

Tabel 5.22  
Program dan Kegiatan  
Badan Keuangan  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>BADAN KEUANGAN</b>				<b>20,247,014,640</b>				<b>17,113,621,682</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>7,443,391,257</b>			<b>100%</b>	<b>7,472,413,699</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDmaterai 3000 500 lembar;materai 6000 600 lembar;cek bermaterai 10 buku;	500 lembar;600 lembar;10 buku;	3,058,000	APBD		500 lembar;600 lembar;12 buku;	3,058,000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Rekening listrik 12 Bulan;Rekeninh telpon 12 Bulan;Rekening air 12 Bulan;	12 bulan	119,148,619	APBD		12 Bulan	119,148,619
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	SKPD	Service kendaraan roda empat ;Service kendaraan roda dua ;suku cadang kendaraan roda empat;suku cadang kendaraan roda dua ;Pajak kendaraan ;BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan ;	12 bulan	235,000,000	APBD		12 bulan	242,285,400
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	alat kebersihan dan bahan pembersih ;Jasa cleaning service ;retribusi sampah ;	12 bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	219,956,200
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	printer terpelihara ;laptop terpelihara ;mesin ketik terpelihara;komputer terpelihara	12 Bulan;	24,000,000	APBD		12 bulan	24,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	alat tulis kantor	85 jenis;	80,000,000	APBD		85 jenis;	83,177,870
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	kuitansi,bill, bon, karcis ;fotocopy 300.000 lembar;penggandaan 60 exemplar;	12 bulan	450,596,928	APBD		12 Bulan	444,999,900
	Penyediaan komponen instanlasi listrik dan penerangan bangunan kantor	SKPD	lampu LED 40 watt 50 buah;lampu LED 12 watt 35 buah;kabel NYM 1 gulung;stop kontak 10.Buah;baterai	50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	9,998,100	APBD		50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	9,998,100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan makan minum kantor	SKPD	makan rapat 500 bungkus;minum rapat 500 kotak;makan lembur 500 bungkus;minum lembur 500 kotak;makan minum pendampingan pemeriksaan 90 hari;minum tamu 12 Bulan;makanan ringan diruang	500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500 kotak;90 hari;12 Bulan;12 Bulan;	50,000,000	APBD		500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500 kotak;90 hari;12 Bulan;12 Bulan;	54,200,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	SKPD	persentase perjalanan dinas diikuti	100%	221,000,000	APBD		100%	221,000,000
	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	SKPD	Terlaksana jasa administrasi keuangan	100%	5,533,199,100	APBD		100%	5,533,199,100
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	SKPD	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbavarkan	12 bulan	297,269,300	APBD		12 bulan	297,269,300
	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	SKPD	Jasa pengamanan kantor terbavarkan	12 Bulan;	200,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	SKPD	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	9 orang	20,121,210	APBD		9 orang	20,121,210
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>5,437,500,000</b>			<b>100%</b>	<b>150,000,000</b>
	Pengadaan peralatan kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	personal komputer 3 unit	37,500,000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	50,000,000	APBD		1 gedung	150,000,000
	Pengadaan tanah untuk gedung kantor Badan Keuangan dan appraisal	SKPD	Jumlah tanah tersedia	1 bidang	5,250,000,000	APBD			
	Penyusunan DED pembangunan gedung Kantor Badan Keuangan	SKPD	Jumlah DED yang tersedia	1 paket	100,000,000	APBD			
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>48,267,500</b>			<b>100%</b>	<b>65,267,500</b>
	Penyusunan Rencana kerja dan keuangan SKPD	SKPD	Jumlah dokumen renja		0	APBD		1 dokumen;	8,500,000
	Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan SKPD	SKPD	Jumlah dokumen LKIP		0	APBD		1 dokumen;	8,500,000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	SKPD	Jumlah dokumen lap keu	2dokumen;	48,267,500	APBD		1 dokumen;	48,267,500
	<b>Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah</b>		<b>persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi</b>	<b>90%</b>	<b>250,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>454,952,600</b>
	Implementasi dan kustomisasi sistim informasi pengelolaan keuangan daerah (dana pendamping SIPKD)	SKPD	Jumlah sistim informasi pengelolaan keuda	1 aplikasi	250,000,000	APBD		1 aplikasi	454,952,600
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi</b>	<b>WTP</b>	<b>3,149,407,583</b>			<b>WTP</b>	<b>4,034,688,683</b>
	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	SKPD	Jumlah Perda APBD yang dihasilkan	1 Perda	140,570,000	APBD		1 Perda	160,570,000
	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	SKPD	Jumlah SKPD yang direkonsiliasi	28 SKPD	49,330,000	APBD		28 SKPD	56,030,000
	Implementasi PP 71 tahun 2010 tentang SAP	SKPD	Jumlah SKPD yang melaksanakan SAP sesuai PP 71 tahun 2010	28 SKPD	170,000,000	APBD		28 SKPD	175,496,343

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan administrasi hibah bansos	SKPD	Jumlah SKPD Monev pengelola hibah bansos	14 SKPD	11,600,000	APBD		14 SKPD	11,600,000
	Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	28 SKPD	24,276,000	APBD		28 SKPD	74,276,000
	Penyusunan ranperwako tentang penjabaran perubahan APBD	SKPD	Jumlah perwako penjabaran perubahan APBD	1 Perwako	362,227,500	APBD		1 Perwako	382,227,500
	Pengelolaan administrasi gaji PNS	SKPD	Jumlah administrasi gaji yang dilaksanakan	12 Bulan;	156,923,480	APBD		12 Bulan;	56,923,480
	Pengelolaan Kas Daerah	SKPD	Jumlah belanja yang menggunakan transaksi Non Tunai	5 jenis	116,428,500	APBD		5 jenis	66,428,500
	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	SKPD	Jumlah Perda pertanggungjawaban SKPD	1 Perda	345,482,500	APBD		1 Perda	304,557,500
	Pengelolaan administrasi anggaran daerah	SKPD	Jumlah dokumen pengananggaran yang disusun	12 dokumen	58,421,080	APBD		12 dokumen	128,421,080
	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	SKPD	Jumlah Informasi keuangan daerah yang disusun	12 dokumen	43,895,000	APBD		12 dokumen	43,895,000
	Penyusunan Ranperwako tentang pergeseran penjabaran APBD	SKPD	jumlah dokumen perwako pergeseran APBD	1 Perwako	39,690,000	APBD		1 Perwako	39,690,000
	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	SKPD	Jumlah dokumen Perwako Standar Biaya	1 Perwako	23,592,640	APBD		1 Perwako	23,592,640
	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	SKPD	jumlah administrasi perbendaharaan yang dilaksanakan	12 Bulan;	142,226,000	APBD		12 Bulan;	142,226,000
	Penyusunan Ranperwako tentang penjabaran APBD	SKPD	Jumlah dokumen perwako penjabaran APBD	1 Perwako	338,500,000	APBD		1 Perwako	361,500,000
	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	SKPD	Jumlah buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 dokumen	139,579,560	APBD		1 dokumen	149,579,560
	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	SKPD	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 dokumen	274,109,250	APBD		1 dokumen	284,109,250
	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	SKPD	Jumlah dokumen KUPA PPAS perubahan	1 dokumen	270,502,500	APBD		1 dokumen	280,502,500
	Peningkatan kapasitas aparatur penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah aparatur penganggaran yang mengikuti studi komparatif		0	APBD		40 orang	350,000,000
	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	SKPD	Jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP TGR	3 kasus;	100,000,000	APBD		3 kasus;	110,000,000
	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	SKPD	Jumlah Perwako pertanggungjawaban APBD	1 Perwako	37,882,500	APBD		1 Perwako	37,877,440
	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	107,500,000	APBD		1 dokumen	157,500,000
	Penyusunan analisa standar belanja	SKPD	jumlah analisa standar belanja	1 dokumen;	38,776,340	APBD		1 dokumen;	38,776,340
	Penyusunan ranperda perubahan APBD	SKPD	jumlah ranperda Perubahan APBD	1 dokumen;	86,465,000	APBD		1 dokumen;	106,465,000
	Sosialisasi dan Bintek penyusunan APBD	SKPD	jumlah peserta sosialisasi dan bintek	222 orang	0	APBD		222 orang	138,731,100
	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	SKPD	Jumlah dokumen penerimaan yang disusun	12 dokumen	25,134,000	APBD		12 dokumen	25,134,000
	Peningkatan Penguasaan Pengelolaan Penatausahaan Pengeluaran bagi Bendahara dan Pejabat terkait	SKPD	Jumlah bendahara SKPD yang mengikuti pelatihan		0	APBD		75 orang	246,850,000
	Pegelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	12 dokumen	46,295,733	APBD		12 dokumen	81,729,450

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Penerimaan PAD</b>		<b>Jumlah penerimaan pajak daerah</b>	<b>42,311 M</b>	<b>1,062,687,000</b>			<b>34.927 Rupiah (Milyar)</b>	<b>1,372,687,000</b>
	Pendataan ulang objek PBB-P2	SKPD	Jumlah dokumen pendataan PBB P2	1 dokumen	88,105,000	APBD		1 dokumen	88,105,000
	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	SKPD	Jumlah objek pengawasan pajak dan retribusi	objek	461,862,000	APBD		objek	481,862,000
	Pengelolaan administrasi pajak daerah	SKPD	Jumlah dokumen adm pajak yang disusun	12 dokumen	76,709,000	APBD		12 dokumen	76,709,000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2	SKPD	Jumlah dokumen pendistribusian dan pengembalian PBB	1 dokumen;	27,637,000	APBD		1 dokumen;	27,637,000
	Peningkatan dan pengembangan Sitem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	SKPD	Jumlah aplikasi online wajib pajak	1 aplikasi;	20,000,000	APBD		1 aplikasi;	210,000,000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	SKPD	Jumlah potensi pendapatan yang diqali	objek	175,110,000	APBD		objek	275,110,000
	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	SKPD	jumlah wajib pajak PBB P2	wajib pajak	44,250,000	APBD		wajib pajak	44,250,000
	Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	SKPD	Jumlah dokumen PBB BPHTB yang dikelola	12 dokumen	162,990,000	APBD		12 dokumen	162,990,000
	Pemutakhiran data piutang Pajak	SKPD	Jumlah piutang pajak yang valid	1 dokumen;	6,024,000	APBD		1 dokumen;	6,024,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota Bukittinggi</b>	<b>50%</b>	<b>2,855,761,300</b>			<b>20%</b>	<b>3,563,612,200</b>
	Penaksiran BMD	SKPD	jumlah aset milik daerah yang disewakan	7 dokumen;	4,855,800	APBD		7 dokumen;	4,855,800
	Penyusunan laporan BMD tahunan	SKPD	Jumlah Laporan BMD tahunan	1 dokumen;	29,692,500	APBD		1 dokumen;	29,692,500
	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	SKPD	Jumlah HGB diatas HPL yang diproses	60 dokumen;	29,050,000	APBD		60 dokumen;	0
	Pembuatan aplikasi pengelolaan BMD	SKPD	Jumlah aplikasi BMD	1 aplikasi	250,000,000	APBD			
	Pengelolaan administrasi aset	SKPD	Jumlah dokumen administrasi aset yang dilaksanakan			APBD		12 Bulan;	102,135,000
	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	SKPD	jumlah penyimpan dan pengurus barang SKPD	180 orang;	1,325,285,000	APBD		180 orang;	1,325,285,000
	Pembuatan aplikasi pengelolaan persediaan BMD	SKPD	jumlah aplikasi persediaan BMD	1 aplikasi;	100,000,000	APBD			
	Penyusunan laporan BMD semesteran	SKPD	Jumlah laporan BMD semesteran tersusun	2 dokumen;	12,083,000	APBD		2 dokumen;	12,083,000
	Pembuatan sitem informasi aset berbasis GIS	SKPD	Jumlah sitem informasi berbasis GIS yang disediakan			APBD		1 sitem informasi	500,000,000
	Penyusunan perwako rumah dinas	SKPD	Jumlah Perwako Rumah Dinas yang disusun			APBD		1 dokumen	70,000,000
	Sertifikat tanah milik Pemko	SKPD	Jumlah aset milik Pemko yang disertifikatkan	dokumen sertifikat	50,000,000	APBD		dokumen sertifikat	50,000,000
	Pengamanan dan pemeliharaan BMD	SKPD	Jumlah aset milik daerah yang diamankan			APBD		jenis	800,000,000
	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	SKPD	Jumlah objek pemanfaatan aset yang dikelola	objek	33,200,000	APBD		objek	33,200,000
	Penyusunan Perwako tentang sewa barang milik daerah	SKPD	Jumlah perwako yang disusun	1 Perwako	70,000,000	APBD		1 Perwako	70,000,000
	Verifikasi dan validasi data pemanfaatan aset	SKPD	Jumlah data aset Pemko yang dimanfaatkan	jenis data	75,000,000	APBD		jenis data	75,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD	SKPD	Jumlah aset yang dipindahtangankan, diawasi dan dikendalikan	jenis	376,595,000	APBD		jenis	491,360,900
	Reevaluasi Barang Milik Daerah	SKPD	akurasi nilai BMD saat ini	Nilai BMD saat ini	500,000,000	APBD			

**Tabel 5.23**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				<b>17,681,253,595</b>				<b>17,872,661,686</b>
	<b>Fungsi Penunjang</b>				<b>6,036,564,000</b>				<b>5,078,550,400</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>BKPSD M</b>	<b>100%</b>	<b>530,614,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>583,675,400</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat	BKPSD M	250 lembar materai, 5 buku cek dan pengiriman surat	2,000,000	APBD		250 lembar materai, 5 buku cek dan pengiriman surat	2,200,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	BKPSD M	1 rekening telepon	18,000,000	APBD		2 rekening telepon, 3 rekening listrik	19,800,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas/ Operasional yang Layak Pakai	BKPSD M	4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua	119,800,000	APBD		4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua	131,780,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Kebersihan Kantor	BKPSD M	20 Item	4,000,000	APBD		1 paket	4,400,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	BKPSD M	18 Item	5,000,000	APBD		18 Item	5,500,000
	Kegiatan Penyediaan Alat-alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat-alat tulis kantor	BKPSD M	53 item	14,114,000	APBD		49 item	15,525,400
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSD M	8 item	13,000,000	APBD		8 item	14,300,000
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKPSD M	12 item	3,150,000	APBD		12 item	3,465,000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	BKPSD M	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	16,500,000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan perjalanan tugas kedinasan	BKPSD M	12 bulan	250,000,000	APBD		12 bulan	275,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Non PNS	BKPSD M	1 tahun, 3 orang	83,000,000	APBD		3 orang	91,300,000
	Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	BKPSD M	1 tahun kegiatan pengadaan	3,550,000	APBD		1 tahun kegiatan pengadaan	3,905,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>	<b>5,499,700,000</b>	<b>APBD</b>			<b>4,455,000,000</b>
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	1 unit	0	APBD		1 unit kendaraan roda empat dan dua	350,000,000
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	BKPSD M	8 Unit Filling Cabinet, 1 Set Vertical Blind	35,000,000	APBD		50 item	500,000,000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	BKPSD M	5 Mouse, 5 Keyboard, 2 Unit Laptop	7,200,000	APBD		50 item	500,000,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BKPSDM	1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	50,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	1 paket	7,500,000	APBD		1 paket	5,000,000
	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Terpenuhi Dokumen Pengadaan Tanah	BKPSDM	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	150,000,000
	Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Terpenuhi Dokumen Pengadaan Tanah	BKPSDM	1 kegiatan	0	APBD		1 paket	150,000,000
	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhi Dokumen DED Bangunan Gedung Kantor	BKPSDM	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 paket	250,000,000
	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	BKPSDM	1 kegiatan	5,250,000,000	APBD		1 kegiatan	2,500,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Atribut Pegawai</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>33,000,000</b>
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas	BKPSDM	45 stel	0	APBD		65 stel	33,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terpenuhi Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>	<b>6,250,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,875,000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LKIP, LPPD, LKPJ	BKPSDM	3 Dokumen	1,750,000	APBD		3 Dokumen	1,925,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan 2019	BKPSDM	2 Laporan	1,500,000	APBD		7 Laporan	1,650,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya DPA 2019, DPA Pergeseran 2019, RKA 2020, DPPA 2019, Renja 2020, Renja Perubahan 2019	BKPSDM	6 Dokumen	3,000,000	APBD		5 Dokumen	3,300,000
	<b>Urusan Kepegawaian</b>				<b>11,644,689,595</b>				<b>12,794,111,286</b>
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>ASN Pemko Bukittinggi yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>80%</b>	<b>3,891,000,000</b>	<b>APBD</b>			<b>4,280,100,000</b>
	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	Terpenuhi Persyaratan untuk Pengangkatan sebagai PNS	BKPSDM	316 orang	3,476,000,000	APBD		350 orang	3,823,600,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi	BKPSDM	150 orang	415,000,000	APBD		100 orang	456,500,000
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Terpenuhi Syarat untuk Kepangkatan PNS	BKPSDM	50 orang	0			50 orang	0
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>80%</b>	<b>2,049,462,185</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>2,254,408,404</b>
	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Terpenuhi Formasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	15 orang	67,477,515	APBD		15 orang	74,225,267
	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	Terlaksananya Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	BKPSDM	5 paket rekomendasi	99,000,000	APBD		5 paket rekomendasi	108,900,000
	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	3 dokumen	245,354,700	APBD		3 dokumen	269,890,170
	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Pemetaan Potensi ASN	BKPSDM	227 ASN	216,848,400	APBD		175 orang	238,533,240
	Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Penempatan ASN pada Jabatan sesuai dengan Potensi Bakat, Minat dan Kompetensinya	BKPSDM	2 laporan	0	APBD		2 laporan	0
	Penyusunan Formasi PNS	Terpenuhi Formasi PNS Kota Bukittinggi	BKPSDM	1 dokumen	56,899,500	APBD		1 dokumen	62,589,450
	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Terlaksananya Pengadaan CPNS	BKPSDM	1 kegiatan	600,000,000	APBD		1 kegiatan	660,000,000
	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Sumpah Janji PNS	BKPSDM	50 orang	6,442,370	APBD		50 orang	7,086,607
	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Terlaksananya Fasilitasi PNS Pindah/Masuk	BKPSDM	100 orang	6,319,040	APBD		100 orang	6,950,944

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Terlaksananya Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	BKPSDM	12 laporan	8,501,000	APBD		12 laporan	9,351,100
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	BKPSDM	12 rekomendasi	61,716,000	APBD		10 paket rekomendasi	67,887,600
	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Terlaksananya Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Surat Keputusan Izin Melaksanakan Proses Perceraian dan atau Islah	BKPSDM	1 laporan	61,741,600	APBD		1 laporan	67,915,760
	KORPRI				400,000,000				440,000,000
	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Terlaksananya Penyusunan SKP dan SKP On-line Terintegrasi	BKPSDM	2700 Dokumen, 1 Aplikasi	219,162,060	APBD		25 SKPD	241,078,266
	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>ASN yang memiliki Standar Kompetensi sesuai Jabatan</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>530 orang</b>	<b>1,991,695,010</b>	<b>APBD</b>		<b>660 orang</b>	<b>2,276,197,342</b>
	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	BKPSDM	2 orang, 6 orang	351,320,500	APBD		10 orang	386,452,550
	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	Terpenuhinya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai Kebutuhan	BKPSDM	300 orang	787,046,200	APBD		175 orang	865,750,820
	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	BKPSDM	30 orang	820,737,600	APBD		30 orang	984,885,120
	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Terpenuhinya Formasi untuk Dinas Perhubungan	BKPSDM	4 orang	32,590,710	APBD		10 orang	39,108,852
	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>924,680,800</b>	<b>APBD</b>		<b>5 kegiatan</b>	<b>1,017,148,880</b>
	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	Terlaksananya Proses Administrasi Kenaikan Pangkat, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	BKPSDM	600 SK, 5 SK dan 20 SK	167,680,320	APBD		600 SK	184,448,352
	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	Tersedianya Kartu Identitas Pegawai	BKPSDM	300 dokumen	21,441,000	APBD		300 dokumen	23,585,100
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Up date dan Up grade Modul Aplikasi	BKPSDM	1 laporan	32,988,900	APBD		12 bulan	36,287,790
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat	BKPSDM	12 bulan	106,071,450	APBD		12 bulan	116,678,595
	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS	BKPSDM	130 orang	96,499,130	APBD		100 orang	106,149,043
	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Arsip Kepegawaian yang Terkelola	BKPSDM	3000 arsip	0	APBD		1 laporan	0
	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	Terintegrasinya Absensi ASN Pemko Bukittinggi	BKPSDM	12 bulan	500,000,000			12 bulan	550,000,000
	Pengelolaan SKP On-line Terintegrasi	Terintegrasinya SKP ASN Pemko Bukittinggi	BKPSDM	12 bulan	0			12 bulan	0
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>85%</b>	<b>2,787,851,600</b>	<b>APBD</b>		<b>2000 orang</b>	<b>2,966,256,660</b>
	Penilaian Pegawai/ASN Berprestasi	Terlaksananya Proses Penilaian ASN Berprestasi	BKPSDM	20 orang	440,949,900	APBD		20 orang	485,044,890
	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Terlaksananya Pengurusan SLKS 10, 20 dan 30 Tahun	BKPSDM	300 piagam	42,493,500	APBD		300 piagam	46,742,850
	Pembekalan kewirausahaan bagi ASN	Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan	BKPSDM	35 orang	399,991,000	APBD		35 orang	439,990,100
	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan	BKPSDM	1000 orang	1,004,891,000	APBD		1000 orang	1,005,000,000
	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Terlaksananya Pembekalan Purna Tugas PNS	BKPSDM	70 orang	849,526,200	APBD		80 orang	934,478,820
	Penilaian Kinerja ASN Terintegrasi	Laporan Kinerja ASN Terintegrasi	BKPSDM	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemulangan Jenazah	Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Jenazah	BKPSDM	1 kegiatan	50,000,000	APBD		1 kegiatan	55,000,000

**Tabel 5.24**  
**Program dan Kegiatan**  
**Inspektorat**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>INSPEKTORAT</b>				<b>1,760,229,940</b>				<b>2,777,183,665</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Inspekt orat</b>	<b>100%</b>	<b>568,399,890</b>				<b>871,383,075</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Inspekto rat	4 item	1,320,000	APBD		4 item	1,597,200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar (bulan/rekening)	Inspekto rat	12 bulan / rekening	19,800,000	APBD		12 bulan / rekening	30,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Inspekto rat	4 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda dua	160,000,000	APBD		4 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda dua	204,495,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Inspekto rat	1 paket, 6 item	124,997,100	APBD		1 paket, 6 item	155,750,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Inspekto rat	7 item	7,700,000	APBD		7 item	18,940,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	Inspekto rat	59 item	18,715,300	APBD		59 item	32,566,675
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	Inspekto rat	6 item, 24.000 lembar, 26 iilid	8,498,150	APBD		6 item, 24.000 lembar, 26 iilid	14,728,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang terbeli	Inspekto rat	13 item	2,249,500	APBD		13 item	3,551,700
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan & minum lembur, rapat, tamu yang tersedia	Inspekto rat	12 bulan	18,605,000	APBD		12 bulan	20,465,500
	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Prosentase rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	Inspekto rat	75%	190,000,000	APBD		75%	359,370,000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan	Inspekto rat	5 paket	4,500,000	APBD		5 orang	6,500,000
	Penilaian angka kredit	Jumlah DUPAK yang dinilai	Inspekto rat	44 Dupak	12,014,840	APBD		44 Dupak	23,419,000
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja</b>	<b>Inspekt orat</b>	<b>100%</b>	<b>167,800,000</b>				<b>200,000,000</b>
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis Perlengkapan kantor yang terbeli	Inspekto rat	1 jenis	27,500,000	APBD		1 paket	30,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan yang terbeli	Inspekto rat	6 Jenis	65,300,000	APBD		8 Jenis	100,000,000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur yang terbeli	Inspekto rat	2 unit	30,000,000	APBD		2 unit	30,000,000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak	Inspekto rat	1 paket	30,000,000	APBD		1 paket	40,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diperbaiki	Inspekt rat	1 paket	15,000,000	APBD		1 paket	16,500,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	<b>Inspekt orat</b>	<b>100%</b>	-				-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	Inspekt rat	45 orang	-	APBD		50 orang	-
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Inspekt orat</b>	<b>100%</b>	<b>3,617,000</b>				<b>5,000,000</b>
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun	Inspekt rat	2 dokumen	396,000	APBD		2 dokumen	750,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah rencana kerja dan keuangan SKPD tersusun	Inspekt rat	7 dokumen	2,430,000	APBD		7 dokumen	2,450,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD tersusun	Inspekt rat	3 dokumen	791,000	APBD		3 dokumen	1,800,000
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkanya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Inspekt orat</b>	<b>100%</b>	<b>442,943,300</b>				<b>1,535,800,590</b>
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	Inspekt rat	130	39,835,800	APBD	PP No.12 Tahun2 017 tentang Pedom an Pembinaan dan Pengawasan Penyele nggaraan Pemerintah	127	788,582,000
	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan hasil Reviu LKPD	Inspekt rat	1 LHR	8,316,500	APBD	Permen dagri No.4 Tahun 2008 tentang Pedom an atas Pelaksa naan Reviu LKPD	1 LKPD Tahunan, 1 LKPD triwulan	62,791,200
	Monitoring Kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil Monitoring	Inspekt rat	8 kegiatan	349,850	APBD	PP No.12 Tahun2 017 tentang Pedom an Pembinaan dan Pengawasan Penyele nggaraan Pemerintah	8 kegiatan	11,303,800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan	Inspektorat	12 bulan	10,000,000	APBD	PP No 12 th 2017 ttg Pedom an Pembinaan dan Pengawasan Penyele nggaraan Pemerintah Daerah dan Permen dagri 76 2016 ttg Kebijakan an Pengaw asan di Lingkun gan Kement rian Dalam Negeri dan Penvelo	12 bulan	135,000,000
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	Inspektorat	5 Dokumen	48,177,500	APBD	PP No. 11 / 2017	5 dokumen	56,401,000
	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi LKIP	Inspektorat	28	29,248,900	APBD	Peraturan Menteri PAN RB No.20 /2013 ttg Perubahan Lampiran Permen PAN RB No.25/2 012 ttg Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah	28	32,173,790
	Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan hasil reviu	Inspektorat	1	5,000,000	APBD	Keppres No. 20 tahun 2015		6,500,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Reviu PPJ	Jumlah laporan hasil reviu	Inspektokrat	1	5,000,000	APBD	Keppres No. 20 tahun 2015		6,500,000
	Reviu LKIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP	Inspektokrat	1 LHR	25,139,750	APBD	Permenpan No.54/2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah	1 LKIP	32,500,000
	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RKA)	Jumlah Laporan hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	Inspektokrat	2 LHR	5,800,000	APBD	SE Mendagri No.700/025/A.4/J tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	8 LHR	11,303,800
	Pembinaan dan evaluasi SPIP	Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP	Inspektokrat	11	34,335,000	APBD	PP 60/2008 ttg Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	11	72,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK	Inspektoral	10 laporan	33,940,000	APBD	Peraturan KPK No.06 Th.2015 ttg Perubahan atas Peraturan KPK No.02 th 2014 ttg Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Perwako No.18 th 2016 ttg Pedoman Pengendalian	10 laporan	80,000,000
	Pelaporan LHKPN & LHKASN	Jumlah Laporan LHKPN dan LHKASN	Inspektoral	1136 laporan	30,000,000	APBD	SE Menpan RB No.5/2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan sanksi atas Keterlambatan LHKPN di Lingkungan K/M Pemda dan SE Menpan RB No.1 ttg Kewajiban Penyampaian LHKASN di	1136 laporan	68,745,000
	Evaluasi PPRG	Jumlah laporan hasil evaluasi	Inspektoral	1	9,300,000		Permen PP dan PA No. 4 Tahun 2014		11,000,000
	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil evaluasi	Inspektoral	1	9,500,000		Permenpan No. 1 Tahun 2005		11,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen penilaian yg terpenuhi	Inspektorat	80%	34,000,000	APBD		7 SKPD	60,000,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)	Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP	Inspektorat	7 SKPD	90,000,000	APBD		7 SKPD	90,000,000
	Koordinasi TP4D	Jumlah kegiatan TP4D		4 Keg	25,000,000	APBD	Instruksi Jaksa Agung No. Ins-001/A/JA/10/2015		
	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>100%</b>	<b>577,469,750</b>				<b>869,924,000</b>
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	Inspektorat	30 orang	300,500,000	APBD		40 orang	330,550,000
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	12 orang	150,000,000	APBD		12 orang	165,000,000
	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Inspektorat	50 orang	17,994,000	APBD		50 orang	40,000,000
	Peningkatan kapasitas dan profesional APIP	Jumlah APIP yang ikut dalam peningkatan kapabilitas	Inspektorat	50 orang	55,000,000	APBD		50 orang	60,500,000
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	Inspektorat	40 kasus	13,975,750	APBD		40 kasus	215,000,000
	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Jumlah SKPD yang dijadikan pilot project	Inspektorat	2 SKPD	40,000,000	APBD	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Pemb. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas	2 SKPD	58,874,000

**Tabel 5.25**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				<b>7,240,488,108</b>				<b>30,377,185,000</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	buku cek, materai 3000, materai 6000, materai teraan	10 buah, 200 buah, 200 buah, 250 buah	2,200,000	APBD		11 buah, 250 buah, 250 buah, 300 buah	2,420,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Rekening telepon, rekening listrik, IndiHome	3 rekening/ 12 bulan	35,000,000	APBD		3 rekening/ 12 bulan	44,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jumlah kendaraan dinas roda 4; Jumlah kendaraan dinas roda 2	3 unit, 10 unit/ 12 bulan	85,790,000	APBD		3 unit, 10 unit/ 12 bulan	97,500,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih ( )	35 item	25,000,000	APBD		35 item	25,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Peralatan dan perlengkapan kantor ( )	53 item	20,000,000	APBD		59 item	20,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	jumlah alat tulis kantor ( )	55 item	27,596,865	APBD		60 item	43,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	barang cetak dan penggandaan ( )	8 item	27,000,000	APBD		8 item	27,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	alat-alat listrik ( )	7 item	7,000,000	APBD		8 item	7,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	minum, nasi, snack	112 porsi, 189 porsi, 1.328 porsi	46,400,000	APBD		115 porsi, 195 porsi, 1.340 porsi	65,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	165,000,000	APBD		12 bulan	320,000,000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	pegawai non pns ( )	6 orang/ 12 bulan	162,147,000	APBD		6 orang/ 12 bulan	680,000,000
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Dokumentasi dan spanduk ( )	12 bulan	17,000,000	APBD		12 bulan	30,000,000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	jumlah paket pekerjaan ( )	1 tahun	30,000,000	APBD		1 tahun	35,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	Koto Selayan ( )	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	60,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	62,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh	campago ipuh ( )	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	95,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	97,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting	Manggis Ganting ( )	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	71,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	78,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air	Pulai Anak Air ( )	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	72,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	74,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun pintu kabun	Puhun Pintu Kabun ()	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	71,550,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	80,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun tembok	Puhun Tembok ()	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	103,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	107,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah	Kubu Gulai Bancah ()	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	64,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	66,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek	Campago Guguk Bulek ()	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	70,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	72,000,000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh	Garegeh ()	kebutuhan operasional kelurahan	1 kelurahan, 12 bulan	72,000,000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	74,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	perlengkapan dan peralatan terbeli	.... Item	56,103,088	APBD		.... Item	299,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	perlengkapan dan peralatan terbeli	.... Item	330,000,000	APBD		.... Item	360,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	rumah dinas yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	5,000,000	APBD		9 kelurahan	36,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	gedung kantor yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	20,000,000	APBD		1 unit/ 12 bulan	150,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Kendaraan Dinas Roda 2 terbeli	12 buah	0	APBD			
	Pembuatan tempat parkir kantor camat mks	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	tempat parkir yang tersedia	1 ls	0	APBD			
	Pembuatan tanman kantor kecamatan MKS	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	taman kantor terbuat	1 ls	0	APBD			
	Pembangunan ruang pelayanan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	ruangan pelayanan terbangun	1 ls	0	APBD			
	Rehab sedang/ berat gedung kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	pembuatan gudang, rehab pintu depan, pintu masuk aula, penambahan WC aula	1 ls	0	APBD			
	Rehab sedang/ berat rumah dinas	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	penambahan garase, penambahan kamar mandi	1 ls	0	APBD			
	Pembangunan gedung kantor camat mandiangin koto selayan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jasa perencanaan pembangunan gedung kanor/ DED kantor camat MKS (untuk pembuatan gedung baru(	1 dokumen	350,000,000	APBD		Pembangunan gedung kantor baru	
	Pengadaan tanah untuk kantor	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	tanah untuk kantor lurah manggis ganting	± 500 M2	0	APBD			
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	pakaian dinas pegawai terbeli	121 stel	0	APBD		125 orang	65,600,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	3,550,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Dokumen Renja, Renja-P, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen	0	APBD		5 dokumen	6,350,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Dokumen LKIP, LPPD, LKPJ	3 dokumen	0	APBD		3 dokumen	16,500,000
	Penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2021-2016 ( )			APBD		1 dokumen	12,500,000
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>		<b>Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT</b>	<b>90%</b>		<b>APBD</b>		<b>90%</b>	
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan tingkat kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM	3 kegiatan/ 12 bulan	79,131,770	APBD		3 kegiatan/ 12 bulan	104,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	72,984,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	73,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh	Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	155,025,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	156,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	97,726,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	98,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air	kelurahan pulai anak air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	119,119,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	120,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun pintu kabun	Kelurahan Pahun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	111,165,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	119,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun tembok	Kelurahan Pahun Tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	135,000,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	146,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	130,465,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	131,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	200,144,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	213,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh	kelurahan garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	73,226,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	74,000,000
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>		<b>persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>12%</b>		<b>APBD</b>		<b>12%</b>	
	Penunjang operasinal terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jenis Pelayanan Terpadu	6 jenis/ 12 bulan	24,000,000	APBD		6 jenis/ 12 bulan	380,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan	Koto Selayan ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	13,121,900	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah	Campago Ipuah ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16,468,600	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting	Manggis Ganting ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16,487,960	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulai Anak Air	Pulai Anak Air ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	14,655,200	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	14,890,000	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	8,000,000	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Kubu Gulai Banchah ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16,214,340	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	14,610,000	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh	Garegeh ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	12,257,750	APBD		4 kali	19,000,000
	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	5 pertemuan	28,480,300	APBD		5 pertemuan	39,964,000
	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan provinsi	2 jenis	51,396,840	APBD		2 jenis	65,000,000
	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Partisipan Pelatihan	45 orang	27,599,900	APBD		45 orang	85,000,000
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>								
	Musrenbang Kecamatan MKS	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	usulan dan partisipasi masyarakat	9 kelurahan	17,226,750	APBD		9 kelurahan	18,950,000
	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Koto Selayan ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,245,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Campago Ipuh ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,570,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Manggis Ganting ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,279,975	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Pulai Anak Air	Pulai Anak Air ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,270,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	15,000,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	11,139,500	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,410,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek	Campago Guguak Bulek ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	11,110,000	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Garegeh ()	usulan rencana pembangunan	11 usulan/kelurahan	9,209,960	APBD		11 usulan/kelurahan	22,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan MKS	mandiangin koto selayan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	9 kelurahan/ 30 dokumen	36,322,000	APBD		9 kelurahan/ 30 dokumen	36,950,000
	Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	Koto Selayan ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	77,550,000
	Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	Campago Ipuh ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76,350,000
	Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	Manggis Ganting ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75,550,000
	Manunggal Sakato Kel. Pulai Anak air	Pulai Anak Air ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75,750,000
	Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	93,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75,550,000
	Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	Puhun Tembok ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76,850,000
	Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	71,550,000
	Manunggal Sakato Kel. Campago Guguak Bulek	Campago Guguak Bulek ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76,150,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	Garegeh ()	Jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76,950,000
	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	kelurahan yang ikut lomba, pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota	2 kegiatan	39,834,860	APBD		2 kegiatan	80,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Koto selayan	Koto Selayan ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago lpuh	Campago lpuh ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Manggis ganting	Manggis Ganting ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Pulau anak air	Pulai Anak Air ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun pintu kabun	Puhun Pintu Kabun ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun tembok	Puhun Tembok ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Kubu gulai bancah	Kubu Gulai Bancah ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago guguk bulek	Campago Guguk Bulek ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Garegeh	Garegeh ()	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	25,000,000	APBD		2 tim, 12 bulan	35,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat tingkat kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan	2 tim	57,599,800	APBD		2 tim	300,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan mandiingin koto selayan	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)	5 keg		- APBD		5 keg	55,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan koto selayan	Koto Selayan ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago ipuh	campago ipuh ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan manggis ganting	Manggis Ganting ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pulai anak air	Pulai Anak Air ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun	Puhun Pintu Kabun ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun tembok	Puhun Tembok ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan kubu gulai bancah	Kubu Gulai Bancah ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago guguk bulek	Campago Guguk Bulek ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan garegeh	Garegeh ()	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan)	2 keg		- APBD		2 keg	45,000,000
	Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanan Retribusi Sampah	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	Monitoring kelapangan	9 kelurahan/ 12 bulan	13,756,000	APBD		9 kelurahan/ 12 bulan	16,500,000
	Training Center (TC) dan pengiriman khafilah untuk mengikuti MTQ kota	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	-	-	0	APBD		80 orang	115,000,000
	MTQ Kecamatan	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	khafilah terbaik	15 cabang	159,169,000	APBD		-	-
	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	10 Acara	17,999,900	APBD		10 Acara	35,000,000
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>		<b>Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>85%</b>		<b>APBD</b>		<b>85%</b>	
	Sosialisasi Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Budaya	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ()	100 peserta	75,000,000	APBD		100 peserta	85,000,000
	Lomba Masakan Tradisional Minangkabau	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	Jumlah peserta lomba ()	27 peserta	27,000,000	APBD		27 peserta	33,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan kesenian dan karawitan tradisional Minangkabau	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jumlah peserta pelatihan ()	50 peserta	30,000,000	APBD		-	-
	Gelar Kreatifitas Kesenian Tradisional Minangkabau	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jumlah Peserta yang mengikuti pagelaran seni ()	-	0	APBD		90 peserta	56,730,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan koto selayan	Koto Selayan ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional	12 bulan	103,400,000	APBD		12 bulan	110,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago ipuh	campago ipuh ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional	12 bulan	171,500,000	APBD		12 bulan	180,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan manggis ganting	Manggis Ganting ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional	12 bulan	133,400,000	APBD		12 bulan	143,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pulai anak air	Pulai Anak Air ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional	12 bulan	116,900,000	APBD		12 bulan	123,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun pintu kabun	Puhun Pintu Kabun ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional	12 bulan	147,850,000	APBD		12 bulan	173,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun tembok	Puhun Tembok ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma	12 bulan	137,000,000	APBD		12 bulan	151,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan kubu gulai bancah	Kubu Gulai Bancah ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma	12 bulan	155,200,000	APBD		12 bulan	161,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago guguk bulek	Campago Guguk Bulek ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma	12 bulan	138,000,000	APBD		12 bulan	143,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan garegeh	Garegeh ()	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma	12 bulan	103,000,000	APBD		12 bulan	110,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	jenis kegiatan 10 program PKK kecamatan	5 kegiatan/ 12 bulan	190,000,000	APBD		5 kegiatan/ 12 bulan	225,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan, pembekalan siskamling, monitoring trantib	3 kegiatan/ 12 bulan	49,692,850	APBD		3 kegiatan/ 12 bulan	176,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan koto selayan	Kelurahan Koto Selayan	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan campago ipuh	Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan manggis ganting	Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan pulai anak air	Kelurahan Pulai Anak Air	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan puhun pintu kabun	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan puhun tembok	Kelurahan Puhun Tembok	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan kubu gulai bancah	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan campago guguk bulek	Kelurahan Campago Guguk Bulek	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan garegeh	kelurahan garegeh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	17,000,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se-kecamatan dan penyusunan profil kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	data profil kependudukan, gambaran demografis, gambaran geografis, perkembangan wilayah	1 dokumen	15,907,000	APBD		1 dokumen	33,000,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan koto selayan	Koto Selayan ()	data profil kependudukan	50 form isian/KK	5,576,000	APBD		25 form isian/KK	4,065,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan campago ipuh	Campago Ipuh ()	data profil kependudukan	167 form isian/KK	11,350,000	APBD		91 form isian/KK	8,200,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan manggis ganting	Manggis Ganting ()	data profil kependudukan	75 form isian/ KK	7,450,000	APBD		50 form isian/ KK	6,500,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan pulai anak air	Pulai Anak Air ()	data profil kependudukan	97 form isian/KK	8,640,000	APBD		65 form isian/KK	6,930,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan puhun pintu kabun	Puhun Pintu Kabun ()	data profil kependudukan	98 form isian/ KK	8,650,000	APBD		75 form isian/ KK	7,450,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan puhun tembok	Puhun Tembok ()	data profil kependudukan	91 form isian/ KK	8,200,000	APBD		74 form isian/ KK	7,300,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan kubu gulai bancah	Kubu Gulai Bancah ()	data profil kependudukan	75 form isian/ KK	7,450,000	APBD		50 form isian/ KK	6,500,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan campago guguk bulek	Campago Guguk Bulek ()	data profil kependudukan	102 form isian/ KK	9,300,000	APBD		75 form isian/ KK	7,450,000
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan garegeh	Garegeh ()	data profil kependudukan	75 form isian/ KK	7,450,000	APBD		50 form isian/ KK	5,576,000
	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	MANDIANGIN KOTO SELAYAN ()	laporan monitoring	9 kelurahan/ 12 bulan	80,000,000	APBD		9 kelurahan/ 12 bulan	83,000,000
	Koordinasi kecamatan sehat	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	fasilitasi kecamatan sehat, fasilitasi uks, dan pembinaan pokja kelurahan sehat ()	12 bulan	148,000,000	APBD		12 bulan	180,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang kegiatan lembaga-lembaga adat	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kanduang dan LKAAM, operasional KAN Mandiangin, Operasional KAN Koto Selayan	2 kegiatan/ 12 bulan	39,500,000	APBD		2 kegiatan/ 12 bulan	190,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan koto selayan	Kelurahan Koto Selayan	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan campago ipuh	Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan manggis ganting	Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan pulai anak air	Kelurahan Pulai Anak Air	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan puhun piintu kabun	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan puhun tembok	Kelurahan Puhun Tembok	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan kubu gulai bancah	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan campago guguk bulek	kelurahan campago guguk bulek	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan garegeh	kelurahan garegeh	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	16,500,000	APBD		12 bulan	18,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	peserta lomba didikan subuh, bantuan operasional BKMT Kecamatan	60 orang/kelurahan, 12 bulan	64,724,000	APBD		60 orang/kelurahan	62,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	Koto Selayan ()	pembinaan generasi muda	120 orang/ 3 kali	15,750,000	APBD		120 orang/ 3 kali	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	Campago Ipuh ()	Jenis Kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	Manggis Ganting ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulai Anak Air	Pulai Anak Air ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		3 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	Garegeh ()	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15,750,000	APBD		2 jenis	16,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Koto Selayan	Koto Selayan ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Campago Ipuh	campago ipuh ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Manggis Ganting	Manggis Ganting ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Pulai Anak Air	Pulai Anak Air ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Fasilitas Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Campago Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Garegeh	Garegeh ()	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	15,000,000
	Penunjang Pelaksanaan Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan]	1 ls	0	APBD		1 ls	30,000,000
	Pendataan/ updating UMKM	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	data UMKM	1 dokumen	60,000,000	APBD		1 dokumen	65,000,000

**Tabel 5.26**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Guguk Panjang**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>				<b>16,998,189,899</b>				<b>6,018,208,000</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1,146,985,884</b>			<b>100%</b>	<b>1,332,300,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli dan Jumlah Buku Cek Terbeli	Kec	300 buah dan 3 buku	1,500,000	APBD		300 buah dan 3 buku	1,800,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening telepon dan listrik terbayar	Kec	12 bulan rekening	30,000,000	APBD		12 bulan rekening	32,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara dan Jumlah Kendaraan Non Dinas Terpelihara	Kec	8 unit kend dinas dan 8 unit kend non dinas	90,000,000	APBD		8 unit kend dinas dan 8 unit kend non dinas	97,500,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat kebersihan terbeli dan Jumlah retribusi sampah terbayar	Kec	25 jenis dan 12 bulan	68,460,904	APBD		25 jenis dan 12 bulan	67,500,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec	12 bulan	13,000,000	APBD		12 bulan	15,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor terbeli	Kec	51 jenis	19,000,000	APBD		51 jenis	22,500,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Fotocopy dan Jenis Barang Cetak	Kec	12 bulan dan 8 jenis	21,000,000	APBD		12 bulan dan 8 jenis	22,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli	Kec	14 jenis	4,000,000	APBD		14 jenis	4,500,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya	Kec	100%	30,000,000	APBD		100%	37,000,000
	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang dihadiri	Kec	100%	130,000,000	APBD		100%	230,000,000
	Penyediaan jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya luran BPJS dan Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	Kec	12 bulan dan 2 orang	27,024,500	APBD		12 bulan dan 2 orang	29,500,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pihak ketiga untuk pengamanan terbayar	Kec	12 bulan	27,024,500	APBD		12 bulan	33,000,000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang terbayar	Kec	8 OBK	40,000,000	APBD		8 OBK	44,000,000
	Penyediaan Jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	Kec	100%	35,000,000	APBD		100%	16,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	TD	12 bulan	86,733,000	APBD		12 bulan	90,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	BAP	12 bulan	95,000,000	APBD		12 bulan	105,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	BCKR	12 bulan	84,242,980	APBD		12 bulan	95,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	BPA	12 bulan	78,000,000	APBD		12 bulan	90,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	PK	12 bulan	82,000,000	APBD		12 bulan	95,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	KK	12 bulan	95,000,000	APBD		12 bulan	105,000,000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkan Tengah Sawah	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	ATTS	12 bulan	90,000,000	APBD		12 bulan	100,000,000
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan</b>		<b>100%</b>	<b>11,319,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>180,370,000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Kec	4 jenis	54,000,000	APBD		10 jenis	90,000,000
	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Kec	5 jenis	70,000,000	APBD		10 jenis	140,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan pengecatan	Kec	1 gedung	50,000,000	APBD		1 gedung	30,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Tarok Dipo	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	TD	5 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	40,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan BAP	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	BAP	5 jenis	30,000,000	APBD		5 jenis	40,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	BCKR	5 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	45,000,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	BPA	3 jenis	30,000,000	APBD		5 jenis	40,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Pakan Kurai	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	PK	5 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	40,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Kayu Kubu	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	KK	5 jenis	30,000,000	APBD		5 jenis	40,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	ATTS	3 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	45,000,000
	Rehabilitasi Gedung Kantor Camat Guguk Panjang	Terlaksananya rehab/perbaikan aula pertemuan dan ruang kerja Camat dan Sekretaris	Kec	1 (satu) aula, 2 (dua) ruang kerja	150,000,000	APBD	Musrenbang	0	0
	Rehabilitasi Halaman dan Taman Kantor	Terpeliharanya halaman dan Taman Kantor camat Guguk Panjang	Kec	Halaman dan taman kantor	200,000,000	APBD		0	0
	Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai	Kec	1 Dokumen	265,000,000	APBD		0	0
	Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu	Kec	1 Dokumen	100,000,000	APBD		0	0
	Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya ruang kerja Aparatur dan Pelayanan Masyarakat Pakan Kurai	Kec	1 (satu) unit Gedung Kantor Lurah Pakan Kurai	5,000,000,000	APBD		0	0
	Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya ruang kerja Aparatur dan Pelayanan Masyarakat Kayu Kubu	Kec	1 (satu) unit Gedung Kantor Lurah Kayu Kubu	5,000,000,000	APBD		0	0
	Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks Balai Adat Pakan Kurai )	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan Balai Adat Pakan Kurai	Kec	Terpelihara 1 (satu) balai adat Pakan Kurai	200,000,000	APBD		0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</b>		<b>IKM bernilai B</b>	<b>274,000,000</b>			<b>IKM bernilai B</b>	<b>477,000,000</b>
	Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat, dan aplikasi pelayanan berbasis IT	Kec	100%	225,000,000	APBD		100%	400,000,000
	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM yang tersusun	Kec	1 laporan	5,000,000	APBD		1 laporan	12,000,000
	Penilaian dan pembinaan Kompetensi Lurah	Lurah yang akan dibina	Kec	2 Lurah	15,000,000	APBD		2 Lurah	30,000,000
	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait		Kec	12 bulan, 3 kali	29,000,000	APBD		12 bulan, 3 kali	35,000,000
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun kelompok masyarakat</b>		<b>40%</b>	<b>1,609,639,525</b>			<b>50%</b>	<b>1,673,500,000</b>
	Fasilitasi kegiatan lembaga-lembaga adat	Jumlah pembinaan, rapat /koordinasi lembaga adat di kecamatan guguk panjang, terfasilitasi	Kec	2 kali	24,500,000	APBD		2 kali	27,500,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan KAMTIBMAS Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec	4 kali	37,000,000	APBD		4 kali	38,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	TD	4 kali	12,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	BAP	4 kali	13,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan BCKR	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	BCKR	4 kali	13,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	BPA	4 kali	12,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	PK	4 kali	11,390,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	KK	4 kali	13,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan ATTS	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	ATTS	4 kali	13,000,000	APBD		4 kali	14,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	TD	30 orang/ kali/ kelurahan	10,000,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	BAP	30 orang/ kali/ kelurahan	11,000,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	BCKR	30 orang/ kali/ kelurahan	9,899,900	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	BPA	30 orang/ kali/ kelurahan	10,053,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	PK	30 orang/ kali/ kelurahan	9,390,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	KK	30 orang/ kali/ kelurahan	11,000,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda, Remaja dan Organisasi Kepemudaan Kelurahan ATTS	Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	ATTS	30 orang/ kali/ kelurahan	10,000,000	APBD		30 orang/ kali/ kelurahan	12,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan dan generasi muda	Kec	5 kegiatan	47,500,000	APBD		5 kegiatan	55,000,000
	Pembinaan/Diklat untuk Pemuda, Remaja Masjid Kec. Guguk Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan/diklat Pemuda dan Remaja mesid	Kec	3 kegiatan	50,000,000	APBD		0	0
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kecamatan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Kec	4 pokja, 1 sekretariat	190,482,000	APBD		4 pokja	200,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	TD	4 pokja	253,500,000	APBD		4 pokja	265,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	BAP	4 pokja	90,000,000	APBD		4 pokja	95,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	BCKR	4 pokja	90,411,125	APBD		4 pokja	100,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	BPA	4 pokja	61,000,000	APBD		4 pokja	70,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	PK	4 pokja	125,000,000	APBD		4 pokja	130,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	KK	4 pokja	115,000,000	APBD		4 pokja	120,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	ATTS	4 pokja	165,000,000	APBD		4 pokja	175,000,000
	Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec. Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	Data 5 Tatanan Kecamatan Sehat	Kec	5 tatanan	12,627,500	APBD		1 laporan	17,000,000
	Lomba Adat Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba Adat dan Budaya yang diadakan	Kec	2 lomba	60,000,000	APBD		2 lomba	65,000,000
	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kec	1 dokumen	50,139,000	APBD		12 laporan	55,000,000
	Updating Profil Kelurahan TD	Buku Profil Kelurahan	TD	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	15,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Updating Profil Kelurahan BAP	Buku Profil Kelurahan	BAP	1 dokumen	7,500,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Update Profil Kelurahan BCKR	Buku Profil Kelurahan	BCKR	1 dokumen	7,500,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Update Profil Kelurahan BPA	Buku Profil Kelurahan	BPA	1 dokumen	7,247,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Update Profil Kelurahan PK	Buku Profil Kelurahan	PK	1 dokumen	7,500,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Update Profil Kelurahan KK	Buku Profil Kelurahan	KK	1 dokumen	7,500,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Update Profil Kelurahan ATTS	Buku Profil Kelurahan	ATTS	1 dokumen	7,500,000	APBD		1 dokumen	7,500,000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	Kec	1 dokumen	19,000,000	APBD		1 dokumen	19,000,000
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun</b>		<b>3%</b>	<b>1,635,084,240</b>			<b>3%</b>	<b>1,220,038,000</b>
	Musrenbang Tk Kecamatan	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kecamatan	Kec	1 dokumen	16,695,000	APBD		1 dokumen	18,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	TD	1 dokumen	17,500,000	APBD		1 dokumen	19,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	BAP	1 dokumen	12,000,000	APBD		1 dokumen	13,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	BCKR	1 dokumen	6,424,870	APBD		1 dokumen	8,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	BPA	1 dokumen	8,239,000	APBD		1 dokumen	10,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	PK	1 dokumen	11,256,000	APBD		1 dokumen	13,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	KK	1 dokumen	12,000,000	APBD		1 dokumen	13,000,000
	Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan	ATTS	1 dokumen	12,899,000	APBD		1 dokumen	14,000,000
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Harian Perkembangan Kegiatan Manunggal Sakato	Kec	30 laporan	23,091,000	APBD		30 laporan	25,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	TD	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	BAP	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	BCKR	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	BPA	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	60,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	PK	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	59,934,170	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	KK	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Proyek Manunggal Sakato	ATTS	1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000	APBD		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	67,000,000
	Penunjang Acara Kecamatan dan keikutsertaan dalam Kegiatan tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kec	4 kegiatan	50,731,000	APBD		4 kegiatan	95,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	TD	2 Tim	40,000,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	BAP	2 Tim	40,000,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan BCKR	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	BCKR	2 Tim	38,000,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	BPA	2 Tim	30,648,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	PK	2 Tim	35,000,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	KK	2 Tim	40,000,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Kelurahan ATTS	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	ATTS	2 Tim	42,281,000	APBD		2 Tim	50,000,000
	Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga Masyarakat Tk Kecamatan	Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina	Kec	3 cabang	150,000,000	APBD		3 cabang	175,000,000
	MTQ Kecamatan	Jumlah Juara MTQ Tk Kec Guguk Panjang	Kec	18 cabang	110,000,000	APBD		0	0
	Rehab Lapangan Futsal Kel. Tarok Dipo	Terlaksananya Hibahbarang Kepada LPM Tarok Dipo	TD	1 paket	20,000,000	APBD		0	0
	Bantuan Pompa air untuk masyarakat Bukit Apit Puhun	Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM Bukit Apit Puhun	BAP	2(dua) unit pompa air 18 KW Merk Grundfous beserta kabel untuk masyarakat lapau Batu Bukit Apit Puhun	60,000,000	APBD		0	0
	Pembuatan sarana lapangan volley ball Metra	Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM Tarok Dipo	TD	Bangku penonton, lampu penerangan, rehab sekretariat	100,000,000	APBD		0	0
	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Pakan Kurai	Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM ATTS Pakan Kurai	PK	Mebeuler Posyandu di Pakan Kurai	50,000,000	APBD		0	0
	Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan ATTS	Terlaksananya Hibah barang kepada LPM ATTS	ATTS	Mebeuler 7 (tujuh) Posyandu	70,000,000	APBD		0	0
	Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan Tarok Dipo	Terlaksananya Hibah barang kepada LPM Tarok Dipo	TD	Mebeuler Posyandu di Tarok Dipo	50,000,000	APBD		0	0
	Penyelesaian Gedung Serba Guna (Dekat Mesjud Banto Laweh)		KK	selesai fisiknya fisik bangunan gedung serba guna	50,000,000	APBD		0	0
	Rehab/Perbaikan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai	Terlaksananya Hibah barang kepada LPM Kayu Kubu	KK	Terpeliharanya 1 (satu) Bangunan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai	75,000,000	APBD		0	0
	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	Kelurahan yang akan dinilai dan dibina	Kec	4 kegiatan, 4 kelurahan	23,385,200	APBD		2 kelurahan	38,000
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT</b>		<b>100%</b>	<b>994,067,500</b>				<b>1,115,000,000</b>
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Kec	4 lembaga	75,645,000	APBD		4 lembaga	95,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	TD	3 lembaga	148,000,000	APBD		3 lembaga	160,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	BAP	3 lembaga	125,000,000	APBD		3 lembaga	145,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BCKR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	BCKR	3 lembaga	135,000,000	APBD		3 lembaga	145,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BPA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	BPA	3 lembaga	71,558,500	APBD		3 lembaga	90,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	PK	3 lembaga	130,000,000	APBD		3 lembaga	140,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	KK	3 lembaga	100,000,000	APBD		3 lembaga	120,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ATTS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	ATTS	3 lembaga	127,864,000	APBD		3 lembaga	135,000,000
	Pengadaan Baju RT/RW dan LPM	Jumlah Baju RT, RW dan LPM yang tersedia	Kec	RT(108), RW(33) dan LPM (21)	81,000,000	APBD		RT(108), RW(33) dan LPM (21)	85,000,000
	<b>Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat</b>		<b>70 pelaku usaha kecil</b>	<b>19,412,750</b>				<b>20,000,000</b>
	Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan	Jumlah kelompok lembaga keuangan mikro pedesaan/ kelurahan yang aktif	Kec	7 laporan	19,412,750	APBD		7 laporan	20,000,000

**Tabel 5.27**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

(1)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>					<b>10,402,219,035</b>			<b>10,521,719,035.00</b>
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>			<b>1,434,269,860.00</b>	<b>APBD</b>			<b>1,455,269,860.00</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000. Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	Kec. ABTB	85 buah, 90 buah, 10 buku	1,594,000.00	APBD		85 buah, 90 buah, 10 buku	2,594,000.00
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet	Kec. ABTB	4 rekening	18,500,000.00	APBD		4 rekening	19,500,000.00
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. ABTB	12 bulan	79,000,000.00	APBD		12 bulan	80,000,000.00
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli	Kec. ABTB	12 item	3,000,000.00	APBD		12 item	4,000,000.00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. ABTB	12 bulan	11,000,000.00	APBD		12 bulan	12,000,000.00
	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang terbeli	Kec. ABTB	21 item	11,000,000.00	APBD		21 item	12,000,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item barang cetakan yang dicetak	Kec. ABTB	5 item	14,000,000.00	APBD		5 item	15,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang terbeli	Kec. ABTB	4 item	3,500,000.00	APBD		4 item	4,500,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	presentase terlaksananya rapat	Kec. ABTB	90%	37,000,000.00	APBD		90%	38,000,000.00
	# Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukittinggi	presentase rapat/koordinasi yang dihadiri	Kec. ABTB	90%	126,000,000.00	APBD		90%	127,000,000.00
	# Penyediaan jasa Pegawai non PNS	tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS	Kec. ABTB	20 orang, 12 bulan	592,000,000.00	APBD		20 orang, 12 bulan	593,000,000.00
	# Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	persentase kegiatan yang terpublikasi	Kec. ABTB	12 bulan	4,000,000.00	APBD		12 bulan	5,000,000.00
	# Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kec. ABTB	90%	4,000,000.00	APBD		90%	5,000,000.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Parit Antang	3 program	70,535,990.00	APBD		3 program	71,535,990.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Belakang Balok	3 program	98,000,000.00	APBD		3 program	99,000,000.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Pakan Labuah	3 program	59,471,000.00	APBD		3 program	60,471,000.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Birugo	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Birugo	3 program	64,278,140.00	APBD		3 program	65,278,140.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	3 program	63,030,000.00	APBD		3 program	64,030,000.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Sapiran	3 program	62,278,340.00	APBD		3 program	63,278,340.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	3 program	47,804,250.00	APBD		3 program	48,804,250.00
	# Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Aur Kuning	3 program	64,278,140.00	APBD		3 program	65,278,140.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>5,429,579,000.00</b>	<b>APBD</b>			<b>5,437,579,000.00</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli	Kec. ABTB	4 item	155,000,000.00	APBD		4 item	156,000,000.00
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Kec. ABTB	6 Item	71,000,000.00	APBD		6 Item	72,000,000.00
	Rehab sedang/berat gedung kantor	terciptanya bangunan kantor yang nyaman	Kec. ABTB	100%	100,000,000.00	APBD		100%	101,000,000.00
		Pembuatan Taman Bunga Pekarangan Kantor Lurah Birugo	Kel. Birugo	100%	50,000,000.00	APBD	Musrenbang	100%	51,000,000.00
		Pembuatan gonjong kantor lurah aur kuning	Kel. Aur Kuning	100%	120,000,000.00	APBD		100%	121,000,000.00
	Pengadaan tanah kantor lurah Pakan Labuah	Jumlah kavling tanah yang diadakan	Kel. pakan labuah	3 kavling tanah	4,533,579,000.00	APBD		3 kavling tanah	4,534,579,000.00
	DED Pembangunan Kantor Lurah	Dokumen	Kec. ABTB	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	101,000,000.00
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Birugo	Jumah Gedung yang dibangun	Kelurahan Birugo	1 gedung	300,000,000.00	APBD	Musrenbang	1 gedung	301,000,000.00
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Presentase Posyandu yang aktif</b> <b>Presentase TP PKK yang aktif</b>			<b>1,395,074,330.00</b>	<b>APBD</b>			<b>1,422,074,330.00</b>
	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tk. Kecamatan	1. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	12 bulan	56,665,000.00	APBD		12 bulan	57,665,000.00
		2. monitoring Posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. Laporan kegiatan pembinaan PKDRT dan Pola Asuh Anak		12 bulan				12 bulan	
		4. Monitoring TPA dan PAUD		12 bulan				12 bulan	
		5. Jumlah peserta pembinaan hatinya PKK		176 peserta				176 peserta	
		6. Laporan kegiatan monitoring Toga dan PHBS		12 bulan				12 bulan	
		7. Jumlah Laporan Monitoring Dana Bergulir		2 laporan				2 laporan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Parit Antang	16 kelompok	113,937,100.00	APBD		16 kelompok	114,937,100.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Bergulir		12 laporan				12 laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Belakang Balok	13 kelompok	97,360,000.00	APBD		13 kelompok	98,360,000.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Bergulir		12 laporan				12 laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Pakan Labuah	29 kelompok	85,280,000.00	APBD		29 kelompok	86,280,000.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Bergulir		12 laporan				12 laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Birugo	56 kelompok	139,449,870.00	APBD		56 kelompok	140,449,870.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Bergulir		12 Laporan				12 Laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Bantuan Dana Operasional Posbindu Cempaka							
		7. Bantuan Baju Seragam Kader Posyandu, Poskeskel, Lansia dan PSM							
	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Kubu Tanjung	16 kelompok	62,254,000.00	APBD		16 kelompok	63,254,000.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Berqulir		12 Laporan				12 Laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Sapiran	32 kelompok	98,908,850.00	APBD		32 kelompok	99,908,850.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Berqulir		12 Laporan				12 Laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Aur Kuning	70 kelompok	137,821,680.00	APBD		70 kelompok	138,821,680.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Berqulir		12 Laporan				12 Laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Ladang Cakiah	22 kelompok	76,901,800.00	APBD		22 kelompok	77,901,800.00
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
		4. Jumlah Laporan Dana Berqulir		12 Laporan				12 Laporan	
		5. Pengadaan Baju Seragam PKK		12 orang				12 orang	
	monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se kecamatan	jumlah profil kecamatan dan kelurahan	Kec. ABTB	9 buku	20,649,900.00	APBD		9 buku	21,649,900.00
	Penunjang operasional KOTAKU	Jumlah laporan kegiatan dan hasil evaluasi	Kec. ABTB	12 bulan	49,055,000.00	APBD		12 bulan	50,055,000.00
	Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat	laporan kegiatan	Kec. ABTB	12 bulan	21,800,000.00	APBD		12 bulan	22,800,000.00
	Koordinasi kecamatan sehat	1. laporan kegiatan forum kecamatan sehat	Kec. ABTB	12 bulan	40,000,000.00	APBD		12 bulan	41,000,000.00
		2. laporan kegiatan uks		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Tk. Kecamatan	1. jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah	Kec. ABTB	80 peserta	35,756,780.00	APBD		80 peserta	36,756,780.00
		2. jumlah peserta pembinaan guru MDA dan didikan subuh		80 peserta				80 peserta	
		3. jumlah peserta pelatihan sholat jenazah		80 peserta				80 peserta	
		4. laporan kegiatan monitoring		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Parit Antang	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Belakang Balok	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Biruqqo	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Biruqqo	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
		Bantuan Dana Operasional BKMT			25,000,000.00	APBD			26,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Sapiran	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Aur Kuning	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00
	Lomba jambore kader PKK Kecamatan	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang/lomba	63,350,000.00	APBD		3 pemenang/lomba	64,350,000.00
	Lomba didikan subuh	tersedianya pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	33,714,350.00	APBD		3 pemenang	34,714,350.00
	Pendataan / updating UMKM	jumlah laporan hasil pendataan	Kec. ABTB	8 laporan	67,170,000.00	APBD		8 laporan	68,170,000.00
	Pengadaan Plang Asmaul Husna	terpasangnya plang Asmaul Husna	Sepanjang Jl.Pof.M.Yamin, S.H., Jl. Adinegoro hingga Jl.Pudin	99 plang	130,000,000.00	APBD		99 plang	131,000,000.00
	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Jumlah swadaya masyarakat</b>			<b>999,143,970.00</b>	<b>APBD</b>			<b>1,029,143,970.00</b>
	Musrenbang Tingkat kecamatan	hasil musrenbang kecamatan	Kec. ABTB	1 laporan	9,957,400.00	APBD		1 laporan	10,957,400.00
	Musrenbang kelurahan parit antang	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Parit Antang	1 laporan	8,093,000.00	APBD		1 laporan	9,093,000.00
	Musrenbang kelurahan belakang balok	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Belakang Balok	1 laporan	7,900,000.00	APBD		1 laporan	8,900,000.00
	Musrenbang kelurahan pakan labuah	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Pakan Labuah	1 laporan	6,895,000.00	APBD		1 laporan	7,895,000.00
	Musrenbang kelurahan birugo	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Birugo	1 laporan	7,900,000.00	APBD		1 laporan	8,900,000.00
	Musrenbang kelurahan kubu tanjunag	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Kubu Taniung	1 laporan	7,915,000.00	APBD		1 laporan	8,915,000.00
	Musrenbang sapiran	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Sapiran	1 laporan	8,778,900.00	APBD		1 laporan	9,778,900.00
	Musrenbang kelurahan ladang cakiah	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	1 laporan	7,197,940.00	APBD		1 laporan	8,197,940.00
	Musrenbang kelurahan aur kuning	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Aur Kuning	1 laporan	7,859,600.00	APBD		1 laporan	8,859,600.00
	koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Tk. Kecamatan	rekap laporan harian manunggal sakato	Kec. ABTB	30 laporan	24,579,820.00	APBD		30 laporan	25,579,820.00
	Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Parit Antang	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Ke. Belakang Balok	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato pakan labuah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Pakan Labuah	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato kelurahan birugo	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Birugo	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manunggal Sakato kubu tanjuang	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Sapiran	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato ladang cakiah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Manunggal Sakato aur kuning	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Aur Kuning	100%	64,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi olah raga masyarakat Tk. Kecamatan	jumlah cabang olah raga	Kec. ABTB	2 cabang	94,359,800.00	APBD		2 cabang	95,359,800.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	jumlah cabang olah raga	Kel. Parit Antang	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	jumlah cabang olah raga	Kel. Belakang Balok	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	jumlah cabang olah raga	Kel. Pakan Labuah	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	jumlah cabang olah raga	Kelurahan Birugo	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjuang	jumlah cabang olah raga	Kel. Kubu Tanjung	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran	jumlah cabang olah raga	Kel. Sapiran	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah cabang olah raga	Kel. Ladang Cakiah	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning	jumlah cabang olah raga	Kel. Aur Kuning	2 cabang	20,000,000.00	APBD		2 cabang	21,000,000.00
	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional	Presentase keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional	Kec. ABTB	90%	31,912,450.00	APBD		90%	32,912,450.00
	MTQ tingkat kecamatan	Jumlah khafilah yang mengikuti MTQ Tingkat Kota	Kec. ABTB	20 cabang	85,000,000.00	APBD		20 cabang	86,000,000.00
	Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	18,795,060.00	APBD		3 pemenang	19,795,060.00
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>60%</b>	<b>134,796,610.00</b>			<b>70%</b>	<b>140,296,610.00</b>
	Penunjang operasional PATEN	Laporan paten	Kec. ABTB	12 bulan	25,000,000.00	APBD		12 bulan	25,500,000.00
	Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah	tersedianya pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	13,089,160.00	APBD		3 pemenang	13,589,160.00
	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	Tersedianya notulen rapat dan laporan rapat	Kec. ABTB	12 bulan	15,000,000.00	APBD		12 bulan	15,500,000.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parit antang	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Parit Antang	12 bulan	9,838,000.00	APBD		12 bulan	10,338,000.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan belakang balok	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Belakang Balok	12 bulan	9,900,000.00	APBD		12 bulan	10,400,000.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pakan labuah	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	9,890,000.00	APBD		12 bulan	10,390,000.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan birugo	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Birugo	12 bulan	11,899,900.00	APBD		12 bulan	12,399,900.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kubu tanjuang	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	9,900,000.00	APBD		12 bulan	10,400,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Sapiran	12 bulan	9,694,700.00	APBD		12 bulan	10,194,700.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ladang cakiah	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	9,914,950.00	APBD		12 bulan	10,414,950.00
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan aur kuning	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Aur Birugo Tigo Baleh	12 bulan	10,669,900.00	APBD		12 bulan	11,169,900.00
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase LPM, RW dan RT yang aktif</b>			<b>1,009,355,265.00</b>			100%	<b>1,037,355,265.00</b>
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Tk. kecamatan	1. jumlah peserta yang dina (peran dan fungsi LPM)	Kec. ABTB	64 peserta	20,000,000.00	APBD		64 peserta	21,000,000.00
2. opsional DPC LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Jambore LPM		1 kali		Musrenbang			1 kali	51,000,000.00	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang	1. Monitoring RT/RW	Kel. Parit Antang	12 bulan	74,675,000.00	APBD		12 bulan	75,675,000.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		12 orang					12 orang	8,500,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Belakang Balok	12 bulan	85,500,000.00	APBD		12 bulan	86,500,000.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		16 orang					16 orang	10,500,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	113,332,000.00	APBD		12 bulan	114,332,000.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		21 orang					21 orang	13,000,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Sapiran	12 bulan	85,237,400.00	APBD		12 bulan	86,237,400.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		15 orang					15 orang	12,680,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
6. Pembasmi rumput liar (mesin pompa dan racun)		4 dan 8							
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Aur Kuning	12 bulan	120,375,000.00	APBD		12 bulan	121,375,000.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		17 orang					17 orang	11,000,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	61,900,000.00	APBD		12 bulan	62,900,000.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		10 orang					10 orang	7,500,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan		12 bulan	122,913,865.00	APBD		12 bulan	123,913,865.00
2. Honor LPM		12 bulan					12 bulan		
3. Honor RT/RW		12 bulan					12 bulan		
4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		24 orang					24 orang	14,500,000.00	
5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	85,242,000.00	APBD		12 bulan	86,242,000.00	
		2. Honor LPM		12 bulan						12 bulan
		3. Honor RT/RW		12 bulan						12 bulan
		4. Pengadaan Baju Seragam RT/RW		12 orang	7,500,000.00				12 orang	8,500,000.00
		5. Pengadaan Baju Seragam LPM		3 orang					3 orang	
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas Tk. kecamatan ABTB	1. jumlah poskamling yang mendapat peralatan dan perlengkapan linmas	Kec. ABTB	8 kelurahan	60,000,000.00	APBD		8 kelurahan	61,000,000.00	
		2. Jumlah peserta Pelatihan Poskamling dan Satlinmas Kelurahan		peserta				peserta		
		3. laporan monitoring kegiatan FKPM		12 bulan				12 bulan		
		4. jumlah peserta yang dibina (narkoba)		peserta				peserta		
		5. laporan monitoring keamanan, ketertiban dan kebersihan		12 bulan				12 bulan		
		6. laporan kegiatan monitoring IMB		12 bulan				12 bulan		
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Parit Antang	jumlah laporan kegiatan	Kel. Parit Antang	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Belakang Balok	jumlah laporan kegiatan	Kel. Belakang Balok	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Pakan Labuah	jumlah laporan kegiatan	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Birugo	jumlah laporan kegiatan	Kel. Birugo	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Aur Kuning	jumlah laporan kegiatan	Kel. Aur Kuning	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah laporan kegiatan	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Sapiran	jumlah laporan kegiatan	Kel. Sapiran	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	
		Bantuan HT Kenwood		6 buah	12,000,000.00			6 buah	13,000,000.00	
	Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah laporan kegiatan	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,000,000.00	

**Tabel 5.28**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>6,276,863,090</b>				<b>8,188,168,500</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>479,424,080</b>				<b>430,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	447 lbr materai, 4 buku cek	2,000,000	APBD		500 Lbr Materai dan 2 Buku Cek	2,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	30,160,000	APBD		36 tagihan	35,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	2 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2	79,484,000	APBD		2 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 6 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	75,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 Ruangan	50,000,000	APBD		3 Ruangan	42,500,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	10,000,000	APBD		9 unit komputer, 6 unit laptop, 11 unit printer	5,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	41 macam	12,809,700	APBD		1 Paket	13,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	7 macam	11,282,000	APBD		7 Macam	12,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	3 macam	2,899,600	APBD		6 Macam komponen	2,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 30 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang makan	17,290,000	APBD		1 ls;1 ls;1 ls	13,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	250,000,000	APBD		12 bulan	225,000,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	5 Dokumen	13,498,780	APBD		2 paket	5,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>40,186,000</b>				<b>15,000,000</b>

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukittinggi	-	-	APBD		-	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kantor	13,236,000	APBD		-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	3 unit komputer all in one, 2 unit printer	26,950,000	APBD		1 komputer All In One, 1 unit printer	15,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>			-				<b>20,000,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Bukittinggi	-	-	APBD		20 stel	10,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Bukittinggi	-	-	APBD		20 stel	10,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD</b>			3,443,500				5,100,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bukittinggi	10 dokumen	978,000	APBD		10 rangkap	1,100,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	2 buku	977,500	APBD		20 rangkap	1,500,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Bukittinggi	18 eksemplar	1,488,000	APBD		20 rangkap	1,750,000
	Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	Bukittinggi	-	-	APBD		10 rangkap	750,000
	<b>Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan</b>			<b>179,147,800</b>				<b>270,000,000</b>
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terselenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	12 laporan	49,226,000	APBD		12 laporan	50,000,000
	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	150 orang	23,172,000	APBD		200 orang	85,000,000
	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terselenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	30 orang	46,749,800	APBD		4 kegiatan	35,000,000
	Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Terselenggaranya Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Bukittinggi	1 kegiatan	60,000,000	APBD		150 orang	100,000,000
	<b>Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada</b>	<b>Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada</b>			<b>625,138,300</b>				<b>1,005,000,000</b>
	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	10 kali sosialisasi, 2 paket iklan layanan masyarakat	272,536,800	APBD		8 Laporan	500,000,000

	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	8 laporan	352,601,500	APBD		12 laporan	505,000,000
	Desk Pemilu / Pilkada	Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	8 laporan	81,100,000	APBD		12 laporan	505,000,000
	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum</b>			<b>2,443,813,250</b>				<b>3,445,568,500</b>
	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	2,228,841,000			24 Laporan	2,750,000,000
	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	10 Parpol	6,528,500	APBD		10 Parpol	20,568,500
	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	12 ormas	75,780,000	APBD		12 ormas	90,000,000
	Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	50 orang	31,831,000	APBD		1 Laporan	35,000,000
	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	-	-	APBD		50 orang	25,000,000
	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	40 eks	33,249,500			40 eksemplar	45,000,000
	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	-	-	APBD		300 orang	130,000,000
	Pembinaan kepada kader Parpol	Terselenggaranya Pembinaan kepada kader Parpol	Bukittinggi	45 orang	67,583,250	APBD		1 Laporan	350,000,000
	<b>Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba</b>	<b>Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi</b>			<b>774,857,125</b>				<b>885,000,000</b>
	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terselenggaranya Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	1000 orang (13 sekolah)	131,517,125	APBD		500 orang	75,000,000
	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Terselenggaranya Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Bukittinggi	1 laporan	250,967,500	APBD		1 laporan	275,000,000
	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	284,485,500			1 Laporan	325,000,000
	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Terselenggaranya Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	750 orang	107,887,000	APBD		750 orang	150,000,000
	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Terselenggaranya Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Bukittinggi	-	-	APBD		1 laporan	60,000,000
	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Penurunan konflik sosial			<b>1,244,846,600</b>				<b>1,417,500,000</b>

		Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Bukittinggi	12 laporan	463,060,600	APBD		12 laporan	490,000,000
		Pengawasan Orang Asing	Terselenggaranya Pengawasan Orang Asing	Bukittinggi	12 kasus	30,851,000	APBD		12 laporan	160,000,000
		Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	12 laporan	593,671,500			12 laporan	220,000,000
		Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	1 berkas	34,300,500	APBD		4 laporan	35,000,000
		Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Terselenggaranya Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	24 laporan	9,941,500	APBD		1 laporan	17,500,000
		Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	Terselenggaranya Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	Bukittinggi	-	-	APBD		-	-
		Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Terselenggaranya Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Bukittinggi	-	-	APBD		-	-
		SATGAS Saber Pungli	Terselenggaranya SATGAS Saber Pungli	Bukittinggi	1 kali sosialisasi/pembinaan dan 1 paket iklan layanan masyarakat	113,021,500	APBD		12 laporan	495,000,000
		<b>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</b>	<b>Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan</b>			<b>36,285,375</b>				<b>45,000,000</b>
		Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Terselenggaranya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	4 kegiatan	36,285,375	APBD		6 kegiatan	45,000,000
		<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama</b>	Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan			<b>449,721,060</b>				<b>650,000,000</b>
		Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	210 orang	200,000,000	APBD		100 orang	350,000,000
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	249,721,060			1 laporan	300,000,000

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2016-2021, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi**

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan pemangku kepentingan/jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD	80	100
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD	1%	2,5%
3	Nilai SAKIP	Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	SAKIP C	SAKIP A
4	Peringkat LPPD	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD RANKING 65	LPPD RANKING 30
5	Indeks RB			B
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	WTP	WTP
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	30	80
8	Persentase RTH Publik	Jumlah RTH publik/jumlah RTH	8%	17%
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	Jumlah Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan/Jumlah fasum	55%	85%
10	Penyediaan air minum layak	Jumlah air minum layak yang tersedia	85	100
11	Kawasan Kumuh		30,60 ha	0
12	Persentase sanitasi layak	Persentase sanitasi layak yang tersedia	85	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	Jumlah pemanfaatan ruang kota yang sesuai peraturan/jumlah pemanfaatan ruang kota	55%	70%
14	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	6,12%	6,50%

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
15	PDRB Perkapita	jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	49,88 Juta	56 Juta
16	Indeks Gini	distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi	0,34	<0,3
17	Jumlah Investasi	Jumlah pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)	25% (80 Perusahaan)	65% 20 Perusahaan)
18	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	4,23	2,84
19	Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara per tahun	460.905 orang	588.245 orang
20	Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	14,7	15
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SD/jumlah SD	72,88%	81,35%
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SMP/jumlah SMP	54,50%	90,90%
23	Angka Harapan Hidup	rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.	72,36	73,14
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah puskesmas yang terakreditasi/jumlah puskesmas	30	100
25	Tingkat Inflasi	kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.	6,50	3,00
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya	1,71	1,38

Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama ini dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021**

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	80	85	90	95	100	100	100
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,5%
3	Nilai SAKIP	SAKIP C	B	BB	BB	A	A	SAKIP A
4	Peringkat LPPD	LPPD RANKING 65	55	40	35	35	30	LPPD RANKING 30
5	Indeks RB		B	B	B	B	B	B
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	30	70	75	75	80	80	80
8	Persentase RTH Publik	8%	10%	14%	17%	17%	17%	17%
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	55%	60%	65%	75%	80%	85%	85%
10	Penyediaan air minum layak	85	85	90	95	95	100	100
11	Kawasan Kumuh	30,60 ha	16ha	6ha	0	0	0	0
12	Persentase sanitasi layak	85	90	95	100	100	100	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	60	65	70	70	70	70%
14	Pertumbuhan ekonomi	6,12%	6,20%	6,30%	6,40%	6,50%	6,50%	6,50%
15	PDRB Perkapita	49,88 Juta	52,50	53,25	54,50	55,75	56	56 Juta

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Indeks Gini	0,34	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
17	Jumlah Investasi	25% (80 Perusahaan)	30%	40%	50%	60%	65%	65% (20 Perusahaan)
18	Tingkat Kemiskinan	4,23	3,75	3,5	3,35	3	2,84	2,84
19	Kunjungan Wisatawan	460.905 orang						588.245 orang
20	Harapan lama sekolah	14,7	14,8	14,9	15	15	15	15
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	75,25%	78,50%	79,50%	80,50%	81,35%	81,35%
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	65,50%	70,75%	80,50%	85,50%	90,90%	90,90%
23	Angka Harapan Hidup	72,36	72,75	72,85	73	73,1	73,14	73,14
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	30	50	70	80	90	100	100
25	Tingkat Inflasi	6,50	6	5	4,5	4	3	3,00
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,6	1,55	1,45	1,4	1,38	1,38

Berdasarkan target kinerja utama untuk tahun 2017, dapat dilihat target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.3**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2017**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	85	100	125
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	%	1,5	1,58%	105
3	Nilai SAKIP	nilai	B	B	100
4	Peringkat LPPD	peringkat	55	33	166
5	Indeks RB	nilai	B	B	100
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP	WTP	100
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	70	80,45	114,92
8	Persentase RTH Publik	%	10	7,2	72
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	%	60	*)	*)
10	Penyediaan air minum layak	%	85	88	103,5
11	Kawasan Kumuh	ha	16	23,4	146
12	Persentase sanitasi layak	%	90	90,05	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	60	62,3	103,8
14	Pertumbuhan ekonomi	%	6,20%	6,04	97
15	PDRB Perkapita	jumlah	52,50	54,12	99
16	Indeks Gini	jumlah	<0,3	0,329	109
17	Jumlah Investasi	%	30	27	90
18	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,75	5,48	68
19	Kunjungan Wisatawan	jumlah	460.905 orang	478.839 orang	103,89
20	Harapan lama sekolah	%	14,8	14,92	100,8
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	75,25	75,44	100,2
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	65,50	72,73	100,8
23	Angka Harapan Hidup	%	72,75	73,36	100,8
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	50	71,43	142,8
25	Tingkat Inflasi	%	6	1,37	437,9
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,6	1,71	106,8

*Keterangan: \*) data tidak tersedia*

## **6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1.	Laju inflasi	2,84	4,00	4,00	4,00
2.	PDRB per kapita (riil)/juta	39.763	47.200	49.296	51.496
3.	Tingkat Kemiskinan	4,58	3,33	3,08	2,84
5.	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	6.1	6,9	7	7
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.04	5,28	5,10	4,93
5.	Harapan Lama Sekolah	14,92	14,85	14,90	15
6.	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	12.330	12.950	13.110	13.271
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,84	73,84	74,84	75,84
	<b>Urusan Pendidikan</b>				
8.	Angka melek huruf	99,94	99,95	99,95	99,95
9.	Angka rata-rata lama sekolah	10,79	11,10	11,15	11,20
10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	136,75	>100%	>100%	>100%
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	140,02	>100%	>100%	>100%
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	165,41	>100%	>100%	>100%
13.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	121,93	>100%	>100%	>100%
14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	110,30	>100%	>100%	>100%
15.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	123,48	>100%	>100%	>100%
	<b>KESEHATAN</b>				
16.	Angka harapan hidup	73,52	74,25	74,52	74,70
17.	Persentase balita gizi buruk	<0.15	.	<0.15	<0.15
	<b>KETENAGAKERJAAN</b>				
18	Rasio penduduk yang bekerja	0,94	0,97	0,98	0,98
	<b>Pemuda dan Olahraga</b>				
19	Jumlah gedung olahraga	6	7	7	7
A	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
I	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
a.	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>				
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85,57%	87,50 %	88%	88,50%
	<b>Pendidikan Dasar</b>				
	Angka partisipasi sekolah	127,3	128	128,5	129
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia	1:243	1:243	1:243	1:243
	Rasio guru/murid	1:28	1:30	1:30	1:30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120,9	128,3	130,8	132,17
	<b>Pendidikan menengah:</b>				
	Angka partisipasi sekolah	144,9	145,1	145,2	145,30

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:273	1:280	1:281	1:282
	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:15	1:15	1:16
	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>				
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	<1%	<1%	<1%
	<b>Angka kelulusan</b>				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	124%	>100		>100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	178%	>100	100%	>100%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92%	95%	100%	100%
b.	<b>URUSAN KESEHATAN</b>				
	Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	0.1	0.1	0.1
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	5.7	5.7	5.7
	Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	1.75	1.75	1.75
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawat &	12.95	12.95	12.95	12.95
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	5.7	5.7	5.7
	Pelayanan Kesehatan Dasar				
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	93	94	95
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96.7	98	99	100
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	89.2	90.6	90.8	91
	- Cakupan pelayanan nifas	83.6	88	90	90
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70.6	78	80	80
	- Cakupan kunjungan bayi	83.8	88	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
	- Cakupan pelayanan anak balita	54.8	88	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	96.97	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat	100	100	100	100
	- Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	53.4	70	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100
	- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	0.0025	<1	<1	<1
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia	57.57	90	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA	80	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar	1	1	1	1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	59.72	80	80	80
	- Peersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100
	<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100
	cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	100	100	100
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	100	100	100
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi	100	100	100	100
	Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	10	10	10
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100	100	100	100
	Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100
c.	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.20%	92%	94%	95%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 m)	167,16	178,1	181,9	183,93
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	53.478 km	69.478 km	74.478 km	79.478 km
	Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar	90 m	50 m	-	-
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	47670.35 m	61971,43m	66738.49 m	71505.53
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik	1 titik	1 titik	4 titik
	Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	8 titik	2 Titilk	0	0
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	11%	13%	14%
d.	<b>URUSAN PERUMAHAN</b>				
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	93%	100%	100%
	Kawasan Kumuh	2	0	0	0
	Luas kawasan permukiman kumuh	30.60 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
e.	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	325.000.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000
	Jumlah uji kir angkutan umum	2700	3100	3200	3300
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2676	3000	3100	3200
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/1 unit	25 menit/1	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit
	Pemasangan Rambu-rambu	489	10	0	0
f.	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
	Prosentase Penanganan sampah	90%	100%	100%	100%
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar)	20%	60%	70%	80%
g.	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN &amp; CATATAN SIPIL</b>				
	Kepemilikan KTP	52.135	71.923	77,9	84.476
	Kepemilikan akta kelah	61.349	67.378	68,9	62.803
h.	<b>URUSAN SOSIAL</b>				
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	84%	86%	88%
i.	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,59	73,45	76,33	77
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	64	94	94	94
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besar-an Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjia Bersama (PB)	24	34	36	38
		18	18	18	18
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besar-an pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7536	8200	8500	8500
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan				
	- Besar-an Pemeriksaan perusahaan	180	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi
	- Besar-an Pengujian peralatan di perusahaan	360	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi
j.	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN</b>				
	Persentase Koperasi aktif	82	85	87	88
	Usaha Mikro dan Kecil	9.527	9.914	10.013	10.113
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9.478	9.865	9.964	10.064
	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49
k.	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>				
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	61	63	65
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	20%	25%	30%
l.	<b>URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
	Gelanggang/balai remaja/lapangan olahraga	6	7	7	7
m.	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM &amp; PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27	27
	Jumlah organisasi olahraga	33	33	33	33
	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10
	Jumlah kegiatan olahraga	10	10	10	10
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3
	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas & OKP	3	3	3	3
	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang	722	450	250	250
	PKK aktif	28	28	28	28

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%
n.	<b>URUSAN KETAHANAN PANGAN</b>				
	Score Pola Pangan Harapan	90	92	92	93
	Regulasi ketahanan pangan				
o.	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	15 SKPD	18 SKPD	24 SKPD
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
p.	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	Web site milik pemerintah daerah	12 bh	21 buah	23 Buah	27 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.365
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk	27	31	31	31
q.	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	9.536	17.536	19.536	21.536
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	3.800	3.850	3.850
	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1
II.	<b>URUSAN PILIHAN</b>				
a.	<b>URUSAN PERTANIAN</b>				
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	66,7	65,3	65,4	65,5
	Produksi perikanan	355 ton	353,68 ton	354,68 ton	355 ton
b.	<b>URUSAN INDUSTRI</b>				
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.9	7.3	7.4	7.5
	Pertumbuhan Industri		5%	5%	5%
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	25 KUB	30 KUB	30 KUB
III.	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>				
a.	<b>PERENCANAAN</b>				
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Ada	Ada	Ada	Ada
b.	<b>KEUANGAN</b>				
	Peningkatan PAD (%)	66.027.359.716	105.087.802.43	118.034.619.698	1.077.173.651.98

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan hal di atas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2019. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini dapat diimplementasikan secara konsisten

dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”*

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
H.M./RAMLAN NURMATIAS